LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI KEBUMEN

2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

LKPJ Bupati Kebumen Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyampaian LKPJ atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dimana proses mekanisme penyampaian dan tata caranya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas berdasarkan tata cara dan mekanisme yang berlaku, bersama ini dengan hormat saya sampaikan LKPJ Bupati Kebumen Tahun 2024 kepada DPRD Kabupaten Kebumen untuk dilakukan pembahasan guna memperoleh rekomendasi demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

Ucapan rasa syukur atas nikmat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2024 ini.

Selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, yang terus mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu tugas-tugas saya selaku Kepala Daerah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan meridhoi atas upaya dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dalam memajukan Kabupaten Kebumen yang kita cintai ini.

Terima kasih

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kebumen, 27 Maret 2025

BUPATI KEBUMEN

LILIS NURYANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Dasar Hukum 1

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah 2

1.2.1 Visi dan Misi 2

1.2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 4

1.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Daerah Tahun 2024 8

1.3 Data Umum Daerah 11

1.3.1 Data Geografis Wilayah 11

1.3.2 Jumlah Penduduk 14

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk 15

1.3.4 Jumlah PNS 17

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 19

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 21

1.3.7 Realisasi Pembiayaan menurut jenis Pembiayaan 22

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **24**

2.1 Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah 25

2.2 Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah 27

2.3 Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah 30

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH **32**

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 32

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 32

1. Urusan Pendidikan 32

2. Urusan Kesehatan 57

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 79
4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 101
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 111
6. Urusan Sosial 127
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 139
1. Urusan Tenaga Kerja 139
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 147
3. Urusan Pangan 157
4. Urusan Pertanahan 165
5. Urusan Lingkungan Hidup 167
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 183
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 193
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 206
9. Urusan Perhubungan 215
10. Urusan Komunikasi dan Informatika 224
11. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 232
12. Urusan Penanaman Modal 245
13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 256
14. Urusan Statistik 262
15. Urusan Persandian 265
16. Urusan Kebudayaan 269
17. Urusan Perpustakaan 278
18. Urusan Kearsipan 284
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan 288
1. Urusan Kelautan dan Perikanan 288
2. Urusan Pariwisata 302
3. Urusan Pertanian 309
4. Urusan Energi Sumber Daya Mineral 328
5. Urusan Perdagangan 330
6. Urusan Perindustrian 341

7. Urusan Transmigrasi 347
3.1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 350
1. Fungsi Perencanaan 350
2. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 358
3. Fungsi Keuangan 367
4. Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik 378
5. Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan 381
3.1.5 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 390
1. Sekretariat DPRD 390
2. Sekretariat Daerah 402
3.1.6 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum 415
1. Kesatuan Bangsa dan Politik 415
3.1.7 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan 425
1. Kecamatan Adimulyo 427
2. Kecamatan Alian 436
3. Kecamatan Ambal 445
4. Kecamatan Ayah 453
5. Kecamatan Bonorowo 461
6. Kecamatan Buayan 470
7. Kecamatan Buluspesantren 477
8. Kecamatan Gombong 485
9. Kecamatan Karanganyar 494
10. Kecamatan Karanggayam 503
11. Kecamatan Karangsambung 511
12. Kecamatan Kebumen 520
13. Kecamatan Klirong 529
14. Kecamatan Kutowinangun 538
15. Kecamatan Kuwarasan 546
16. Kecamatan Mirit 553
17. Kecamatan Padureso 561
18. Kecamatan Pejagoan 568

19. Kecamatan Petanahan 576
20. Kecamatan Poncowarno 584
21. Kecamatan Prembun 592
22. Kecamatan Puring 600
23. Kecamatan Rowokele 608
24. Kecamatan Sadang 614
25. Kecamatan Sempor 621
26. Kecamatan Sruweng 629
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan 637
3.2.1 Arah Kebijakan Kabupaten Kebumen 756
1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 756
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024 757
3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah 758
3.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen 758
3.2.4 Inovasi Daerah 759
3.3 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2023 769
1. Bappeda 769
2. BPKPD 769
3. BKPSDM 769
4. Inspektorat 769
5. Disdikpora 769
6. Dinkes PPKB 769
7. Disperindagkop UMKM 769
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 792
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan 792
4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah tingkat atasnya 792
4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya 793
4.2 Hambatan Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian 794

BAB V PENUTUP 795

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 5
Tabel I.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 7
Tabel I.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2024 9
Tabel I.4 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen Tahun 2024 12
Tabel I.5 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 13
Tabel I.6 Persebaran Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen 14
Tabel I.7 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024 14
Tabel I.8 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024 15
Tabel I.9 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2024 17
Tabel I.10 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024* (*unaudited*) 21
Tabel I.11 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2024 (*unaudited*) 22
Tabel I.12 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 (*unaudited*) 22
Tabel II.1 Perubahan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 (*unaudited*) 27
Tabel II.2 Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2024 (*unaudited*) 29
Tabel II.3 Perubahan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 (*unaudited*) 30
Tabel III.1 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 33
Tabel III.2 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 55
Tabel III.3 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 58
Tabel III.4 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024 75
Tabel III.5 Target Dan Capaian Dari Indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 76
Tabel III.6 Kinerja BLUD Kebumen Tahun 2024 78
Tabel III.7 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 80
Tabel III.8 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023-2024 97
Tabel III.9 Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024 98
Tabel III.10 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen 99
Tabel III.11 Capaian Pelayanan Air Bersih Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 100
Tabel III.12 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2024 102
Tabel III.13 Indikator Kinerja Urusan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024 108

Tabel III.14 Data Lokasi Kawasan Kumuh dan Penanganan s/d tahun 2024 109
Tabel III.15 Capaian Penanganan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 110
Tabel III.16 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 112
Tabel III.17 Indikator Kinerja Urusan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024 122
Tabel III.18 Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban 122
Tabel III.19 Data Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 123
Tabel III.20 Indikator Kinerja Urusan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024 126
Tabel III.21 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024 128
Tabel III.22 Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen 137
Tabel III.23 Persentase capaian SPM Sosial tahun 2024 138
Tabel III.24 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2024 140
Tabel III.25 Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024 147
Tabel III.26 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024 149
Tabel III.27 Rekapitulasi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Tahun 2024 156
Tabel III.28 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 158
Tabel III.29 Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kebumen 164
Tabel III.30 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 166
Tabel III.31 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2024 169
Tabel III.32 Tujuan dan Sasaran Urusan Lingkungan Hidup 181
Tabel III.33 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 181
Tabel III.34 Realisasi IKA, IKU dan IKTL Kabupaten Kebumen 183
Tabel III.35 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2024 184
Tabel III.36 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2024 190
Tabel III.37 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2024 194
Tabel III.38 Indikator Kinerja Urusan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024 205
Tabel III.39 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024 207
Tabel III.40 Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024 215
Tabel III.41 Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif tahun 2023-2024 215
Tabel III.42 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 216
Tabel III.43 Indikator Kinerja Urusan 223

Tabel III.44 Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Kebumen 224
Tabel III.45 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024 225
Tabel III.46 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2024..... 232
Tabel III.47 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 233
Tabel III.48 Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024..... 240
Tabel III.49 Data Jumlah Koperasi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 242
Tabel III.50 Jumlah UMKM Kabupaten Kebumen Tahun 2024 244
Tabel III.51 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2024..... 246
Tabel III.52 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024..... 255
Tabel III.53 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Tahun 2024..... 257
Tabel III.54 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan 261
Tabel III.55 Jumlah Perhitungan Capaian Realisasi 262
Tabel III.56 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2024..... 263
Tabel III.57 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2023-2024 265
Tabel III.58 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Kabupaten Kebumen Tahun 2024..... 266
Tabel III.59 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2023-2024..... 269
Tabel III.60 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024..... 270
Tabel III.61 Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2024..... 276
Tabel III.62 Capaian Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2020-2024 276
Tabel III.63 Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan..... 277
Tabel III.64 Indikator Persentase Kesenian yang Dikembangkan..... 277
Tabel III.65 Capaian Program.Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024..... 279
Tabel III.66 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024..... 283
Tabel III.67 Indikator Kinerja Urusan Pembangunan Daerah..... 283
Tabel III.68 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2024..... 285
Tabel III.69 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen 287
Tabel III.70 Perkembangan Penerapan Arsip Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024..... 288
Tabel III.71 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2024..... 289
Tabel III.72 Capaian Kinerja Urusan Perikanan Dan Kelautan 300
Tabel III.73 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Perikanan dan Kelautan 300

Tabel III.74 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2024 303
Tabel III.75 Persentase Indikator Kinerja Urusan Pariwisata 308
Tabel III.76 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2024 310
Tabel III.77 Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen 326
Tabel III.78 Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – Tahun 2024 327
Tabel III.79 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan ESDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024 329
Tabel III.80 Target dan Realisasi Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 330
Tabel III.81 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 331
Tabel III.82 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024 336
Tabel III.83 Data Pasar Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024 337
Tabel III.84 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2024 342
Tabel III.85 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024 346
Tabel III.86 Capaian Program. Kegiatan sub Kegiatan Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2024 348
Tabel III.87 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen 349
Tabel III.88 Targetkan Transmigran Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 350
Tabel III.89 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Keg Fungsi Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 352
Tabel III.90 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2022-2024 358
Tabel III.91 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2024 358
Tabel III.92 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepegawaian Kabupaten Kebumen Tahun 2024 359
Tabel III.93 Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian 365
Tabel III.94 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Urusan Manajemen Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 369
Tabel III.95 Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD 378
Tabel III.96 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 379
Tabel III.97 Tabel Nilai dan Status Keterbukaan Informasi Publik Pemkab Kebumen 381
Tabel III.98 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 383
Tabel III.99 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Kebumen 2024 388
Tabel III.100 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 391
Tabel III.101 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen 402

Tabel III.102 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 403
Tabel III.103 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen 415
Tabel III.104 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024 416
Tabel III.105 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum 424
Tabel III.106 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 427
Tabel III.107 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2024 436
Tabel III.108 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2024 445
Tabel III.109 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 453
Tabel III.110 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 461
Tabel III.111 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 470
Tabel III.112 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2024 477
Tabel III.113 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2024 485
Tabel III.114 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 494
Tabel III.115 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2024 503
Tabel III.116 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2024 511
Tabel III.117 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024 520
Tabel III.118 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2024 529
Tabel III.119 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 538
Tabel III.120 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 546
Tabel III.121 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2024 553
Tabel III.122 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024 561
Tabel III.123 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 568
Tabel III.124 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 576
Tabel III.125 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024 584

Tabel III.126 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 592
Tabel III.127 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2024 600
Tabel III.128 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2024 608
Tabel III.129 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 614
Tabel III.130 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2024 621
Tabel III.131 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 629
Tabel III.132 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan 637
Tabel III.133 Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023 dan Target Tahun 2024 757
Tabel III.134 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2023 dan Rencana tindak lanjut 769
Tabel IV.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya 793
Tabel IV.2 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2024 794

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen 11
Gambar III.1 Ketersediaan Energi dan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 165
Gambar III.2 Kontribusi Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 326

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah setiap tahun melaksanakan berbagai kebijakan strategis pembangunan daerah yang dirumuskan sedemikian hingga mampu memberikan arah dan strategi yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan utama pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik. Rumusan berbagai kebijakan pembangunan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang merepresentasikan kinerja Pemerintah Daerah. Evaluasi atas kinerja pembangunan tersebut tentunya perlu dilaporkan secara akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik kepada stakeholder terkait.

Transparansi perencanaan, penganggaran dan pencapaian kinerja Kepala Daerah pada kurun waktu tertentu merupakan wujud akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* dan clean *government*. Hal ini sekaligus sebagai indikator untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran disandingkan dengan ketercapaian beberapa indikator kinerja.

Refleksi satu tahun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Daerah melalui perangkat daerah yang dipimpinnya dideskripsikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2024 Kabupaten Kebumen. LKPJ Kabupaten Kebumen juga berfungsi sebagai bahan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen kepada Kepala Daerah.

LKPJ Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1 Dasar Hukum

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024; dan
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah **"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat".**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera : Suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Indikator untuk mengukur

pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi;

Mandiri : Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, sehingga mandiri diterjemahkan sebagai perekonomian yang berpihak pada masyarakat, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi;

Berakhlak : Pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius, tanpa kehilangan kepribadian budaya, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman, dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter;

Bersama Rakyat : Masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Kabupaten Kebumen terbagi dalam 5 (lima) sasaran yaitu:

a) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi;
b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
c) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agro bisnis dan ekonomi kerakyatan;
d) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
e) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

1.2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Selanjutnya Rumusan strategi disusun menjadi langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi					
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik
		1.2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	2	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik
		1.3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	3	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah dan penertiban administrasi aset daerah
Misi 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya					
1.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	1	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan kesehatan
		1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	2	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan pendidikan
		1.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	3	Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak
Misi 3: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan					

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	1.1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	1	Peningkatan nilai tambah dan kualitas sarana-prasarana pertanian
		1.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	2	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya
		1.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	3	Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata
		1.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah		
2.	Meningkatkan pemerataan pembangunan	2.1	Berkurangnya penduduk miskin	1	Penurunan kemiskinan
		2.2	Berkurangnya pengangguran	2	Penurunan pengangguran
Misi 4: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					
1.	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi
		1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	2	Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat					
1.		1.1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	1	Penjagaan kesatuan bangsa

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	2	Pelestarian cagar budaya
2.	Mewujudkan kondusitivas wilayah	2.1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	1	Penurunan tindakan kriminal masyarakat
		2.2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	2	Peningkatan desa tangguh bencana

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

Tabel I.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan *opengov* dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana	Pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas sumber daya manusia	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia	Pemantapan sektor pertanian, industri dan jasa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta didukung sumber daya manusia yang berdaya saing

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

1.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Daerah Tahun 2024

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu **"Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan Sektor Pertanian. Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"** yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan;
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim; dan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana.

Penjabaran lebih lanjut dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 akan dicapai melalui fokus pada upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
   b. peningkatan pengelolaan data pembangunan;
   c. peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
   d. peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan;
   b. peningkatan upaya pencegahan *stunting*;
   c. peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan
   d. peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan. dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan nilai tambah sektor pertanian. perikanan dan kelautan;
   b. peningkatan skala ekonomi koperasi. industri/usaha mikro. kecil dan menengah;
   c. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
   d. peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi. pasokan dan ketersediaan barang;
   e. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
   f. penguatan ketahanan pangan; dan

g. peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim. dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung ekonomi;
   b. peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
   c. peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
   d. peningkatan kelayakan hunian;
   e. pengembangan sistem transportasi publik; dan
   f. peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana. dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan kewaspadaan dini;
   b. fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024;
   c. peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
   d. pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 juga telah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional Tahun 2024. Secara lengkap keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen. Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel I.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Prioritas 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik	**Prioritas 4** Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	**Prioritas 7** Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Prioritas 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	**Prioritas 2** Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	**Prioritas 3** Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
Prioritas 3 Peningkat stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan	**Prioritas 1** Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih	**Prioritas 1** Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
penanggulangan kemiskinan	optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	
Prioritas 4 Pemantapan dan pengembangan Infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim	**Prioritas 1** Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas **Prioritas 3** Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	**Prioritas 2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan **Prioritas 5** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar **Prioritas 6** Membangun lingkungan hidup. Meningkatkan ketahanan bencana. dan perubahan iklim
Prioritas 5 Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	**Prioritas 3** Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	**Prioritas 4** Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan **Prioritas 6** Membangun lingkungan hidup. Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim **Prioritas 7** Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen. Bappeda Prov. Jateng dan Bappenas. 2024

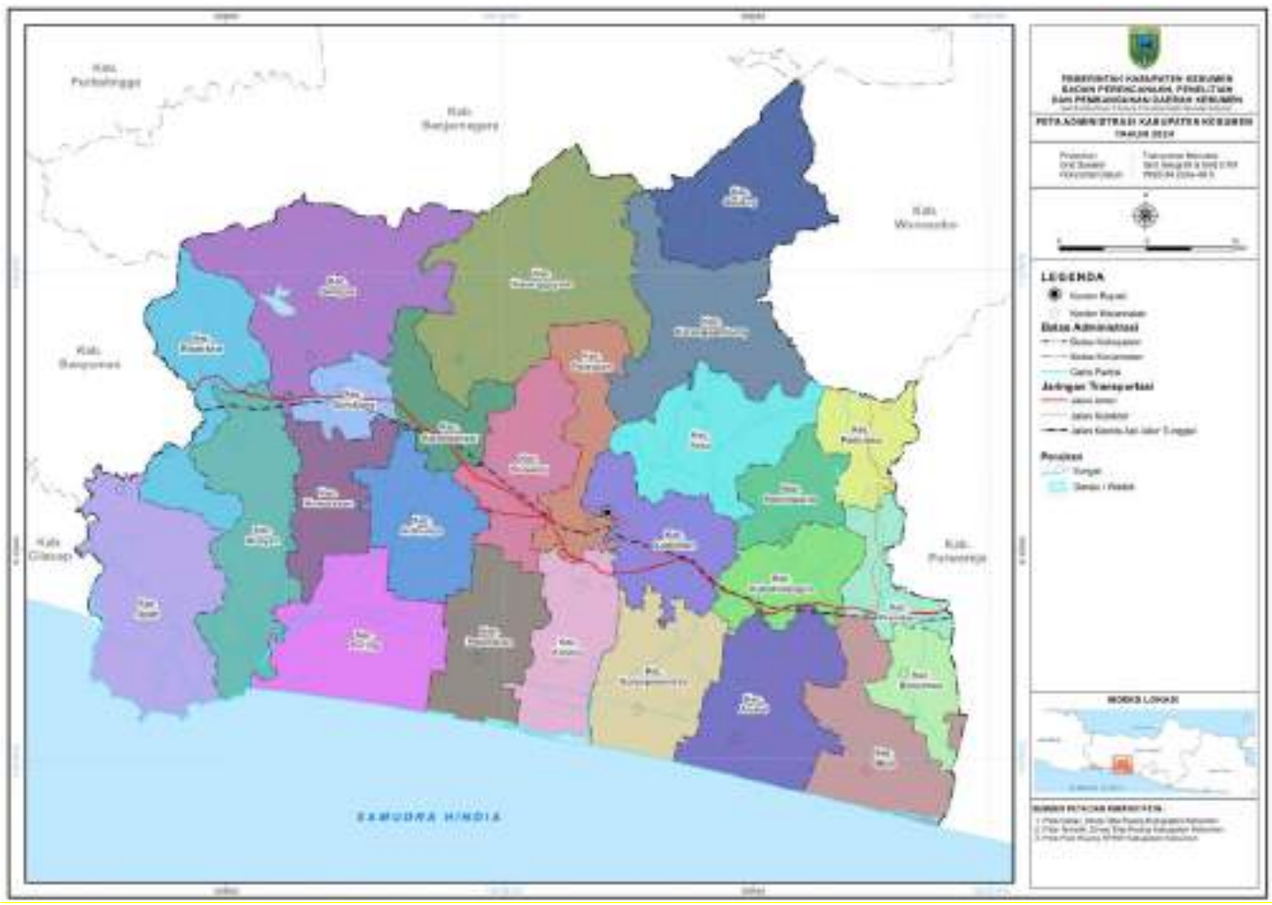
Pelaksanaan dari Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Kebumen.

1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di antara 7º27'-7º50' Lintang Selatan dan 109º22'-109º50' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan (Gambar 1.1):

- Sebelah timur Kabupaten Purworejo
- Sebelah selatan Samudra Hindia
- Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta
- Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.



Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Sumber: Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, 2024

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi. Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan

terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km2 atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km2 atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km2.

Tabel I.4 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
1	Ayah	18	0	81	396
2	Buayan	20	0	90	341
3	Puring	23	0	98	318
4	Petanahan	21	0	81	258
5	Klirong	24	0	107	318
6	Buluspesantren	21	0	82	386
7	Ambal	32	0	113	313
8	Mirit	22	0	70	265
9	Bonorowo	11	0	42	139
10	Prembun	13	0	40	130
11	Padureso	9	0	23	86
12	Kutowinangun	19	0	80	241
13	Alian	16	0	73	254
14	Poncowarno	11	0	34	100
15	Kebumen	24	5	138	554
16	Pejagoan	13	0	64	257
17	Sruweng	21	0	97	332
18	Adimulyo	23	0	81	227
19	Kuwarasan	22	0	86	247
20	Rowokele	11	0	61	332
21	Sempor	16	0	74	368
22	Gombong	12	2	81	288
23	Karanganyar	7	4	61	242
24	Karanggayam	19	0	76	390
25	Sadang	7	0	35	131
26	Karangsambung	14	0	62	252
	Total	**449**	**11**	**1.930**	**7.127**

Dilihat dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran rendah dan kawasan perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0 s.d.

997,5 meter. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 6 tingkatan, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel I.5 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-7 meter	26.378,15	20,59
2	7-18 meter	22.163,28	17,30
3	18-25 meter	15.360,36	11,69
4	25-100 meter	23.316,29	18,20
5	100-500 meter	40.111,17	31,31
6	500-997,5 meter	781,71	0,61

Sumber: Kebumen dalam Angka, Tahun 2017

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;
2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.

Secara hidrogeologis, sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Potensi air tanah di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar 5,7 juta m^2/tahun. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Salah satu jenis air tanah dalam adalah Cekungan Air Tanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi cekungan air tanah Banyumudal, cekungan air tanah Kebumen Purworejo dan cekungan air tanah Kroya.

Tabel I.6 Persebaran Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen

No	Cekungan Air Tanah	Lokasi
1	Cekungan Air Tanah Banyumundal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombong. Buayan. Karanganyar. Kuwarasan. Puring. Adimulyo. Sruweng. Petanahan. Klirong. Alian. Kebumen. Buluspesantren. Kutowinangun. Ambal. Mirit. Prembun. Bonorowo. Poncowarno dan Padureso.
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

Sumber: Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen. 2024

1.3.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.446.833 jiwa, tumbuh sebesar 0,89% dari tahun 2023. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 734.040 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 712.793 jiwa. Adapun secara terperinci jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis kelamin tahun 2024 sebagaimana data berikut ini:

Tabel I.7 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Kecamatan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Total	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	33.05.01	AYAH	34.796	50,70%	33.831	49,27%	68,627	4,74%
2	33.05.02	BUAYAN	35.835	51,06%	34.349	49,30%	70,184	4,85%
3	33.05.03	PURING	34.298	50,70%	33.348	48,94%	67,646	4,68%
4	33.05.04	PETANAHAN	32.436	50,58%	31.697	49,30%	64,133	4,43%
5	33.05.05	KLIRONG	34.396	50,70%	33.441	49,42%	67,837	4,69%
6	33.05.06	BULUSPESANTREN	31.849	50,94%	30.674	49,30%	62,523	4,32%
7	33.05.07	AMBAL	34.068	50,92%	32.842	49,06%	66,910	4,62%
8	33.05.08	MIRIT	28.943	50,79%	28.038	49,08%	56,981	3,94%
9	33.05.09	PREMBUN	15.298	50,28%	15.129	49,21%	30,427	2,10%
10	33.05.10	KUTOWINANGUN	25.687	50,74%	24.942	49,72%	50,629	3,50%
11	33.05.11	ALIAN	36.491	50,94%	35.142	49,26%	71,633	4,95%
12	33.05.12	KEBUMEN	69.456	50,59%	67.836	49,06%	137,292	9,49%
13	33.05.13	PEJAGOAN	29.567	50,87%	28.554	49,41%	58,121	4,02%
14	33.05.14	SRUWENG	32.787	50,48%	32.166	49,13%	64,953	4,49%

No	Kecamatan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Total	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
15	33.05.15	ADIMULYO	19.660	49,97%	19.682	49,52%	39,342	2,72%
16	33.05.16	KUWARASAN	27.350	50,98%	26.301	50,03%	53,651	3,71%
17	33.05.17	ROWOKELE	27.451	50,60%	26.798	49,02%	54,249	3,75%
18	33.05.18	SEMPOR	37.397	50,81%	36.198	49,40%	73,595	5,09%
19	33.05.19	GOMBONG	25.377	49,89%	25.492	49,19%	50,869	3,52%
20	33.05.20	KARANGANYAR	19.537	50,50%	19.153	50,11%	38,690	2,67%
21	33.05.21	KARANGGAYAM	32.331	51,16%	30.859	49,50%	63,190	4,37%
22	33.05.22	SADANG	12.446	51,43%	11.753	48,84%	24,199	1,67%
23	33.05.23	BONOROWO	11.662	50,95%	11.225	48,57%	22,887	1,58%
24	33.05.24	PADURESO	8.909	50,64%	8.683	49,05%	17,592	1,22%
25	33.05.25	PONCOWARNO	10.104	50,90%	9.746	49,36%	19,850	1,37%
26	33.05.26	KARANGSAMBUNG	25.909	50,98%	24.914	49,10%	50,823	3,51%
Jumlah			**734.040**	**50,73%**	**712.793**	**49.27%**	**1.446.833**	**100%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2024

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Kecamatan Kebumen merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk yang terbesar dengan jumlah 137.292 jiwa atau 9,49% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Kebumen, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil adalah Kecamatan Padureso dengan jumlah penduduk sebanyak 17.592 jiwa atau 1,22% dari jumlah penduduk Kabupaten Kebumen,

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Angka Pertambahan Penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya, Secara rinci data pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.8 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah		Pertumbuhan Penduduk
		2023	2024	
1	Ayah	68.007	68.627	0,91%
2	Buayan	69.528	70.184	0,94%
3	Puring	66.857	67.646	1,18%
4	Petanahan	63.433	64.133	1,10%
5	Klirong	67.129	67.837	1,05%
6	Buluspesantren	61.890	62.523	1,02%

No	Kecamatan	Jumlah		Pertumbuhan Penduduk
		2023	2024	
7	Ambal	66.327	66.910	0,88%
8	Mirit	56.283	56.981	1,24%
9	Prembun	30.160	30.427	0,89%
10	Kutowinangun	50.189	50.629	0,88%
11	Alian	70.726	71.633	1,28%
12	Kebumen	136.446	137.292	0,62%
13	Pejagoan	57.627	58.121	0,86%
14	Sruweng	64.246	64.953	1,10%
15	Adimulyo	39.053	39.342	0,74%
16	Kuwarasan	53.252	53.651	0,75%
17	Rowokele	53.832	54.249	0,77%
18	Sempor	72.871	73.595	0,99%
19	Gombong	50.707	50.869	0,32%
20	Karanganyar	38.560	38.690	0,34%
21	Karanggayam	62.700	63.190	0,78%
22	Sadang	24.068	24.199	0,54%
23	Bonorowo	22.691	22.887	0,86%
24	Padureso	17.457	17.592	0,77%
25	Poncowarno	19.624	19.850	1,15%
26	Karangsambung	50.360	50.823	0,92%
Jumlah		**1.434.023**	**1.446.833**	**0,89%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. 2024

Tabel 1.8 menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah sebesar 0,89%. Data ini merupakan data hasil pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Dengan angka pertumbuhan tersebut di atas perlu diperhatikan adanya kemungkinan terjadinya masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya.

1.3.4 Jumlah PNS

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 16 (enam belas) Dinas, 3 (tiga) Badan, dan 26 Kecamatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada perangkat daerah tersebut sampai dengan tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel I.9 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Rincian ASN			TOTAL
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	12	21	40
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	6	10	23
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	3	8	18
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	21	3	47	71
5.	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7	10	12	29
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6	8	5	19
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	12	13	32
8.	Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	37	1574	303	1914
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	7	9	22
10.	Dinas Lingkungan Hidup. Kelautan dan Perikanan	12	16	78	106
11.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7	6	33	46
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	10	147	176

NO	Perangkat Daerah	Rincian ASN			TOTAL
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	13	9	28
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	8	6	16
15.	Dinas Pendidikan. Kepemudaan dan Olahraga	14	4756	2916	7686
16.	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	14	9	62	85
17.	Dinas Pertanian dan Pangan	8	81	89	178
18.	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Perhubungan	10	6	24	40
19.	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	8	10	25
20.	Dinas Tenaga Kerja	7	24	7	38
21.	Inspektorat Daerah	9	34	11	54
22.	Kecamatan Adimulyo	7	2	8	17
23.	Kecamatan Alian	7	2	7	16
24.	Kecamatan Ambal	6	2	7	15
25.	Kecamatan Ayah	8	2	9	19
26.	Kecamatan Bonorowo	7	1	8	16
27.	Kecamatan Buayan	7	2	9	18
28.	Kecamatan Buluspesantren	6	2	6	14
29.	Kecamatan Gombong	15	2	11	28
30.	Kecamatan Karanganyar	24	2	12	38
31.	Kecamatan Karanggayam	8	2	6	16
32.	Kecamatan Karangsambung	8	1	11	20

NO	Perangkat Daerah	Rincian ASN			TOTAL
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
33.	Kecamatan Kebumen	31	1	16	48
34.	Kecamatan Klirong	7	2	5	14
35.	Kecamatan Kutowinangun	7	1	8	16
36.	Kecamatan Kuwarasan	8	2	6	16
37.	Kecamatan Mirit	6	2	7	15
38.	Kecamatan Padureso	7	2	6	15
39.	Kecamatan Pejagoan	5	2	7	14
40.	Kecamatan Petanahan	6	2	9	17
41.	Kecamatan Poncowarno	8	2	5	15
42.	Kecamatan Prembun	6	2	8	16
43.	Kecamatan Puring	8	2	7	17
44.	Kecamatan Rowokele	8	2	7	17
45.	Kecamatan Sadang	7	2	8	17
46.	Kecamatan Sempor	7	2	8	17
47.	Kecamatan Sruweng	6	2	9	17
48.	Satuan Polisi Pamong Praja	12	13	17	42
49.	Sekretariat Daerah	20	43	73	136
50.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8	3	14	25
51.	JUMLAH	490	6.712	4.135	11.337

Data BKPSDM Kabupaten Kebumen tahun 2024

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Perkembangan realisasi pendapatan dapat dilihat melalui perbandingan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2023 (audited) dengan 2024 (unaudited) tumbuh sebesar 7,93%, dimana di tahun 2023 (audited) realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.901.021.509.721,00 dan di tahun 2024 (unaudited) realisasi pendapatan sebesar

Rp. 3.131.071.255.386,00, sedangkan capaian realisasi tahun 2024 terhadap target di tahun 2024 mencapai 102,23%, hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp.3.062.696.919.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.131.071.255.386,00.

Kondisi tersebut ditopang oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 477.994.183.101,00 atau tercapai 102,31% dari target sebesar Rp. 467.192.970.000.00. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp.2.634.514.063.285.00 dari anggaran sebesar Rp. 2.595.403.949.000,00 atau 101,51% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari target Rp100.000.000,00 tercapai Rp.18.563.009.000,00 atau 18.563,01%.

Untuk rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2024 (unaudited) dan realisasi tahun 2023 (audited) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.10 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024* (*unaudited*)

NO	URAIAN	TAHUN 2024*			TAHUN 2023 (Audited)
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp.)
	PENDAPATAN	**3.062.696.919.000**	**3.131.071.255.386**	**102,23**	**2.901.021.509.721**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
	Pajak Daerah	142.880.000.000	139.439.551.572	97,59	137.222.705.502
	Retribusi Daerah	34.328.188.000.	33.227.714.159	96,79	28.881.046.419
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.751.620.000	21.856.399.056	100,48	19.123.340.688
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	268.233.162.000	283.470.518.314	105,68	278.423.869.096
	JUMLAH (I)	**467.192.970.000**	**477.994.183.101**	**102,31**	**463.650.961.705**
2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.327.121.395.000	2.366.169.012.472	101,68	2.250.967.223.263
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	268.282.554.000	268.345.050.813	100,02	184.883.215.191
	JUMLAH (II)	**2.595.403.949.000**	**2.634.514.063.285**	**101,51**	**2.435.850.438.454**
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
	Pendapatan Hibah	100.000.000	18.563.009.000	18.563,01	1.520.109.562
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
	JUMLAH (III)	**100.000.000**	**18.563.009.000**	**18.563,01**	**1.520.109.562**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2024

Dari tabel diatas untuk jenis Pendapatan Asli Daerah yang tidak memenuhi target yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian apabila ditinjau dari sumber daya pendapatan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih merupakan faktor yang dominan dalam APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp 2.634.514.063.285.00 atau 84,14% dari seluruh realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 3.131.071.255.386.00.

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Secara umum belanja daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2024 dimana terjadi perubahan, baik berupa pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos anggaran. Secara umum realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen mencapai 96,22%. dari pagu anggaran sebesar Rp.3.237.537.144.000,00 mampu terealisasi sebesar Rp. 3.115.014.330.258,00.

Berikut ini Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2024:

Tabel I.11 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2024 (*unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	**BELANJA OPERASI**	**2.240.808.596.285**	**2.134.525.599.246**	**95,26**
1	Belanja Pegawai	1.253.846.431.851	1.187.615.334.962	94,72
2	Belanja Barang dan Jasa	827.393.106.434	790.209.428.632	95,51
3	Belanja Subsidi	1.450.000.000	1.447.997.750	99,86
4	Belanja Hibah	147.997.946.000	145.372.917.402	98,23
5	Belanja Bantuan Sosial	10.121.112.000	9.879.920.500	97,62
II	**BELANJA MODAL**	**288.393.970.715**	**278.316.622.550**	**96,51**
1	Belanja Modal Tanah	5.633.135.000	5.547.762.848	98,48
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.419.785.636	117.600.488.966.00	97,66
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.747.023.424	40.226.975.917	96,36
4	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	105.852.413.000	102.857.035.252	97,17
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.701.613.655	12.044.972.327	81,93
III	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000**	**323.000.000**	**16,15**
1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	323.000.000	16,15
IV	**BELANJA TRANSFER**	**706.334.577.000**	**701.849.108.462**	**99,36**
1	Belanja Bagi Hasil	16.002.191.000	15.934.319.925	99,58
2	Belanja Bantuan Keuangan	690.332.386.000	685.914.788.537	99,36
BELANJA DAERAH		**3.237.537.144.000**	**3.115.014.330.258**	**96,22**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2024

1.3.7 Realisasi Pembiayaan menurut jenis Pembiayaan

Demikian juga terhadap realisasi pembiayaan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2024 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos anggaran. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan sebagaimana data berikut ini:

Tabel I.12 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 (*unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**179.440.225.000**	**179.270.945.877,98**	**99,91**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	164.691.485.000	164.691.485.877,98	100
2	Pencairan Dana Cadangan	12.648.740.000	12.774.460.000	100,99
3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.100.000.000	1.805.000.000	85,95
II	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**4.600.000.000**	**4.305.000.000**	**93,59**
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	100
3	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	1.805.000.000	85,95
	PEMBIAYAAN NETTO	**174.840.225.000**	**174.965.945.877,98**	**100,07**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2024

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 telah disusun pada tahun anggaran 2024 melalui Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dan telah menjadi Pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023. Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan II tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kebumen memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024 meliputi:

a) Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 masing-masing kegiatan;
b) Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD tahun 2024 terhadap kemampuan fiskal daerah;
c) Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
d) Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainya;
e) Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Perubahan terhadap rencana program kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) tahun 2024 dilakukan pada beberapa hal sebagai berikut:

a) Penyesuaian belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan yang bersumber dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari Pusat;
b) Penyesuaian terhadap pergeseran baik antar objek belanja, rincian objek sampai dengan sub rincian objek;
c) Penyesuaian terhadap Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai;
d) Penambahan anggaran terhadap kegiatan yang bersifat mengikat;
e) Efisiensi dan rasionalisasi;

2.1 Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Pendapatan Daerah yang harus dilakukan secara optimal dan akuntabel. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu modal dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah adalah dengan peningkatan pendapatan daerah. Kemampuan keuangan daerah akan tercermin dari PAD yang diperoleh, semakin besar persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil.

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Daerah terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Penerimaan Pemerintah Daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik.

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berupaya mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah, dimana selain mendapat Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat beberapa kebijakan peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

a) Optimalisasi PAD melalui:
    1. Melakukan penyempurnaan dasar hukum dan regulasi pemungutan;
    2. Melakukan koordinasi dengan APIP dan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan pengawasan pajak daerah;
    3. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;

4. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
5. Melaksanakan koordinasi dengan OPD Pengelola Pendapatan dalam rangka sinergitas pemungutan PAD;
6. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Pemungut Pajak, OPD Pengelola Pendapatan maupun para Camat;
7. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
8. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
9. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
10. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan dividen atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;dan
11. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional;

b) Pengelolaan pendapatan transfer perlu dilaksanakan dengan cermat karena sumber pendapatan ini berasal dari pemerintah pusat dengan kebijakan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
   1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perpanjangan tangan pemerintah pusat terkait dengan penyaluran pendapatan transfer ke daerah;
   2. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk setiap penyaluran dan pengelolaan pendapatan transfer;
   3. Pelaporan dengan data yang valid serta tepat waktu untuk kebutuhan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID); dan
   4. Mengusulkan dana yang dibiayai dari APBD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu.

Secara umum pendapatan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi. kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2024 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos. Perubahan anggaran pendapatan pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Tabel II.1 Perubahan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 (*unaudited*)

NO	URAIAN	APBD 2024		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
A.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**448.177.739.000**	**467.192.970.000**	**19.015.231.000**	**4,24**
1.	Pajak Daerah	134.680.200.000	142.880.000.000	8.199.800.000	6,09
2.	Retribusi Daerah	37.950.555.000	34.328.188.000	(3.622.367.000)	-9,54
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.861.197.000	21.751.620.000	(2.109.577.000)	-8,84
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	251.685.987.000	268.233.162.000	16.547.175.000	6,57
B.	**Pendapatan Transfer**	**2.492.497.244.000**	**2.595.403.949.000**	**102.906.705.000**	**4,13**
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.311.729.490.000	2.327.121.395.000	15.391.905.000	0,67
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	180.767.754.000	268.282.554.000	87.514.800.000	48,41
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**0**
1.	Pendapatan Hibah	100.000.000	100.000.000	0	0
Pendapatan Daerah		**2.940.774.983.000**	**3.062.696.919.000**	**121.921.936.000**	**4,15**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2024

2.2 Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah

Arah Kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, diantaranya dalam penggunaan DAU dan DBH diarahkan untuk penggajian formasi PPPK, penggunaan DID diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi, penggunaan DAK sesuai petunjuk teknis masing-masing Kementerian dan Lembaga, penggunaan DBHCHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat.

Perubahan anggaran belanja selama tahun 2024 dapat dilihat pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Tabel II.2 Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2024 (*unaudited*)

NO	URAIAN	APBD 2024		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
I.	**Belanja Operasi**	**2.171.806.573.372**	**2.240.808.596.285**	**69.002.022.913**	**3,18%**
1.	Belanja Pegawai	1.281.154.271.000	1.253.846.431.851	-27.307.839.149	-2,13%
2.	Belanja Barang dan Jasa	752.543.695.772	827.393.106.434	74.849.410.662	9,95%
3.	Belanja Subsidi	600.000.000	1.450.000.000	850.000.000	141,67%
4.	Belanja Hibah	145.983.252.100	147.997.946.000	2.014.693.900	1,38%
5.	Belanja Bantuan Sosial	11.525.354.500	10.121.112.000	-1.404.242.500	-12,18%
II.	**Belanja Modal**	**176.309.731.628**	**288.393.970.715**	**112.084.239.087**	**63,57%**
1.	Belanja Modal Tanah	5.633.135.000	5.633.135.000	0	0,00%
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.895.171.350	120.419.785.636	74.524.614.286	162,38%
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.876.322.000	41.747.023.424	870.701.424	2,13%
4.	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	74.521.135.000	105.852.413.000	31.331.278.000	42,04%
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.383.968.278	14.701.613.655	5.317.645.377	56,67%
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0	40.000.000	40.000.000	-
III.	**Belanja Tak Terduga**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**0**	**0.00%**
1.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0.00%
IV.	**Belanja Transfer**	**686.293.873.000**	**665.464.171.000**	**-20.829.702.000**	**-3,04%**
1.	Belanja Bagi Hasil	16.149.838.000	16.002.191.000	-147.647.000	-0,91%
2.	Belanja Bantuan Keuangan	670.144.035.000	690.332.386.000	20.188.351.000	3,01%
Jumlah Belanja		**3.036.410.178.000**	**3.237.537.144.000**	**201.126.966.000**	**6,62%**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2024

2.3 Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diantaranya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) audited yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dan Pengembalian Pinjaman Daerah dari Kelompok Tani untuk Dana Talangan Pangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diantaranya untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Daerah pada Perda APBD Tahun Anggaran 2024 dan pemberian pinjaman kepada kelompok tani (gabungan kelompok tani). Perubahan dari pemberian dana bergulir kepada nelayan untuk antisipasi keterlambatan pelaksanaan lelang ikan sebesar Rp.600.000.000.00.

Tabel II.3 Perubahan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 (*unaudited*)

NO	URAIAN	APBD 2024		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
I.	**Penerimaan Pembiayaan**	**100.235.195.000**	**179.440.225.000**	**79.205.030.000**	**79,02%**
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	85.486.455.000	164.691.485.000	79.205.030.000	92,65%
2.	Pencairan Dana Cadangan	12.648.740.000.00	12.648.740.000	0	0%
3.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0%
II.	**Pengeluaran pembiayaan**	**4.600.000.000**	**4.600.000.000**	**0**	**0%**
1.	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%
2.	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0%
3.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0%
Pembiayaan Netto		**95.635.195.000**	**174.840.225.000**	**79.205.030.000**	**82,82%**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2024

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan pendidikan dilaksanakan melalui program prioritas Program Pengelolaan Pendidikan. Adapun capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.1 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan	DISDIKPORA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	%	85	83	98,58	Angka partisipasi dasar sekolah tidak mencapai target dimana APK PAUD dan APK SMP sederajat masih menunjukkan angka dibawah 100, artinya masih kurang kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak ke jenjang PAUD, adanya penurunan pada jumlah murid yang berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan usianya, adanya anak usia sekolah yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Kebumen, serta faktor ekonomi dan anak berkebutuhan khusus.	Untuk meningkatkan APK PAUD dilakukan fasilitasi Bunda dan Pokja Bunda PAUD untuk sosialisasi tentang pentingnya mengenalkan pendidikan anak sejak dini melalui PAUD. Untuk meningkatkan APK SMP dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait anak putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah dan untuk anak berkebutuhan khusus telah disediakan sekolah inklusif.
				1 Kegiatan Pengelolaan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100	103.71	103.71		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendidikan Sekolah Dasar							
				a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (1 Unit)	Paket/unit	1	1	100		
					Jumlah Pembangunan Talud (DAU) ;	Paket	3	3	100		
					1. SDN Kalipuru Kec. Karangsambung.		1	1	100		
					2. SDN 2 Kecamatan Sampang		1	1	100		
					3. SDN Karangbolong kec Buayan		1	1	100		
					Jumlah Ruang Kelas. Baru yang Dibangun (DAU):	Ruang	10	10	100		
					1. SDN Karangbolong Kec. Buayan		1	1	100		
					2. SDN Ginandong Kec. Karanggayam		1	1	100		
					3. SDN 1 Binangun Kec. Karanggayam		1	1	100		
					4. SDN 3 Selogiri Kec. Karanggayam		1	1	100		
					5. SDN Ayah kec. Ayah		1	1	100		
					6. SDN Madureso kec Kuwarasan		1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7. SDN 1 Kuwarasan kec. Kuwarasan		1	1	100		
					8. SDN 1 Kalitengah kec. Gombong		1	1	100		
					9. SDN Balorejo kec Bonorowo		1	1	100		
					10. SDN 1 Jembangan kec Poncowarno (DAK)		1	1	100		
					Jumlah Ruang Kelas yang direhab:	Ruang	22	22	100		
					1. SDN Kaligesing Kec. Sadang;		1	1	100		
					2. SDN Kalipoh Kec. Ayah;		3	3	100		
					3. SDN 1 Nogoraji kec. Buayan.		1	1	100		
					4. SDN Jembangan kec Poncowarno (DAK)		4	4	100		
					5. SDN Kaliputih kec Kutowinangun		4	4	100		
					6. SDN 2 Somagede kec Sempor		3	3	100		
					7. SDN Grogolbeningsari kec Petanahan		1	1	100		
					8. SDN Ampelsari kec Petanahan		2	2	100		
					9. SDN 1 Banjararjo kec Ayah		3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10. SDN 1 Bumiagung kec Rowokele		2	2	100		
					11. SDN Patemon kec Gombong		1	1	100		
					Jumlah Pembangunan ruang UKS:	ruang	1	1	100		
					1. SDN 1 Jembangan kec Poncowarno		1	1	100		
					Jumlah Ruang Guru direhab:	ruang	1	1	100		
					1. SDN 1 Jembangan Kec. Poncowarno (DAK)		1	1	100		
					2. SDN 2 Kalirejo kec Karanggayam		1	1	100		
					Jumlah UKS yang direhab:	kelas	1	1	100		
					1. SDN 2 Kalirejo kec Karanggayam		1	1	100		
					Jumlah Mebeler yang diadakan (Banprob)	ruang	1	1	100		
					Jumlah peralatan TIK yang diadakan		250	250	100		
					1. SDN Kalibagor kec Kebumen	set	1	1	100		
					2. SDN 3 Petanahan kec Petanahan	set	1	1	100		
					3. SDN 1 Bumirejo kec Puring	set	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Meubelair SD yang diadakan:	set	5	5	100		
					1. SDNi 2 Kaleng Kecamatan Puring.	set	1	1	100		
					2. Negeri 1 Binangun Kecamatan Karanggayam.	set	1	1	100		
					3. SD Negeri 3 Selogiri Kecamatan Karanggayam.	set	1	1	100		
					4. SD Negeri Ayah Kecamatan Ayah.	set	1	1	100		
					5. SD Negeri 1 Banjararjo Kecamatan Ayah"	set	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana.Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah prasarana ruang kelas yang direhab (DAU):	Paket	1	1	100		
					1. Rehab Prasarana Pendidikan	Ruang	12	12	100		
					Jumlah Ruang Kelas yang direhab (DAU/Aspirasi Masyarakat melalui Pokok Pikiran):	Ruang	12	12	100		
					1. MI GUPPI Sumberadi Kec. Kebumen	Ruang	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2. MI Maarif Ambarwinangun kec Ambal	Ruang	2	2	100		
					3. MI Muhamadiyah Sidomukti Ambal	Ruang	3	3	100		
					4. MI Maarif Kaliputih kec Alian	Ruang	2	2	100		
					5. MI Jatiroto kec Buayan	ruang	1	1	100		
					6. SD Pius kec Gombong	Paket	1	1	100		
					7. SDIT Alhuda kec Adimulyo	Ruang	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah paket peralatan TIK SD (DAK):	Paket	2	2	100		
					1. SDN 1 Jembangan Kec. Poncowarno.	Paket	1	1	100		
					2. SDN Kedalemanwetan kec Puring	Paket	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah penerima Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI (DTKS DINSOS)	Siswa	2.046	2.042	99.80	Terdapat 4 anak yang tidak tersalurkan: 1 anak meninggal, 1 anak dobel data, 2 orang tidak mengambil di bank sampai batas 20 Desember 2024	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan pendidikan	751	745	99.20	Terdapat 6 SD *regrouping*: 2023 =4 SD, 2024=2 SD	
					Jumlah SD yang difasilitasi pelaksanaan Ujian dan Monev BOS	Sekolah	751	745	99.20		
				f Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kepala SD Negeri dan pengawas SD yang dievaluasi	Orang	718	718	100		
					Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidik	718	718	100		
				g Sub Kegiatan Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan lomba/Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa (KSN SD. KOSN SD. FLS2N SD. LCC SD. Dokter Kecil SD, MAPSI SD)	Sekolah	746	746	100		
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	763	763	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				h Sub Kegiatan Penyediaan Pendidikan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	GTT, P2K dan PTT di Lingkungan Sekolah Dasar negeri dan Disdikpora Kabupaten Kebumen	Orang	2.296	2.296	100		
					Jumlah Calon Kepala Sekolah Yang Mengikuti Seleksi dan Pembekalan Serta Pelantikan/Pengambilan Sumpah Calon Kepala Sekolah	Orang	100	100	100		
				i Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan pemilihan PTK berprestasi	Orang	3.770	3.770	100		
				j Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah	751	746	99.33	ada 6 SD negeri regrouping: 2023: 4 SD 2024: 2 SD	
				k Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Sekolah	751	747	99.47	terdapat 4 SD *regrouping* pada tahun 2023	
				2 Kegiatan Pengelolaan	Angka Partisipasi Kasar	%	98	85	87.01	masih kurang kesadaran	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						masyarakat untuk menyekolahkan anak ke jenjang PAUD, adanya penurunan pada jumlah murid yang berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan usianya atau anak usia sekolah yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Kebumen, serta faktor ekonomi dan anak berkebutuhan khusus	
				a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Talud:	Unit	2	2	100	-	
					SMPN 1 Karangsambung	Unit	1	1	100		
					SMPN 2 Sempor	Unit	1	1	100		
					Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabot DAK:	Unit	1	1	100		
					SMPN 1 Bonorowo.	Paket	1	1	100		
					SMPN 2 Ayah.	Paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SMPN 3 Satap Ayah.	Paket	1	1	100		
					SMPIT Al Furqon Ambal	Paket	1	1	100		
					Pembangunan toilet jamban (Aspirasi Masyrakat melalui pokok pikiran):						
					SMP Taman Dewasa Karanganyar (DAU)	Unit	1	1	100		
					Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabot DAK:						
					SMPN 1 Bonorowo	Paket	1	1	100		
					Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabot DAK:						
					SMPN 1 Bonorowo	Paket	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana.Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas (Aspirasi Masyarakat melalui pokok pikiran):	Unit	17	17	100	-	
					SMP Maarif 1 Kebumen	Ruang	1	1	100		
					SMP Pius Bhakti Utama Gombong	Ruang	1	1	100		
					SMP Penabur Kebumen	ruang	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rehabilitasi Ruang Kelas DAK:						
					SMPN 1 Buayan.	ruang	13	13	100		
					SMPN 1 Ayah	ruang	8	8	100		
					SMPN 2 Adimulyo.	ruang	2	2	100		
					SMPN 3 Satap Ayah	ruang	5	5	100		
					Rehabilitasi Ruang Kelas DAU:						
					SMPN 7 Kebumen	ruang	2	2	100		
					Rehabilitasi Ruang Guru DAK:						
					SMPN 3 Satap Ayah	ruang	1	1	100		
					Rehabilitasi Ruang Lab IPA DAK:						
					SMPN 2 Adimulyo.	ruang	1	1	100		
					SMPN 3 Satap Ayah	ruang	1	1	100		
					Rehabilitasi Ruang Perpustakaan DAK:						
					SMPN 1 Buayan	ruang	1	1	100		
					Rehabilitasi Toilet Jamban DAK:						
					SMPN 2 Adimulyo	unit	1	1	100		
					SMPN 2 Ayah	unit	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengadaan Meubelair Banprov:						
					SMP N 1 ADIMULYO	paket	1	1	100		
					SMP N 1 ALIAN	paket	5	5	100		
					SMP N 1 AMBAL	paket	5	5	100		
					SMP N 1 AYAH	paket	3	3	100		
					SMPN 1 BONOROWO	paket	1	1	100		
					SMP N 1 BUAYAN	paket	1	1	100		
					SMP N 1 BULUSPESANTREN	paket	5	5	100		
					SMP N 1 GOMBONG	paket	1	1	100		
					SMP N 1 KARANGANYAR	paket	1	1	100		
					SMP N 1 KARANGGAYAM	paket	5	5	100		
					SMP N 1 KARANGSAMBUNG	paket	1	1	100		
					SMP N 1 KEBUMEN	paket	1	1	100		
					SMP N 1 KLIRONG	paket	5	5	100		
					SMP N 1 KUWARASAN	paket	5	5	100		
					SMP N 1 MIRIT	paket	5	5	100		
					SMP N 1 PADURESO	paket	5	5	100		
					SMP N 1 PEJAGOAN	paket	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SMPN 1 PETANAHAN	paket	1	1	100		
					SMP N 1 PONCOWARNO	paket	3	3	100		
					SMP N 1 PREMBUN	paket	1	1	100		
					SMP N 1 PURING	paket	1	1	100		
					SMP N 1 ROWOKELE	paket	1	1	100		
					SMP N 1 SADANG	paket	1	1	100		
					SMP N 1 SEMPOR	paket	1	1	100		
					SMP N 2 ADIMULYO	paket	4	4	100		
					SMP N 2 AMBAL	paket	1	1	100		
					SMP N 2 AYAH	paket	1	1	100		
					SMP N 2 BUAYAN	paket	1	1	100		
					SMP N 2 BULUSPESANTREN	paket	1	1	100		
					SMP N 2 GOMBONG	paket	1	1	100		
					SMP N 2 KARANGANYAR	paket	1	1	100		
					SMP N 2 KARANGGAYAM	paket	1	1	100		
					SMP N 2 KARANGSAMBUNG	paket	1	1	100		
					SMP N 2 KEBUMEN	paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SMP N 2 KUTOWINANGUN	paket	1	1	100		
					SMP N 2 MIRIT	paket	3	3	100		
					SMP N 2 PEJAGOAN	paket	1	1	100		
					SMP N 2 PREMBUN	paket	5	5	100		
					SMP N 2 PURING	paket	4	4	100		
					SMP N 2 ROWOKELE	paket	5	5	100		
					SMP N 2 SATU ATAP ALIAN	paket	5	5	100		
					SMP N 2 SEMPOR	paket	4	4	100		
					SMP N 2 SRUWENG	paket	1	1	100		
					SMP N 3 GOMBONG	paket	1	1	100		
					SMP N 3 KARANGANYAR	paket	5	5	100		
					SMP N 3 KEBUMEN	paket	1	1	100		
					SMP N 3 KUTOWINANGUN	paket	5	5	100		
					SMP N 3 SATU ATAP AYAH	paket	1	1	100		
					SMP N 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG	paket	1	1	100		
					SMP N 3 SATU ATAP SEMPOR	paket	1	1	100		
					SMP N 4 GOMBONG	paket	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SMP N 4 KEBUMEN	paket	5	5	100		
					SMP N 4 SATU ATAP KARANGSAMBUNG	paket	4	4	100		
					SMP N 5 KEBUMEN	paket	3	3	100		
					SMP N 6 KEBUMEN	paket	4	4	100		
					SMP N 7 KEBUMEN	paket	3	3	100		
					SMP NEGERI 1 SRUWENG	paket	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat TIK SCR Banprov:	Unit	1.024	1.024	100		
					SMP N 1 ADIMULYO	paket	1	1	100		
					SMP N 1 ALIAN	paket	1	1	100		
					SMP N 1 AMBAL	paket	1	1	100		
					SMP N 1 AYAH	paket	1	1	100		
					SMPN 1 BONOROWO	paket	1	1	100		
					SMP N 1 BUAYAN	paket	1	1	100		
					SMP N 1 BULUSPESANTREN	paket	1	1	100		
					SMP N 1 GOMBONG	paket	1	1	100		
					SMP N 1 KARANGANYAR	paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SMP N 1 KARANGGAYAM	paket	1	1	100		
					SMP N 1 KARANGSAMBUNG	paket	1	1	100		
					SMP N 1 KEBUMEN	paket	1	1	100		
					SMP N 1 KLIRONG	paket	1	1	100		
					SMP N 1 KUWARASAN	paket	1	1	100		
					SMP N 1 MIRIT	paket	1	1	100		
					SMP N 1 PADURESO	paket	1	1	100		
					SMP N 1 PEJAGOAN	paket	1	1	100		
					SMPN 1 PETANAHAN	paket	1	1	100		
					SMP N 1 PONCOWARNO	paket	1	1	100		
					SMP N 1 PREMBUN	paket	1	1	100		
					SMP N 1 PURING	paket	1	1	100		
					SMP N 1 ROWOKELE	paket	1	1	100		
					SMP N 1 SADANG	paket	1	1	100		
					SMP N 1 SEMPOR	paket	1	1	100		
					SMP N 2 ADIMULYO	paket	1	1	100		
					SMP N 2 AMBAL	paket	1	1	100		
					SMP N 2 AYAH	paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SMP N 2 BUAYAN	paket	1	1	100		
					SMP N 2 BULUSPESANTREN	paket	1	1	100		
					SMP N 2 GOMBONG	paket	1	1	100		
					SMP N 2 KARANGANYAR	paket	1	1	100		
					SMP N 2 KARANGGAYAM	paket	1	1	100		
					SMP N 2 KARANGSAMBUNG	paket	1	1	100		
					SMP N 2 KEBUMEN	paket	1	1	100		
					SMP N 2 KUTOWINANGUN	paket	1	1	100		
					SMP N 2 MIRIT	paket	1	1	100		
					SMP N 2 PEJAGOAN	paket	1	1	100		
					SMP N 2 PREMBUN	paket	1	1	100		
					SMP N 2 PURING	paket	1	1	100		
					SMP N 2 ROWOKELE	paket	1	1	100		
					SMP N 2 SATU ATAP ALIAN	paket	1	1	100		
					SMP N 2 SEMPOR	paket	1	1	100		
					SMP N 2 SRUWENG	paket	1	1	100		
					SMP N 3 GOMBONG	paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SMP N 3 KARANGANYAR	paket	1	1	100		
					SMP N 3 KEBUMEN	paket	1	1	100		
					SMP N 3 KUTOWINANGUN	paket	1	1	100		
					SMP N 3 SATU ATAP AYAH	paket	1	1	100		
					SMP N 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG	paket	1	1	100		
					SMP N 3 SATU ATAP SEMPOR	paket	1	1	100		
					SMP N 4 GOMBONG	paket	1	1	100		
					SMP N 4 KEBUMEN	paket	1	1	100		
					SMP N 4 SATU ATAP KARANGSAMBUNG	paket	1	1	100		
					SMP N 5 KEBUMEN	paket	1	1	100		
					SMP N 6 KEBUMEN	paket	1	1	100		
					SMP N 7 KEBUMEN	paket	1	1	100		
					SMP NEGERI 1 SRUWENG	paket	1	1	100		
					Pengadaan Alat TIK DAK:						
					SMPN 1 Alian	paket	1	1	100		
					SMPN 2 Ambal	paket	1	1	100		
					SMPN 2 Ayah	paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengadaan Alat TIK Aspirasi Masyrakat melalui pokok pikiran: SMP VIP Al Muhajiruna Wal Anshor, Prembun	paket	1	1	100		
					Pengadaan Alat Lab IPA DAK:						
					SMPN 1 Alian	paket	1	1	100		
					SMPN 1 Ayah	paket	1	1	100		
					SMPN 1 Bonorowo	paket	1	1	100		
					SMPN 1 Buayan	paket	1	1	100		
					SMPN 2 Adimulyo	paket	1	1	100		
					SMPN 2 Ambal	paket	1	1	100		
					SMPN 2 Ayah	paket	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penerima Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SMP/MTs (DTKS DINSOS)	Siswa	1.000	939	93.9	Terdapat 82 anak tidak sesuai Perbup	
				e Sub Kegiatan Penyelenggara an Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	14.571	14.571	100		
					Jumlah sekolah jenjang SMP yang	Sekolah	120	120	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					menyelenggarakan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan *Asessment* Nasional dan Monev BOS						
				f Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kepala SMP Negeri dan pengawas SMP yang dievaluasi	orang	73	73	100		
					Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidik	59	59	100		
				g Sub Kegiatan Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	43.196	43.196	100		
					Jumlah paket penghargaan untuk Siswa SMP Berprestasi dan Lomba (KSN SMP. KOSN SMP, FLS, GSI, OPSI, FLS2N SMP, LCC SMP, KKR, MAPSI SMP)	paket	8	8	100		
				h Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan	Orang	577	577	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Pertama						
				l Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1.145	1.145	100		
				Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	65	65	100		
				j Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (bimtek, KOSP)	Sekolah	400	400	100		
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik	120	120	100		
				k Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah	SMP Negeri yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Sekolah	59	59	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Menengah Pertama							
				3 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar Paud	%	41,63	44,77	107,54%		
				a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	1	3	300		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dilaksanakan Pemeliharaan (POKIR) :	Unit	18	17	94,44	Terdapat 1 PAUD yang diusulkan Pokir belum memenuhi syarat sehingga tidak bisa dicairkan	
				c Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Lembaga	104	84	80,76	Terdapat perubahan sasaran penerima dan perubahan kegiatan dari pengadaan APE menjadi pemeliharaan Sarana	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										prasarana utilitas sekolah	
				d Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga PAUD negeri dan swasta yang dibina	Lembaga	1.152	1.131	98,17	Ada 18 lembaga yang tutup dan ada 3 lembaga yang regruping	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	31.273	31.273	100		
				e Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang di monev, evaluasi Kepala dan Pengawas TK yang dievaluasi	Lembaga	68	68	100		
				f Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi +	orang	2.176	2.176	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Lembaga	27	27	100		
				h Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD negeri dan swasta yang dibina	Lembaga	1.152	1.131	98,17	Ada 18 lembaga yang tutup dan ada 3 lembaga yang regruping	
				4 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidikan non formal yang terkelola	%	100	100	100		
				a Sub kegiatan Pemeliharaan rutin sarana, Prasarana dan Yutilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Yutilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan.	Unit	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Koordinasi perencanaan sufervisi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Perencanaan, Supervisis dan	Doukmen	63	63	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan evaluasi layanan dibidang Pendidikan	Evaluasi layanan di Bidang Pendidikan						
				c Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/ Kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	Satuan Pendidik	63	63	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	135	135	100		
				e Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/ Kesetaraan yang mengelola dana BOP	satpen	25	25	100		
				f Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	satpen	63	63	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g Pengadaan alat praktek dan peraga siswa non formal kesetaraan	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	paket	4	4	100		

2) **Permasalahan**

a) Angka partisipasi sekolah jenjang PAUD dan SMP belum mencapai 100%

b) Ketercukupan jumlah pendidik ASN, distribusi, dan mutu tenaga pendidik masih kurang.

c) Sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat tingkat kerusakan yang belum sepenuhnya direhabilitasi.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Untuk Meningkatkan APK PAUD dilakukan dengan memfasilitasi Bunda dan Pokja Bunda PAUD untuk sosialisasi pentingnya mengenalkan pendidikan anak sejak dini melalui PAUD, dan untuk meningkatkan APK SMP dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah formal maupun non formal, dan untuk anak berkebutuhan khusus telah disediakan sekolah yang inklusif.

b) Mengusulkan penambahan pendidik ASN serta mengoptimalkan kinerja pendidik yang ada.

c) Efektifitas ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas sarpras pendidikan dan mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Rata-rata capaian program urusan pendidikan adalah 98,58%. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 99.56%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Keseluruhan program prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.2 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024		TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	CAPAIAN	
Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan. Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kebumen. 2024

Indikator kinerja urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga meliputi persentase capaian SPM Pendidikan, persentase organisasi pemuda yang aktif, dan persentase prestasi olahraga. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal (Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022). SPM Bidang Pendidikan yang melekat di Dinas Pendidikan. Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen meliputi 4 (empat) jenis layanan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan.

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun Renstra. Layanan Pendidikan Dasar menggunakan indikator jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun Renstra. Layanan Pendidikan Dasar menggunakan indikator jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun Renstra. Layanan Pendidikan Menengah Pertama menggunakan indikator jumlah anak 12-15 tahun yang tahun yang sudah atau sedang belajar pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun Renstra. Layanan Pendidikan Kesetaraan menggunakan indikator jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun Renstra.

Persentase capaian SPM Bidang Pendidikan secara kumulatif di tahun 2024 sebesar 100,68%. Dengan rincian pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini (umur 5-6 tahun) sebesar 101,02%. Pendidikan Dasar umur 7-12 Tahun sebesar 103,92%. Pendidikan Dasar umur 13-15 Tahun sebesar 97,80%. dan Pendidikan Kesetaraan Usia 7-18 Tahun sebesar 100%. Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen usia 5-6 tahun telah mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (angkanya melebihi 100% dikarenakan sebagian dari anak berusia 5-6 tahun ada di SD/MI dan sudah menyelesaikan jenjang PAUD). Penduduk Kabupaten Kebumen usia 7-12 tahun telah mendapatkan layanan Pendidikan Dasar (angkanya melebihi 100% dikarenakan sebagian dari anak berusia 7-12 tahun ada di SMP/MTs/sederajat dan sudah menyelesaikan jenjang SD/MI/sederajat). Penduduk Kabupaten Kebumen usia 7-12 tahun telah mendapatkan layanan Pendidikan Dasar jenjang SD/MI/sederajat (angkanya melebihi 100% dikarenakan sebagian dari anak

berusia 7-12 tahun ada di SMP/MTs/sederajat dan sudah menyelesaikan jenjang SD/MI/sederajat). Penduduk Kabupaten Kebumen usia 13-15 tahun telah mendapatkan layanan Pendidikan Dasar setingkat SMP/MTs/sederajat (angkanya 97,80 kurang dari 100% dikarenakan sebagian dari anak berusia 7-12 tahun tidak bersekolah di SMP/MTs/sederajat atau tidak menyelesaikan pendidikannya di jenjang tersebut). Faktor penyebab penduduk yang tidak bersekolah usia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (kemauan bersekolah rendah) sangat sulit dikembalikan lagi untuk bersekolah, pernikahan di usia dini, sebagian penduduk usia sekolah yang ada di pondok pesantren tidak bersekolah, dan faktor kemiskinan. Selanjutnya capaian untuk layanan pendidikan kesetaraan capaiannya 100% sesuai target yang ditetapkan.

Sebagai pembanding capaian kinerja yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 jumlah anak sekolah yang menerima Program Indonesia Pintar 2024 tingkat Sekolah Dasar sebanyak 19.037 siswa, tingkat Sekolah Menengah Pertama 3.354 siswa. Sementara jumlah siswa miskin yang menerima Beasiswa Kurang Mampu (BKM) Kelas Akhir tingkat Sekolah Dasar sebanyak 2.000 siswa dan tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1.000 siswa.

2. Urusan Kesehatan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

a) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (khusus untuk Peningkatan Pelayanan BLUD);
e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.3 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	6	6	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Terbayar Gaji dan Tunjangannya	Orang	1.961	1.961	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang Tersusun	Dokumen	3	3	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	12	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perundang-undangan						
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material	Paket	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	26	26	100		
				g Penyelenggaraan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Arsip DInamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		
				4 Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah SDM yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	105	105	100		
				a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	105	105	100		
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Terbeli	Unit	6	6	100		
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	3	3	100		
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	55	55	100		
				a Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Unit	25	25	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pemeliharaan, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan						
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara (PC, Laptop, Printer. Scanner, Kabel). Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya (RS Prembun)	Unit	23	23	100		
				e Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	4	4	100		
				8 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kegiatan Pelayanan BLUD	Keg	4	4	100		
				a Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Kegiatan Pelayanan dan Penujang Pelayanan BLUD (Operasional BLUD DINKES, BLUD RSDS, BLUD RS PREMBUN, BLUD PUSK)	Keg	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedia dan Terpelihara	Paket	39	39	100		
				a Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Unit Faskes Lainnya yang Dibangun.	Unit	3	3	100		
				b Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana Prasana Alat Kesehatan dan SDM Supaya Sesuai Standar	Paket	8	8	100		
				c. Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM supaya sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal	Unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1:1.000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan Rumah Sakit.						
				d Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	3	3	100		
				e Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan, dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Paket Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan, dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Paket	2	2	100		
				f Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	Jumlah Paket Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	Paket	35	35	100		
				2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kab/kota	%	100	100	100		
				a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Dilayani Sesuai Standard	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standard	%	100	100	100		
				c Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase BBL Dilayani Sesuai Standard	%	100	100	100		
				d Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Balita Sesuai Standar	%	100	100	100		
				e Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pelayanan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standard.	%	100	100	100		
				f Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Pelayanan Usia Produktif Sesuai Standard	%	100	100	100		
				g Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia Lanjut Dilayani Sesuai Standard	%	100	100	100		
				h Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi Dilayani Sesuai Standard	%	100	100	100		
				i Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita DM Dilayani Sesuai Standard.	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				j Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pelayanan ODGJ Sesuai Standard	%	100	100	100		
				k Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pelayanan Orang Terduga TB Dilayani Sesuai Standard	%	100	100	100		
				l Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pelayanan Orang Berisiko Terinfeksi HIV Dilayani Sesuai Standard	%	100	100	100		
				m Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	presentase KLB ditangani dalam waktu < 24 jam	%	100	100	100		
				n Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen	2	2	100		
				o Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase Balita Stunting		12	9.14	131	Pada perhitungan ini, realisasi capaian semakin rendah semakin baik, karena menunjukkan penurunan kasus stunting	Faktor pendorong penurunan stunting yaitu Gerakan cegah stunting, Gerakan aksi bergizi, Gerakan Ibu Hamil sehat dan Program PMT Lokal
					Persentase Kasus Gizi Buruk		0.02	0.02	100	Pada perhitungan ini angka capaian semakin kecil semakin baik karena menunjukkan menurunnya kasus gizi buruk	Faktor pendorong penurunan gizi buruk yaitu semua balita gizi buruk dirujuk untuk mendapatkan perawatan kesehatan
				p Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga.	Dokumen	26	26	100		
				q Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pnngelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	36	36	100		
					Persentase Capaian Desa STBM	%	33	34	103.33		
				r Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	35	35	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya						
				s Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	9	9	100		
				t Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	5	5	100		
				u Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	%	98	99	101.09		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	2	100		
				v Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1	100		
				w Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				x Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Unit	37	37	100		
				y Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak DIharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	4	4	100		
				3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	100	100	100		
				a Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	2	2	100		
				4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D. dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS yang Memiliki Izin Operasional yang Masih Berlaku	Kegiatan	1	1	100		
				Peningkatan Mutu/Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan.	Unit	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	%	100	100	100		
				1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota.	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK.	Dokumen	2	2	100		
				a Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan SDM Kesehatan	Dokumen	2	2	100		
				2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDMK Tingkat Daerah Kab/Kota	Orang	200	200	100		
				a Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDMK	Orang	200	200	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tingkat Daerah Kab/Kota						
				D PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	%	100	100	100		
				1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pemberian Izin dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal (UMOT).	%	100	100	100		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal atau Usaha Mikro Obat Tradisional Berizin yang Diawasi.	Lokasi	135	135	100		
				2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat PIRT Sebagai Izin Produksi untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh RT dan Pengawasan Produk PIRT	Dokumen	315	315	100		
				Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak	Jumlah Sarana Industri Rumah	Lokasi	259	259	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tangga Pangan yang Diawasi dan Dikendalikan serta Ditindaklanjuti					
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kegiatan	2	2	100		
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan/Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan.	Unit	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				E PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	%	77	98	126.84		
				1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
				a Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	15	15	100		
				2 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
				a Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga Sehat	%	77.1	97.8	126.84		
				3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Persentase terlaksananya	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				a Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	53.44	75	140.34		

2) **Permasalahan**

Berdasarkan tabel di atas, dari 5 capaian kinerja program urusan kesehatan secara keseluruhan telah mencapai target, sehingga tantangan yang dihadapi oleh bidang kesehatan adalah mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal dengan upaya preventif dan promotif kesehatan.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Secara umum capaian program telah tercapai sesuai target yang diharapkan dan perlu dilakukan penyesuaian kembali target kesehatan untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Rata-rata capaian program urusan kesehatan adalah 105,37%. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kesehatan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.4 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Angka Harapan Hidup	tahun	74.98 *(BPS hasil PS2020)*	73.80	75.22 *(BPS hasil PS2020)*	101.92	74
Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 2024

Tabel di atas menunjukkan indikator kinerja utama urusan kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup mencapai 75,22 tahun, dari target 73,80 tahun pada tahun 2024, hal ini menunjukkan peluang meningkatnya usia penduduk berumur panjang semakin baik. Presentasi capaian SPM kesehatan pada tahun 2024 mencapai 100% sesuai dengan target yang diharapkan, capaian SPM merupakan upaya kesehatan memberikan pelayanan dasar secara minimal yang wajib diberikan kepada masyarakat melalui berbagai upaya kesehatan. Berikut adalah target dan capaian dari indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan tahun 2024.

Tabel III.5 Target Dan Capaian Dari Indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.845	13.845	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.845	13.845	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.767	13.767	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	69.321	69.321	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	184.515	184.515	100
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	587.315	587.315	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	174.506	174.506	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	64.187	64.187	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	11.128	11.128	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehata jiwa sesuai standar	4.655	4.655	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	18.604	18.604	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*	18.422	18.422	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Harapan selanjutnya adalah terus meningkatkan pelayanan dan mempertahankan upaya-upaya yang mendukung keberhasilan capaian program-program kesehatan.

Untuk mengetahui Kinerja BLUD yang meliputi 35 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.6 Kinerja BLUD Kebumen Tahun 2024

NO.	BLUD	CAPAIAN KINERJA			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	04507-Puskesmas Ayah I	100	86,33	Baik	
2	04508-Puskesmas Ayah II	100	89,95	Baik	
3	04509-Puskesmas Buayan	100	87,65	Baik	
4	04510-Puskesmas Puring	100	92,2	Baik	
5	04511-Puskesmas Petanahan	100	86	Baik	
6	04512-Puskesmas Klirong I	100	90,1	Baik	
7	04513-Puskesmas Klirong II	100	86,2	Baik	
8	04514-Puskesmas Buluspesantren I	100	91,2	Baik	
9	04515-Puskesmas Buluspesantren II	100	89,35	Baik	
10	04516-Puskesmas Ambal I	100	85,85	Baik	
11	04517-Puskesmas Ambal II	100	91,9	Baik	
12	04518-Puskesmas Mirit	100	82,75	Baik	
13	04519-Puskesmas Bonorowo	100	89,15	Baik	
14	04520-Puskesmas Prembun	100	91,85	Baik	
15	04523-Puskesmas Alian	100	87,45	Baik	
16	04521-Puskesmas Padureso	100	84,5	Baik	
17	04522-Puskesmas Kutowinangun	100	84,65	Baik	
18	04524-Puskesmas Poncowarno	100	89,3	Baik	
19	04525-Puskesmas Kebumen I	100	87,85	Baik	
20	04526-Puskesmas Kebumen II	100	91	Baik	
21	04527-Puskesmas Kebumen III	100	89,85	Baik	
22	04528-Puskesmas Pejagoan	100	93,1	Baik	
23	04529-Puskesmas Sruweng	100	88,45	Baik	
24	04530-Puskesmas Adimulyo	100	92,25	Baik	
25	04531-Puskesmas Kuwarasan	100	89,5	Baik	
26	04532-Puskesmas Rowokele	100	89,65	Baik	
27	04533-Puskesmas Sempor I	100	94,35	Baik	
28	04534-Puskesmas Sempor II	100	87,55	Baik	
29	04535-Puskesmas Gombong I	100	86,35	Baik	
30	04536-Puskesmas Gombong Ii	100	87,5	Baik	

31	04537-Puskesmas Karanganyar	100	85,15	Baik	
32	04538-Puskesmas Karanggayam II	100	90,75	Baik	
33	04539-Puskesmas Karanggayam I	100	92,2	Baik	
34	04540-Puskesmas Sadang	100	88,65	Baik	
35	04541-Puskesmas Karangsambung	100	86,9	Baik	
36	RSUD Soedirman	100	83,02	Sangat Baik	
37	RSUD Prembun	100	88,35	Sangat Baik	

Sumber: Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 2024

Catatan: Dalam perhitungan penilaian Kinerja BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit mempunyai perbedaan Indikator dan Kategori Total Skor sehingga untuk kategori hasil penilaian mempunyai rentang nilai yang berbeda.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Pengembangan Sumber Daya Air (SDA);
c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
e) Program Penataan Bangunan Gedung;
f) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
g) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
h) Program Penyelenggaraan Jalan;
i) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.7 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	87.2	87.2	Terdapat beberapa kegiatan yang tidak diubah targetnya menjadikan perhitungan dari program tidak tercapai, akan tetapi perhitungan pada sub kegiatannya tercapai 100%, kecuali bimtek tidak dilaksanakan pengiriman peserta diklat/bimtek karena sudah difasilitasi oleh Kementerian	Akan lebih cermat dalam penentuan target kegiatan.
				1 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	17	17	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perangkat Daerah yang Tersusun						
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	175	175	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	11	11	100		
				3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset/barang daerah yang dikelola dan diamankan	paket	1	1	100		
				a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100		
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	kegiatan	1	0	0	pengiriman peserta diklat/bimtek sudah difasilitasi oleh kementerian	
				a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	kegiatan	1	0	0	pengiriman peserta diklat/bimtek sudah difasilitasi oleh kementerian	
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah	unit	41	40	97,56	pembelian sesuai kebutuhan dan anggaran pada sistem SIPD saat itu	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					tidak bisa dirubah target dari kegiatan	
				a Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	20	20	100		
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	20	20	100		
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya	JJumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	119	119	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	88	88	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	82,5	78,75	95,45	1 Adanya kejadian bencana yang menyebabkan kerusakan jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi tidak baik. 2 Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra.	Diusulkan pada tahun berikutnya
				1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	%	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan. Embung. dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	1	1	100		
				b Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang terpelihara	unit	1	1	100		
				c Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	3	3	100		
				2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	kegiatan	5	5	100		
				a Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	4	4	100		
				b Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah JIAT yang terbangun	KM	0	0	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang direhabilitasi	KM	2	2	100		
				d Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang terpelihara	KM	1	1	100		
				e Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	DI	4	4	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	%	22,5	24,76	110,04		
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani	SR	71.546	89.210	124,69		
				a Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan yang dibangun	liter/detik	33	33	100		
				b Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	liter/detik	1	1	100		
				c Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan	Orang	114	114	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM						
				d Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum SPAM yang dioperasikan dan Dipelihara	lokasi	4	4	100		
				D PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	18,01	16,21	90,01	1 Adanya kejadian bencana sehingga menyebab kan beberapa titik jaringan drainase mengalami longsor dan kebocoran drainase	Diusulkan pada tahun berikutnya
										2 Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada Renstra	
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah saluran drainase yang dipelihara/direhabilitasi/dibangun	Lokasi	11	11	100		
				a Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Sistem Drainase Lingkungan	Meter	230	230	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang Beroperasi dan Terpelihara						
				b Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	dokumen	3	3	100		
				E PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	%	82,15	82,49	100,42		
				1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Presentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	82,15	82,49	100,42		
				a Pemeliharaan. Perawatan. dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara. Dirawat. dan Diperiksa Berkala	bangunan	3	3	100		
				b Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	dokumen	50	50	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	bantuan teknis	8	8	100		
				d Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	unit	1	1	100		
				e Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	unit	100	100	100		
				f Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT.	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai	Dokumen	400	400	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Teknis TPT, Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						
				F PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	%	15	15	100		
				1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	10	14	140		
				a Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	50	335	670		
				b Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	14	140		
				G PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	79,48	73,48	92,45	1 Jumlah perhitungan jalan rusak bertambah pada Triwulan IV yang disebabkan oleh bencana alam dan adanya kendaraan ODOL (*Over Dimension/Overloading*) serta adanya	Mengajukan usulan penganggaran baik melalui APBD,DAK dan Banprov

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										penambahan panjang ruas jalan dari 960.358 km menjadi 1017.15 km	
										2 Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada Renstra	
				1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan yang tertangani	Km	32	42	131,86		
				a Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Desa	Jumlah Dokumen Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	dokumen	12	13	108,33		
				b Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	14	21	157,16		
				c Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	30	42	140,65		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan menuju standar	km	7	7	107,84		
				e Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	jembatan	1	1	100		
				f Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jembatan	2	2	100		
				g Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara rutin	km	960	1.017	105,91		
				h Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	km	12	14	116,39		
				i Pelebaran Jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan	Jembatan	1	1	100		
				H PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	%	55,08	55,08	100		
				1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Kegiatan	1	1	100		
				a Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	50	100	200		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator. Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator. Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	100	200	200		
				2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	kegiatan	1	1	100		
				a Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	dokumen	1	1	100		
				I PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	%	91,35	91,35	100		
				1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RRRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100		
				a Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan RTRW dan RRTR yang disusun	Dokumen	15	15	100		
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	kegiatan	12	12	100		
				b Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	kegiatan	3	3	100		
				3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun	dokumen	130	361	277,69		
				a Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	dokumen	130	130	100		
				b Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	dokumen	130	231	177,69		
				4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	kegiatan	12	13	108,33		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					kabupaten/kota pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota						
				a Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	kegiatan	12	14	116,67		

2) **Permasalahan**

a) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap memiliki target pada Tahun 2024 yaitu 79.48% dan realisasinya masih dibawah target yaitu 73.48% hal ini disebabkan karena jumlah perhitungan jalan rusak bertambah pada Triwulan IV yang disebabkan oleh bencana alam dan adanya kendaraan ODOL (*Over Dimension/Overloading*), serta adanya penambahan panjang ruas jalan dari 960.358 km menjadi 1.017,15 km dan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran pada Renstra.

b) Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik memiliki target pada tahun 2024 yaitu 82,5% dan realisasi baru mencapai 78,75% atau belum memenuhi target, hal ini disebabkan karena adanya kejadian bencana sehingga menyebabkan beberapa titik jaringan irigasi mengalami longsor dan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra.

c) Persentase drainase dalam kondisi baik memiliki target 18,01% pada tahun 2024, sedangkan realisasi 16,21% atau dengan capaian 90,01% hal tersebut disebabkan karena adanya kejadian bencana sehingga menyebabkan beberapa titik jaringan drainase mengalami longsor dan kebocoran drainase serta anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra.

d) Persentase pelayanan air minum sudah memenuhi target di tahun 2024 yaitu terealisasi 24,76% dari target yang ditetapkan oleh RPJMD sebesar 22,5%. angka tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100% rumah tangga telah memiliki akses air minum sampai dengan Tahun 2024 dimana realisasi SPM mencapai 100%.

e) Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik pada tahun 2024 dengan capaian 100,04% atau realisasi 82,49% dari target 82,15%. Hal tersebut sudah memenuhi target RPJMD pada tahun tersebut.

f) Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani dengan target 15% terealisasi 100%. Indikator tersebut mengampu 2 (dua) sub yaitu perencanaan bidang Cipta Karya baik SPAM, gedung dan bantuan semen ke tingkat desa/kelurahan.

g) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sudah memenuhi target RPJMD tahun 2024 yaitu 91,35% dan realisasi tahun 2024 yaitu 91,35%.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

b) Mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharan jaringan irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

c) Mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

d) Pelaksanaan verifikasi bantuan hibah semen yang lebih akurat agar tepat sasaran.

e) Pengadaan sumber air minum menggunakan skema kegiatan SPAM antar desa sangat membantu masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan air minum.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan dimana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 97,29%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Pelaksanaan program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. Adapun Indikator Kinerja Urusan sebagai berikut:

Tabel III.8 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	73,96	79,48	73,48	92,45	85,18
2. Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	76,31	82,50	78,75	95,45	87,5
3. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	16,19	18,01	16,21	90,01	20,04
4. Persentase pelayanan air bersih	%	24,14	22,50	24,76	110,04	25
5. Persentase Bangunan Gedung pemerintah	%	80,81	83,16	82,49	99,19	83,84

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
dalam Kondisi Baik						
6. Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	%	13,91	15	15	100	15
7. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	91,25	91,35	91,35	100	91,55

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen. 2024

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 7 (tujuh) indikator Kinerja Urusan Perangkat Daerah dengan penjelasan pencapaian target dan realisasi sebagai berikut:

a) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah 1.017.150 kilometer. Dimana proporsi jalan Kabupaten Kebumen yang rusak berat masih terdapat 119.820 Km atau sebesar 11,78% yang lokasinya tersebar di 19 wilayah yaitu kecamatan Buayan, Gombong, Adimulyo, Ayah, Puring, Kuwarasan, Karanggayam, Karangsambung, Sadang, Alian, Pejagoan, Petanahan, Klirong, Kutowinangun, Prembun, Ambal, Bonorowo, Mirit dan Padureso. Adapun data panjang dan proporsi jalan berdasarkan kondisi tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel III.9 Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024

NO.	URAIAN	Kondisi awal	Panjang Jalan (km)	Panjang Jalan (Km)
		2021	2023	2024
1	Kondisi Baik	365.191	470.620	411.814
2	Kondisi Sedang	337.400	281.665	335.543
3	Kondisi Rusak Ringan	124.364	145.045	166.827
4	Kondisi Rusak Berat	133.403	119.820	102.966
5	Jalan secara keseluruhan	960.358	1.017.150	1.017.150
Proporsi Kondisi Baik (%)		38.027	46.27	40.49
Proporsi Kondisi Sedang (%)		35.133	27.69	32.99

Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	12.950	14.26	16.40
Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	13.891	11.78	10.12

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen. 2024

Dengan bertambahnya panjang jalan kewenangan kabupaten pada tahun 2024 menyebabkan beban kerja yang semakin meningkat. Adapun realisasi kinerja DPUPR terkait capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2024 adalah sepanjang 747.357 kilometer atau mencapai sebesar 73,48%. Kondisi ini mengalami penurunan sepanjang 4.928 km dari tahun 2023. Selain adanya penambahan panjang jalan kewenangan kabupaten, hal tersebut juga dikarenakan ketersediaan anggaran yang belum memenuhi renstra.

b) Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik

Panjang saluran irigasi sekunder yang menjadi kewenangan kabupaten Kebumen yaitu 186.105 m dengan luas sasaran daerah irigasi 12.260 Ha. Adapun data panjang saluran irigasi sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel III.10 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen

NO.	URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023	2024
1	Irigasi Teknis Sekunder	M	184.418	186.105	186.105	186.105
2	Irigasi Kondisi Baik	%	75,17	76,31	78,71	78,75
3	Irigasi Kondisi Sedang	%	1,55	1,51	1,44	1,4
4	Irigasi Kondisi Rusak Ringan	%	1,23	1,23	1,17	1,17
5	Irigasi Kondisi Rusak Berat	%	22,04	20,95	18,67	18,67

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen. 2024

Adapun realisasi kinerja DPUPR terkait capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2024 yaitu 78,75% dengan target RPJMD pada tahun 2024 sebesar 82,5%. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu 78,71%. Sedangkan untuk kinerja DPUPR dalam pemenuhan target RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 87,50%. Untuk mencapai target yang telah ditentukan dibutuhkan kinerja yang optimal dari semua pihak serta dukungan anggaran dari pemerintah. Adapun kendala tidak tercapainya target disebabkan adanya beberapa titik bendungan dan saluran irigasi mengalami kerusakan dikarenakan tingginya curah hujan serta adanya refocusing penganggaran pada tahun 2024.

c) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Panjang drainase keseluruhan sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 yaitu 1.032.85 km. Panjang tersebut meliputi panjang drainase jalan kewenangan kabupaten sesuai SK jalan, drainase sekunder, drainase perkotaan

dan panjang drainase kewenangan kabupaten sesuai SK Bupati Kebumen Nomor 611/216/Kep./2016 tentang Daerah Irigasi Dan Saluran Drainase Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Realisasi drainase dalam kondisi baik 16,21% atau memiliki capaian 90,01% dari target pada tahun 2024, hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang hanya 16,19%. Beberapa penyebab tidak tercapainya target yaitu adanya bencana mengakibatkan drainase mengalami kerusakan karena daya tampung yang berlebihan, penambahan ruas jalan menjadikan panjang drainase juga bertambah menjadi 1.089,42 km dan adanya refocusing anggaran pada tahun 2023.

d) Persentase pelayanan air bersih

Pelayanan air bersih di kabupaten Kebumen oleh PDAM SPAM Perdesaan dan Sumber Air lainnya. Namun dalam penghitungan capaian pelayanan air bersih untuk rumah tangga hanya memperhitungkan saluran perpipaan, dimana capaian tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.11 Capaian Pelayanan Air Bersih Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

INDIKATOR PROGRAM	Total Jumlah Penduduk Seluruhnya	Sambungan s/d Tahun 2024	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI		JUMLAH = (4)+(5)	CAPAIAN= (6): (2)x100%
			PDAM	SPAM PERDESAAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Pelayanan air Bersih Perpipaan Tahun 2024	1.441.425	89.210	142.736	214.104	356.840	24,76%

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen. 2024

e) Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik

Menurut data RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kebumen data gedung pemerintah Kabupaten Kebumen sebanyak 297 unit. Pada tahun 2024 memiliki target 244 unit atau sekitar 82,15% dari keseluruhan, dengan realisasi pada tahun 2024 hanya 82,49% dengan capaian 100,42%.

f) Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertangani

Persentase bangunan dan lingkunganya memiliki rumus perhitungan yaitu jumlah bangunan dan lingkungan yang ditangani dengan DED/jumlah bangunan dan lingkungan yang membutuhkan DED x 100%. Capaian dari indikator tersebut yaitu 100% sesuai dengan target dan indikator tersebut juga

mengakomodir usulan aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran DPRD tentang hibah semen.

g) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Realisasi pada tahun 2024 memenuhi target yaitu 91,35% atau dengan capaian 100%. Tetapi kondisi ini belum menggambarkan kondisi riil 2021 dikarenakan untuk update kesesuaian penataan ruang masih menunggu update data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

1) **Capaian Kinerja Program. Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Pengembangan Perumahan
b) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
c) Program Kawasan Permukiman
d) Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.12 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi	Dokumen	1	1	100		
				a Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan dan Identifikasi Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi di Kabupaten Kebumen:	Unit	10	10	100		
					Desa Plumbon Kec. Karangsambung sebanyak 3 Unit (Relokasi).						
					Desa Sampang. Kec Sempor sebanyak 1 Unit (Relokasi).						
					Desa Wonokromo Kec.Alian sebanyak 4 Unit (Relokasi).						
					Desa Glontor Kec. Karanggayam sebanyak 1 Unit (Relokasi).						
					Desa Tirtomoyo Kec. Poncowarno sebanyak 1 unit (Rehabilitasi).						
				B PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	%	21,12	48,63	230,27		
				1 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Ha	8	81,02	953,18		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							
				a Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Permukiman Kumuh yang ditangani	Ha	8	81,02	953,18		
				b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	12	12	100		
				C PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	%	76,32	64,56	84,59	Penerima bantuan ada yang meninggal dunia dan beberapa penerima didanai dari sumber dana lain.	Melakukan verifikasi data lapangan calon penerima bantuan RTLH lebih awal, sehingga apabila terjadi penerima meninggal dunia atau didanai sumber dana lain dapat dilakukan revisi SK Bupati lebih awal.
				1 Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni tertangani	unit	33	28	84,85	Penerima bantuan ada yang meninggal dunia dan beberapa penerima didanai	Melakukan verifikasi data lapangan calon penerima bantuan RTLH lebih awal, sehingga apabila

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dari sumber dana lain.	terjadi penerima meninggal dunia atau didanai sumber dana lain dapat dilakukan revisi SK Bupati lebih awal.
				a Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh (unit) (P2MKM 33 unit)	unit	33	28	84,85	Penerima bantuan ada yang meninggal dunia dan beberapa penerima didanai dari sumber dana lain.	Melakukan verifikasi data lapangan calon penerima bantuan RTLH lebih awal, sehingga apabila terjadi penerima meninggal dunia atau didanai sumber dana lain dapat dilakukan revisi SK Bupati lebih awal.
				b Sub Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Dokumen	1	1	100		
				D PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA	Persentase peningkatan akses air limbah aman	%	1,17	3,67	313,68		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
				1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik	Paket	27	30	107,41		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	15	18	120		
				b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	12	12	100		

2) **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a) Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani Tahun 2024 ditargetkan sebesar 76,32%. namun hanya terealisasi sebesar 64,56% atau dengan tingkat capaiannya adalah 84,59%. Target tahun 2024 sebanyak 33 unit terealisasi sebanyak 28 unit. Aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran sebanyak 5 unit RTLH yang tidak terlaksana disebabkan 1 penerima bantuan meninggal dunia, 3 penerima bantuan sudah direalisasikan dengan sumber dana lain, 1 penerima bantuan tidak siap swadaya.
b) Belum optimalnya sinkronisasi data di dalam penanganan kawasan kumuh. Terdapat 7 Indikator penyebab penanganan kumuh, dimana 7 indikator tersebut membutuhkan kolaborasi dan penanganan dari Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bertujuan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Kebumen. Secara garis besar permasalahan pada program tersebut yaitu Pendataan Kepemilikan Tangki Septik di Kabupaten Kebumen yang belum mencapai 100%. Dimana kondisi tangki septik yang dimiliki masyarakat Kabupaten Kebumen banyak yang belum memenuhi standar. Selain itu kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyedotan lumpur tinja juga masih rendah.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Untuk mengatasi permasalahan pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan mengidentifikasi dan memastikan pada saat survey awal terkait kesiapan swadaya penerima bantuan dan lahan aman dari bencana sehingga dalam pelaksanaan tidak mengundurkan diri serta dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan di lapangan.
b) Masih luasnya sisa kawasan kumuh pada akhir Tahun 2023 yaitu 309,7 Ha perlu kolaborasi penanganan Kumuh dari Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen untuk mengentaskan kawasan kumuh. Untuk mengatasi permasalahan pada Program Kawasan Permukiman tersebut, dilakukan optimalisasi peran Pokja PKP sebagai koordinator penanganan kumuh. Selain itu dilakukan pendataan kegiatan penanganan kumuh yang dilakukan mandiri oleh desa, sehingga pada tahun 2024 dari target penanganan Kumuh 8 Ha mampu tercapai 81,02 Ha pada akhir tahun 2024. Perhitungan penanganan kawasan kumuh tidak hanya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, tetapi juga yang dilakukan secara mandiri oleh desa dengan menggunakan anggaran desa. Dengan demikian capaian

penanganan kumuh yang dilakukan dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

c) Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan pengisian aplikasi pendataan kepemilikan tangki septik melalui aplikasi SIRUMAH (Sistem Informasi Rumah) dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala melalui penayangan iklan edukasi di Kebumen TV, Radio In FM dan sosial media lainnya.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Perumahan dan Permukiman dengan Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 182,13% sedangkan rata-rata capaian kegiatan adalah 269,08%.

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kawasan Permukiman diketahui capaian kinerja program sampai dengan Triwulan IV adalah 48,63% dari target 21,12% menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Analisis tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 230,27% atau kategori sangat tinggi. Capaian program dan kegiatan urusan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) diketahui capaian kinerja program sampai dengan Triwulan IV adalah 3,67% dari target 1,17% menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Analisis tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 313,68% atau kategori sangat tinggi.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel III.13 Indikator Kinerja Urusan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	58,70	48,72	71,16	140,05	40,21

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha (%)	%	16,70	21,12	48,63	230,27	31,46
Persentase rumah tidak layak huni tertangani	%	63,25	76,32	64,56	84,59	100

Sumber: Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Perhubungan. 2024

Data lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Kebumen berdasarkan SK Nomor 663/385 Tahun 2020 dan penanganannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.14 Data Lokasi Kawasan Kumuh dan Penanganan s/d tahun 2024

No	Uraian Luas	Penanganan (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Permukiman Kumuh	343,27	343,27	343,27	343,27	343,27
2	Luas Permukiman Kumuh yang tertangani	31,43	0	0,5	2,16	81,02
3	Luas Permukiman Kumuh yang belum tertangani	311,84	311,84	311,34	309,18	228,16

Sumber: Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Perhubungan. 2024

Luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/385/2020 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 343,27 Ha meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kec. Sempor (1 desa), Kec. Gombong (2 kelurahan dan 3 desa), Kec. Karanganyar (4 kelurahan dan 6 desa), Kec. Sruweng (1 desa), Kec. Pejagoan (1 desa), Kec. Kebumen (4 kelurahan dan 13 desa), Kec. Kutowinangun (4 desa) dan Kec. Prembun (4 desa).

Dari total luasan kawasan kumuh seluas 343,27 Ha area yang telah tertangani dari tahun 2020 hingga 2024 adalah 115,11 Ha. Dengan demikian sisa luas kawasan kumuh yang perlu ditangani pada akhir tahun 2024 seharusnya 228,16 Ha.

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh

tergambar kemiskinan masyarakat. Adapun sebaliknya rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan luas bangunan serta kesehatan penghuni.

Berikut data perkembangan cakupan rumah layak huni dan rumah tidak layak huni huni Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024:

Tabel III.15 Capaian Penanganan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah	306.885	354.807	354.807	354.807	354.807
2	Jumlah rumah layak huni	306.285	328.465	329.912	331.359	332.347
3	Jumlah rumah tidak layak huni	600	26.342	24.895	23.266	22.460
4	Persentase rumah layak huni	99,80	92,98	92,98	93,4	93,7
5	Persentase rumah tidak layak huni	0,20	7,42	7,02	6,6	6,3

Sumber: Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Perhubungan.2024

Berdasarkan database Perumahan Kabupaten Kebumen yang disusun tahun 2014 sebagai data dasar penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kebumen, jumlah rumah di Kabupaten Kebumen sebanyak 306.885 unit dengan jumlah RTLH sebanyak 26.860 unit. Sampai dengan akhir tahun 2020 dari RTLH sejumlah 26.860 unit sudah tertangani sejumlah 26.260 unit sehingga masih tersisa 600 unit yang akan ditangani pada tahun 2021 sehingga persentase rumah layak huni sampai dengan Tahun 2020 adalah 99,80%.

Pada Tahun 2020 dilakukan updating data RTLH dengan hasil jumlah rumah sebanyak 354.807 unit dengan jumlah RTLH 39.680 unit namun setelah dilakukan cross cek dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 terdapat 28.035 unit RTLH yang masuk dalam data DTKS, sehingga persentase rumah layak huni di akhir Tahun 2020 adalah 99,80%. Penanganan RTLH Tahun 2021 adalah 2.293 unit terdiri dari 600 unit sisa database 2014 dan 1.693 unit data Tahun 2020, sehingga sisa jumlah RTLH menjadi 26.342 unit dan persentase rumah layak huni menjadi 92,58%. Kemudian penanganan tahun 2022 jumlah 1.447 unit sehingga sisa jumlah RTLH menjadi 24.895 unit dan persentase rumah layak huni adalah 92,98%. Pada Tahun 2023 menangani 1.629 unit sehingga presentase menjadi 93,4%. Selanjutnya pada tahun 2024 menangani 806 unit rumah tidak layak huni sehingga presentase rumah layak huni menjadi 93,7%.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penanggulangan Bencana;
b) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program prioritas di atas terbagi di dua perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.16 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian. industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda; Persentase terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan; persentase terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal;	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	kegiatan	4	4	100		
			.	a Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	Jumlah bulan terbayarnya Honorarium PTT dan THL beserta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan							
					Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Patroli Penertiban dan Pengawalan Bupati	Kegiatan	250	250	100		
				b Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas meningkat keterampilan	orang	130	130	100		
					Jumlah bulan pengamanan pelaksanaan pengamanan pemilu oleh Satpol PP, Satlinmas, TNI, Polri.	bulan	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Anggota satlinmas meninggal yang mendapat santunan	orang	37	36	97,3	1 orang ahli waris pindah alamat keluar Kab Kebumen	Diusulkan kembali di tahun 2025
					Jumlah SDM satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas yang ditingkatkan	orang	104	104	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pengamanan hari hari besar keagamaan dan tahun baru	kegiatan	3	3	100		
				2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	kegiatan	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	24	24	100		
					Jumlah orang memperoleh sosialisasi/penyuluhan/pembinaan Perda dan atau Perkada untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha yang rawan melanggar perda dan/atau perkada	orang	480	480	100		
				b Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda. dan/atau Perbup untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha	kali	36	36	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah jenis Perda yang diprioritaskan untuk ditegakkan	jenis	20	20	100		
				3 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	kegiatan	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang terbina dan terberdayakan	orang	10	10	100		
				B PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kesiapsiagaan Damkar; Persentase Respon time pemadaman kebakaran ; kesiapsiagaan SDM Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran ;	%	73,08	73,08	100		
				1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan THL Damkar yang terbayar	Bulan	12	12	100		
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam kabupaten/kota	laporan	12	12	100		
				b. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah bulan kegiatan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran	bulan	12	12	100		
				1 Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase terlaksananya kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah kecamatan terdata sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Kec.	26	26	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	%	100	100	100		
				a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan	Jumlah anggota masyarakat dibina dalam penanggulangan kebakaran	orang	180	175	97,2	Lima orang peserta tidak hadir	Disertakan pada pelatihan di tahun selanjutnya

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat							
		BPBD	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian. industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	C PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman	Orang	9.000	9.000	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun						
				2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan/Desa	13	13	100		
				b Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	90	90	100		
				c Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	400	400	100		
				e Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	Dokumen	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara. Keluarga. maupun Petugas sesuai	Unit	280	280	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kesiapsiagaan terhadap Bencana	dengan jenis ancaman di kawasan tempat tinggalnya						
				g Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	200	200	100		
				h Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasional (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	12	12	100		
				3 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan. ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	100	100	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik	Orang	1.000	1.000	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
				4 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	4	4	100		
					Jumlah Sekolah Aman bencana yang dilaksanakan	Sekolah	4	4	100		
				c Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Yang Tersedia	Dokumen	1	1	100		
				d Koordinasi penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dilegalkan	Kegiatan	2	2	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi urusan Trantibumlinmas saat ini adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah dan disisi lain penerapan sanksi terhadap pelanggar Perda/Perkada belum memberikan efek jera sehingga pelanggar masih melakukan hal yang sama. selain itu masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Satpol PP ataupun Dinas terkait berpengaruh pada kinerja penindakan yang kurang maksimal.

Permasalahan pada SPM Bidang Bencana. data by name by addres pada data penduduk yang berada pada wilayah rawan bencana belum dapat menampilkan secara keseluruhan nomor NIK dan nomor KK.

Capaian SPM bidang Trantibumlinmas adalah 100% karena pelaksanaan Operasi Trantibum dan Operasi Penegakan Perda yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selalu mengedepankan humanisme, sehingga tidak mengakibatkan dampak negatif/yang merugikan masyarakat/melanggar peraturan.

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Kebakaran, Kabupaten Kebumen telah memenuhi SPM terutama respon time kebakaran selama 15 menit khususnya untuk wilayah Gombong, Kebumen dan Prembun. Namun demikian, terdapat wilayah lain yang belum terjangkau untuk memenuhi response time yaitu wilayah Kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Karanggayam, Karangsambung, Sadang dan Padureso dikarenakan belum adanya pos Damkar di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan penambahan pos di wilayah tersebut untuk memenuhi SPM response time kebakaran 15 menit.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya mengatasi permasalahan yang muncul adalah dengan meningkatkan lagi penegakan dan penindakan kepada pelanggar Perda/Perkada dengan bersinergi dengan OPD terkait dan memberi solusi terhadap pelanggar trantibum tersebut sehingga tidak mengulangi pelanggaran lagi. Mengusulkan diadakannya diklat PPNS bagi Satpol PP dan Dinas terkait, sehingga penegakan Perda/Perkada dapat lebih maksimal. Sedangkan upaya mencapai waktu tanggap 15 menit di wilayah Kabupaten Kebumen adalah dengan membentuk dan membina Linmas desa sebagai Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), yang diharapkan sebagai garda terdepan dan orang pertama yang mengetahui adanya kebakaran dan diharapkan dapat mengambil tindakan sesuai kemampuannya sebelum tim pemadam tiba di lokasi. Hal ini diharapkan dapat mencegah ataupun mempercepat pemadaman dalam suatu kejadian kebakaran.

Upaya saat ini yang telah dilaksanakan adalah adanya kerjasama/MoU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terkait dengan data kependudukan.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan, dimana urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Kebumen diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Demikian juga untuk rata-rata capaian kegiatan juga telah mencapai 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan indikator kinerja tercapai 100% sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.17 Indikator Kinerja Urusan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen. 2024

Adapun Indikator Kinerja Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel III.18 Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kebumen Tahun 2023-2024

NO	URAIAN KINERJA	CAPAIAN TAHUN	
		2023	2024
1	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	12.442	12.442

2	Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	87.20	87.20
3	Jumlah Pelanggaran Perda	16.796	35.969

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen. 2024

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah Persentase Penegakan Perda dengan target tiap tahun adalah 100% penegakan Perda tertangani. Kinerja tahun 2024 dengan hasil 20 jenis Perda yang ditegakkan dengan rincian 5 Penegakan Perda ditemukan Pelanggaranan sedangkan 15 Penegakan Perda Lainnya tidak ditemukan Pelanggaran dengan rincian Pelanggaran Perda sebagaimana Tabel di bawah ini. Pelanggaran Perda tersebut telah tertangani secara keseluruhan atau dengan capaian 100%.

Tabel III.19 Data Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	JENIS PERDA	JENIS PELANGGARAN (PASAL)	NON YUSTISI	YUSTISI	KET
1.	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN	Pasal 2 s.d 8 Perda Nomor 6 Tahun 2003	14 Toko/Tempat Usaha	-	Pengawasan Izin Usaha
2.	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA TANDA DAFTAR GUDANG	-	-	-	-
3.	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI. IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI. IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI	-	-	-	-
4.	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA. IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA MAKANAN. MINUMAN DAN IZIN	-	-	-	-

NO	JENIS PERDA	JENIS PELANGGARAN (PASAL)	NON YUSTISI	YUSTISI	KET
	PENGOBATAN TRADISIONAL				
5.	PERDA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN	-	-	-	-
6.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK RESTORAN	-	-	-	-
7.	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME	-	-	-	-
8.	PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR	-	-	-	-
9.	PERDA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	-
10.	PERDA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	-	-	-	-
11.	PERDA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	-	-	-	-
12.	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
13.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	-	-	-	-
14.	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG	-	-	-	-

NO	JENIS PERDA	JENIS PELANGGARAN (PASAL)	NON YUSTISI	YUSTISI	KET
	PEMILIHAN. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA				
15.	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	-	-	-	-
16.	PERDA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN	-	6 Tempat Hiburan	-	Pengawasan Izin Tempat Hiburan
17.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA	-	-	-	-
18.	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN	Pasal 5 Perda No 4 Tahun 2020	-	23 Orang	18 tempat 5.989 botol, 7 Toples, 5 plastik, 2 Galon dan 2.5 Jligen
		Pasal 7 Perda No 4 Tahun 2020	54 Orang		
		Pasal 11 Perda No 4 Tahun 2020	19.316 Reklame		
		Pasal 11 Perda No 4 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 47 Tahun 2018	15.555 APK		
		Pasal 16 Perda No 4 Tahun 2020	22 Gangguan Trantibum, 3 Parkir Liar		
		Pasal 21 Perda No 4 Tahun 2020	183 Orang		Anak Jalanan/Badut/Pengamen/PGOT/Pengemis
		Pasal 22 Perda No 4 Tahun 2020	-	56 Orang	4 tempat hotel/kost/hunian
		Pasal 23 Perda No 4 Tahun 2020	70 ODGJ		

NO	JENIS PERDA	JENIS PELANGGARAN (PASAL)	NON YUSTISI	YUSTISI	KET
		Pasal 4 Perda Nomor 4 Tahun 2020	13 Apotek	-	Pengawasan atas kepatuhan Perda dan Perbup
		Pasal-pasal pada Perda Nomor 4 Tahun 2020	480 orang	-	Sosialisasi Kepada Masyarakat di wilayah Kebumen dan Pelajar Sekolah
19.	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN	Pasal 9 Perda Nomor 4 Tahun 2022	14 Toko/Tempat Usaha	-	Pengawasan Operasional Tempat Usaha/Swalayan
20.	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGARAN PERIZINAN BERUSAHA	-	160 Pengusaha/Orang	-	Sosialisasi Perda kepada Pengusaha
Jumlah			35.890	79	

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen. 2024

Pelaksanaan kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

Tabel III.20 Indikator Kinerja Urusan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen. 2024

Pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa di Kabupaten Kebumen serta peningkatan kapasitas Destana yang telah dilaksanakan sudah sesuai target yang direncanakan namun masih mengalami permasalahan antara lain:

a) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Destana dimana pada saat pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengikuti pelaksanaan.

b) Keterbatasan anggaran sehingga program Desa Tangguh bencana hanya baru sebatas pelatihan tidak sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana.
c) Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas program Destana.

Solusi atau upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai berikut:

a) Meningkatkan program/kegiatan pelatihan destana yang telah dilakukan dengan menambah unsur-unsur perwakilan masyarakat serta komunikasi efektif dengan Pemerintah Desa.
b) Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggaran penanganan bencana dengan menyesuaikan kondisi kerawanan bencana pada masing masing Desa.
c) Peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap program Destana yang telah dilaksanakan.

6. Urusan Sosial

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Sosial dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

a) Program Rehabilitasi Sosial;
b) Program Pemberdayaan Sosial;
c) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
e) Program Penanganan Bencana; dan
f) Program Pengelolaan Tempat Makam Pahlawan

Adapun capaian kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.21 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Sosial	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	presentase peningkatan kemampuan SDM Kesos	%	71	80,12	112,85		
				1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Keg	3	3	100		
				a Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	78	97	124,36		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	Orang	26	22	84,62	- 3 orang mengundurkan diri - 1 orang purna bakti	Motivasi melalui camat agar warganya berkenan menjadi TKSK
				c Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Karang Taruna yang diberdayakan	Lembaga	3	3	100		
				d Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	sertifikat	2	2	100		
				B PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan	Orang	3	0	0	Tidak adanya laporan warga negara migran korban tindak kekerasan (bersifat penyediaan)	Melakukan koordinasi dengan *migran care*, TKSK, Tagana dan masyarakat
				a Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	Orang	3	0	0	Tidak adanya laporan warga negara migran korban tindak kekerasan (bersifat penyediaan)	Melakukan koordinasi dengan *migran care*, TKSK, Tagana dan masyarakat
				C PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	%	100	104,15	104,15		
				1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	orang	2.144	2.203	102,75		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengemis di Luar Panti Sosial							
				a Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan	Orang	1.534	1.534	100		
				b Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat bantu	Orang	100	100	100		
				c penyediaan sandang	jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan sandang	orang	270	270	100		
				d Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	140	140	100		
				e Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	Orang	50	98	196		
				f Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS terlantar (orang kehabisan bekal)	Orang	50	61	122		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang diberi bantuan						
				2 Rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	kegiatan	5	5	100		
				a Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	Orang	45	91	202,22		
				b Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial permakanan	Orang	140	140	100		
				c Penyediaan sandang	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sandang (Rumah Singgah Dosaraso)	Orang	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapat kan bantuan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (Rusi Dosaraso)	Orang	100	100	100		
				e Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	jumlah lembaga dan kemitraan disabilitas yang difasilitasi	lambaga	1	1	100		
				D PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL	cakupan perlindungan jaminan sosial	%	78,76	89,05	113,07		
				1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi bantuan sosial	kecamatan	26	26	100		
				a Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	keluarga	250.000	177.114	70,85	adanya penerima bantuan PKH yang telah di graduasi PKH oleh Kemensos	Selalu melakukan update data PKH
						kube keluarga	10	10	100		
				b. fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah penerima BLT DBHCHT	Jiwa	3.800	3.680	96,84	Adanya calon penerima BLT yang telah	Melakukan perubahan SK Bupati untuk

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										terdaftar dalam SK Bupati tetapi pindah domisili/keluar kota, meninggal dunia dan *resign*	menggantikan penerima BLT DBHCHT yang pindah domisili dengan calon penerima prioritas berikutnya
				E PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100		
				1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Keg	5	5	100		
				a Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	orang	500	500	100		
				b Penyediaan Sandang	jumlah orang korban bencana yang mendapatkan bantuan sandang	orang	115	115	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	1	1	100		
				d Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	92	92	100		
				e Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	orang	240	240	100		
				2 Penyelenggara an Pemberda- yaan Masyara- kat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	Keg	2	2	100		
				a Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah kampung siaga bencana yang difasilitasi	KSB	6	6	100		
				b Koordinasi. Sosialisasi dan	jumlah taruna siaga bencana	orang	60	60	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	yang diberdayakan						
				F PROGRAM PENGELOLA- AN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	presentase TMP yang dikelola	%	100	100	100		
				1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang direhab	Unit TMP	1	1	100		
				b Pengamanan TMPN Kabupaten/Kota	Jumlah orang pengaman TMP	Orang	1	1	100		

2) **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Sosial adalah:

a) Sasaran penerima manfaat belum masuk basic data kemiskinan.
b) Rumah singgah untuk penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang terlantar (PGOT) dan ODGJ terlantar belum sesuai standar lembaga LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial).
c) Jumlah persediaan makanan belum mencukupi jumlah korban bencana yang memerlukan bantuan, dikarenakan kejadian bencana tidak dapat di prediksi.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas selama tahun 2024 antara lain:

a) Basic data kemiskinan masih dalam proses validasi untuk ditetapkan.
b) Secara bertahap memenuhi standar Lembaga Kesejahteraan Sosial baik sarana, prasarana dan SDM.
c) Koordinasi dengan Kemensos dan Dinsos Provinsi.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Rata-rata capaian program urusan sosial adalah 105,01%. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 87,84%. Salah satu penyebab belum optimalnya capaian indikator kegiatan karena tidak adanya laporan migran korban tindak kekerasan.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Capaian kinerja urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel III.22 Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100	100	100
2	Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM Sosial	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Kebumen. 2024

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada indikator persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan capaian kinerja pada indikator kinerja persentase capaian SPM Sosial sebesar 100% dengan kriteria penilaian Baik.

Dari hasil penilaian sendiri/Self assessment atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2024 menunjukan rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran yang telah ditetapkan adalah 100% (baik).

Pelaksanaan urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk Persentase capaian SPM Sosial tahun 2024 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun hambatan dalam penanganan PPKS tersebut antara lain berupa tingginya angka PPKS dan adanya calon penerima manfaat yang meninggal, serta kurangnya dukungan lingkungan keluarga.

Adapun rincian capaian SPM Sosial dengan formulasi pengukuran persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sesuai standar ditambah persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota sesuai standar telah mencapai 100% untuk semua indikator SPM urusan Sosial sebagaimana berikut:

Tabel III.23 Persentase capaian SPM Sosial tahun 2024

NO	URAIAN	Jumlah yang dilayani	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti social	639	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti socia	361	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	1.254	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	126	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	947	100%

Sumber: SPM Bangda. 2024

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penempatan Tenaga Kerja;
b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
c) Program Hubungan Industrial.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.24 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai"A"	%	100	96,42	96.42	Karena tidak semua kompetensi, dari 21 paket hanya 20 paket yang mendapat paket UJK dari BPVP Surakarta	Membuat usulan tambahan kuota UJK
				1 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetens	Jumlah Paket Pelatihan berdasar-kan unit kompetensi	paket	10	10	100		
				a Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah orang pencari kerja yang mengikuti pelatihan	orang	189	264	139,68		
				b Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan	Jumlah paket kerjasama dengan LPKS	lembaga	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja							
				2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	orang	50	50	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah instruktur LPKS yang terbina A	orang	50	50	100		
				B PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja terdaftar	%	28,50	26,02	91,3	Jumlah pencari kerja lebih banyak dari tahun sebelumnya, sementara jumlah penempatan kerja berkurang karena pengurangan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri (Malaysia)	Menambah informasi lowongan kerja, konsultasi karir bergerak (PATRIOT)
				1 Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Tenaga Kerja yang terserap	orang	2.567	3.745	145,89	1 Penambahan tenaga kerja terserap setelah pelatihan	
										2 Animo bekerja ke luar negeri bertambah	
				a Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja Jumlah Kegiatan Pelayanan	Jumlah pencari kerja yang terlayani melalui mekanisme antar kerja	orang	14.000	13.650	97,5	1 Pembuatan kartu kuning melalui aplikasi E-Makaryo milik provinsi, sehingga tidak tercatat di Dinas	1 Permohonan data ke Disnaker Provinsi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Tenaga Kerja Kebumen	
										2 Setelah lulus SMA/SMK tidak membuat kartu AK-1 (kartu kuning) 3 Banyak perusahaan sudah tidak lagi mensyaratkan kartu AK-1 untuk melamar	2 Layanan PATRIOT (Pelayanan AK1, Karier, Info loker terpadu) untuk mempermudah mencari informasi loker
				b Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah orang Terserapnya tenaga kerja dari masyarakat setengah menganggur dari keluarga	Jumlah orang terserapnya tenaga kerja dari masyarakat setengah menganggur dari keluarga miskin dan di PH	Orang	30	30	100		
				2 Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI atau PMI yang terlindungi	orang	2.130	1.696	79,62	Berkurangnya Calon Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri karena ada perusahaan negara penempatan (Malaysia) yang tutup	Diarahkan untuk bekerja ke negara lain sektor formal
				a Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah calon PMI atau PMI yang terlindungi	orang	180	180	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)							
				b Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah orang calon PMI yang mengurus paspor	Orang	1.800	1.496	83,11	Berkurangnya Calon Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri karena ada perusahaan negara penempatan (Malaysia) yang tutup	Diarahkan untuk bekerja ke negara lain sektor formal
				c Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Orang	50	52	104		
				C PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian	%	100	130	130		
				1 Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang terselesaikan	Kasus	10	13	130		
				a Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak	Jumlah kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial	Kegiatan	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pada kepentingan di 1(satu)daerah Kabupaten/Kota							

2) **Permasalahan**

Dalam pelaksanaan urusan Tenaga Kerja dijumpai permasalahan sebagai berikut:

a) Kondisi pencari Kerja setiap tahun rata-rata di atas 11.000 orang, sementara jumlah lowongan pekerjaan tidak banyak sehingga disparitas antara jumlah lowongan kerja yang harus disediakan dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja akan menyebabkan banyak pencari tidak mendapatkan pekerjaan.
b) Masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebanding jumlah pertumbuhan angkatan kerja serta rendahnya kompetensi tenaga kerja.
c) Minimnya lapangan kerja sampai dengan saat ini tidak ada industri besar di Kabupaten Kebumen yang mampu menampung ribuan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen. Jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan.
d) Era revolusi industri modern berdampak positif dan negatif kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan. Era tersebut memang memunculkan jenis jabatan/pekerjaan baru namun juga menghilangkan jenis/pekerjaan lama yang sudah ada. Teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap proses produksi di perusahaan sehingga menyebabkan pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia menjadi dilakukan secara komputerisasi. Oleh karena itu pencari kerja juga harus respon terhadap perkembangan zaman.
e) Rendahnya minat bekerja di daerah sendiri dikarenakan UMK rendah.

3) **Upaya Mengatasi Masalah**

Upaya yang sudah dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja antara lain:

a) Meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kebumen dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi. Terdapat kebijakan yang mendorong iklim investasi sehingga menarik investor ke Kebumen sehingga banyak tenaga kerja yang diserap.
b) Jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi dan potensi angkatan kerja yang cukup tinggi. Pemkab melakukan sinergi dengan perguruan tinggi dan sekolah dalam upaya mendorong transformasi/paradigma dalam era sekarang dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang ketenagakerjaan melalui rakor dengan kepala sekolah SMA/SMK/MA yang nantinya diimplementasikan dalam kurikulum yang bisa menyediakan kebutuhan tenaga kerja.

c) Memaksimalkan Fungsi Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK/SMA/MA serta *Career Development Center* (CDC) yang ada di Perguruan Tinggi agar berupaya agar alumni dapat bekerja.
d) Intervensi pencari kerja dengan kegiatan *mini Job Fair, Job Fair*, serta *Job Canvassing* (mencari lowongan kerja dan memasarkan tenaga kerja) kepada perusahaan serta layanan karir bergerak.
e) Fasilitasi rekrut tenaga kerja oleh perusahaan di Dinas Tenaga Kerja.
f) Monitoring penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk mengetahui kesesuaian pekerjaan yang dijalani dengan perjanjian kerja serta kondisi dan kelayakan pekerja di perusahaan tempat bekerja.
g) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas di seluruh Indonesia dan Balai Latihan Kerja di Provinsi dan Kabupaten.
h) Tahun 2024 Pelatihan di BBPVP Semarang sebanyak 8 orang.
i) Tahun 2024 Pelatihan di BBPVP BEKASI sebanyak 5 orang.
j) Memaksimalkan website dan media sosial (facebook. instagram. twitter dan youtube) sebagai media informasi lowongan kerja.
k) Dinas Tenaga Kerja dalam menginformasikan tentang kegiatan Dinas dan layanan kerja secara update melalui Web Bursakerja.kebumen.go.id.
l) Inovasi dalam Pelayanan Antar Kerja dengan PATRIOT (Pelayanan AK-1,Karier, Pelatihan dengan info loker ke wilayah).
m) Inovasi Si PEMIKAT (Sinergi Perlindungan PMI Keluarga dan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Stakeholder dalam bekerja keluar negeri.
n) Inovasi Gayatri (Gerbang Layanan Terpadu PMI LTSA) memudahkan akses layanan ke luar negeri melalui layanan terpadu satu atap.
o) Inovasi Kalih Pitri K2P3-Klinik Konseling Penyelesaian Permasalahan Perusahaan dengan memanfaatkan website Disnaker Kabupaten Kebumen.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Tenaga kerja diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 105,91%. Adapun rata-rata capaian kegiatan adalah 111,10%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Hasil pelaksanaan program urusan tenaga kerja adalah capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja. Untuk mengetahui jumlah peningkatan keterserapan tenaga kerja dihitung dengan rumus% (persentase) jumlah penempatan tenaga kerja/jumlah pencari kerja yang terdata ditambah dengan% (persentase) jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan,kemudian dibagi 2, atau lebih jelasnya sebagai berikut:

$$\text{Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja} = \frac{\text{\% jumlah penempatan tenaga kerja/jumlah pencari kerja yang terdata} + \text{\% jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan}}{2}$$

Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja tahun 2024 sebesar 37,56%. Capaian tersebut berdasarkan persentase jumlah penempatan tenaga kerja/jumlah pencari kerja yang terdata sebesar 26,02 ditambah Persentase jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan 49,10% dibagi 2. Adapun rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.25 Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024

NO	URAIAN	JUMLAH	
		2023	2024
1	Pencaker	12.367	13.650
2	penempatan pencaker	4,355	3,553
3	presentase penempatan	35,21	26,02
4	Pelatihan	448	600
5	penempatan pelatihan	175	192
6	presentase penempatan pelatihan	32,11	49,10

Sumber: Disnaker Kabupaten Kebumen. 2024

Pada tahun 2024 Jumlah pengangguran mencapai 5,07%. Angka ini diperoleh dari persentase jumlah angkatan kerja tahun 2024 sejumlah 855.785 orang dibagi dengan jumlah Angkatan Kerja Yang Tidak Memperoleh Kesempatan Kerja sejumlah 43.406 orang.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalu 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
b) Program Perlindungan Perempuan;
c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
f) Program Perlindungan Khusus Anak.

Adapun capaian kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.26 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pemberda yaan Perempuan dan Perlin-dungan Anak	Dinas Sosial. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintahan kewenangan kabupaten/kota	%	16.99	16.99	100		
				1 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	kegiatan	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender	prangkat daerah	52	52	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota						
				2 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	30	30	100		
				B PROGRAM PERLINDUNG-AN PEREMPUAN	cakupan program perlindungan perempuan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100		
				2 Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang pendapatkan Layanan Pengaduan	orang	60	104	173		
				b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	layanan	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kewenangan Kabupaten/Kota						
				C PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	%	16,99	16,99	100		
				1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100		
				D PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Daerah Kabupaten/Kota						
				a Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	1	1	100		
				E PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	kategori kabupaten layak anak (KLA)	madya	madya	madya	100		
				1 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintan dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	kegiatan	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerint, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha	organisasi	52	52	100		
				b Sub keg koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				kewenangan kabupaten/kota	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						
				2 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	kegiatan	3	3	100		
				3 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100		
				4 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan	dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						
				F PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100		
				1 Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota	Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	kegiatan	1	1	100		
				a Sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	orang	50	68	136		

2) **Permasalahan**

Adapun permasalahan yang ada pada Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a) Angka kekerasan anak melebihi target
b) Keterlibatan perempuan di parlemen dan pengambil keputusan di birokrasi masih di bawah angka nasional dan provinsi
c) Belum semua sekolah di semua tingkatan menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA)
d) Belum semua desa menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
e) Berdasarkan evaluasi KLA masih perlu adanya fasilitas bermain ramah anak yang aman. nyaman dan tidak berbayar.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Pendampingan semua aduan kekerasan anak
b) Sosialisasi dan advokasi tentang perempuan melek politik
c) Memberikan edukasi kepada sekolah di semua tingkatan agar menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA)
d) Memberikan edukasi kepada Desa agar mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
e) Koordinasi dengan dinas terkait untuk membuat fasilitas bermain ramah anak yang aman, nyaman dan tidak berbayar

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100%. Adapun rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Realisasi indikator sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Kriteria penilaian realisasi kinerja adalah baik.

Berikut adalah daftar korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor dan tertangani:

Tabel III.27 Rekapitulasi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Tahun 2024

No	Target Korban kekerasan yang melapor	Realisasi Korban kekerasan yang tertangani	Capaian (%)

	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan
1	50	60	68	109	136	181,66

Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen. 2024

3. Urusan Pangan

1) **Capaian Kinerja Program. Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Pangan dilaksanakan melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
b) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
c) Program Penanganan Kerawanan Pangan
d) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Capaian indikator kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.28 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Persentase Peningkatan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	4	4,50	112,5		
				A PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	%	21,74	20,22	93,01	Tahun 2024 tidak ada pengadaan infrastruktur	
				1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	%	21,74	20,22	93,01	Tahun 2024 tidak ada pengadaan infrastruktur	
				a Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Infrastruktur Logistik	rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik						
				B PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	%	47,94	48,37	100,90		
				1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	%	21,75	21,75	100		
				a Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	27	27	100		
				b Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	4	4	100		
				2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan yang dikelola	%	10	14,16	141,60		
				a Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	26	26	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal	%	74,13	75	101,17		
				a Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	100		
				C PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	%	59,54	58,78	98,72	Adanya keterbatasan anggaran pemberian bantuan kepada desa rawan pangan. Adapun anggaran yang tersedia untuk pembinaan desa rawan pangan	Dibutuhkan dukungan anggaran
				1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	Dokumen	1	1	100		
				a Penyusunan. Pemutakhiran dan	Peta dan Analisis Ketahanan dan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan						
				2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya	Desa	9	14	155,56		
				a Pelaksanaan Pengadaan. Pengelolaan. dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan. Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	100		
				D PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	91,76	92,75	101,08		
				1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan	Dokumen	1	1	100		
				a Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	4	28	700		
				b Koordinasi dan sinkronisasi keamanan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan mutu pangan segar asal tumbuhan	sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						

2) **Permasalahan**

Permasalahan-permasalah yang terjadi dalam upaya pencapaian capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan pangan Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

a) Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan oleh masyarakat.
b) Masih minimnya lumbung pangan di daerah.
c) Belum mantapnya Pengelolaan Cadangan Makanan Pemerintah.
d) Masih perlu updatenya peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan.
e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam konsumsi pangan B2SA.
f) Kurangnya keberlanjutan pelaksanaan pemanfaatan pekarangan
g) Masih tingginya makanan sisa/terbuang (*Food Waste).*
h) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dalam penjaminan keamanan pangan melalui registrasi PSAT PDUK.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya-upaya pemecahan masalah dan tindak lanjut yang terjadi dalam upaya pencapaian capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan pangan Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

a) Pembinaan pengelolaan dan keberlanjutan infrastruktur dan kemandirian pangan
b) Memaksimalkan pembangunan lumbung pangan.
c) Edukasi masyarakat melalui kampanye edukasi pemahaman tentang pentingnya cadangan makanan pribadi dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
d) Pembuatan peta rawan pangan yang berkelanjutan.
e) Edukasi tentang pentingnya konsumsi makanan yang B3SA kepada masyarakat.
f) Sosialisasi dan monitoring Pemanfaatan Lahan Pekarangan (P2L).
g) Kampanye edukasi tentang stop boros pangan guna mengurangi makanan sisa/terbuang (*Food Waste)*
h) Sosialisasi, Edukasi, Komunikasi kepada pelaku usaha untuk melaksanakan penjaminan keamanan pangan melalui registrasi PSAT PDUK.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan capaian indikator kinerja program, capaian indikator kinerja empat program rata-rata 98,43% dan capaian indikator kinerja tujuh kegiatan rata-rata 113,05%.

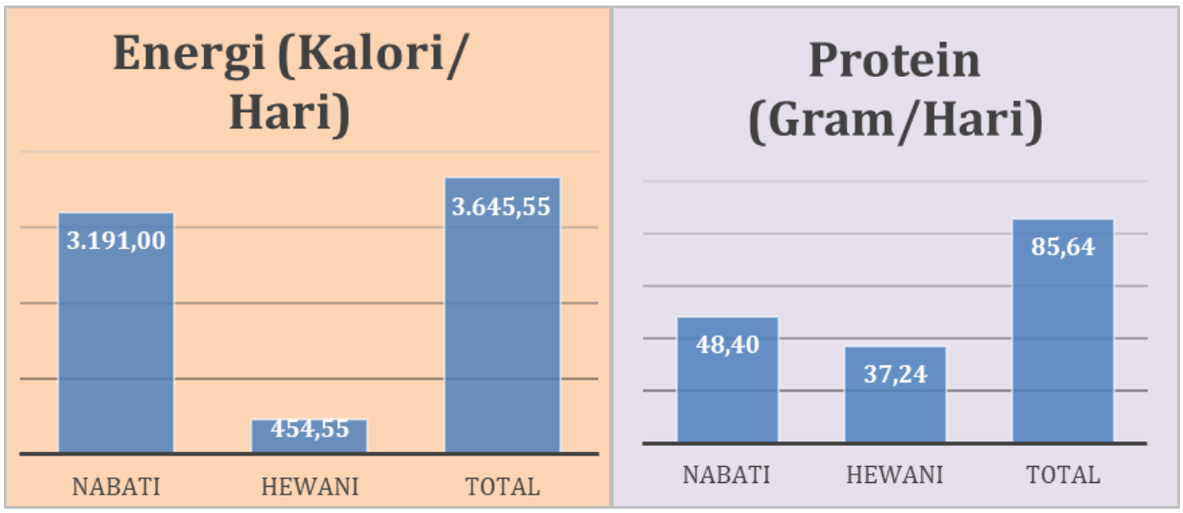
5) **Capaian Kinerja Urusan**

Keseluruhan program yang telah disampaikan telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan berkurangnya penduduk miskin dengan sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.29 Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	6,52	4	4,5	112,50	6

Indikator kinerja persentase Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan kategori sangat baik. Capaian indikator kinerja 4,50% diperoleh dengan perhitungan: (jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2024-jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2020)/jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2020 x 100%. Dimana hasil perhitungan tersebut yaitu: (3.731,19-3.570,55)/3.570,55 x 100% = 4,50%. Nilai ketersediaan energi pangan dan ketersediaan protein pangan berdasarkan sumber bahan makanan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 3.2. berikut ini.



Gambar III.1 Ketersediaan Energi dan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Dilihat dari gambar di atas di ketahui kontribusi ketersediaan energi pangan Tahun 2024 dari kelompok bahan pangan nabati sebesar 87,53% dan dari kelompok bahan pangan hewani 12,47%. Sedangkan kontribusi protein kelompok bahan pangan nabati sebesar 56,52% lebih tinggi dibandingkan ketersediaan protein kelompok bahan pangan dari hewani sebesar 43,48%.

4. Urusan Pertanahan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan pertanahan dilaksanakan melalui 1 (satu) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.30 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Lahan	Sengketa	12	12	100		
				a Inventarisasi Sengketa. Konflik. dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Lahan	Sengketa	12	15	125		

2) **Permasalahan**

Permasalahan urusan pertanahan adalah belum adanya laporan dari masyarakat terkait Sengketa Tanah Garapan.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dilaksanakan sosialisasi terkait inventarisasi sengketa tanah garapan dengan sasaran masing-masing kecamatan dan Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Program sengketa lahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersifat persediaan. Berdasarkan capaian indikator kinerja program, capaian indikator kinerja program rata-rata adalah 100% dan capaian indikator kinerja kegiatan adalah 100%. Hal tersebut belum memvisualkan keadaan nyata dikarenakan pada tahun 2024 tidak ada sengketa lahan yang masuk. Pada tahun 2024 kegiatan tersebut digunakan untuk sosialisasi dan rapat-rapat terkait aset tanah milik pemerintah daerah.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai 2 (dua) urusan salah satunya adalah urusan pertanahan yang menjadi sasaran strategis dari tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang mempunyai indikator indeks kepuasan masyarakat. Untuk capaian dari sasaran atau IKU (Indikator Kinerja Utama) tersebut adalah 100% dari target 100%.

5. Urusan Lingkungan Hidup

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program prioritas yang meliputi:

a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
e) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan

i) Program Pengelolaan Persampahan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.31 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan (DLHKP)	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	75	75	100		
				1 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	dokumen	2	1	50	Tidak ada anggar -an penyusunan dokumen atau review dokumen/ kebijakan pada tahun 2024, diganti dengan kegiatan sosialisasi kebijak- an sehingga target program	Menginventarisasi berbagai tanggapan masyarakat selama sosialisasi sebagai dasar review kebijakan kedepannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan peran serta masyarakat, mengajukan anggaran tambahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										penyusunan RPPLH tidak tercapai sampai akhir tahun 2024	penyusunan dokumen LH
				a. Subkeg. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provins	Dokumen	1	0	0		
				b. Subkeg. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100		
				B. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	74	70	94,05	Masih banyaknya pelaku usaha dan masyarakat yang menghasilkan limbah dan dibuang ke badan air tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan indeks kualitas air rendah.	Mengupayakan peningkatan kualitas air Sungai melalui: kegiatan sosialisasi pada Masyarakat untuk mengelola sampah dengan benar, pengawasan bagi pelaku usaha yang menghasilkan limbah agar mengelola limbah dg benar melalui IPAL.
											Meningkatkan pemasangan papan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											informasi dan peringatan LH.
											Melakukan inventarisasi RTH yang ada dan melakukan penanaman pohon pada lokasi yang lebih luas dengan meningkatkan Kerjasama antar Lembaga (BPDAS) untuk memperoleh bantuan tanaman.
				1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan	3	3	100		
				a. Subkeg. Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	Dokumen	2	2	100		
				b. Subkeg. Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rumah Kaca. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan						
				c. Subkeg. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	500	882	176,40		
				2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	kegiatan	11	11	100		
				a. Subkeg. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	6	6	100		
				b. Subkeg. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	5	5	100		
				3 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	kegiatan	16	16	100		
				a. Subkeg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan						
				b. Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	11	11	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	%	40	40	100		
				1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan kehati	dokumen	1	1	100		
				a. Subkeg. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	731,99	839,15	114,64		
				b. Subkeg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	50	50	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c. Subkeg. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1	1	100		
				D. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memiliki izin pengelolaan LB3	%	45	46	101		
				1 Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah fasilitasi dan verifikasi pengelolaan B3 dan LB3	kali	30	34	113,33		
				a. Subkeg. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	4	6	150		
				b. Subkeg. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	26	28	107,69		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan izin lingkungan	%	14	12	87,64	Realisasi kinerja ditentukan oleh jumlah permohonan persetujuan lingkungan yang masuk. Ada perbedaan kriteria perizinan pada penerbitan izin usaha, sehingga menurunkan jumlah fasilitasi perizinan usaha secara signifikan karena hanya diperlukan surat pernyataan yang bisa dilakukan secara online tanpa fasilitasi dari dinas lingkungan hidup	Meningkatkan kegiatan pengawasan baik langsung atau tidak langsung untuk mencegah adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terakumulasi dalam jangka panjang
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha	unit	125	47	37,60	Perubahan peraturan perizinan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja	Meningkatkan kegiatan pencegahan pencemaran melalui peningkatan pengawasan
				a. Subkeg. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan	Dokumen	90	11	12,22	Perubahan peraturan	Meningkatkan kegiatan pencegahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Teknis. Persetujuan Lingkungan. dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan					perizinan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja	pencemaran melalui peningkatan pengawasan
				F. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN. DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	%	18	17	90,59	Untuk mencapai target program sebanyak 18,48% dibutuhkan tambahan Perdes sebanyak 15 Perdes pada tahun 2024, tetapi anggaran hanya cukup untuk memfasilitasi penyusunan Perdes sebanyak 6 Perdes (hal ini disebabkan karena adanya kekurangan anggaran fasilitasi di tahun sebelumnya.	1. Merekomendasikan anggaran desa dalam fasilitasi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Pelestarian Lingkungan Hidup. 2. Meningkatkan kegiatan pelatihan melalui lembaga pendidikan seperti adiwiyata dan lainnya.
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan TingkatDaerah kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata	Lokasi	17	53	311,76		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Subkeg. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk LembagaKemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	6	7	116,67		
				b. Subkeg. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	11	46	418,18		
				G. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase fasilitas penghargaan lingkungan hidup	%	67	73	108,82		
				1 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup	Lokasi	16	23	143,75		
				a. Subkeg. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalamPerlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	16	23	143,75		
				H. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	kasus	15	9	60		
				a. Subkeg. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	15	9	60	Jumlah pengaduan yang masuk dibawah target yang ditentukan	
				I. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	%	28	50	178,83		
				1 Kegiatan Pengolahan Sampah	Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah	Kegiatan	5	5	100		
				a. Subkeg. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	2	2	100		
				b. Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	9	9	100		
				c. Subkeg. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir	Ton	31.814	41.451	130,29		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						
				d. Subkeg. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat. Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	5	5	100		
				e. Subkeg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Unit	34	34	100		

2) **Permasalahan**

Permasalahan yang ada pada Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten kebumen dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

a) Adanya pertambahan penduduk yang cukup tinggi yang berakibat pada bertambahnya volume sampah maupun limbah, sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
b) Perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah dan sampah secara sembarangan;
c) Penentuan target IKLH belum akuntabel dengan penyediaan anggaran yang seharusnya disiapkan dalam rencana pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau target dalam Perda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam jangka panjang;
d) Terbatasnya waktu, anggaran dan prasarana (maps yang belum update) dalam inventarisasi luasan Tutupan Lahan untuk perhitungan IKLH setiap tahunnya.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya mengatasi permasalahan yang ada pada Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten kebumen dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

a) Sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan terhadap masyarakat perihal pengendalian pencemaran lingkungan serta program konservasi sumberdaya alam. Hal ini sedikit dapat merubah pola pikir masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik;
b) Adanya demplot/percontohan instalasi pengolahan air limbah, terutama air limbah pada kegiatan industri kecil yang merupakan “model” pengolahan sederhana, yang bisa cukup efektif mengurangi beban pencemaran;
c) Upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap jenis usaha/kegiatan untuk selalu melaksanakan penetapan terhadap baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan, yang merupakan syarat bisa dikeluarkannya izin PPLH;
d) Melakukan konservasi lahan secara masif melalui gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip” dan pelaksanaan program unggulan Bupati Kebumen “Nandur Wit Nggo Anak Putu”;
e) Fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Restorasi;
f) Pelatihan dan Sosialisasi terhadap industri kecil;
g) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan;
h) Inventarisasi mandiri Luasan RTH Kabupaten Kebumen, Luasan Tutupan Lahan Kabupaten.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program. jumlah program sebanyak 9 program dengan total jumlah capaian sebesar 961,40% sehingga dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 106,82%. Jumlah kegiatan sebanyak 11 dengan total capaian 1.216,45% dan rata-rata capaian kegiatan sebesar 110,59%.

Capaian Program dan Kegiatan memiliki situasi yang linear dimana keduanya saling mendukung dan mempengaruhi. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dikarenakan ketersediaan anggaran pada sub kegiatan sehingga mempengaruhi capaian kegiatan itu sendiri.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Urusan Lingkungan hidup diarahkan untuk mencapai misi keempat RPJMD yaitu “peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan sasaran 4.2 yaitu “meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan 2024 sebagai berikut:

Tabel III.32 Tujuan dan Sasaran Urusan Lingkungan Hidup

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Poin	74,28	69,86	94,05	*Laporan IKLH DLHKP Kab. Kebumen 2024* *Ekspose IKLH DLHK Provinsi Jateng* *Ekspose IKLH Kementerian KLHK*

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup. Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen 2024

Tabel III.33 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

		2024	

INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD 2026
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,17	74,28	69,86	94,05	74,45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja utama urusan Lingkungan Hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Urusan Lingkungan Hidup:

a) Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
c) Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Realisasi IKLH pada tahun 2024 mencapai 69,86 (presentase capaian sebesar 94,05%). Meskipun mengalami kenaikan terhadap tahun sebelumnya tetapi belum dapat mencapai target. Hal ini disebabkan masih banyaknya pelaku usaha dan masyarakat yang menghasilkan limbah dan dibuang ke badan air tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan indeks kualitas air rendah dan jumlah kegiatan yang menjadi sumber pencemar semakin banyak.

Ketiga variabel yang digunakan yaitu;

1. Indeks Kualitas Air;
2. Indeks Kualitas Udara; dan
3. Indek Tutupan Lahan.

Dengan rentang predikat IKLH sebagai berikut:

IKLH <40 = waspada

IKLH 40-50 = sangat kurang baik

IKLH 50-60 = kurang baik

IKLH 60-70 = cukup baik

IKLH 70-80 = baik

IKLH > 80 = sangat baik

Pada tahun 2024 realisasi IKLH Kabupaten Kebumen sebesar 69,86 atau masuk kategori “CUKUP BAIK”.

Tabel III.34 Realisasi IKA, IKU dan IKTL Kabupaten Kebumen

No	Variabel	Capaian Tahun		Predikat
		2023	2024	
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,41	94,42	Sangat Baik
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	51,74	53,11	Sedang
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50,63	58,73	Kurang
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,17	69,86	Cukup Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen 2024

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pendaftaran Penduduk;
b) Program Pencatatan Sipil; dan
c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.35 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUK-AN DAN PENCATATAN SIPIL	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	%	100	100	100		
				1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk	Layanan	7	7	100		
				a Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP,KIA)	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (KTP,KIA)	Dokumen	1100	120.088	109,1		
				b Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	4	4	100		
				c Pencatatan. Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Pencatatan.	Dokumen	27	27	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan						
				2 Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan	Kegiatan	1	1	100		
				a Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Dokumen	2	2	100		
				3 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan	1	1	100		
				a Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Lapoan	1	1	100		
				B PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil		100	100	100		
				1 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil	Kegiatan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	1	1	100		
				b Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	1	1	100		
				2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan penyelenggarakan urusan administrasi kependudukan	Kegiatan	1	1	100		
				a Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Koordinasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Institusi Lainya	Laporan	2	2	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Buku Data Kependudukan	Buku	3	3	100		
				a Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah agregat buku kependudukan	Buku	3	3	100		
				2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	Kegiatan	3	3	100		
				a Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	100		
				b Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	5	5	100		
				c Komunikasi. Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	1	1	100		

2) **Permasalahan**

Dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih dijumpai permasalahan sebagai berikut:

a) Belum seluruh penduduk sadar adminduk;
b) Lokasi geografis tempat tinggal Masyarakat pemohon yang jauh dari tempat pelayanan administrasi kependudukan;
c) Belum tercukupnya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai;
d) Terbatasnya SDM yang kompeten baik dari sisi kuantitas maupun kualitas guna mendukung tercapainya pelayanan prima administrasi kependudukan;
e) SOP belum mengikuti regulasi yang bersifat dinamis;
f) Institusi pengguna data belum memahami pentingnya data kependudukan dari Dukcapil;
g) Sosialisasi adminduk belum menjangkau semua unsur lapisan;
h) Budaya masyarakat yang menunda pengurusan administrasi kependudukan sehingga data kependudukan tidak valid dan akurat.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen maka dapat dilakukan upaya mengatasi permasalahan diantaranya:

a) Pelayanan prima administrasi kependudukan yaitu pelayanan yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Dalam era saat ini pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju antara lain:

    1. Penduduk menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan tanpa biaya;
    2. Perkembangan TI menuntut pelayanan untuk bisa menjadi lebih memudahkan masyarakat;
    3. Diperlukan terobosan-terobosan baru untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan adminduk.

b) Satu data kependudukan secara nasional atau NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku dan melekat selamanya pada setiap penduduk dari lahir bahkan dibawa setelah meninggal dunia sehingga diperlukan NIK sebagai identitas tunggal administrasi.

    1. Implementasi integrasi *big data* kependudukan dalam semua proses pemerintahan di Indonesia telah berjalan sejak tahun 2019. Integrasi *big data* ini memudahkan dalam semua proses pemerintahan. Proses tersebut secara bertahap telah dilakukan oleh jajaran Dukcapil. Tidak hanya besar

data yang menjadi poin utama tetapi apa yang harus dilakukan organisasi terhadap data tersebut yang terkoneksi dengan banyak lembaga dan instansi- instansi pelayanan publik.

2. *Big data* mendorong penduduk untuk mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik;

c) Administrasi kependudukan menuju *Go-Digital*.

1. Implementasi *Go-Digital* bertujuan mewujudkan pelayanan yang cepat dan memudahkan masyarakat;
2. Mulai tahun 2019 jajaran Dukcapil telah menggunakan tanda tangan digital untuk mengurus data administrasi kependudukan (Adminduk);
3. Masyarakat bisa mengurus keperluan layanan kependudukan seperti akta kelahiran tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Cukup mengisi formulir online, tekan *enter* dan data kependudukan yang diperlukan dapat diperoleh dengan cepat, bisa di-*print out* atau dicetak sendiri aktanya oleh penduduk dari rumah;
4. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital KEMENDAGRI adalah aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

d) Semua penduduk memiliki identitas.

Salah satu hak penduduk diantaranya adalah setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan. Dengan adanya dokumen kependudukan tersebut maka penduduk tercatat dalam database kependudukan sehingga kementerian/lembaga (K/L) hingga swasta dapat memanfaatkan data administrasi kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP-elektronik untuk segala keperluan pelayanan publik maupun penegakan hukum.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya Program adalah 100%. Rata-rata capaian Kegiatan adalah 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Tahun 2024 ini tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel III.36 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen (%)	99,77	95,15	99,57	104,64	94,45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. 2024

Tabel 3.35 menjelaskan bahwa pencapaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 terkait cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan kategori Sangat Tinggi yaitu 104,64%. Ketercapaian indikator kinerja tidak lepas dari berbagai upaya dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diuraikan dalam beberapa hal sebagai berikut:

a) Melaksanakan program GO-LAK (GO – Layanan Administrasi Kependudukan). GO-LAK merupakan Program Unggulan Bupati Kebumen yaitu program pelayanan administrasi kependudukan jembut bola ke rumah (*door to door*) utamanya kelompok difabel dan yang berkebutuhan khusus;
b) Melakukan sosialisasi pelayanan Administrasi Kependudukan melalui tatap muka dan melalui media sosial (facebook. Instagram. X. Tiktok). sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki dan memperbarui dokumen administrasi kependudukan (Masyarakat sadar Adminduk);
c) Proses pembuatan dokumen administrasi kependudukan semakin cepat. mudah dan gratis;
d) Pelayanan melalui tatap muka dan online dengan whatsapp, aplikasi lawet Kebumen dan Identitas Kependudukan Digital (IKD);

e) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
f) Pelayanan Terintegrasi yaitu di Mall Pelayanan Publik (MPP);
g) Melakukan beberapa inovasi pelayanan diantaranya:

1. KeTaPel-17

Inovasi ini merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang diperuntukan bagi wajib KTP-el pemula atau usia 17 tahun dimana pada saat usia 17 tahun langsung menerima KTP-el sebagai hadiah ulang tahun dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

2. Balada PAK-KIS

Inovasi ini merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kebumen. Inovasi "BALADA PAK-KIS" (Bayi Lahir Dapat Paket Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kartu Indonesia Sehat) ditandai dengan Penandatanganan PKS pada tanggal 1 September 2021 dan telah di launching tanggal 16 September 2021 oleh Bupati Kebumen Di Mexolie Hotel Kebumen. Dalam kerjasama ini. bayi yang baru lahir bisa langsung mendapatkan dokumen administrasi kependudukan berupa Akta Kelahiran. Kartu Keluarga. dan Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kebumen. serta KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kebumen. Balada Pak-KIS juga bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan klinik bersalin untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan tersebut.

3. Kios Pelanduk

Inovasi ini merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang memberikan pelayanan di Desa/Kelurahan. Inovasi Kios Pelanduk merupakan inovasi pelayanan publik yang melayani Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perpindahan Keluar, Kedatangan dalam satu Desa/Kelurahan.

4. Pesona Sunday Morning (Pelayanan Adminduk untuk Semua Orang Sinambi Santai Dokumen Adminduk Bisa Anyar Maning)

Inovasi ini merupakan pelayanan administrasi kependudukan untuk semua orang yang membahagiakan pada hari minggu pagi yang dilaksanakan di alun-alun dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Pelayanan administrasi kependudukan yang diperuntukkan bagi semua orang yang membahagiakan sambil santai dokumen administrasi kependudukan bisa anyar maning (sambil bersantai juga bisa mendapat dokumen adminduk baru lagi).

5. WA Tiket

Pemohon diberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan dengan cara pelayanan online dengan menggunakan aplikasi whatsApp sesuai dengan permohonan.

6. Gerlin Difaduk (Gerakan Perlindungan Difabel sadar Adminduk)

Inovasi ini merupakan program jemput bola untuk melayani proses pendataan. perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat Disabilitas/Difabel yang tidak bisa datang sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Tempat Perekaman Data Penduduk (TPDK) di 26 Kecamatan. Inovasi ini sudah di launching pada tanggal 5 Agustus 2022 oleh Bupati Kebumen di area Disdukcapil Kebumen.

7. Peti Megatruh (Pelaporan Kematian Melalui Gerakan Adminduk Cepat, Akurat, dan Handal)

Inovasi ini merupakan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan berbagai pihak seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan fasilitas kesehatan dalam pelaporan kematian penduduk. Hal ini sangat penting dalam rangka memutakhirkan data kependudukan di Kabupaten Kebumen Inovasi ini sudah di launching pada tanggal 5 Agustus 2022 oleh Bupati Kebumen di area Disdukcapil Kebumen.

8. Yandis Terpadu

Pelayanan Administrasi Kependudukan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP).

9. Pulpen ASN (Paket Untuk Layanan Pensiunan ASN)

Inovasi ini merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang bertujuan untuk mempermudah pegawai pensiunan dalam mendapatkan dokumen – dokumen kependudukannya. Yaitu para ASN yang pensiun pada saat menerima SK Pensiunan/Taspen langsung mendapatkan dokumen kependudukan berupa KK, KTP-El, dengan status pekerjaan berubah menjadi pensiunan.

10. Gerbang Harapan

Gerakan bersama Administrasi Kependudukan mengelola hasil laporan putusan dan penetapan Pengadilan Negeri Kebumen.

11. Layak Menikah Ijabah

Inovasi yang bekerja sama dengan kantor Kemenag Kabupaten Kebumen melalui pernikahan Identitas jadi berubah.

12. Santri One Paduka

Memudahkan Masyarakat yang telah bercerai dalam mengurus hanya melelalui satu pintu.

13. Drive Thru Ekspres

Pelayanan Drive Thru Ekspres untuk Mempercepat Pelayanan Cetak Ktp Elektronik Rusak/Hilang Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

h) Peningkatan dan Perluasan Layanan pada event-event besar di Kabupaten Kebumen seperti Kebumen International Expo (KIE), Program Bupati Mubeng Kebumen, Program Bupati dan Forkopimda Mengajar dan beberapa kegiatan lainnya baik even di Tingkat kecamatan dan desa;
i) Mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta dan dunia usaha sebagai wujud peningkatan pelayanan prima pada masyarakat;
j) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek). Peningkatan Kapasitas SDM dan refreshing petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) **Capaian Kinerja Program. Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilaksanakan melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penataan Desa
b) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
c) Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan
d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Adapun capaian kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.37 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A. PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Tertata	%	4.90	9.35	190.8		
				1 Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda Penataan desa dan Jumlah Perubahan Perda Pilkades yang tersusun	Kegiat an	2	3	150		
				a. Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusa,. Penggabungan dan Perubahan Status Desa.	Jumlah Perda Penataan desa yang tersusun dan Jumlah Perubahan Perda Pilkades yang tersusun	Doku men	2	3	150		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13				B. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama desa	Kegiatan	3	3	100		
				a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kerjasama antar Desa	Desa	7	449	6,414		
				b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kegiatan TMMD	Desa	3	4	133,33		
					Jumah Desa yang mendapat fasilitasi kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Desa	8	9	112,5		
					Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kegiatan Karya Bhakti Manunggal	Desa	5	5	100		
				c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa kawasan perdesaan yang terfasilitasi	Desa	22	22	100		
				C. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Bumdes yang meningkat klasifikasinya	lembaga	49	49	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiat an	13	13	100		
				a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pendampingan KPMD. Pendamping Desa. Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli	Desa/Orang	449	449	100		
					Jumlah Kegiatan Penghargaan Desa Award/Lomba Desa	Kegiat-an/Kegiatan	1	1	100		
				b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes	kecamatan	26	26	100		
					Jumlah desa yg mendapat fasilitasi pendampingan perencanaan	Desa	449	449	100		
					Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes	Desa/Kelurahan	449	449	100		
				c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang menyusun APBDes dan APBDes Perubahan	Desa	449	449	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Ikhtisar Pelaporan Pertanggungjawaban APBDes yang disusun	Doku men	1	1	100		
					Jumlah Pedoman Penyusunan APBDes yang Disusun	Doku men	1	1	100		
				d. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa. aparatur kecamatan dan pendamping desa yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa	Orang	950	950	100		
				e. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi pelaksanaan Musdes	Kecamatan	26	26	100		
				f. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesma yang terfasilitasi	Lemba ga	32	32	100		
					Jumlah BUMDesa yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lemba ga	10	26	260		
					Jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya dari tumbuh menjadi berkembang dan	Lemba ga	10	49	490		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					berkembang menjadi maju						
					Jumlah Fasilitasi Lembaga Kerjasama Antar Desa	Unit	26	26	100		
				g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kegiat an	1	1	100		
				h. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kegiat an	1	1	100		
				i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan SID Desa online dan IDM	desa	449	449	100		
				j. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa mendapat fasilitasi pengelolaan aset desa	Desa	449	449	100		
					Jumlah aparatur kecamatan dan pendamping desa yang mengikuti rapat koordinasi terkait dengan aset desa	orang	52	52	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				k. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD (130 orang). mengikuti Bimtek Aparatur Pemdes	Orang	130	130	100		
				l. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi DD (Dana Desa APBN)	Desa	449	449	100		
					Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Siltap)	Desa	449	449	100		
					Jumlah desa yang mendapat fasilitas BPJS bagi Kades dan Perangkat Desa	Desa	449	449	100		
					Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Desa	449	449	100		
					Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi. bantuan	Desa	449	449	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					keuangan Kabupaten dan Bantuan keuangan lainnya						
				m. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Desa	30	1.347	4.490		
				D. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	18.70	18.70	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat.	Kegiatan	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang mendapatkan Pemberdayaan WPA	Kecamatan	26	26	100		
					Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan KP SPAMS	Kelompok	28	78	278.57		
					Jumlah Desa yang mendapatkan pemberdayaan/pembinaan posyandu	Desa	7	70	700		
				b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantekdes yang dibentuk	Unit	2	7	350		
				c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	Jumlah pasar desa yang dibina	lokasi	20	44	220		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							
				d. Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan BBGRM	Desa	449	449	100		
				e. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan kegiatan Evaluasi TP.PKK	Desa/Kelurahan	52	52	100		
					Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Desa/Kel	460	460	100		
					Jumlah TP PKK Kabupaten yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Kabupaten	1	1	100		
					Jumlah TP PKK Kecamatan yang mendapat	Kecamatan	26	26	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pembinaan/pemberdayaan						

2) **Permasalahan**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya berkaitan dengan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa. Hal ini salah satunya karena sebagian besar tingkat pendidikan aparatur pemerintahan desa adalah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, kurang tertibnya administrasi desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga tahapan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa masih mengalami kendala, misalnya terjadi keterlambatan pertanggungjawaban keuangan baik secara pelaporan keuangan maupun administrasi pertanggungjawaban keuangannya. Hal tersebut juga berpengaruh pada pemanfaatan teknoilogi informasi yang hanya bertumpu pada satu aparatur atau beberapa aparatur Pemdes saja. Selain itu juga masih belum optimalnya keberadaan Lembaga Kemsyarakatan Desa yang ada di desa seperti BUM Desa, Karang Taruna, PKK, serta lembaga lainnya sehingga peran dalam mensejahterakan masyarakat desa hanya bertumpu pada aparatur pemerintah desa. tetapi keterlibatan lembaga tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam turut bertanggungjawab dalam mensejahterakan masyarakat desanya.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan beberapa upaya yang terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. seperti pelatihan pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pengambilan keputusan, serta pengembangan keterampilan digital dan komunikasi. Selain itu juga bekerjasama dengan Universitas Terbuka Purwokerto dalam Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi Aparatur Pemerintahan Desa. Kedua, meningkatkan disiplin dan kualitas pelaporan keuangan dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang lebih baik, seperti penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan dan sistem informasi desa, serta meningkatkan frekuensi dan transparansi pelaporan keuangan. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan desa seperti pengembangan sistem informasi desa, aplikasi pengelolaan keuangan, dan platform komunikasi digital, serta meningkatkan akses internet di desa dan penggunaan perangkat digital dalam pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih baik, efektif, dan efisien, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 122,7%. Rata-rata capaian kegiatan sebesar 112,7%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Tabel III.38 Indikator Kinerja Urusan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	71,49	34,08	88,64	246,33	42,09

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, maka Renstra Dinas PMD Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD 2021-2026 sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Renstra Dinas PMD Kabupaten Kebumen tahun 2024 merupakan renstra tahun 4 Renstra Dinas PMD dengan target IDM yaitu 34,08%

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 -2026 disebutkan bahwa Formula Indek Desa Membangun yaitu Jumlah Desa dengan Indek Desa Membangun kategori maju dan mandiri dibagi jumlah desa total dikalikan 100%. Pada Tahun 2024 IDM Kabupaten Kebumen tercapai 88,06%. Hal ini didasarkan pada jumlah desa maju dan mandiri sebanyak 398 terdiri dari 152 desa mandiri dan 246 desa maju.

Saat ini, sebanyak 449 Desa juga telah membentuk Bumdes. Adapun tujuan pendirian Bumdes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dan

pendapatan asli desa, meningkatkan, pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Pada tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga RPJMD/Renstra 2022-2026. pendirian Bumdes sejumlah 449 desa yang telah tercapai, dilakukan pembinaan atau pada akhir periode Renstra ditargetkan sebanyak 100% atau sebanyak 449 Bumdes dan telah terealisasi sebanyak 449 Bumdes atau seluruh desa yang ada di Kabupaten Kebumen.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengendalian Penduduk;
b) Program Pembinaan Keluarga Berencana;
c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.39 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	41,67	76.47	183,51		
				1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	jumlah lembaga yang melaksanakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Lembaga	5	5	100		
				a Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	Jumlah pendidikan kependudukan formal dan nonformal yang mendapatkan	Lembaga (Sekolah)	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					sosialisasi kependudukan						
				2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	Dok	2	2	100		
				a Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen kajian dampak kependudukan yang tersusun	Dok	1	1	100		
				b Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang tersusun	Dok	1	1	100		
				B PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS	%	64,5	67,11	104,04		
				1 Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan -BKB -BKR -BKL -UPPKA	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	jumlah advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	kali	4	4	100		
				b Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah paket sarana KIE program KKBPK yang tersedia dan terdistribusi	Kec.	26	26	100		
				c Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	jumlah media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang dalam promosi dan KIE program KKBPK	Paket	15	15	100		
				d Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	jumlah lokasi tersedianya sarana dan operasional di balai penyuluh KKBPK	Kecamatan	26	26	100		
				2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional PKB/PLKB dalam menggerakan kader IMP	%	2.647	2.647	100		
				a Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	Unit	26	26	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	Kecamatan	26	26	100		
				b Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina	Orang	2.647	2.647	100		
				3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan	kegiatan	3	3	100		
				a Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang difasilitasi distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	Faskes KB	57	57	100		
				b Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah akseptor MKJP yang difasilitasi	orang	11.294	11.053	97,86	Kepesertaan KB untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) jenis MOP dan MOW masih kurang	Perlunya edukasi lebih untuk penggunaan MKJP metode MOW dan MOP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang difasilitasi kesehatan dan kelompok kegiatan yang terfasilitasi promosi dan konseling dan hak-hak reproduksi	Orang	750	750	100		
				4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kebumen/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten	kegiatan	1	1	100		
				a Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang terfasilitasi	Desa	77	77	100		
				C PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	%	70,41	84,23	119,62		
				1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangun an keluarga melalui pembinaan	Kegiatan	3	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kesejahteraan Keluarga	ketahanan dan kesejahtera an						
				a Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	- Jumlah BKB KIT Stunting	Paket	20	25	100		
				b Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Jumlah Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan	5	5	100		
				c Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah anggota UPPKS yang mendapatkan promosi dan sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orang	80	80	100		
				2 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran	Jumlah mitra kerja yang mendapatkan	kegiatan	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga						
				a Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan	jumlah anggota mitra kerja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	anggota	104	104	100		

2) **Permasalahan**

Capaian peserta KB aktif sebesar 67,11% dari target 64,50% dimana capaian pada tahun 2024 memanfaatkan momentum dengan mitra kerja dalam melakukan pelayanan KB. Secara umum capaian program KB secara keseluruhan telah tercapai 104,04% sesuai dengan target. Namun untuk kesertaan MKJP masih kurang dari target 11.294 tercapai 11.053 (97,86%). hal ini dikarenakan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada jenis MOP dan MOW belum sesuai target karena minat pengguna yang masih rendah. Hal tersebut juga dikarenakan adanya peningkatan target yang tidak selaras atau tidak dibarengi dengan peningkatan anggaran yaitu perubahan standar harga pada komponen pembiayaan Peningkatan Kesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Adapun upaya yang ditempuh di tahun 2024 untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Memaksimalkan KB pasca salin dan pasca keguguran.
b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dipertajam melalui berbagai media baik elektronik, cetak dan media luar ruang, KIE perorangan dan kelompok serta media sosial lainnya.
c) Meningkatkan kepesertaan dengan cara memanfaatkan moment-moment tertentu untuk pelayanan serentak (Harlah Aisyiyah, Harlah Muslimat, Hari Keluarga Nasional, Hari Kartini, Hari Ibu, Kerjasama Bhayangkara, TNI Manunggal, Hari Kontrasepsi Sedunia, Hari PKK).

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 135,72%. Sementara rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 100%.

Hal ini dikarenakan mulai dari Perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dan mencapai target yang diharapkan.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Adapun capaian kinerja urusan dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.40 Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan peserta KB aktif	%	69,96	64,50	67,11	104,04	65,00

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kebumen. 2024

Capaian kinerja tahunan cakupan Peserta KB Aktif tahun 2024 sebesar angka 67,11%. Realisasi 2024 sebesar 104,04% diperoleh dari jumlah peserta KB aktif sebesar 134.474 dibagi jumlah PUS sebesar 200.393. Dengan bertambahnya peserta KB aktif diharapkan dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk sehingga kualitas SDM dapat meningkat dan dapat mengentaskan kemiskinan. Adapun perkembangan cakupan peserta KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.41 Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif tahun 2023-2024

NO.	URAIAN KINERJA	2023	2024
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2-3	2-3
2.	Jumlah akseptor KB:	130.712	134.474
	Laki-Laki	9.631	14.056
	Perempuan	121.081	120.418
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	186.846	200.393
4.	Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	130.712	134.474

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kebumen. 2024

9. Urusan Perhubungan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.42 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian. industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	79,11	75,78	95,79	Kebutuhan perlengkapan jalan cukup banyak karena luas jangkauannya bertambah terus	Mengusulkan alokasi anggaran untuk penyediaan perlengkapan jalan ke Provinsi maupun Pusat
				1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	%	56	60,67	108,34		
				a Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Paket	5	5	100		
				b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rasio Cakupan Kebijakan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	%	100	100	100		
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawa san Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penga-wasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100		
				3 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik (yaitu Jumlah alat uji KIR yang baik dibagi jumlah alat uji KIR yang ada)=9 unit 100% baik	%	100	100	100		
				a Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	Unit	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen penyediaan kartu bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor	Dokumen	7254	6889	94,97	Kebijakan pusat, masa berlaku buku ujiyang awalnya 6 bulan menjadi 3 tahun.	
				c Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Unit	9	9	100		
				4 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	100		
				a Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100		
				5 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor penilai andalalin	Bulan	12	12	100		
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Penilaian Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan	12	10	83,33	Persetujuan pengesahan andalalin sesuai	Berkoordinasi dengan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										izin yang diajukan ke Dinas Perkimhub	DPMPTSP dan Pemrakarsa
				6 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rasio Cakupan Kebuijakan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dan Pengawasan Pengendalian terhadap Sarpras keselamatan Transportasi	%	100	100	100		
				a Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan koptensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100		
				7 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum	Bulan	12	12	100		
				a Pengendalian dan Pengawasan	Jumlah laporan pengendalian dan	Laporan	48	48	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						
				8 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	80	80	100		
				a Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Terintegrasi Secara Elektronik						

2) **Permasalahan**

Beberapa sub kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal di tahun 2024 antara lain:

a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
   1. Kurangnya SDM ketenagalistrikan untuk pemeliharaan perlengkapan jalan.
   2. Kurangnya suku cadang perlengkapan jalan seperti LPJU dan APILL untuk pemeliharaan secara berkala.
   3. Kurangnya Kendaraan Operasional Khusus (Truck Crame)

b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
   1. Kurangnya kesadaran masyarakat pengusaha untuk mengajukan dokumen andalalin.
   2. Masih banyak bangunan tempat usaha yang belum mempunyai dokumen andalalin.

c) Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam troyek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik:

- Adanya batas usia kendaraan maksimal namun pengusaha tidak mampu melaksanakan peremajaan

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan melaksanakan pelatihan yang bersertifikat untuk meningkatkan kemampuan SDM, pengadaan suku cadang perlengkapan jalan dan pembelian Truck Crame.

b) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dengan melakukan sosialisasi terhadap pemrakarsa gedung bangunan yang wajib dilakukan Andalalin.

c) Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan melaksanakan Operasi Laik Jalan (OLJ) dan sosialisasi ke perusahaan angkutan.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perhubungan dapat diketahui capaian rata-rata capaian kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar 95,79%. Rata-rata capaian kegiatan adalah 101,04%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Pelaksanaan Capaian Kinerja urusan Perhubungan dengan indikator Indeks Infrastruktur Perhubungan dari target 79,11% capaian realisasi sebesar 75,78%. Adapun dalam pelaksanaan urusan dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.43 Indikator Kinerja Urusan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	75,30	79,11	75,78	95,79	80,44

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Kebumen. 2024

Indeks Infrastruktur Perhubungan diperoleh dengan cara menghitung persentase dari perbandingan (persentase ketersediaan perlengkapan jalan + persentase ketersediaan terminal tipe-C + persentase alat uji KIR dalam keadaan baik): 3

Keterangan:

- Persentase ketersediaan perlengkapan jalan = jumlah perlengkapan jalan (LPJU, rambu dan APILL) yang tersedia/jumlah perlengkapan jalan yang ideal x 100%
- Persentase ketersediaan terminal tipe-C = jumlah terminal yang terbangun/jumlah terminal yang ideal x 100%
- Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik = jumlah alat uji KIR dalam keadaan baik/jumlah total alat uji KIR x 100%

Tabel III.44 Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Kebumen

No	Kelengkapan Jalan	Jumlah	Kebutuhan	%
1	LPJU	7.134	140	50,96
2	APILL	58	60	96,67
3	Rambu	2.751	80	34,39
	Persentase I			60,67
4	Terminal	4	6	66,67
	Persentase II			66,67
5	Alat Uji Kir	9	9	100
	Persentase III			100
Indeks Insfrastruktur Perhubungan				75,78%.

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Kebumen. 2024

Dengan demikian perhitungan Capaian kinerja adalah sebagai berikut: (60,67+66,67+100)/3= 75,78%.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.45 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATI-KA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	Nilai	3,85	4,94	128,31		
				1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	Paket	10	10	100		
				a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	2	2	100		
				2 Kegiatan Pengelolaan e government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	aplikasi	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	aplikasi	100	100	100		
				b Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100		
				B PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	10	10	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	22	22	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12	100		
				3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	1	1	100		
				a Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	250	250	100		
				4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	4	4	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	4	4	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	paket	4	4	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100		
				5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	40	40	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	40	40	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	unit	33	33	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang dipelihara	unit	34	34	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Pemeliharan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	107	107	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung Kantor dan bangunan lainnya terpelihara	unit	3	3	100		

2) **Permasalahan**

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika adalah:

a) Kurangnya pedoman formal untuk manajemen SPBE, seperti pedoman kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan.
b) Belum adanya tools/alat bantu untuk proses Manajemen Layanan TIK, sehingga layanan TIK yang ada belum dapat termonitor dengan jelas.
c) Belum tersedianya pedoman formal menyebabkan manajemen SPBE belum berjalan optimal, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan, karena tidak ada rujukan dan panduan yang jelas.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

a) Menginisiasi penyusunan pedoman formal untuk kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, dan manajemen perubahan melalui tim koordinasi SPBE Pemkab Kebumen.
b) Mengadopsi standar nasional atau internasional terkait manajemen SPBE dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal.
c) Mengembangkan atau mengadopsi tools berbasis teknologi untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi layanan TIK.
d) Menyusun rencana aksi implementasi pedoman formal bersama Tim Koordinasi SPBE sebagai bagian dari dokumen perencanaan strategis pemerintah daerah.
e) Membentuk mekanisme monitoring berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen SPBE, termasuk penerapan pedoman formal dan penggunaan tools layanan TIK.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Rata- rata capaian kinerja Program adalah sebesar 114,12%. Adapun rata-rata capaian kegiatan dari seluruh program adalah 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya tata kelola SPBE. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.46 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks SPBE	Indeks	3,70	3,50	4,07	116,28%	3,60

Sumber: DISKOMINFO Kabupaten Kebumen. 2024

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pada tahun 2024 pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selama periode 2024 adalah nilai indeks SPBE 4.07 atau sudah dapat menggambarkan predikat sangat baik dalam penerapan SPBE.

11. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
b) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
c) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
e) Program Pengembangan UMKM.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.47 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	persen	46,67	77,36	165,76		
				1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi akuntabel	Koperasi	90	170	188,89		.
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	20	20	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota							
				B PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	persen	36.798	36.798	100		
				1 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	Keg	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	90	90	100		
				C PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	persen	6	25	413,26		
				1 Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	Koperasi	24	25	104,17		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan perlindungan koperasi						
				a Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	unit usaha	24	25	104,17		
				D PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase Peningkatan UKM yang berkualitas	persen	10,89	11,82	108,54		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang terbina	Usaha Mikro	225	1.622	720,89		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	120	305	254,17		
				b Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima	Unit Usaha	14	188	1.342,09		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro						
				E PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	Unit Usaha	45	275	611,11	.	
				1 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jml UKM yang meningkat skala usahanya	UKM	300	330	110		
				a Sub.Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	250	1.242	496,08		

2) **Permasalahan**

a) Rendahnya Mutu SDM Koperasi

Koperasi membutuhkan SDM yang memiliki kualitas yang memadai untuk perkembangan usaha, namun pada kenyataanya masih banyak SDM memiliki kualitas rendah karena kurangnya pelatihan, rendahnya motivasi untuk berkembang serta kurangnya pengetahuan akan prinsip-prinsip Koperasi. Rendahnya mutu SDM dapat berdampak pada efisiensi dan efektivitas kinerja Koperasi. Keputusan yang diambil mungkin tidak optimal, sehingga berpotensi merugikan Koperasi. Serta masih kurangnya kompetensi SDM Koperasi baik pengurus maupun pengawas dalam mengelola Koperasi sehingga pertumbuhan Koperasi relatif lambat.

b) Keterbatasan Akses Pasar Koperasi

Belum optimalnya Koperasi untuk berkembang secara mandiri serta keterbatasan akses pasar. Koperasi sebagai bentuk usaha bersama yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya seringkali menghadapi tantangan dalam memperluas jangkauan pasarnya. Keterbatasan teknologi menjadi salah satu penghambat sehingga membuat Koperasi sulit dalam melakukan aksesnya ke dalam inovasi dan ide-ide yang modern sehingga memperlambat kemajuan usaha.

c) Keterbatasan SDM UMKM

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM. Banyak pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan, keterampilan manajerial dan kemampuan teknis untuk mengelola bisnis secara profesional. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas, kesulitan dalam menciptakan inovasi dan kurangnya kemampuan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu minimnya pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas SDM UMKM semakin memperbesar kesenjangan dalam pengelolaan usaha.

d) Keterbatasan Akses Pasar UMKM

Akses pasar yang terbatas juga menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang. Banyak pelaku UMKM yang hanya mampu memasarkan produk mereka dalam skala lokal, tanpa memiliki akses ke pasar yang lebih luas termasuk pasar nasional dan internasional. Hal ini disebabkan oleh minimnya jaringan distribusi, kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran, serta keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital seperti *e-commerce*. Akibatnya produk UMKM seringkali sulit bersaing dan tidak dikenal oleh konsumen yang lebih luas.

e) Keterbatasan informasi Perizinan UMKM

Kurangnya akses informasi mengenai perizinan usaha menjadi kendala bagi banyak pelaku UMKM untuk meningkatkan legalitas dan kredibilitas usaha mereka. Proses perizinan yang dianggap kompleks, kurangnya pemahaman tentang persyaratan, serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait membuat banyak UMKM enggan atau kesulitan untuk mengurus perizinan. Kondisi ini tidak hanya menghambat pengembangan usaha tetapi juga membatasi UMKM untuk mendapatkan akses fasilitas dan dukungan dari pemerintah maupun lembaga keuangan.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Kunci utama dalam meningkatkan daya saing Koperasi adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelolanya. Banyak Koperasi masih mengalami kendala akibat rendahnya kompetensi pengurus dan anggota dalam manajemen serta prinsip Koperasi. Untuk mengatasi hal ini, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan. Program pelatihan harus mencakup manajemen usaha, pemasaran, digitalisasi bisnis serta tata kelola koperasi yang profesional. Selain itu koperasi perlu membangun budaya organisasi yang lebih adaptif dengan memberikan insentif dan penghargaan bagi pengurus dan anggota yang berprestasi. Sosialisasi yang lebih luas tentang nilai dan prinsip koperasi juga harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi anggota. Dengan peningkatan SDM yang berkualitas koperasi akan mampu mengambil keputusan yang lebih optimal, meningkatkan efisiensi operasional serta mempercepat pertumbuhan usahanya.

b) Selain peningkatan SDM, koperasi juga harus mampu berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi dan memperluas akses pasar. Salah satu tantangan utama koperasi adalah keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas akibat kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu koperasi harus mulai menggunakan platform digital seperti *marketplace*, media sosial, dan *e-commerce* untuk memasarkan produk mereka. Selain digitalisasi, koperasi juga perlu mendapatkan akses permodalan yang lebih luas dengan membangun kemitraan dengan lembaga keuangan, BUMN, maupun swasta. Pendampingan dalam strategi pemasaran, inovasi produk, serta sertifikasi mutu juga penting agar koperasi lebih kompetitif. Dengan optimalisasi teknologi dan akses pasar, koperasi dapat berkembang lebih mandiri dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggotanya serta masyarakat.

c) Upaya Mengatasi SDM UMKM

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM merupakan tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Untuk mengatasinya, langkah strategis dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan dan workshop yang berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, mencakup manajemen bisnis,

pemasaran, inovasi produk, hingga penguasaan teknologi digital. Selain itu program sertifikasi kompetensi dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha meningkatkan kredibilitas dan membuka akses ke pasar yang lebih luas. Pengembangan platform digital pembelajaran juga menjadi solusi modern yang memungkinkan pelaku UMKM mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan lembaga pelatihan dan sektor swasta dapat memperkuat upaya peningkatan SDM ini, memastikan pelaku UMKM memiliki keterampilan yang relevan untuk bersaing di pasar yang dinamis

d) Akses pasar UMKM

Untuk mengatasi keterbatasan akses pasar, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah utama. Edukasi dan pendampingan diberikan kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan platform *e-commerce*, media sosial dan aplikasi pemasaran digital guna menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu penyelenggaraan pameran produk secara rutin di tingkat lokal, nasional, maupun internasional memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mempromosikan produk mereka kepada calon pembeli dan mitra bisnis. Pendampingan dalam memperbaiki kualitas branding dan kemasan produk juga menjadi langkah penting agar produk UMKM memiliki daya tarik yang lebih besar. Di sisi lain, membangun kemitraan strategis dengan perusahaan besar atau jaringan ritel modern dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan memberikan peluang bagi UMKM untuk masuk ke ekosistem bisnis yang lebih mapan.

e) Akses informasi perizinan UMKM

Minimnya informasi mengenai perizinan usaha menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang secara legal dan profesional. Untuk mengatasinya dilakukan sosialisasi dan edukasi secara rutin kepada pelaku UMKM tentang pentingnya perizinan usaha, manfaatnya, serta prosedur pengurusannya. Proses perizinan juga disederhanakan melalui digitalisasi, memungkinkan pelaku usaha mengajukan dan memantau proses perizinan secara online dengan lebih mudah dan cepat. Layanan konsultasi gratis atau bantuan teknis disediakan untuk membantu UMKM mengatasi kendala selama proses pengurusan perizinan. Sebagai tambahan, pemberian subsidi atau insentif khusus diberikan kepada UMKM yang sedang mengurus perizinan, terutama bagi usaha yang baru berkembang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan semakin banyak UMKM yang memiliki legalitas usaha, meningkatkan kredibilitas mereka dan membuka peluang untuk mendapatkan fasilitas atau dukungan dari berbagai pihak.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Koperasi Dan UMKM diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 279,73%. Ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 244,79% atau telah melebihi target yang telah ditetapkan.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.48 Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Koperasi Sehat	%	83,33	46,67	77,36	165,76	63,33
Presentase Usaha Kecil menengah yang berkualitas	%	11,11	11,76	11,82	100,51	13,22

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. 2024

Capaian indikator kinerja utama Disperindag KUKM pada indikator presentase koperasi sehat tahun 2024 dibanding tahun 2023 menurun dari 83,33% menjadi 77,36% namun melebihi dari target capaian IKU tahun 2024 dengan rasio capaian sebesar 165,76%. Sedangkan cakupan persentase usaha kecil menengah yang berkualitas dari tahun 2023 yaitu 11,11% pada tahun 2024 meningkat menjadi 11,82%.

Dalam pelaksanaan kinerja Disperindag KUKM dan Menengah di tahun 2024 mempunyai target penilaian sebanyak 30 koperasi dengan mengambil sampel sebanyak 53 koperasi untuk dilakukan penilaian. Hasil penilaian koperasi dalam satu tahun berjalan dari 53 koperasi terdapat 41 koperasi sehat, 12 koperasi cukup sehat dan tidak terdapat koperasi dalam pengawasan maupun pengawasan khusus. Sehingga indikator persentase koperasi sehat dapat diperoleh perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$Persentase\ Koperasi\ Sehat = \frac{jumlah\ koperasi\ sehat}{jumlah\ koperasi\ yang\ dinilai}\ x\ 100\% = \frac{41}{53}\ x\ 100\%$$

$$= 77{,}36\%$$

Indikator kinerja Persentase Koperasi yang sehat di Kabupaten Kebumen telah tercapai sebesar 77,36% bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 46,67%. dengan kategori sangat baik.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan koperasi sehat dari data diatas dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi Pengukuran. sebagai berikut:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{realisasi}{target}\ x\ 100\%\ = \frac{77{,}36}{46{,}67}\ x\ 100\%$$

$$= 165{,}76\%$$

Nilai realisasi target persentase koperasi sehat sebesar 77,36% dengan target sebesar 46,67% maka diperoleh capai indikator kinerja sasaran meningkatnya jumlah koperasi sehat sebesar 165,76%.

Perkoperasian di Kabupaten Kebumen yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian meningkatkan SDM perkoperasian tidak lepas dari kepatuhan melaksanakan prinsip Koperasi, pengelolaan keuangan yang baik, diversifikasi usaha, pengembangan produk dan layanan, peningkatan keanggotaan, dan partisipasi anggota.

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2024 mempunyai target UKM yang tersertifikasi sebanyak 1.845 UKM, dengan UKM tersertifikasi sebanyak 1.845 UKM yang difasilitasi dinas. Sehingga indikator Persentase Peningkatan UKM yang berkualitas dapat diperoleh perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$Persentase\ Peningkatan\ UMKM\ yang\ Berkualitas$$
$$= \frac{(jumlah\ UKM\ yang\ bersertifikat\ tahun\ (n) - \ Jumlah\ UKM\ yang\ bersertifikat\ tahun\ (n-1)}{Jumlah\ UKM\ yang\ bersertifikat\ tahun\ (n-1)}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{1.845\ -\ 1.650}{1.650}\ x\ 100\%\ =\ 11{,}82\%$$

Indikator kinerja Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas di Kabupaten Kebumen telah tercapai sebesar 11,82% bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100,51% dengan kategori sangat baik.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan UMKM dari data diatas dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi Pengukuran, sebagai berikut:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{realisasi}{target}\ x\ 100\%\ = \frac{11.82}{11.76}\ x\ 100\%\ = 100.51\%$$

Nilai realisasi target Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas sebesar 11,82% dengan target sebesar 11,76% maka diperoleh capai indikator kinerja sasaran meningkatnya Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas sebesar 100,51%.

Adapun rincian persentase jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi tidak aktif di Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.49 Data Jumlah Koperasi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Kelompok Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	KUD	21	2	23
2	Koperasi Pertanian	7	6	13
3	Koperasi Nelayan	5	0	5
4	Kopti	1	0	1
5	Kopinkra	2	0	2
6	Kopontren	3	6	9
7	Kopkar	11	3	14
8	Koperasi Angkatan darat	2	0	2
9	Koperasi kepolisian	1	0	1
10	Koperasi Serba usaha	46	12	58
11	Koperasi Pasar	3	2	5
12	Koperasi Simpan Pinjam	50	2	52
13	Koperasi Angkutan Darat	1	0	1
14	Koperasi Pegawai Negeri (KPRI)	89	1	90
15	Koperasi Wanita	4	0	4
16	Koperasi veteran	1	0	1
17	Koperasi Wredatama	6	1	7
18	Koperasi Pepabri	3	0	3
19	Koperasi Lainnya	81	0	81

No	Kelompok Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
20	KSPPS	28	5	33
21	Koperasi Sekunder	2	0	2
Jumlah		367	40	407

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari jumlah 407 koperasi yang berada di Kabupaten Kebumen terdapat 367 Koperasi aktif dan 40 Koperasi tidak aktif.

Adapun untuk sebaran keberadaan UMKM di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.50 Jumlah UMKM Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	Adimulyo	2.425
2	Ambal	3.131
3	Ayah	788
4	Buayan	2.154
5	Buluspesantren	2.590
6	Gombong	2.890
7	Karanganyar	782
8	Kebumen	5.212
9	Klirong	5.660
10	Kutowinangun	1.942
11	Kuwarasan	1.530
12	Mirit	1.739
13	Padureso	510
14	Petanahan	3.265
15	Poncowarno	18
16	Prembun	1.607
17	Puring	2.115
18	Rowokele	2.347
19	Sempor	781
20	Sruweng	1.458
21	Bonorowo	1.139
22	Pejagoan	1.029
23	Karangsambung	888
24	Alian	1.957
25	Sadang	764
26	Karanggayam	611
	Total	**50.322**

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen sebanyak 50.322 tersebar didalam 26 Kecamatan. Adapun dari 26 Kecamatan tersebut terdapat 3 kecamatan yang memiliki UMKM terbanyak yaitu 5.660 UMKM di Kecamatan Klirong, 5.212 UMKM di Kecamatan Kebumen dan 3.265 UMKM di Kecamatan Petanahan. Adapun yang terendah adalah Kecamatan Padureso yang hanya terdapat 510 UMKM.

12. Urusan Penanaman Modal

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
b) Program Promosi Penanaman Modal
c) Program Pelayanan Penanaman Modal
d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.51 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	Milyar Rupiah	405	686,76	169,57		
				1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	1	1	100		
				a Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	1	1	100		
				b Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan	kegiatan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					berusaha di daerah						
				2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi dan peluang usaha	Dokumen	2	2	100		
				a Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah RUPM daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	100		
				b Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	Dokumen	1	1	100		
				B PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen promosi penanaman modal kabupaten/kota	Dokumen	2	1	50	Dokumen LOI yang direncanakan 2 tetapi realisasinya 1 (PT TANAH LAUT)	Mengoptimalkan komunikasi dengan Pelaku Usaha yang merencanakan LOI.
				1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	kegiatan	4	4	100		
				a Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kabupaten/kota	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	persen	100	100	100		
				1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	persen	100	100	100		
				a Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah dokumen perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					terintegrasi secara elektronik						
				b Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	650	650	100		
				c Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	kali	10	10	100		
				D PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	persen	100	100	100		
				1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pelaksanaan penanaman modal	kali	60	60	100		
				b Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	kali	8	8	100		
				c Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	kali	40	40	100		
				E PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi	persen	100	100	100		
				1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Dok	2	2	100		
				a Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang	Dok	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	terintegrasi secara elektronik						

2) **Permasalahan**

Berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 503/168 Tahun 2022 Tentang Standar Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, pelayanan pada masyarakat mempunyai SOP, memiliki durasi waktu tertentu dan penyelesaiannya merupakan unsur prioritas pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pada penyelesaian tersebut sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Nomor 2163 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis yang didalamnya telah tersusun alur tahapan setiap kegiatan baik kegiatan penunjang IKU maupun kegiatan prioritasnya. Peta Proses Bisnis telah memiliki dokumen turunannya yaitu SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Nomor 5003 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang mencakup alur, waktu, dan tahapan setiap kegiatan/aktivitas yang sering dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen telah dilakukan publikasi dan legalitas melalui Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 168 Tahun 2022 yang telah mencakup perizinan berusaha dan nonperizinan. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, diantaranya:

Kebijakan, Potensi dan Ekosistem Peluang Hilirisasi Investasi Strategis di daerah:

a) Akselerasi kerjasama internasional dan promosi serta fasilitasi minat hilirisasi investasi strategis di daerah.
b) Dukungan pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan hilirisasi investasi strategis di daerah.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian optimalisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan antara lain:

a) Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD teknis terkait.
b) Belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan non-perizinan secara komprehensif.
c) Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (SBK).
d) Data profil peluang investasi belum lengkap fiturnya.

e) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan nonperizinan guna kegiatan usahanya.
f) Masih terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pemerintah pusat.
g) Kurangnya petugas pelayanan di MPP.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
   1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk anggaran, fasilitas, serta pelatihan sumber daya untuk daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam dalam rangka hilirisasi.
   2. Membangun sistem digital terintegrasi dari semua K/L yang memiliki kepentingan terhadap percepatan pengembangan hilirisasi.
   3. Penyampaian informasi terkait *Market Intelligence* yang dilakukan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
   4. Digitalisasi promosi di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disiapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan harus diupdate oleh Pemerintah Daerah

b) Program Promosi Penanaman Modal;
   1. Telah dibangun Aplikasi berbasis Web yang terintegrasi dengan SIPERI (Sistem Informasi Perizinan Terintegrasi) berupa GALAKSI (Gerai Layanan Kebumen Pro Investasi).
   2. Telah diberikan apresiasi dalam rangka AUT (Anugrah Usaha Terbaik) Tahun 2023 kepada Kategori usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar. Telah diselenggarakan kegiatan promosi penanaman modal berupa IBIF (*International Business Investment Forum*) Tahun 2023 dalam rangkaian kegiatan KIE (*Kebumen International Expo*) tahun 2023 dan diselenggarakan mini expo serta bisnis matching dan bisnis klinik pada kegiatan *Investment Center*. Penyelenggaraan forum bisnis dan penandatanganan *Letter of intent* (LOI) dokumen kepeminatan investasi.
   3. Telah diikuti CJIBF (*Central Java Investment Business Forum*) tingkat Internasional yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Telah diikuti *Investment Challenge* yang diselenggarakan oleh BI (Bank Indonesia) Perwakilan Semarang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berkontribusi pada CJIP (*Central Java Investment Platform*) berupa IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) yang potensial di Pengembangan Investasi Kabupaten Kebumen.

c) Program Pelayanan Penanaman Modal telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan:
   1. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kebumen.

2. Sosialisasi Fasilitasi Layanan Izin usaha bagi UMKM di 15 lokasi diantaranya: Kec. Ayah, Kec. Ambal, KPPS Ummat, Pasar Tumenggungan, Kec.Karanggayam, Asosiasi UMKM Petanahan, Stand di KIE, Toserba Jadi Baru, Kec. Klirong, Kec. Buluspesantren, Kec. Kuwarasan, Gedung PLUT, Kec. Padureso, Kec. Karanggayam dan Kec. Karanganyar.
3. Penyelesaian Layanan Pengaduan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan penanaman modal dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 103,91%. Adapun rata-rata capaian kegiatan adalah 100% yang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tindak lanjut berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen antara lain:

a) Pengadaan sarana prasarana penunjang layanan secara berkala dan upaya dalam melakukan perbaikan/pemeliharaan guna meningkatkan kualitas layanan perizinan.
b) Pemeliharaan pada sistem perizinan (Siperi) dan beberapa perubahan guna memudahkan proses perizinan kepada masyarakat.
c) Penataan arsip dan monitoring arsip secara bertahap.
d) Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK.
e) Upaya update data pada aplikasi Galaksi (Gerai Layanan Kebumen Pro Investasi).
f) Pelaksanaan promosi melalui media sosial, keikutsertaan dalam event daerah maupun nasional.
g) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi perizinan atau *gathering* terhadap pelaku usaha.
h) Koordinasi terkait pembahasan kebijakan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
i) Melakukan analisa, inspeksi lapangan dan evaluasi pada pelaku usaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
j) Penyelenggaraan seminar penanaman modal, forum bisnis, pameran penanaman modal, dan publikasi informasi potensi investasi baik melalui digital maupun media cetak.

k) Pemetaan kebutuhan SDM, dilakukan bimbingan/pelatihan dan evaluasi pada pegawai.

l) Percepatan penanganan proses izin dan penanganan pengaduan masyarakat.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal sebanyak 1 Indikator yang seluruhnya telah mencapai target tahunan yang tetapkan di dalam RPJMD 2022-2026. Secara lengkap capaian kinerja Urusan Penanaman Modal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.52 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Peningkatan Investasi	Persen (%)	61,65	1	76,70	15,05 (76,70-61,65)	6

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kebumen. 2024

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Target nilai investasi PMA/PMDN tahun 2024 adalah Rp.405.000 dengan capaian realisasi Rp.686.760.779.257.- atau presentase mencapai 169,57% dari target yang ditetapkan.

Sedangkan perhitungan Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan Investasi dengan rumus: Jumlah nilai investasi berskala nasional dalam rupiah tahun (n) yaitu tahun 2024 senilai Rp.686.760.779.257 dikurangi Rp.388.644.285.520 (nilai investasi berskala nasional dalam rupiah tahun 2020) dibagi 388.644.285.520 (nilai investasi berskala nasional dalam rupiah tahun 2020) kali 100 sama dengan 76,70 dikurangi 61,65 (peningkatan investasi tahun 2024) sama dengan 15,05. Dengan demikian Persentase peningkatan Investasi tahun 2024 sebesar 15,05 tercapai diatas target IKU urusan yang ditetapkan sebesar 1%.

Fungsi utama Pemerintah Daerah adalah melayani masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal yang penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat, memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
c) Program Pengembangan Kepramukaan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.53 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Kepemudaan dan Olahraga	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDA-AN DAN OLAHRAGA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	3,92	34,42	878,06		
				1 Kegiatan Penyadaran. Pemberdayaan. dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab./Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kab./Kota	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Keg	23	42	182,60		
				a Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab./Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota	Orang	735	735	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi Olahraga (persen)	%	63,33	52,94	83,59	Beberapa atlet cabang olahraga yang dikirim tidak mendapatkan medali	Dilaksanakannya pembinaan dan fasilitasi cabang olahraga lebih intensif
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik	Unit	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Lokasi	30	30	100		
				2 Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten	Kegiatan	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang ikut serta dalam penye - lenggaraan kejuaraan	Orang	230	372	161,73		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	13	9	69,23	Berkurangnya event NPC dan Porprov	Mengoptimalkan event yang ada dan meningkatkan pembinaan atlet
				a Pemusatan Latihan Daerah. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	84	99	117,85		
				b Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	62	48	77,42	Jumlah atlet berprestasi yang mendapatkan medali tingkat provinsi dan nasional jumlahnya menurun	Dilaksanakannya pembinaan dan fasilitasi cabang olahraga lebih intensif
				4 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga	Keg	2	6	300		
				a Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah unit organisasi yang dibina	Unit	3	5	166,66		
				C PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan prestasi kepramukaan	%	66,67	66,67	100		
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah kegiatan pembinaan dan	Keg	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Organisasi Kepramukaan	pengembangan organisasi kepramukaan						
				a Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan kepramukaan.	Orang	5.133	7.301	142,23		

2) **Permasalahan**

a) Terdapat sarana prasarana olahraga yang rusak sebagai tempat atau alat untuk kegiatan olahraga

b) Kurangnya minat masyarakat berolahraga

c) Rendahnya prestasi olahraga di Kebumen

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Melakukan pemeliharaan sarana prasarana di Kabupaten Kebumen dan mengadakan fasilitas olahraga baru

b) Menambahkan fasilitas olahraga terbuka yaitu *Jogging track* di alun-alun

c) Membuat pembinaan olahraga secara prioritas dan dengan keikutsertaan kompetisi di luar daerah.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kepemudaan dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 353,88%. Rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 141,97%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Kinerja di urusan kepemudaan dan olahraga melalui pelaksanaan program diatas adalah persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase prestasi olahraga, yang kesemuanya mencapai target bahkan persentase organisasi pemuda yang aktif melebihi target RPJMD, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.54 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	45,98	3,94	34,42	878,06	3,92
Persentase Prestasi Olahraga	%	107,94	63,33	52,94	83,59	70

Pada indikator sasaran persentase organisasi pemuda yang aktif realisasinya sebesar 34,42% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 3,94% atau dengan kata lain capaian kinerjanya sebesar 878,06%. Sedangkan

sasaran persentase prestasi olahraga realisasinya sebesar 52,94% atau dengan kata lain capaian kinerjanya sebesar 83,59%.

Indikator persentase organisasi pemuda yang aktif dihitung dengan rumus = Jumlah organisasi pemuda yang aktif/Jumlah seluruh organisasi pemuda x 100%. Selanjutnya untuk persentase prestasi olahraga dihitung dengan rumus = Jumlah nomor cabang olahraga yang berprestasi (mendapat medali emas/perak/perunggu di tingkat provinsi dan nasional)/Jumlah nomor cabang olahraga yang mengikuti event olahraga x 100%.

Tabel III.55 Jumlah Perhitungan Capaian Realisasi

Tahun	Capaian Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif		Capaian Prestasi Olahraga	
	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Jumlah nomor cabang olahraga yang berprestasi (mendapat medali emas/perak/perunggu di tingkat Provinsi dan Nasional)	Jumlah nomor cabang olahraga yang mengikuti event olahraga
2021	42	122	16	24
2022	42	122	19	32
2023	68	148	11	25
2024	42	122	9	17

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2024

14. Urusan Statistik

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Statistik dilaksanakan melalui Program Prioritas Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.56 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Statistik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	dokumen	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	1	1	100		

2) **Permasalahan**

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan statistik adalah sebagai berikut:

a) Keterbatasan Sumber Daya baik SDM maupun anggaran menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan Satu Data Kebumen.
b) Di tahun 2024 belum optimalnya kegiatan Forum Satu Data Kebumen sehingga kurang adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.
c) Upaya penjaminan kualitas data telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen. Namun pada tahap diseminasi data terdapat perbedaan waktu diseminasi yang melebihi dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga masih perlu ditambahkan penyediaan format data yang lebih bervariasi
d) Dalam tata kelola Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Kebumen belum dilakukan *review* dan evaluasi secara berkala yang dapat menjelaskan perbedaan sebelum dan sesudah dilakukannya *review* dan evaluasi.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan juga peningkatan alokasi anggaran di bidang statistik.
b) Kegiatan Forum Satu Data Kebumen perlu dioptimalkan kembali sebagai sarana untuk koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah di Kabupaten Kebumen.
c) Perlu menyusun petunjuk teknis yang lebih detail terkait mekanisme penjaminan ketersediaan data untuk pengguna data, proses identifikasi kebutuhan data, penilaian akurasi data, penjaminan aktualisasi data, ketepatan waktu diseminasi, ketersediaan data untuk pengguna data, akses media penyebarluasan data, penyediaan format data, keterbandingan data dan kematangan konsistensi statistik.
d) Perlu dilakukan *review* dan evaluasi secara berkala dalam tata kelola Satu Data Indonesia.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Rata-rata capaian kinerja Program Penyelenggaraan statistik Sektoral adalah 100%. Adapun rata-rata capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan *website* Satu Data. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.57 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase OPD yang Mengisi *Website* Satu Data Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100

Sumber: DISKOMINFO Kabupaten Kebumen. 2024

Capaian kinerja urusan statistik selama periode 2024 adalah seluruh OPD di Kabupaten Kebumen mengisi portal Satu Data sesuai SOP dan tersedianya Buku Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

15. Urusan Persandian

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Persandian dilaksanakan melalui Program Prioritas Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Adapun capaian kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.58 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Persandian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian. industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PPROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	%	83,48	94,35	113,02		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	%	83,48	94,35	113,02		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat daerah	50	50	100	.	

2) **Permasalahan**

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan persandian adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terkait tanda tangan elektronik dapat menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi ini oleh kepala desa dan masyarakat di Kabupaten Kebumen.
b) Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi: Infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai ditingkat desa dapat menghambat penggunaan tanda tangan elektronik, memerlukan investasi dalam pembaruan dan peningkatan teknologi.
c) Keamanan Data: Keprihatinan terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi dapat menjadi hambatan, khususnya jika masyarakat atau pemerintah desa merasa kurang yakin terhadap keamanan penggunaan tanda tangan elektronik.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah adalah sebagai berikut:

a) Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada kepala desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait manfaat dan prosedur penggunaan tanda tangan elektronik.
b) Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Investasi dalam peningkatan infrastruktur dan teknologi di tingkat desa untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi tanda tangan elektronik.
c) Pengembangan Kebijakan Pendukung: Menyusun kebijakan pendukung yang memastikan keamanan dan validitas tanda tangan elektronik, serta memberikan insentif bagi kepala desa yang mengadopsi teknologi ini.
d) Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Memperkuat kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara untuk memberikan dukungan teknis dan regulasi yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Rata-rata capaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah 113,02%. Adapun rata-rata capaian kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 113,02%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.59 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	%	70,65	83,48	94,35	113,02	100

Sumber: DISKOMINFO Kabupaten Kebumen. 2024

Capaian kinerja urusan persandian selama periode 2024 adalah terlaksananya penerapan Tanda Tangan Elektronik untuk seluruh Kepala Perangkat Daerah dan 431 Kepala Desa/Kelurahan.

16. Urusan Kebudayaan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengembangan Kebudayaan; dan
b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.60 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kesenian yang Dikembangkan (%)	%	40,63	41,27	101,57		
				1 Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	%	52	52,67	101,30		
				a Sub Kegiatan Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Orang	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Laporan	2	2	100		
				B PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	27,47	76,15	277,23	.	
				1 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	%	29	76,15	262,60		
				a Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	objek	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek	10	10	100		

2) **Permasalahan**

Capaian indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan sebesar 58,71% melampaui target yang ditetapkan sebesar 34,05%, menunjukkan pencapaian yang cukup baik dalam upaya pelestarian budaya. Meskipun demikian pencapaian yang signifikan ini mungkin juga memberikan beberapa permasalahan/kendala yang perlu diperhatikan. Berikut adalah analisis mengenai permasalahan/kendala:

a) Kesenjangan Kualitas Pelestarian

Permasalahan: Capaian kuantitatif yang tinggi mungkin tidak diiringi dengan kualitas pelestarian budaya yang optimal. Misalnya dokumentasi yang kurang detail atau program pelestarian yang kurang berdampak jangka panjang.

Dampak: Risiko hilangnya esensi budaya atau pelestarian yang bersifat formalitas tanpa nilai substansial.

b) Keterbatasan Sumber Daya

Permasalahan: Meski capaian tinggi, pelestarian budaya mungkin terkendala oleh sumber daya yang terbatas, baik dari segi anggaran, tenaga ahli, maupun fasilitas pendukung.

Dampak: Potensi keberlanjutan program pelestarian menjadi terhambat.

c) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Permasalahan: Pelestarian budaya bisa menjadi kurang efektif jika partisipasi masyarakat lokal belum optimal, baik dalam bentuk keterlibatan langsung maupun kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya.

Dampak: Program pelestarian menjadi terkesan eksklusif dan sulit berakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

d) Modernisasi dan Globalisasi

Permasalahan: Pengaruh modernisasi dan globalisasi dapat mengurangi minat generasi muda terhadap budaya lokal, meskipun indikator pelestarian menunjukkan hasil yang baik.

Dampak: Tantangan dalam menjadikan budaya lokal relevan di tengah dinamika zaman.

e) Fragmentasi Program Pelestarian

Permasalahan: Program pelestarian mungkin dilakukan secara terpisah-pisah tanpa koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, komunitas budaya dan lembaga swasta.

Dampak: Efisiensi dan efektivitas program menjadi terhambat.

f) Kurangnya Monitoring dan Evaluasi

Permasalahan: Tingginya angka capaian mungkin belum didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang memadai untuk menilai dampak riil dari pelestarian budaya.

Dampak: Kesulitan dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penguatan.

g) Perubahan Prioritas Kebijakan

Permasalahan: Fokus pada aspek lain seperti ekonomi dan infrastruktur dapat menggeser prioritas terhadap pelestarian budaya.

Dampak: Potensi penurunan dukungan jangka panjang terhadap pelestarian budaya

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja di masa mendatang, beberapa strategi yang akan diimplementasikan:

a) Mengatasi Kesenjangan Kualitas Pelestarian

- Mengembangkan panduan standar pelestarian budaya yang jelas dan terukur.
- Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal dan informal.
- Melibatkan ahli budaya dan tokoh masyarakat dalam setiap program pelestarian untuk menjaga kualitas dan autentisitas budaya.

b) Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya

- Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pelestarian budaya dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Mengoptimalkan kolaborasi dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- Memberdayakan komunitas lokal sebagai pelaku utama pelestarian dengan memberikan pelatihan dan pendampingan.

c) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

- Mengadakan program kampanye kesadaran budaya. seperti festival budaya, pameran seni dan lokakarya tradisional.
- Mendorong masyarakat untuk mendokumentasikan dan mempraktikkan tradisi budaya secara mandiri.
- Membentuk kelompok atau komunitas budaya di tingkat desa atau kelurahan sebagai pusat kegiatan pelestarian.

d) Menghadapi Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi

- Menggabungkan elemen budaya tradisional dengan inovasi modern untuk menjadikannya lebih relevan bagi generasi muda.
- Memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan budaya lokal melalui media sosial, situs web dan platform digital lainnya.
- Menciptakan produk budaya kreatif, seperti musik, pakaian, atau kerajinan, yang dapat bersaing di pasar global.

e) Mengatasi Fragmentasi Program Pelestarian

- Membentuk badan koordinasi khusus yang bertugas mengintegrasikan semua program pelestarian budaya.
- Membangun kemitraan yang solid antara pemerintah, komunitas budaya, akademisi, dan sektor swasta.
- Mengembangkan peta jalan pelestarian budaya yang bersifat jangka panjang dan menyeluruh.

f) Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi

- Membuat indikator kinerja yang tidak hanya mencakup kuantitas tetapi juga kualitas pelestarian budaya.
- Melakukan survei dan penelitian berkala untuk mengukur dampak dari setiap program pelestarian.
- Membuka saluran umpan balik dari masyarakat untuk mengetahui kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

g) Mengatasi Perubahan Prioritas Kebijakan

- Mengintegrasikan pelestarian budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
- Memastikan pelestarian budaya masuk dalam dokumen perencanaan strategis nasional maupun daerah.
- Mengadvokasi pentingnya pelestarian budaya kepada para pembuat kebijakan melalui data dan studi kasus yang relevan.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan data diatas. rata-rata capaian program adalah 189,40% hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Dan rata-rata capaian kegiatan adalah 154,63% dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 168,54%. Secara umum, baik program maupun kegiatan kebudayaan telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Di wilayah Kabupaten Kebumen banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi. Sebagian benda tersebut sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan sejarah (objek di duga cagar budaya/ODCB) yang ada hingga tahun 2024 yang terdata sebanyak 130 buah, dan yang dilestarikan 99 buah. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan, khususnya yang merupakan kesenian dan kebudayaan asli Kebumen adalah dengan

menyelenggarakan festival seni dan budaya serta pelestarian objek di duga cagar budaya/ODCB dan Cagar Budaya/CB. Penyelenggaraan festival seni dan budaya selain memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda. melestarikan seni budaya asli Kebumen dan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan sesuai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017.

Tabel III.61 Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2024

No	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2023	TAHUN 2024			TARGET AKHIR 2026
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
1.	Persentase budaya yang dilestarikan	60,30	34,05	58,71	172,43	43,05

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. 2024

Persentase budaya yang dilestarikan pada Tahun 2024 telah mencapai target dengan realisasi 58,71% dengan capaian kinerja 172,43%. Dan target akhir RPJMD mencapai 136,38%. Indikator Persentase budaya yang dilestarikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.62 Capaian Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2020-2024

TAHUN	PERSENTASE KESENIAN YANG DIKEMBANGKAN	PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN	TARGET	REALISASI
	%	%	%	%
2020	39,34	21,98	18,16	30.,99
2021	60,66	0	20,82	30
2022	42,62	26,92	25,05	34,89
2023	44,44	76,15	29,82	60,30
2024	41,27	76,15	34,05	58,71

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan dengan Rumus = Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan/Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdata x 100% dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.63 Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan

TAHUN	JUMLAH BENDA, SITUS, DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN	TOTAL BENDA, SITUS, DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG TERDATA	TARGET	REALISASI
			%	%
2020	20	91	17,58	21,98
2021	0	91	19,78	0
2022	35	130	21,98	26,92
2023	99	130	25,27	76,15
2024	99	130	27,47	76,15

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Dari tabel diatas pada tahun 2020 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ada 20 objek cagar budaya/diduga cagar budaya dari 91 objek yang terdata. Pada tahun 2021 karena ada pandemi Covid19 jadi hampir semua kegiatan terhenti karena ada r*ecofusing* anggaran. Dan ditahun benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sejumlah 35 objek cagar budaya/diduga cagar budaya, dari 130 objek yang terdata. Pada tahun 2022 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sejumlah 55 objek cagar budaya/diduga cagar budaya dari 130 objek yang terdata. Dan di tahun 2023 dan tahun 2024 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ada 99 objek dari dari 130 objek yang terdata.

Indikator persentase kesenian yang dikembangkan dengan rumus: Jumlah kebudayaan/jumlah kegiatan x 100% dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.64 Indikator Persentase Kesenian yang Dikembangkan

TAHUN	JUMLAH KEBUDAYAAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET	REALIASI
			%	%
2020	61	24	18,75	39,34
2021	61	37	21,88	60,66
2022	61	26	28,13	42,62
2023	63	28	34,38	44,44
2024	63	26	40,63	41,27

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Capaian kinerja urusan kebudayaan menunjukkan bahwa secara umum kinerja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan dilaksanakan tepat waktu.

17. Urusan Perpustakaan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pembinaan Perpustakaan; dan
b) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.65 Capaian Program.Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Perpustakaan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian. industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	%	12,93	16,91	130,78		
				1 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah/Kabupaten	%	33,58	40,69	121,17		
				a Sub Kegiatan Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	3	4	133,3		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					sesuai kewenangannya						
				b Sub kegiatan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	26	30	115,3		
				c Sub kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	Buku	1000	1000	100		
				2 Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah pengunjung ke Perpustakaan	%	19,58	31,45	160,62		
				a Sub Kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi	Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca	kali	154	160	103,89		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat.	dan Literasi pada satuan Pendidikan						
				b Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	26	38	146,15		
				B PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno	%	80	80	100		
				1 Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang didaftarkan ke Perpustakaan Nasional	dokumen	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan. perawatan. pelestarian dan pendaftaran naskah kuno.	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan. Perawatan. Pelestarian. dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	1	1	100		

2) **Permasalahan**

Permasalahan dalam pencapaian target program dan kegiatan yaitu;

a) Jumlah pustakawan di Kabupaten Kebumen belum mencukupi, dari 504 pustakawan baru ada 90 orang.
b) Titik akses informasi layanan perpustakaan (Perpustakaan dan Perpustakaan Digital) belum merata, dari 1031 titik baru ada 503 titik.
c) Dukungan pegiat literasi (bunda literasi dan duta literasi) dan komunitas literasi (Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, Komunitas Literasi Sekolah, Institut literasi Indonesia) di Kabupaten Kebumen belum optimal.
d) Sarana prasarana layanan perpustakaan dan perpustakaan digital belum merata.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu:

a) Mengusulkan formasi Pustakawan.
b) Kerjasama dan CSR dengan PT. Enam KUBUKU Indonesia dan PT. Media DIGIDO Nusantara dalam rangka penyediaan layanan perpustakaan digital sekolah dan desa.
c) Mendorong Duta Literasi Kabupaten, Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten dan Kecamatan serta Desa.
d) Mengusulkan sarpras layanan perpustakaan dan perpustakaan digital yang berbasis teknologi informasi.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perpustakaan dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 115,39% atau kategori hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Capaian kinerja kegiatan rata-rata adalah 127,26%.

Keberhasilan pelaksanaan urusan ini dapat pula dibuktikan dengan adanya skor Indeks Peningkatan Literasi masyarakat menempati peringkat pertama di Jawa Tengah Tingkat Kabupaten dan peringkat ke 6 di Jawa Tengah tingkat Kabupaten/Kota. Perpustakaan daerah Kabupaten Kebumen memperoleh akreditasi A dan memperoleh penghargaan keberlanjutan inovasi pelayanan publik GWPC tahun 2024.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Kinerja di urusan perpustakaan secara umum ditunjukkan dengan satu indikator yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan

Literasi Masyarakat ditargetkan 12,96 dan terealisasi 16,91 atau telah tercapai bahkan melebihi target yang direncanakan. Hal ini dikarenakan adanya inovasi layanan perpustakaan, kerjasama dengan penggiat literasi, komunitas, aktif di media sosial, pengukuhan bunda literasi kabupaten dan duta literasi kabupaten. Secara lengkap capaian kinerja Urusan perpustakaan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.66 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	18,85	12,96	16,91	130,27	13,06

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. 2024

Cara menghitung capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah Jumlah Semua Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi aspek masyarakat x 100. Semakin banyak unsur pembangun Literasi Masyarakat maka semakin baik pula Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dihasilkan. Dari target kinerja tahun 2024 yaitu 12,96 terealisasi menjadi 16.91 sehingga capaian yang didapat 130,27%.

Secara rinci Indikator Kinerja Urusan perpustakaan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.67 Indikator Kinerja Urusan Pembangunan Daerah

NO	URAIAN	TAHUN	
		2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan (unit)	13	1.030
2	Jumlah Kunjungan Perpustakaan (Orang)	290.339	307.276
3	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (Buku)	48.844	44.426
4	Presentase Pengunjung Perpustakaan%	29,71	31,45

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. 2024

18. Urusan Kearsipan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Urusan ini dilaksanakan melalui program prioritas yaitu Program Program Pengelolaan Arsip. Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.68 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Kearsipan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENGELOLA-AN ARSIP	Persentase Jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku	%	76,27	84,31	110,54		
				1 Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	50	50	100		
				a Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah pembinaan pengelolaan arsip dan pengawasan kearsipan	OPD	50	50	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Berkas	3	3	100		
				2 Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten Kebumen	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Akuisisi. Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis	Arsip	4	4	100		
				3 Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip statis yang diunggah melalui JIKN	Berkas	24	27	112,5		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Informasi. Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi. Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	5	5	100		

2) **Permasalahan**

Masih ada permasalahan yang dihadapi antara lain:

a) Sumber daya manusia kearsipan sudah tersedia, namun belum memenuhi kualifikasi kompetensi arsiparis dan pengelola kearsipan.
b) Sarana prasarana kearsipan belum sepenuhnya memadai sesuai kriteria yang dibutuhkan.
c) Keterbatasan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan Diklat kearsipan karena Diklat merupakan kewenangan BKPSDM.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya mengatasi permasalahan yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yaitu:

a) Dilakukan Diklat kearsipan oleh BKPSDM.
b) Penyediaan sarana prasarana sesuai kebutuhan.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kearsipan dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 110,54% atau kategori hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 104,16%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Keseluruhan program dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip baku.

Tabel III.69 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen
Tahun 2023-2004

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase jumlah Perangkat Daerah menerapkan arsip baku	%	74,51	76,27	84,31	110,54	80,20

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. 2024

Capaian kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2023-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 persentase unit kerja yang telah menerapkan arsip baku 74,51% atau 380 unit kerja. Namun

pada tahun 2024 unit kerja yang telah menerapkan arsip baku telah mencapai 430 unit kerja atau 84,31%. Dari target yang telah direncanakan Urusan Kearsipan telah mencapai 110,54%.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip pada pencipta arsip dilaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan kearsipan. Hal ini bertujuan untuk tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Guna mendukung terwujudnya pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku juga dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.70 Perkembangan Penerapan Arsip Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024

URAIAN	2023	2024
Jumlah OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku	380	430
Jumlah OPD	510	510
Persentase OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku	74,51	84,30

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. 2024

Keberhasilan pelaksanaan urusan ini dapat pula dibuktikan dengan diterimanya penghargaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Peringkat 2 dengan kategori AA (sangat memuaskan) dengan nilai 93,15. Prestasi tersebut juga menempatkan Kabupaten Kebumen di peringkat 8 Pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional Tahun 2024.

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.71 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan (DLHKP)	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	5,00	5,01	100,20		
				1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	9.363.13	9.522.86	101,71		
				a. Subkeg. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b. Subkeg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	36	36	100		
				2 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan. pendidikan. pelatihan dan pemantauan	Kelompok	35	42	120		
				a. Subkeg. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	150	163	108,67		
				b. Subkeg. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	20	20	100		
				3 Kegiatan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan TPI	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	unit	8	8	100		
				a. Subkeg. Pelayanan Penyelenggaraan	Jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang	Unit	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	mendapatkan sarana operasional						
				4 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kapal perikanan yang berizin	%	37,57	44,14	117,47		
				a. Subkeg. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	496	501	101,01		
				B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	%	20	17,73	88,66	Harga udang di tingkat nasional sedang rendah karena terbatasnya pemasaran keluar negeri	Meningkatkan produksi perikanan air tawar untuk serapan dalam negeri.
				1 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	Dokumen	110	111	100,91		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
				a. Subkeg. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi	110.00	111.00	100,91		
				2 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Ton	98.31	173.18	176,16		
				a. Subkeg. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	100		
				b. Subkeg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	28	28	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c. Subkeg. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	60	60	100		
				d. Subkeg. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	120	120	100		
				e. Subkeg. Perencanaan. Pengembangan. Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan. Dikembangkan. Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	16,53	16,53	100		
				C. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	%	85,71	107,14	125		
				1 Kegiatan Pengawasan	Jumlah Perairan Umum Daratan	lokasi	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	(PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan						
				a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	8	8	100		
				D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	%	40	303,73	759,31		
				1 Kegiatan Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang	Kelompok	20	26	130		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	mendapatkan pembinaan						
				a. Subkeg. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	20	23	115		
				2 Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi hasil pengolahan perikanan dan garam	ton	104,63	99,99	95,56	Produksi garam yang menurun drastis karena kerusakan Tunnel (faktor cuaca, hujan deras, angin kencang/putting beliung, banjir) dan terkendala biaya rehab/perbaikan Tunnel yang sangat besar sehingga Kugar masih kesulitan dalam	- Kugar akan mengusahakan biaya perbaikan tunnel melalui swadaya/mandiri

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										pembiayaan untuk rehab tunnel.	
											- Pengajuan proposal bantuan hibah ke APBD Kabupaten/APBD Provinsi
											- Pada Tahun 2024 sudah ada alokasi dana untuk bantuan sarpras Kugar
				a. Subkeg. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	104,63	99,99	95,56	- Dilihat dari jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 9.363,13 ton dan produksi perikanan budidaya sebanyak 12.878,74 ton. Seharusnya ketersediaan ikan untuk komsumsi dan usaha pengolahan ikan telah mencapai 22.241,87 ton	Penghitungan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota ke depannya mencakup beberapa sumber yaitu dari hasil produksi penangkapan ikan, dari hasil budidaya, serta ikan yang masuk dari luar Kabupaten Kebumen
										- Dari jumlah produksi tahun 2023 sebesar 16.351,95 ton. sudah ada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										peningkatan 5.889,92 ton. Adapun angka 99,99 ton hanya penghitungan untuk 1 sub kegiatan saja.	
				b. Subkeg. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	19	19	100		

2) **Permasalahan**

Adapun permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

a) Kurangnya prasarana pendaratan ikan dan sandaran kapal yang aman sehingga mengurangi trip melaut oleh sebab itu kapal diatas 5 Gross Ton (GT) belum bisa mendaratkan ikan di Kabupaten Kebumen dan kapal dengan ukuran dibawah 5 GT tidak optimal melaut dalam waktu satu tahun;
b) Ukuran kapal yang kecil di Kabupaten Kebumen sehingga tidak bisa melaut lebih lama dan sangat tergantung oleh cuaca;
c) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha budidaya ikan untuk mandiri;
d) Kelompok Pengawas Masyarakat terhadap Perairan Umum Daratan (PUD) masih sedikit;
e) Pengetahuan dan keterampilan SDM serta modal yang kurang;
f) Jumlah produksi perikanan khususnya perikanan tangkap di laut (yang dilakukan oleh para nelayan) sangat tergantung sekali dari faktor alam/musim. Sebagaimana kita ketahui bersama di tahun 2024 ini sering terjadi adanya gelombang pasang menjadi penyebab terbatasnya trip penangkapan nelayan, akibatnya hasil tangkapan belum maksimal;
g) Penanganan hasil tangkapan oleh nelayan kurang baik sehingga menurunkan mutu dan nilai jual hasil tangkapan;
h) Produktivitas Garam yang masih rendah karena belum semua kelompok usaha garam (KUGAR) aktif;
i) Masih tingginya ketergantungan usaha kelompok kepada bantuan pemerintah karena modal yang besar serta resiko kerusakan akibat cuaca;
j) Belum adanya produk olahan ikan di Kabupaten Kebumen yang dapat dijadikan sebagai produk unggulan;
k) Belum adanya sentra kuliner atau sentra ikan segar di pusat kota atau dengan konsep pariwisata;
l) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk hasil olahan ikan karena mahalnya bahan baku untuk pengolahan hasil perikanan;
m) Rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk olahan hasil perikanan yang sebagian lebih mahal daripada sumber protein lain. Hal ini dapat dilihat dari perolehan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Kebumen yang sangat rendah dibawah target provinsi (29,17 kg/ka/ta) dan target nasional (62,5 kg/ka/ta) yaitu rata-rata dalam setahun hanya 28,08 kg/ka/ta.

3) **Upaya Mengatasi Masalah**

Adapun solusi untuk mengatasi masalah yang ada pada Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

a) Pemberian Hibah Sarpras Perikanan tangkap;
b) Mengusulkan anggaran hibah melalui APBD Kabupaten. provinsi maupun pusat;
c) Melaksanakan diklat teknis budidaya ikan;
d) Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) Pringtutul dan Pasar Ikan di Kutowinangun;
e) Mendorong peningkatan jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
f) Peningkatan produksi tambak udang masyarakat maupun BUBK melalui penyuluhan dan pemberian sarpras;
g) Meningkatkan restocking ikan di PUD;
h) Bimtek, Pelatihan, Sertifikasi terhadap produk dan SDM;
i) Pembangunan Prasarana Pendaratan Ikan (*Breakwater* sekaligus sandaran kapal) yang aman dan bisa untuk melakukan kegiatan penangkapan sepanjang tahun kecuali musim Angin Barat untuk kapal dengan Gross Ton (GT) kecil;
j) Meningkatkan Tonase Kapal Penangkapan Ikan dan Lama Trip;
k) Meningkatkan jumlah kapal dengan Tonase di atas 5 GT;
l) Pemberian fasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang sesuai standar;
m) Memberikan sosialisasi cara penanganan hasil tangkapan yang baik;
n) Meningkatkan pelatihan dan bimbingan terhadap kelompok usaha garam supaya produknya dapat bersaing di pasaran;
o) Menumbuhkan kemandirian kelompok usaha garam (Kugar);
p) Mendorong tumbuhnya inovasi produk usaha garam;
q) Menetapkan/mengangkat salah satu produk olahan ikan asli kebumen sebagai produk unggulan hasil olahan ikan khas kabupaten Kebumen; dan
r) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan dengan terus melakukan pembinaan poklahsar serta menjamin ketersediaan bahan baku olahan.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 4 (empat) program, dengan total capaian sebesar 1.065,25 atau rata-rata capaian kinerja program sebesar 266,31% dan mendapat kategori Hasil Sangat Tinggi. hal ini menghasilkan capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Jumlah kegiatan sebanyak 9 (Sembilan) dengan total capaian sebesar 1.041,81 sehingga rata-rata capaian sebesar 115,76%.

Capaian program yang capaiannya sangat tinggi atau lebih dari 200% sesuai dengan ketentuan efisiensi kinerja. yaitu ;

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator kinerja program Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan yaitu sebesar 759,31% hal tersebut dikarenakan kenaikan harga bahan baku sehingga menaikkan harga jual produk olahan hasil perikanan.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Terdapat 1 Indikator Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun capaian kinerja urusan kelautan sesuai dengan perjanjian kinerja dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini:

Tabel III.72 Capaian Kinerja Urusan Perikanan Dan Kelautan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
		Target	Realisasai	Capaian	
Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan (IKU)	%	6,00	26,36	439,38	9

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen. 2024

Tabel III.73 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Perikanan dan Kelautan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tujuan: Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	5.657.88 Milyar Rupiah (Target gabungan beberapa OPD)	422.01 Milyar Rupiah	7,46
2.	Sasaran: Meningkat nya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan (IKU)	6,00%	26,36%	439,38
		Nilai produksi usaha kelautan dan perikanan (IKU)	Rp. 3548.950.924.-	Rp.422.014.794.640.13.-	119,21
		Nilai Produksi perikanan	Rp. 156.803.264.400.-	Rp.153.838.453.500.00.-	98,11

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		budidaya (Pendukung IKU)			
		Nilai Produksi perikanan tangkap (Pendukung IKU)	Rp 206.071.425.440.-	Rp.239.742.697.383.88.-	116,34
		Nilai produksi hasil pengolahan perikanan dan garam (Pendukung IKU)	Rp. 9.859.949.400.-	Rp.28.433.643.756.-	288,38

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen. 2024

Data dasar tahun 2020 untuk 3 indikator pendukung IKU memperoleh nilai produksi yaitu;

a) Nilai Produksi perikanan budidaya Rp. 130.669.3870.-
b) Nilai Produksi perikanan tangkap Rp. 196.258.500.419.-
c) Nilai produksi hasil pengolahan perikanan dan garam Rp. 7.042.8210.-

Dari ketiga indikator diatas memperoleh nilai produksi sebesar Rp.333.970.708.419.- jika dimasukkan ke dalam rumus peningkatan maka terjadi peningkatan Nilai Produksi sebesar 26,36% dengan Nilai Produksi pada tahun 2024 sebesar Rp..- 422.014.794.640.13.-

Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan	=	$\frac{(\text{Rp. } 422.014.794.640.13 - \textit{Rp. } 333.970.708.419)}{(\textit{Rp. } 333.970.708.419)}$	*X 100%*

Dari Tabel diatas jika dimasukkan ke dalam rumus maka diperoleh Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar

26,36% dari tahun dasar 2020. Dari target peningkatan 6,00% maka diperoleh capaian 439,38% dengan predikat **“Baik Sekali”.**

2. Urusan Pariwisata

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pemasaran Pariwisata;
b) Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; dan
c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adapun capaian kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.74 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pariwisata	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	%	86,52	86,86	100,39		
				1 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (kegiatan)	Keg	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengelolaan Kawasan Strategis	orang	500	500	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pariwisata Kab/Kota						
				2 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola	unit	9	9	100		
				a Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pariwisata kab/kota	Dokumen	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikembangkan dan dikelola	Destinasi	9	9	100		
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	3	3	100		
				3 Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah unit bidang usaha pariwisata yang terbina/sosialisasi (bidang)	bidang	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola pemda (obwis)	obwis	8	8	100		
				B PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	25	38.69	162		
				1 Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara	orang	1.400.200.00	2.983.422	213,07		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/event pemasaran pariwisata yang dilaksanakan (kegiatan)	Keg	8	8	100		
				C PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	%	25	25	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan	Keg	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						
				a Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Tingkat Dasar	orang	150	150	100		

2) **Permasalahan**

Capaian indikator kontribusi pendapatan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,83% di bawah target yang ditetapkan sebesar 2,03% menunjukkan beberapa permasalahan dan kendala dalam sektor pariwisata yang perlu diperhatikan. Berikut adalah mengenai permasalahan/kendala yang terjadi:

a) Transportasi umum menuju destinasi wisata belum memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.
b) Promosi dan Pemasaran yang belum optimal, seperti kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital seperti medsos dan media sosial.
c) Kurangnya pelatihan dan sertifikasi: SDM di sektor pariwisata, seperti pemandu wisata, petugas hotel, dan pengelola destinasi, belum mendapatkan pelatihan yang memadai.
d) Kurangnya kesadaran masyarakat lokal dalam mendukung pariwisata di daerahnya sendiri.
e) Persaingan dengan Destinasi Lain, kompetisi dalam pelayanan dan inovasi pengembangan wisata.
f) Minimnya penambahan wahana wisata dan sarana pendukung sebagai daya tarik wisata.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Melihat capaian indikator Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar 1,83%. di bawah target 2,03% sektor pariwisata perlu merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Berikut adalah beberapa strategi yang akan diimplementasikan:

a) Pemenuhan transportasi umum oleh Pemerintah Daerah atau investor. Perbaikan aksesibilitas jalan, jembatan dan sarana transportasi menuju destinasi wisata.
b) Optimalisasi Promosi dan Branding Pariwisata.
   Promosi terintegrasi dengan memanfaatkan media sosial, influencer, dan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan internasional.
c) Melaksanakan pelatihan dan setifikasi SDM Pariwisata (Pemandu wisata dan pengelola destinasi)
d) Melaksanakan sosialisasi tentang kepariwisataan bagi masyarakat dengan melibatkan para influencer, Duta Wisata, dan memanfaatkan event-event untuk pengenalan obyek wisata.
e) Penambahan wahana sebagai daya tarik wisata sesuai dengan perkembangan jaman,

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pariwisata dapat diketahui rata-rata capaian program adalah 120,91%. Rata-rata capaian kegiatan adalah 110,96%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Kinerja di urusan pariwisata ditunjukkan dengan satu indikator yaitu Persentase peningkatan kunjungan wisata.

Tabel III.75 Persentase Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
		Target	Realisasai	Capaian	
Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD	%	2,03	1,83	90,15	2,24

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. 2024

Kinerja urusan pariwisata Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 jumlah kontribusi PAD hanya Rp.8.567.416.230 terealisasi 1,83% dari target 2,03% atau tercapai 90,15% dari target PAD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebesar Rp.467.192.9700. Penurunan minat wisatawan mempengaruhi jumlah kunjungan dan pengeluaran wisatawan sehingga PAD menurun. Kualitas layanan dan pengalaman wisata yang belum memadai juga menjadi faktor penentu dalam menarik wisatawan untuk berkunjung kembali. Peningkatan dalam hal ini dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kontribusi PAD dari sektor pariwisata.

Dalam menghadapi penurunan PAD ini perlu adanya evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan serta upaya perbaikan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kontribusi PAD dari sektor pariwisata. Perbaikan infrastruktur, peningkatan promosi dan pemasaran, serta peningkatan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan dapat menjadi langkah-langkah yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan kinerja urusan pariwisata Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang.

3. Urusan Pertanian

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Pertanian dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
e) Program Perizinan Usaha Pertanian;
f) Program Penyuluhan Pertanian.

Adapun capaian kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.76 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	12,7	13,25	104,31		
				1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian	%	67	70,63	105,41		
				a Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	100		
				b Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	2	100		
				2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	Persentase luas area tanaman	%	0,58	0,06	10,35	1 Luas area yang difasilitasi tahun N	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Hewan, Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	pertanian/perkebunan yang difasilitasi					dibagi Luas Area Tahun 2020 dikali 100%	
										2 Target persentase luas area tanaman pertanian/perkebunan yang difasilitasi tahun 2024 berdasarkan Renstra adalah 0,79% yaitu luas area yang difasilitasi tahun 2024 ditargetkan 962 Ha atau 0,79% dari jumlah lahan pertanian sejumlah 121.781 Ha (tahun 2020)	Mengusulkan melalui APBN
										3 Realisasi tahun 2024 adalah 0,06% yaitu luas area yang difasilitasi hanya 706.33 Ha atau 0,06% dari luas lahan pertanian 121.781Ha. Sehingga 256 ha tidak terfasilitasi pada tahun 2024 karena penyesuaian pagu anggaran.	
										4 Adanya penyesuaian pagu anggaran atas	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program DAPAT (Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu) Tahun 2024	
				a Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	3	3	100		
				b Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	2	100		
				c Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	1	1	100		
				3 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak	%	124,78	126,98	101,76		
				a Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak. Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak. Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	1	1	100		
				4 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	1	100		
				5 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak sapi yang mendapatkan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit	%	3,62	3,62	100		
				a Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Laporan	500	500	100		
				a Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan	2.000	2.000	100		
				B PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	%	24	20,90	87,08	1 Rumusan persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak adalah Jumlah prasarana pertanian yang layak dibagi Jumlah kebutuhan prasarana dikali 100%	1 Usulan kegiatan bersumber dana APBN
										2 Target sampai dengan tahun 2024 berdasarkan renstra panjang prasarana pertanian yang layak	2 Desa bersama kelompok tani melakukan pembangunan/rehabilitasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										147.240 meter atau 24% dari 613.500 meter yang dibutuhkan.	saluran irigasi dengan anggaran desa maupun swadaya masyarakat;
										3 Realisasi sampai dengan tahun 2024 adalah 128.222 meter atau 20,90% dari panjang prasarana yang dibutuhkan yaitu 613.500 meter karena penyesuaian pagu anggaran.	3 Peran aktif dari kelompok masyarakat (GP3A, P3A) dalam memelihara saluran irigasi.
				1 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya	Kegiatan	2	2	100		
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	2	100		
				2 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	62	62	100		
				a Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	25	25	100		
				b Pembangunan. Rehabilitasi dan	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta	Unit	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Sarana Pendukungnya yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara						
				c Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	23	23	100		
				d Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	12	12	100		
				e Pembangunan. Rehabilitasi. Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun. direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	2	2	100		
				3 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kecamatan	26	26	100		
				a Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	%	2,98	19,16	642,95		
				1 Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)	Ekor	1.791	1.586	88,55	1 Terjadii penurunan target kasus penyakit hewan menular dari tahun sebelumnya. dimana di tahun 2023 target kasus sejumlah 1962, sedangkan di tahun 2024 target kasus menurun yaitu 1791. Sehingga terdapat penurunan terget kasus sejumlah 171 ekor	
										2 Realisasi 2024 sebanyak 1.586 ekor dimana terjadi penurunan sebanyak 376 kasus penyakit hewan menular. Sehingga perhitungan berdasarkan realisasi per target adalah 376/171 *100% = 219,88%	
				a Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah wilayah atau kawasan yang	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota						
				2 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	Kali	3.200	986	30,81	Penggunaan aplikasi lalulintas isikhnas.com masih baru yang menyebabkan pelaku usaha masih belum familiar dengan aplikasi tersebut	sosialisasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan/produk hewan perlu ditingkatkan
				a Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan. Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	laporan	1	1	100		
				b Analisis Risiko Penyakit Hewan. zoonosis. produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan. zoonosis. produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	1	1	100		
				3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	Kali	1.810	68.493	3.784,14		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah Kabupaten/Kota							
				a Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	1	100		
				4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	12	12	100		
				a Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	100		
				b Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	1	100		
				5 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang memperoleh pendampingan dalam penerapan kesejahteraan hewan	Unit	6	6	100		
				a Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	4	4	100		
				D PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	10,01	1,54	15,38	1 Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Hama Penyakit	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Tanaman adalah (luas lahan yang ditanggulangi dari OPT* + luas lahan yang mengikuti AUTP**)/luas lahan pertanian x 100%.	
										2 Target pada tahun 2024 berdasarkan Renstra adalah 10,01% yaitu luas lahan yang ditanggulangi dari OPT 555 Ha dan luas lahan yang mengikuti AUTP seluas 8.795 Ha sehingga jumlahnya 9350 Ha atau 10,01% dari luas lahan pertanian 93.448.53 Ha	
										3 Realisasi tahun 2024 adalah 1,54% yaitu luas lahan yang ditanggulangi dari OPT 555 Ha dan luas lahan yang mengikuti AUTP hanya seluas 382.08 Ha sehingga jumlahnya 937.08 Ha atau 1.54% dari luas lahan pertanian 93.448,53 Ha	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										4 Adanya kebijakan dari PUSAT (APBN) untuk kuota AUTP	
				1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	9.350	937,08	10,02	1 Target Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Tahun 2024 berdasarkan Renstra adalah 9.350 Ha	
										2 Realisasi Tahun 2024 adalah 937,08 Ha. hal ini dikarenakan penyesuaian luasan penjaminan AUTP yang difasilitasi kegiatan hanya seluas 382,08 Ha	
				a Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	555	555	100		
				b Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan. Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman	Laporan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pangan. hortikultura dan perkebunan						
				E PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	%	100	100	100		
				1 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	%	100	100	100		
				a Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	1	100		
				b Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	%	100	100	100		
				c Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				F PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	%	58	58	100		
				1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Skor rata-rata kategori nilai prestasi kerja penyuluh dan kategori penilaian kelas kelompok tani	Poin	2.8	2.8	100		
				a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	34	34	100		
				b Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	50	50	100		
				c Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	7	7	100		
				d Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	2	2	100		
				e Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	1	1	100		

2) **Permasalahan**

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam upaya pencapaian capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

a) Penggunaan teknologi yang belum optimal
b) Tingginya biaya produksi pertanian
c) Terbatasnya ketersediaan dan akses pupuk bersubsidi
d) Masih tingginya angka kehilangan produksi *(food loss)*
e) Minimnya rata-rata luas kepemilikan dan penguasaan lahan pertani dan masih terjadunya alih fungsi lahan ke non pertanian
f) Kondisi jaringan Irigasi belum memadai
g) Produktivitas ternak Sapi Unggulan (Sapi PO Kebumen) terganggu akibat Penyakit Hewan Menular Strategis
h) Masih awamnya pengetahuan masyarakat mengenai vaksin penyakit hewan menular. Adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) menghambat proses pengambilan sampel pada ternak Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB). Belum optimalnya pengawasan lalu lintas ternak keluar masuk daerah yang berpotensi menyebabkan penularan penyakit hewan
i) Masih maraknya Hama Penyakit Tanaman dan anomali Iklim yang ekstrim mempengaruhi produksi
j) Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap izin usaha dan ketersediaan data usaha pertanian dan peternakan yang belum optimal
k) Masih kurangnya jumlah penyuluh
l) Kurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian
m) Masih kurangnya kompetensi SDM petani/peternak termasuk dalam peningkatan nilai tambah, belum optimalnya tingkat adopsi dan inovasi teknologi dan kelembagaan belum berorientasi bisnis;
n) Berkembangnya digitalisasi pasar
o) Belum optimalnya peningkatan kelas kelompok tani mengenai manajemen kelembagaan kelompok tani
p) Masih sedikit Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berbadan hukum

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya-upaya pemecahan masalah dan tindak lanjutnya dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai produksi pertanian tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

a) Mekanisasi pertanian dengan mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya produksi;
b) Subsidi biaya produksi yaitu dengan memberikan subsidi atau bantuan dalam bentuk pupuk, benih dan pestisida kepada petani untuk mengurangi beban biaya produksi;
c) Diversifikasi pupuk dengan mengembangkan alternatif pupuk organik yang ramah lingkungan serta memberikan pelatihan tentang penggunaan pupuk organik kepada petani. Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi untuk memastikan bahwa pupuk tersebut sampai kepada petani yang membutuhkannya;
d) Peningkatan teknologi pasca panen yaitu dengan meningkatkan akses petani terhadap teknologi pasca panen seperti pengeringan dan penyimpanan yang tepat guna mengurangi kerugian hasil panen. Memberikan pelatihan kepada petani tentang praktik pasca panen yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat dalam pengolahan dan penyimpanan;
e) Menegakkan perizinan alih fungsi lahan dengan ketat dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Menginisiasi program konsolidasi lahan untuk menggabungkan lahan pertanian kecil menjadi area yang lebih besar. Meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mengawasi dan menegakkan aturan penataan ruang;
f) Merehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi yang ada untuk memastikan distribusi air yang efisien dan merata. Pengelolaan partisipatif yang melibatkan petani dalam pengelolaan irigasi termasuk perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan;
g) Kedisiplinan *Biosecurity*, penanganan setiap penyakit hewan seperti pengobatan massal PMK dan LSD dengan Puskeswanling dan prosedur isolasi kasus. Peningkatan Pelayanan Medik Reproduksi bekerjasama dengan FKH UGM. Mengusulkan anggaran untuk Pelestarian Wilayah sumber Bibit dan Bibit Sapi PO Kebumen kepada Kementan serta peningkatan produktivitas Sapi PO Kebumen.
h) Pelaksanaan vaksinasi PMK dan LSD dengan target minimal 80 persen dari populasi sapi. Surveilan/pengamatan penyakit hewan secara rutin;
i) Sosialisasi dan pembinaan kepada petani pentingnya pengendalian OPT secara preventif dan upaya antisipasi dampak perubahan iklim (kebanjiran/kekeringan). Sosialisasi kepada kelompok tani untuk bisa mengikuti AUTP secara mandiri;

j) Penyusunan dokumen usaha pertanian dan peternakan dan pembinaan dan sosialisasi perizinan usaha pertanian dan peternakan;
k) Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian;
l) Mengembangkan program magang dan pelatihan yang menarik dan praktis dengan mengajak generasi muda untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pertanian modern dan berkelanjutan. Mendorong inklusi pendidikan pertanian di tingkat sekolah serta menjadikan materi pertanian menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi muda;
m) Menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis, pendampingan teknis, pendidikan teknologi, fasilitasi akses teknologi, adanya pusat inovasi pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengenalan Konsep Agribisnis;
n) Pengenalan teknologi digital yaitu dengan memberikan pelatihan kepada petani dalam penggunaan teknologi digital termasuk pemasaran online, aplikasi pertanian dan platform perdagangan digital;
o) Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk petani dalam mengelola kelembagaan mereka dengan pendekatan bisnis yang lebih baik;
p) Pembinaan dan pendampingan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) agar dapat berbadan hukum.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2024 rata-rata capaian indikator kinerja dari enam program mencapai 174,95% dan dari 17 kegiatan tercapai 301,83%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

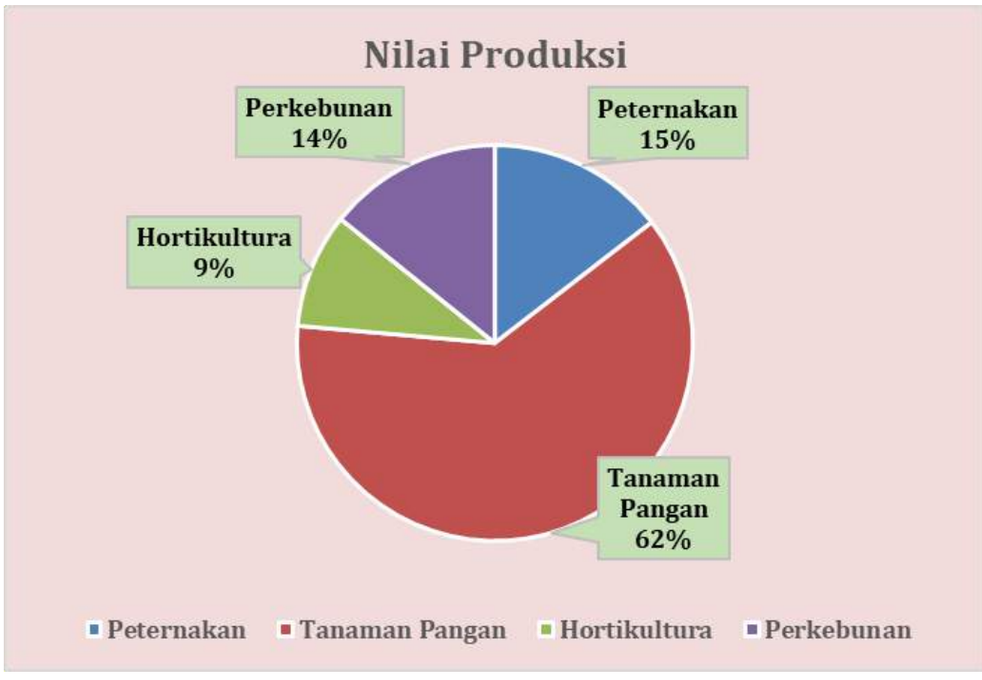
Keseluruhan program yang telah disampaikan telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai produksi pertanian tahun 2024 untuk mendukung capaian tujuan yang merupakan sasaran daerah yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer dengan capaian kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.77 Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen
Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	15,98	4	14,33	358,25	6

Sumber: DISTAPANG Kab. Kebumen 2024

Indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi pertanian Kabupaten Kebumen telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian indikator kinerja 14,33% diperoleh dengan formulasi Pengukuran = (nilai produksi pertanian tahun (n) dalam rupiah-nilai produksi pertanian tahun 2020 dalam rupiah)/nilai produksi pertanian tahun 2020 dalam rupiah x 100%. Nilai produksi pertanian tahun 2020 sebesar Rp.4.535.602.068.918.- dan nilai produksi tahun 2024 sebesar Rp. 5.185.626.327.660.- yang terdiri dari nilai produksi peternakan (daging dan telur), tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura (buah-buahan, sayur – sayuran, biofarmaka) dan perkebunan dengan kontribusi nilai produksi hasil pertanian tahun 2024 masing – masing sektor dapat dilihat pada gambar 3.1. berikut ini.



Gambar III.2 Kontribusi Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Sumber: DISTAPANG Kab. Kebumen 2024

Dilihat dari tabel di atas di ketahui kontribusi terbesar nilai produksi pertanian di Kabupaten Kebumen tahun 2024 adalah dari komoditas tanaman pangan sebesar 62%. kemudian komoditas peternakan sebesar 15%. komoditas perkebunan sebesar 14%. dan komoditas hortikultura sebesar 9% dari total nilai produksi pertanian sejumlah Rp.5.185.626.327.660.-

Nilai produksi pertanian tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dari komoditas peternakan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut ini.

Tabel III.78 Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – Tahun 2024

NO.	Komoditas	Nilai Produksi (Rp.)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Peternakan	955.329.468.518	794.374.2080	675.472.222.750	775.521.422.130	754.657.072.500
2.	Tanaman Pangan	2.729.463.6150	2.913.177.1890	2.838.161.639.900	3.268.936.3320	3.206.544.491.200
3.	Hortikultura	415.148.135.900	606.848.086.266	532.507.711.400	444.910.433.092	486.956.5620
4.	Perkebunan	435.660.849.500	805.791.0100	792.213.8600	771.216.574.500	737.468.201.960
	Jumlah	**4.535.602.068.918**	**5.120.190.493.266**	**4.838.355.434.050**	**5.260.584.761.722**	**5.185.626.327.660**

Sumber: DISTAPANG Kab. Kebumen 2024

Dilihat dari data diatas, nilai produksi pertanian Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 12,89%. Kontribusi kenaikan terbesar adalah komoditas perkebunan sebesar 84,96%, komoditas hortikultura 46,18% dan komoditas tanaman pangan 6,73%. Sedangkan untuk komoditas peternakan mengalami penurunan sebesar 16,85%. Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,50% dengan kontribusi penurunan terbesar adalah komoditas peternakan sebesar 14,97%, hortikultura 12,25%, tanaman pangan 2,58% dan perkebunan 1,68%. Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami peningkatan nilai produksi sebesar 8,73% dengan kontribusi kenaikan terbesar pada komoditas tanaman pangan sebesar 15,18% dan komoditas peternakan sebesar 14,81%. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan yaitu komoditas hortikultura sebesar 16,45% dan komoditas perkebunan menurun sebesar 2,65%. Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan nilai produksi pertanian sebesar 1,42% dengan kontribusi penurunan terbesar pada komoditas perkebunan sebesar 4,38%. Selanjutnya komoditas peternakan sebesar 2,69% dan komoditas tanaman pangan 1,91%. Sedangkan komoditas hortikultura mengalami kenaikan sebesar 9.45%.

4. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan ESDM dilaksanakan melalui program prioritas

a) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.

Adapun capaian kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.79 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan ESDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Urusan ESDM	Dinas Tenaga Kerja	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase pengelolaan energi baru terbarukan	%	100	100	100		
				1 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatausahaan izin Pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota	dokumen	1	1	100		

2) **Permasalahan**

Lokasi penelitian sumber air panas di Sempor sulit dijangkau karena sumber mata air terletak diatas perbukitan.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Penelitian oleh penyedia (CV. Geo melange) tetap dilaksanakan dengan berjalan kaki mendaki perbukitan menuju sumber mata air sesuai jadwal yang sudah dibuat.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan ESDM diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100%. sedangkan rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Berdasarkan tabel capaian IKU dan kegiatan urusan ESDM diketahui capaian kinerja program adalah 100%.

Tabel III.80 Target dan Realisasi Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja Urusan	Target		Realisasi	
	2023	2024	2023	2024
Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	100%	100%	100%	100%

5. Urusan Perdagangan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
c) Program Pengembangan Ekspor;
d) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Adapun capaian kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.81 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	Rupiah	8.273.4250	7.322.096.932	90,79	Banyaknya kios yang tidak aktif, adanya permohonan keringanan retribusi pelayanan pasar, tunggakan retribusi yang belum terselesaikan	Melakukan promosi potensi retribusi kios pasar, melakukan penagihan tunggakan secara berkala
				1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit	4	4	100		
				a Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit	4	4	100		
				b Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terlayani kebersihan dan tersedianya SDM Pengelola	Unit	4	4	100		
				2 Pembinaan Terhadap Pengelola	Jumlah Pembinaan dan	Kegiatan	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						
				a Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	4	4	100		
				b Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	4	4	100		
				B PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi barang kebutuhan pokok	%	1,5	-3,01	200,67		
				1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	381	381	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok	Kali	381	381	100		
				2 Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab./Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan	365	365	100		
				a Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok	Hari	365	365	100		
				C PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta (Rupiah)	2.100	41.748	1.988		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	3	3	100		
				a Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	3	3	100		
				D PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUN - AN KONSUMEN	Presentase UTTP yang tertera	%	49,06	104,7	213,41		
				1 Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang. dan Pengawasan	Terlaksananya alat UTTP yang tertera/tera ulang	keg	2.500	5.336	213,44		
				a Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang di tera/tera ulang	unit	2.500	5.336	213,44		
				E PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN	Capaian Pemasaran Produk UMKM	%	71,77	80,23	111,78		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PRODUK DALAM NEGERI							
				1 Pelaksanaan Promosi. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	350	351	100,28		
				a Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	6	7	116,66		

2) **Permasalahan**

a) Masih kurangnya SDM Pengawasan Kemetrologian.

b) Masih terbatasnya fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM.

c) Masih belum optimalnya pemeliharaan pasar-pasar daerah.

d) Masih belum tercukupinya kontainer/penampung sampah pada pasar-pasar.

e) Banyaknya bermunculan PKL baru yang belum terdaftar.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Mengusulkan tambahan SDM Pengawasan Kemetrologian dan optimalisasi SDM yang ada dengan mengikuti diklat pengawasan kemetrologian.

b) Optimalisasi promosi dan pemasaran melalui griya pamer Dekranasda dengan mengadakan event UMKM dan menerima kunjungan kerja dari luar daerah, mempromosikan melalui media online seperti Instagram, aplikasi Simbok Blonjo, bekerja sama dengan toko swalayan untuk memasarkan produk UMKM yang sudah lolos kurasi dan fasilitasi pameran dalam daerah maupun luar daerah, mengadakan event/festival serta mengikuti kegiatan dekranas/*business matching* yang diselenggarakan pemerintah provinsi maupun pusat.

c) Melakukan inventarisasi kerusakan di pasar-pasar daerah, mendorong pedagang untuk melakukan pemeliharaan secara mandiri dan mengusulkan untuk dilakukan perbaikan.

d) Mengusulkan pengadaan kontainer dan mengoptimalkan kontainer yang ada.

e) Melaksanakan pendataan PKL menggunakan Sistem Aplikasi PKL

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perdagangan. dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 520,93%. Demikian juga rata-rata capaian kegiatan adalah 116,25%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Kinerja di urusan perdagangan ditunjukkan dengan indikator Capaian sebagai berikut:

Tabel III.82 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	9,21	4,89	5,49	112,27	4,45

Sumber: data diolah oleh BPS Kebumen. 2024

Sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, persentase peningkatan PDRB ADHB sektor Perdagangan dari target 4,89% telah terealisasi 5,49% atau capaian kinerja urusan perdagangan 112,27%.

$$Persentase\ PDRB\ ADHB\ Sektor\ Perdagangan = \frac{(PDRB\ ADHB\ sektor\ perdagangan\ besar\ dan\ eceran\ tahun\ (n)\ -\ PDRB\ ADHB\ sektor\ perdagangan\ besar\ dan\ eceran\ tahun\ (n-1))}{PDRB\ ADHB\ sektor\ perdagangan\ besar\ dan\ eceran\ tahun\ (n-1)}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{5.535.806{,}20 - 5.248.266{,}76}{5.248.266{,}76}\ x\ 100\% = \frac{287.539{,}44}{5.248.266{,}76}\ x\ 100\% = 5.49\%$$

Realisasi peningkatan PDRB sektor perdagangan lebih dari 1,12 kali lipat dari target yang direncanakan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Peningkatan tersebut disebabkan beberapa faktor seperti peningkatan aktivitas perdagangan, kebijakan yang efektif atau kondisi pasar yang mendukung menjadi penyebab capaian yang melampaui target.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya saing perdagangan dari data diatas dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{realisasi}{target}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{5{,}49}{4{,}89}\ x\ 100\% = 112{,}27\%$$

Nilai realisasi target meningkatnya daya saing perdagangan sebesar 5,49% dengan target sebesar 4,89% maka diperoleh capai indikator kinerja sasaran meningkatnya daya saing perdagangan sebesar 112,27%.

Adapun Data Pasar Rakyat di Kabupaten Kebumen disertai dengan kondisi pasar sebagai berikut:

Tabel III.83 Data Pasar Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
1	Pasar Jatiluhur	Desa Jatiluhur Kec. Rowokele	2000	APBD	Rusak Berat

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
2	Pasar Karangjambu	Desa Karangjambu Kec. Sruweng	2020	TP	Baik
3	Pasar Dorowati	Desa Dorowati Kec. Klirong	2020	TP	Baik
4	Pasar Banyumudal	Desa Banyumudal Kec. Buayan	2015	DAK	Baik
5	Pasar Ayah	Desa Ayah Kecamatan Ayah	2011	TP	Baik
6	Pasar Karangsari	Desa Karangsari Kec. Buayan	2019	DAK	Baik
7	Pasar Tanjungsari	Desa Tanjungsari Kec. Petanahan	2005	APBD	Rusak Berat
8	Pasar Candirenggo	Desa Candirenggo Kec. Ayah	2011	DAK	Baik
9	Pasar Rowokele	Desa Rowokele Kec.Rowokele	2015	DAK	Baik
10	Pasar Kritig	Desa Kritig Kec. Petanahan	2018	DAK	Baik
11	Pasar Jatisari	Desa Jatisari Kec. Kebumen	2012	TP	Baik
12	Pasar Kelapa Prembun	Desa Prembun Kec. Prembun	2016	APBD	Rusak
13	Pasar Sruni	Desa Sruni Kec. Alian	2014	TP	Baik
14	Pasar Jogosimo	Desa Jogosimo Kec. Klirong	2018	APBD	Baik
15	Pasar Caruban	Desa Caruban Kec. Adimulyo	2017	DAK	Baik
16	Pasar Sidomulyo	Desa Sidomulyo Kec. Adimulyo	2019	DAK	Baik

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
17	Pasar Giwangretno	Desa Giwangretno Kec. Sruweng	2015	TP	Baik
18	Pasar Tamanrejo	Kel Tamanwinangun Kec. Kebumen	2007	APBD	Rusak Berat
19	Pasar Indrakila	Desa Krakal Kec. Alian	2011	TP	Baik
20	Pasar Hewan Purbowangi	Desa Purbowangi Kec Buayan	2019	APBD	Baik
21	Pasar Demangsari	Desa Demangsari Kec. Ayah	2016	DAK	Baik
22	Pasar Kuwarasan	Desa Kuwarasan Kec. Kuwarasan	2017	APBD	Baik
23	Pasar Ungaran	Desa Ungaran Kec. Kutowinangun	2017	DAK	Baik
24	Pasar Puring	Desa Sitiadi Kec. Puring	2017	TP	Baik
25	Pasar Hewan Argopeni	Desa Argopeni Kec. Kebumen	2018	APBD	Baik
26	Pasar Bocor	Desa Bocor Kec. Buluspesantren	2016	TP	Baik
27	Pasar Prembun	Desa Prembun Kec. Prembun	2012	TP	Baik
28	Pasar Tlogopragoto	Desa Tlogopragoto Kec. Mirit	2012	APBD	Baik
29	Pasar Ambal	Desa Ambalresmi Kec. Ambal	2011	TP	Baik
30	Pasar Petanahan	Desa Petanahan Kec. Petanahan	2013	APBD	Baik

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
31	Pasar Kabekelan	Desa Kabekelan Kec. Prembun	2018/2020	TP	Baik
32	Pasar Tumenggungan	Kelurahan Kebumen Kec. Kebumen	2012	APBD	Baik
33	Pasar Kutowinangun I	Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun	2013	TP	Baik
34	Pasar Karanganyar	Kel Karanganyar Kec. Karanganyar	2012	TP	Baik
35	Pasar Wonokriyo	Kel Wonokriyo Kec. Gombong	2018	APBD	Baik
36	Pasar Karanggayam	Desa Karanggayam Kec Karanggayam	2014	APBD	Baik
37	Pasar Burung dan Klithikan	Kelurahan Kebumen Kec. Kebumen	2019	APBD	Baik
38	Pasar Kayu Gombong	Desa Plumbon Kec. Karangsambung	2011	TP	Baik
39	Pasar Hewan Karanganyar	Kel Karanganyar Kec. Karanganyar	2015	DAK	Rusak
40	Pasar Kutowinangun 2 (Ps Lama)	Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun	2022	TP	Baik
41	Pasar Rakyat Pagi Kebumen	Kel Kebumen Kec. Kebumen	2024	TP	Baik

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan berkait dengan Pasar Rakyat yang dikelola Dinas terdapat 3 (tiga) pasar rakyat kondisi rusak berat (Pasar Jatiluhur,

Pasar Tanjungsari, Pasar Tamanrejo). 2 (dua) pasar rakyat kondisi rusak (Pasar Kelapa Prembun, Pasar Hewan Karanganyar) dan 36 (tiga puluh enam) pasar rakyat dalam kondisi baik. Perbaikan Pasar rakyat di tahun 2024 dilakukan sesuai skala prioritas sesuai ketersediaan anggaran dan berupaya diusulkan ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mendapatkan dana alokasi khusus/alokasi tugas pembantuan.

Kenaikan Usaha Perdagangan berizin khususnya di bidang industri menggambarkan kesadaran pelaku usaha/industri akan pentingnya izin usaha. Dengan legalitas izin usaha yang dimiliki maka peluang pasar semakin besar dikarenakan untuk produk-produk IKM yang ingin masuk atau diperjualbelikan ke pasar/toko swalayan dipersyaratkan memiliki izin seperti NIB yaitu Nomor Induk Berusaha, SP-PIRT yaitu Sertifikat Produksi-Pangan Industri Rumah Tangga dan Sertifikat Halal untuk produk makanan dan minuman. Setiap tahun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen memfasilitasi pembuatan NIB, SP-PIRT dan HAKI (legalitas Merk).

6. Urusan Perindustrian

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.84 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Perindustrian	DINAS PERINDUSTRIAN. PERDAGANGAN. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	%	20,43	31,18	152,61		
				1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah industri yang terbina	Orang	100	100	100		
				a Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan. Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembang an. Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	5	5	100		
				b Koordinasi. Sinkronisasi. dan pelaksanaan	Jumlah Dokumen Koordinasi. Sinkronisasi. dan	Dokumen	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
				Pembangunan Sumber Daya Industri	pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						
				c Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	4	4	100		
				d Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	3	3	100		
				B PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Presentasi Dokumen Perizinan yang Terfasilitasi	%	100	100	100		
				1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI). Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI). Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perizinan industri yang terfasilitasi	Dokumen	45	45	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perizinan industri yang terfasilitasi	Dokumen	45	45	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Data Industri	Dokumen	1	1	100		
				1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Industri	Dokumen	1	1	100		
				a Fasilitasi Pengumpulan. Pengolahan dan Analisis Data Industri. Data Kawasan Industri serta Data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Data Industri	Dokumen	1	1	100		

2) **Permasalahan**

a) Sebagian besar Industri Kecil dan Menengah belum memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terkait Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
b) Pelaku usaha kecil dan menengah sering kali kurang memahami regulasi dan prosedur perizinan
c) Sebagian besar pelaku usaha industri masih mempergunakan teknologi tradisional dan belum menerapkan proses produksi yang baik sehingga kuantitas produksi masih terbatas dan kualitas produk belum memenuhi standar yang dipersyaratkan.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Mengadakan pelatihan mengenai pentingnya SIINAS dan sertifikasi TKDN
b) Membentuk tim pendamping untuk membantu IKM dalam proses pendaftaran SIINAS dan pengajuan sertifikasi TKDN.
c) Menyediakan layanan konsultasi gratis untuk pengurusan sertifikasi.
d) Memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat layanan.
e) Menyediakan konsultasi online untuk memudahkan pelaku UKM mendapatkan informasi langsung terkait perizinan
f) Melakukan pembinaan, pendampingan, pelatihan, bantuan peralatan, monitoring dan evaluasi untuk para pelaku usaha industri.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perindustrian dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 117,53%. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Kinerja di urusan Perindustrian ditunjukkan dengan indikator Capaian Perindustrian sebagai berikut:

Tabel III.85 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
Presentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	12,00	5,47	10,11	184,83	4,93

Sumber: Diolah oleh BPS Kebumen. 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dinilai atas dasar harga pada tahun berjalan PDRB tahun 2023 tercapai 12% untuk target tahun 2024 sebesar 5,47% dan tercapai sebesar 10.11%. Capaian PDRB yang melebihi target menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Kebumen.

$$Persentase\ PDRB\ ADHB\ Sektor\ Perindustrian$$
$$= \frac{(PDRB\ ADHB\ Tahun\ (n)\ -\ PDRB\ ADHB\ Tahun\ (n-1)}{PDRB\ ADHB\ Tahun\ (n-1)}\ x\ 100\%$$
$$= \frac{8.757.899{,}27 - 7.954.081{,}95}{7.954.081{,}95}\ x\ 100\%\ = 10{,}11\%$$

Capaian kinerja sasaran strategis urusan perindustrian dari data diatas dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi Pengukuran. sebagai berikut:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{realisasi}{target}\ x\ 100\%$$
$$= \frac{10.11}{5.47}\ x\ 100\%\ = 184{,}83\%$$

Target tahun 2024 sebesar 5,47% dan tercapai sebesar 10,11% maka diperoleh capai indikator kinerja sasaran meningkatnya daya saing perdagangan sebesar 184,83%. Pencapaian PDRB atas harga berlaku yang melebihi target menunjukkan efektivitas kebijakan dan program pembangunan daerah.

7. Urusan Transmigrasi

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Transmigrasi dilaksanakan melalui program prioritas Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.86 Capaian Program. Kegiatan sub Kegiatan Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	%	20	10	50	Terbatasnya jumlah kuota yang diterima dari Provinsi Jawa Tengah (1 tahun 1 KK)	Mengusulkan penambahan kuota ke Kementerian Desa dan PDTT
				1 Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		KK	4	2	50	Terbatasnya jumlah kuota yang diterima dari Provinsi Jawa Tengah (1 tahun 1 KK)	Mengusulkan penambahan kuota ke Kementerian Desa dan PDTT
				a Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta transmigrasi	KK	4	2	50	Terbatasnya jumlah kuota yang diterima dari Provinsi Jawa Tengah (1 tahun 1 KK)	Mengusulkan penambahan kuota ke Kementerian Desa dan PDTT

2) **Permasalahan**

a) Kegiatan Fasilitas Transmigrasi sangat tergantung pada kuota dari pusat sehingga belum bisa memenuhi harapan masyarakat untuk dapat ikut serta transmigrasi.

b) Terbatasnya kuota alokasi penempatan transmigrasi pada tahun 2024 Kebumen mendapat alokasi sebanyak 2 Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut:

- UPT Kahingai Kabupaten Lamandau Prov. Kalimantan Tengah (1 KK)
- UPT Padang Tarok Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (1 KK). Sehingga tidak dapat memenuhi target transmigrasi yang ditempatkan. Transmigrasi merupakan program given dari Provinsi Jateng sehingga Kabupaten Kebumen hanya dapat melaksanakan penempatan transmigrasi sesuai alokasi kuota transmigrasi tersebut

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat

b) Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dinas di Provinsi terkait kuota transmigrasi dengan mempertimbangkan tingginya animo masyarakat yang mendaftar program transmigrasi:

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan transmigrasi diketahui rata-rata capaian kinerja Program adalah 50% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 50%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Pada tahun 2024 dilaksanakan program dan kegiatan transmigrasi. capaian kinerja Urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan jumlah fasilitasi transmigrasi penduduk Kabupaten Kebumen. Jumlah KK yang difasilitasi pada kurun waktu 2021-2026 cukup fluktuatif. Secara lengkap capaian kinerja urusan transmigrasi tersaji dalam tabel di berikut ini:

Tabel III.87 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Transmigran yang ditempatkan	%	15	10 KK	2	10%	10

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. 2024

Dari tabel diatas diketahui pada tahun 2024 target transmigran adalah 4 KK tetapi hanya dapat diberangkatkan 2 KK. Untuk jumlah KK yang ditargetkan dari tahun 2024 sampai 2026 setiap tahunnya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel III.88 Targetkan Transmigran Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah KK yang difasilitasi untuk bertransmigrasi	10 KK	10 KK	4 KK	4 KK	4 KK	4 KK

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. 2024

3.1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Fungsi Perencanaan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang perencanaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
c) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Aplikasi SEMARAK yang merupakan integrasi dari 3 aplikasi yaitu E-SAKIP yang berisi pelaporan kinerja instansi pemerintah (dikelola oleh Bagian Organisasi) aplikasi SIMPEL yang berisi capaian realisasi fisik dan keuangan (dikelola oleh Bagian Pembangunan) dan aplikasi SIMDALEV yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan daerah (dikelola oleh Bappeda) masih dalam tahap Pengembangan. Semangatnya adalah untuk memudahkan perangkat daerah dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja serta pelaporan.

Adapun capaian kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.89 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Keg Fungsi Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan	BAPPEDA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	90	100	111,11		
				1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan	Dokumen	4	4	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Berita Acara	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis pembangunan daerah	Dok	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Dok	2	2	100		
				3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Dok	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Laporan	1	1	100		
				B PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah urusan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	urusan	21	21	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	urusan	7	7	100		
				b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	urusan	14	14	100		
				2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Urusan	13	13	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang perekonomian	Urusan	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(RPJPD. RPJMD dan RKPD)							
				b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Sumber Daya Alam	Urusan	5	5	100		
				3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Urusan	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Urusan	7	7	100		
2	Penelitian dan Pengembangan			C PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	83,33	85.71	102,86		
				1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Dokumen	10	12	120		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengkajian Peraturan yang disusun						
				a Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	Laporan	10	12	120		
				2 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah produk pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah	Produk	6	7	116,67		
				a Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang difasilitasi	Produk	6	7	116,67		

2) **Permasalahan**

a) Proses pengintegrasian aplikasi ke dalam aplikasi SEMARAK belum mencakup keseluruhan sampai dengan penilaian kinerja individu.
b) Belum optimalnya Sinergitas Lembaga Kelitbangan di Kabupaten Kebumen.
c) Belum optimalnya Fasilitasi dalam mendukung daya saing dan ekosistem inovasi melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Proses pengembangan aplikasi SEMARAK dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi.
b) Dilakukan rapat-rapat persiapan dan koordinasi pengembangan jaringan penelitian (Jarlit).
c) Dilakukan koordinasi, persiapan, launching dan pembentukan dan operasional pelayanan Sentral Kekayaan Intelektual (Sentral KI)

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Rata-rata capaian program urusan penunjang fungsi perencanaan adalah 104,66%. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%.

Nomenklatur untuk masing-masing sub kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2024 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan tetap mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi, maka pemerintah Kabupaten Kebumen melalui BAPPEDA telah mengembangkan sistem evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja pembangunan Kabupaten Kebumen yang disingkat SEMARAK. Aplikasi Semarak merupakan integrasi dari aplikasi E-SAKIP, SIMPEL dan SIMDALEV.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Sasaran program urusan penunjang perencanaan yang dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2024 adalah meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah dan perangkat daerah.

Capaian kinerja urusan perencanaan BAPPEDA tahun 2024 sebesar 100%, yaitu terlaksananya:

a) Fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan
    1. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
    2. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

b) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel III.90 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2022-2024

No.	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Kualitas Perencanaan	100%	100%	100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kebumen. 2024

Capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan selama periode 2024 antara lain penyusunan dokumen kajian daerah, pelaksanaan kegiatan KRENOVA, fasilitasi riset-riset daerah serta penerbitan jurnal riset dan inovasi daerah.

Tabel III.91 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2024

No	Indikator	2022	2023	2024
1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	77,08%	75%	85,71%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kebumen. 2024

2. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalitas ASN dengan penerapan sistem merit melalui Permenpan RB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem Merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem Merit meliputi 8 aspek yaitu: perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pembagian karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi.

Pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

a) Program Kepegawaian Daerah; dan

b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.92 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepegawaian Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	92	99	107,60		
				1 Kegiatan Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kegiatan	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan ASN	Kegiatan	3	3	100		
				b Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN	Dokumen	600	663	110,5		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Pemberhentian							
				c Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pemutakhiran Data Kepegawaian	Dokumen	2	2	100		
				2 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	jumlah kegiatan Mutasi dan promosi yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Kegiatan	3	3	100		
				b Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah kegiatan pengelolaan promosi ASN	Dokumen	5	5	100		
				3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pendidikan lanjutan	Orang	60	58	96,66	- Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan tergantung usulan dari OPD	Membuat surat edaran terkait dengan aturan ijin belajar, tugas belajar dan usulan untuk ujian PI dan ujian dinas
										- Terbatasnya Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan Sesuai Perbup nomor 47 Th. 2023 tentang	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Akademik bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	Dokumen	300	1.065	355		
				4 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	6	6	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	4	100		
4	Pendidikan dan Pelatihan			B PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya	%	73,18	61,89	84,57	Belum semua JPT Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas mengikuti diklat	Penambahan anggaran dan koordinasi secara berkala dengan lembaga

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										struktural karena keterbatasan anggaran dan kuota dari Lembaga Diklat	penyelenggaraan Diklat
				1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Penilaian dan Evaluasi	Kegiatan	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Penyelenggara an Pengembang an Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah jenis Diklat Penyelenggara an Pengembang an Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jenis	5	5	100		
				2 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	100	100	100		
				a Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	Jumlah jenis Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Jenis	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan						

2) **Permasalahan**

a) Perencanaan Kebutuhan ASN

- Penyampaian usulan kebutuhan ASN dari masing-masing perangkat daerah berjalan lambat;
- Peta jabatan yang belum dimutakhirkan sesuai kondisi saat ini dan mempertimbangkan dampak transformasi digital;

b) Pengadaan ASN

- Pengadaan ASN di Kabupaten Kebumen mengikuti kebijakan nasional berfokus pada pelayanan dasar (guru dan tenaga kesehatan) sehingga pengadaan tenaga teknis formasinya amat terbatas.
- Pelaksanaan pengadaan menyesuaikan jadwal secara nasional dan pada tahun 2024 dilaksanakan pada Tahun 2025. Ini berakibat pada tahapan proses yang tidak selesai di akhir tahun 2024 dan dilanjutkan pada tahun 2025.

c) Sistem Informasi

- Belum dilaksanakan pembangunan dan penggunaan *assessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi untuk seluruh ASN di tahun 2024 baru untuk JPT dan 300 PNS sehingga belum semua ASN.
- Belum tersusunnya Perbup SIMPEG.

d) Manajemen Kinerja

- Dengan adanya perubahan Penilaian Kinerja maka diperlukan perubahan dalam sistem manajemen kinerja.
- Pengembangan Kompetensi ASN belum memenuhi 20 jam dalam 1 tahun sehingga Indeks Profesionalisme ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen masih rendah.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Perencanaan Kebutuhan ASN

- Menyampaikan surat edaran ke masing-masing perangkat daerah dalam rangka penyampaian usulan kebutuhan ASN agar tepat waktu sesuai *timeline* yang ditentukan.
- Melakukan koordinasi ke Bagian Organisasi terkait penyusunan peta jabatan yang mempertimbangkan dampak adanya transformasi digital.

b) Pengadaan ASN

- Menyampaikan masukan pada saat evaluasi pelaksanaan pengadaan agar diberikan formasi tenaga teknis yang mencukupi sesuai usulan yang diajukan.

- Mengupayakan setiap tahapan proses pengadaan ASN tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan oleh Panselnas.

c) Sistem Informasi

- Perencanaan pembangunan dan penggunaan *assessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi dituangkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
- Penyusunan dan penerapan Perbup SIMPEG dalam urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- Penyusunan SE pemutakhiran data SIMPEG bagi semua ASN.

d) Manajemen Kinerja

- Mengintegrasikan sistem manajemen ASN di pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Mengembangkan aplikasi SINAU dan membuat surat edaran ke OPD agar seluruh ASN dapat mengikuti diklat secara daring melalui SINAU, sehingga diharapkan semua PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran selama 1 tahun.
- Membuat Surat Edaran ke perangkat daerah untuk melakukan pendataan PNS yang sudah mengikuti diklat.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 99,99%. Sementara rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Kinerja di urusan fungsi penunjang Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan ditunjukkan dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel III.93 Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	99,00	92,00	99,99	108,68	93,99
Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti	%	59,68	73,18	61,89	84,57	77,21

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	
Pendidikan dan Pelatihan Struktural						

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka realisasi capaian indikator kinerja yang diampu BKPSDM tahun 2024 sebagai berikut:

a) Indikator Persentase Penempatan PNS dalam jabatan konsisten karena pengadaan ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
b) Indikator persentase pejabat struktural ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami kenaikan dari 59,68% menjadi 61,89%.

Adapun uraiannya sebagai berikut:

a) Capaian Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan

Pada tahun 2024 persentase penempatan PNS dalam jabatan memperoleh capaian sebesar 109,00% yang diperoleh dari target sebesar 92,00% dapat terealisasi sebesar 99,93%. Perhitungan ini diperoleh dari jumlah ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sejumlah 11.589 orang, sebanyak 11.689 orang sudah sesuai dengan jabatannya, sedangkan 8 orang belum sesuai dengan formasi jabatannya.

b) Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

BKPSDM Kabupaten Kebumen sudah mengirim Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas untuk mengikuti diklat kepemimpinan ke lembaga diklat sebanyak 286 orang. Sampai dengan tahun 2024 jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan baik tingkat II, III maupun IV sesuai jenjang jabatannya sebanyak 307 orang dari total Jumlah Pejabat struktural yang ada sebanyak 5.496 orang atau masih ada 189 pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan, sehingga diperoleh presentase capaian sebesar 61,89%. Kabupaten Kebumen belum dapat mengirimkan pejabat struktural untuk mengikuti Diklatpim secara keseluruhan mengingat anggaran yang tersedia dan kuota diklat di lembaga penyelenggara diklat yang terbatas.

Target jumlah dokumen pemberhentian kepegawaian ASN adalah 600 orang dengan realisasi 663 dokumen disebabkan karena pemberhentian selain

karena PNS mencapai pensiun BUP, PNS meninggal dunia, pensiun atas permintaan sendiri dan pensiun karena uzur tidak dapat diprediksi.

Target Jumlah dokumen SK jabatan fungsional yang diterbitkan ada kenaikan 604 dokumen dari target awal 300 dokumen menjadi 904 dokumen atau naik sebesar 301% disebabkan karena jumlah usulan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional. Kenaikan jenjang jabatan fungsional, alih jenjang jabatan fungsional dan pengangkatan dalam jabatan tidak bisa diprediksi secara tepat. Penerbitan berdasarkan usulan dari OPD dimana PNS yang diusulkan karena telah mendapatkan penetapan angka kredit sesuai yang dipersyaratkan.

3. Fungsi Keuangan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang Keuangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mempertahankan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya untuk melakukan sinergitas dan kolaborasi aktif antar perangkat daerah. Penyusunan Laporan Keuangan sampai dengan disahkan sebagai Perda Pertanggungjawaban APBD telah melalui serangkaian proses mulai dari perencanaan penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan dimana pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menggunakan Aplikasi SIPD-RI mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan.

b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting bagi pemerintah daerah, mencakup berbagai jenis properti seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Meskipun memiliki nilai strategis, namun BMD belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan sumber daya tetapi juga menghambat potensi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten melalui program dan kegiatan pengelolaan BMD berusaha untuk memastikan pengelolaan BMD telah berjalan dengan baik. dari mulai proses perencanaan, pengamanan, penatausahaan, optimalisasi hingga penghapusan BMD. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BMD juga merupakan salah satu kriteria pengukuran yang setiap tahunnya selalu diperhatikan oleh BPK.

c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Terkait dengan pelaksanaan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah telah dilakukan tindak lanjut terkait atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dimana Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen. Upaya optimalisasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai dari pelaksanaan undian berhadiah bagi Wajib Pajak hingga program pembebasan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan yang diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong agar masyarakat lebih taat pajak.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.94 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Urusan Manajemen Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Keuangan	BPKPD	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100		
				1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran dan regulasi	Dokumen	10	10	100		
				a Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	Dokumen	4	4	100		
				b Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD	Dokumen	2	2	100		
				c Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan	Jumlah dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
				d Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga	Dokumen	2	2	100		
				e Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kegiatan	5	5	100		
				2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kegiatan	4	4	100		
				a Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah OPD yang terlayani pencairan Belanja Gaji berdasar penerbitan SP2D	OPD	50	50	100		
				b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan/belanja transfer	OPD	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD yang melaksanakan laporan Rekonsiliasi DTH,RTH, dan Verifikasi SPM non Gaji	Dokumen	50	50	100		
				d Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	Dokumen	2	2	100		
				3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen penyampaian pelaporan keuangan SKPD tepat waktu	Dokumen	1.357	1.357	100		
				a Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional SKPD	Dokumen	1.355	1.355	100		
				b Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah dokumen LKPD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
				c Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan rekon dalam rangka konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kegiatan	3	3	100		
				d Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Bimtek Akuntansi	Kegiatan	1	1	100		
				e Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan BLUD	Kegiatan	1	1	100		
				4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				b Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapatkan alokasi dana desa (ADD) Jumlah Desa yang mendapat alokasi Dana Desa (DD) Jumlah desa yang mendapatkan alokasi bantuan		449	449	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					keuangan khusus. Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan keuangan untuk operasional TPQ. Jumlah Desa yang mendapat kawasan perdesa an (5 kawasan) pengembangan produk unggulan 5 kawasan (wisata, anyaman pandan, peternakan sapi, batik dan gula semut) dan terlaksananya revitalisasi Bumdes sebagai pengelola ekonomi kawasan						
				c Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah penyediaan belanja tidak terduga		1	1	100		
				d Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Alokasi BHPD, BHRD, Bagi hasil pihak ketiga untuk Perhutani dan KPIPW Serayu Bogowonto Sempor		449	449	100		
				B PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	Dokumen	63	63	100		
				a Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan Pendampingan Penatausahaan BMD OPD	Kegiatan	2	2	100		
				b Penyusunan Perenca naan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBMD	Dokumen	3	3	100		
				c Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah unit BMD yang difasilitasi Pengamanannya	unit	156	156	100		
				d Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD	jenis	5	5	100		
				e Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan BMD	Jumlah pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi Laporan BMD	kegiatan	2	2	100		
				f Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan BMD yang disusun	Dokumen	2	2	100		
				g Pembinaan Pengelolaan Barang milik daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan	kegiatan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pemerintah Kabupaten/Kota	pengelolaan barang milik daerah						
				h Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Perbup SHSD	Dokumen	1	1	100		
				A PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase capaian Pendapatan Asli Daerah	%	100	102,31	102,31		
				1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	10	10	100		
				a Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Desa yang termonitor dan terevaluasi pajak daerah dan retribusi daerah. Jumlah OPD yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Desa	460	460	100		
				b Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan, sosialisasi dan keberatan	Kecamatan	26	26	100		
				c Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Basis Data Pajak Daerah	Obyek	1.361.544	1.361.544	100		
				d Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OPD pengelola pendapatan	OPD	55	55	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	wajib pajak	1.361.544	1.361.544	100		
				f Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih di 11 jenis pajak daerah	orang	1.361.544	1.361.544	100		

2) **Permasalahan**

Meskipun semua indikator kinerja program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen di Tahun 2024 dapat terealisasi, tetapi masih ditemukan beberapa kendala/permasalahan sebagai berikut:

a) Dinamika regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah seperti implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah melalui SIPD-RI secara penuh yang dalam pelaksanaannya masih mengalami banyak kendala;
b) Kendala eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program diantaranya kondisi perekonomian masyarakat yang menurun dampak sehingga mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan faktor dinamika teknis pelaksanaan pengelolaan BMD;dan
c) Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan terutama dalam proses pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

a) Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan Pusat Data dan Informasi Kemendagri terkait dengan SIPD-RI;
b) Optimalisasi sistem informasi secara menyeluruh baik dalam pengelolaan keuangan, pendapatan maupun barang milik daerah;dan
c) Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Rata-rata capaian program urusan penunjang Urusan Manajemen Keuangan adalah 100,77%. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Target kinerja yang ingin dicapai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk target tahun 2024 indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2023 terealisasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mampu mempertahankan penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini WTP dari BPK RI atas LKPD yang ke-7 kalinya secara berturut-turut

dalam 7 tahun terakhir yakni tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Tabel III.95 Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			T.Akhir RPJMD 2026	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini BPK atas LKPD	WTP atas LKPD 2022	WTP	WTP atas LKPD 2023	100%	WTP	100%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.2024.

Berdasarkan Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 229/S/XVIII.SMG/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024 perihal hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. BPK RI memberikan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Capaian kinerja indikator Opini BPK atas LKPD sebesar 100% dengan kriteria capaian kinerja Baik. Pemberian Opini WTP dari BPK RI menggambarkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah memenuhi:

a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
b) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara umum memadai.
c) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

4. Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan urusan Transparansi dan Partisipasi Publik dilaksanakan melalui satu program prioritas yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.96 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Transparasi dan Partisipasi Publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks PPID	%	34,50	34,50	100		
				1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	%	176	176	100		
				a Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	8	8	100		
				b Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	6	6	100		
				c Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan	Dokumen	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Informasi Program atau Kebijakan						

2) **Permasalahan**

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Transparansi dan Partisipasi Publik adalah dari sisi jumlah SDM masih kurang dan petugas yang menangani secara khusus masalah PPID kurang kompeten.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah mendorong OPD dan Desa menyusun tim PPID dan rutin melaksanakan bimtek bagi petugas PPID OPD dan desa.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Capaian Program Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik adalah sebesar 100%. Adapun rata-rata capaian kegiatan dari seluruh program adalah 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan (IKU)**

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya indeks PPID. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.97 Tabel Nilai dan Status Keterbukaan Informasi Publik Pemkab Kebumen Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks PPID	Persen	32,16	34,51	34,51	100%	43,14

Sumber: DISKOMINFO Kabupaten Kebumen. 2024

Capaian kinerja urusan Transparansi dan Partisipasi Publik selama periode 2024 adalah 176 PPID OPD dan Desa di Kabupaten Kebumen dalam kondisi baik.

5. Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yaitu:

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan

b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan adalah Level Kapabilitas APIP sedangkan indikator kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah nilai persepsi korupsi Adapun capaian kinerja program dan kegiatan fungsi pengawasan adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel III.98 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Leveling APIP	Level	3	3	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan	Laporan	157	264	168,15		
				a Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	6	61	1.061		
				b Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	24	34	141,67		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	5	7	140		
				d Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	37	76	205		
				e Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	80	81	101,25		
				f Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepa katan	1	1	100		
				g Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	100		
				2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	37	44	118,92		
				a Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah	Laporan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	35	42	120		
				B PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Persepsi Korupsi	Nilai	4	4	109		
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rekomendasi	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi	5	5	100		
				2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	Perangkat Daerah	24	52	216,67		
				a Sub Kegiatan Pendampingan dan	Jumlah Perangkat Daerah Yang	Perangkat Daerah	24	52	216,67		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						
				b Sub Kegiatan Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	13	24	184,62		
				c Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	8	8	100		
				d Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	3	7	233		

2) **Permasalahan**

Berdasarkan tabel Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 target kinerja program dan kegiatan dapat tercapai, adapun permasalahan adalah sebagai berikut:

a) Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur. Berdasarkan analisis beban kerja, kebutuhan ASN Inspektorat Daerah adalah 143 orang, namun baru tersedia 54 orang. Kekurangan terutama di jabatan fungsional Auditor dan PPUPD. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Jenderal kebutuhan jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 46 sudah terisi 5 yaitu 4 PPUPD ahli madya dan 1 PPUPD Ahli Pertama sehingga masih kurang 41 PPUPD. Sedangkan untuk jabatan auditor, berdasarkan rekomendasi dari BPKP kebutuhan auditor sebanyak 80 auditor dan saat ini sudah ada 24 auditor sehingga masih kurang 56 auditor.
b) Kompetensi sumber daya APIP yang memiliki sertifikasi profesi baru 11 orang dan 2 orang penyuluh antikorupsi bersertifikat;
c) Belum terpenuhinya jam pelatihan minimal 120 jam/tahun untuk auditor dan PPUPD;
d) Banyaknya penugasan mandatory (perintah) dari Instansi atasan yang tidak dibarengi dengan pemberian biaya penugasan dan pembekalan kemampuan teknis yang disyaratkan.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Pengiriman pejabat fungsional auditor dan PPUPD mengikuti diklat di pusdiklat, juga dilaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri yang diikuti seluruh pegawai Inspektorat Daerah dengan narasumber pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat.
b) Mengajukan kebutuhan pegawai PPUPD dan Auditor melalui seleksi CPNS Tahun 2024
c) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan etos kerja dan integritas tinggi. meskipun anggaran pengawasan belum mencapai 0,5% APBD

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan fungsi pengawasan diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 104,5%. Sementara rata-rata capaian kegiatan adalah 137,79%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Capaian kinerja urusan fungsi pengawasan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III.99 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Kebumen 2024

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Maturitas SPIP	Nilai	3,19 (Level 3)	3,30 (Level 3)	3,301 (Level 3)	100,03%	3,50

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 BPKP Perwakilan D.I Yogyakarta Nomor PE.09.03/LHP-394/PW12/3/2024 tanggal 17 Desember 2024, nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah 3,301 (Level 3) sehingga capaian kinerjanya 100,03%. Adapun hasil evaluasi BPKP adalah sebagai berikut:

a) Penetapan Tujuan

1. Indikator sasaran strategis pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung indikator yang ditetapkan dalam RPJMN antara lain pada sasaran strategis pemda “Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak” dengan indikator “Indeks Pembangunan Gender” dan “Cakupan Perlindungan Anak”. Indikator tersebut belum memasukan indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), Persentase Anak Berusia 10-17 tahun bekerja, cakupan perlindungan perempuan.
2. Target kinerja atas indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah belum memenuhi kriteria SMART, yaitu penetapan target kinerja Tahun 2024 belum realistis (pertumbuhan kinerja) dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 dan capaian kinerja berjalan Tahun 2024, yaitu sasaran strategis “Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan” dengan indikator kinerja ”Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan” ditetapkan target Tahun 2024 sebesar 4,89% berada dibawah realisasi Tahun 2023 sebesar 9,21% dan capaian kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024 sebesar 5,49%
3. Terdapat beberapa penetapan indikator kinerja yang *overlapping*/tumpang tindih antara sasaran program/kegiatan/sub kegiatan dan beberapa penetapan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan beberapa penetapan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 belum

memperhatikan capaian tahun sebelumnya yaitu indikator Persentase TMP yang dikelola, jumlah dokumen data industri, jumlah sosialisasi bantuan sosial dan jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola.

b) Komponen Struktur dan Proses

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memiliki kebijakan terkait integritas, disiplin dan kode etik baik lingkup Pemerintah Daerah maupun masing-masing Perangkat Daerah yang telah dikomunikasikan dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah;
2. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mempunyai kebijakan yang terkait dengan komitmen dan kompetensi;
3. Pimpinan Daerah dan Kepala Daerah terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait manajemen kinerja, manajemen keuangan dan aset, manajemen SDM, manajemen risiko yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memiliki Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
5. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis perangkat daerah dan risiko operasional. Risiko tersebut telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya;
6. Kebijakan pengelolaan keuangan telah dikomunikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kebumen dan telah dipahami oleh pengelola aset dan pengguna aset;
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan evaluasi atas pengelolaan risiko operasional dan strategis perangkat daerah serta pemantauan berkala terhadap seluruh aktivitas pengendalian dan capaian kinerja di level program/kegiatan/sub kegiatan hingga kinerja individu pegawai di Perangkat Daerah.

c) Komponen Pencapaian Tujuan

1. Capaian *Outcome* dan *Output* terkait dengan kualitas perencanaan kinerja yang belum sepenuhnya selaras dan tepat pada sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis perangkat daerah, program, kegiatan serta ketepatan indikator dan target kinerja dalam mendukung keberhasilan tujuan Perangkat Daerah;
2. Pemerintah Kabupaten Kebumen memperoleh opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut periode Tahun 2019 sampaid dengan Tahun 2023;

3. Aset dalam kondisi baik periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 rata-rata persentase berada diatas 98% yaitu Tahun 2023 sebesar 98,14%, Tahun 2022 sebesar 98,16% Tahun 2021 sebesar 98,02%. Tahun 2020 sebesar 98,05% dan Tahun 2019 sebesar 98,10%

3.1.5 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat DPRD

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan untuk Sekretariat DPRD dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.100 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sekretariat	Sekretariat DPRD	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	8	8	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	3	3	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	31	31	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kali Diklat/Seminar/Workshop yang diikuti oleh ASN Sekretariat DPRD	kali	4	4	100		
				a Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pertemuan ASDEKSI/Sosialisasi Perundang-undangan yang diikuti oleh ASN Setwan	kali	4	4	100		
				4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan						
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	12	100		
				B Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip dinamis	bulan	12	12	100		
				1 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				2 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	390	390	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan dan	unit	34	34	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabat yang dipelihara						
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang dipelihara	unit	25	25	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang dipelihara	unit	220	220	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara	unit	1	1	100		
				3 Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh Gaji dan Tunjangan	orang	50	50	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Stel Pakaian Dinas dan Atribut yang disediakan untuk setiap Anggota DPRD	stel	4	4	100		
				c Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh layanan medical check up	orang	50	28	56	Beberapa anggota DPRD tidak mengambil hak untuk *Medical Check Up*	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah bulan pemenuhan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12	100		
				C Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk	Dokumen	21	18	85,71	3 Perda tidak disahkan dan 1 Naskah Akademik tidak disusun	
				a Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Propemperda yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda yang dibahas	Dokumen	13	10	76,92	3 Raperda pada Masa Persidangan III Tahun 2024 yaitu Raperda tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja. Raperda tentang Perlindungan Anak	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dan Raperda tentang Perlindungan Perempuan tidak terbahas karena mundurnya pembentukan fraksi dan alat kelengkapan DPRD. Raperda tersebut akan dibahas pada Masa Persidangan I Tahun 2025	
				c Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang dikaji	Dokumen	4	4	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang tersusun	Dokumen	4	4	100		
				2 Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Dokumen	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Laporan Semester yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				3 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	Dokumen	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Infrastruktur yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Pengawasan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan Bidang Perekonomian	Perekonomian yang tersusun						
				e Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				g Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LKPJ Bupati	Dokumen	1	1	100		
				4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD	Kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Kali Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD yang diselenggarakan	Kali	6	5	83,33	tidak semua partai politik melaksanakan bimbingan teknis pada triwulan IV	
				b Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang disediakan Pakar dan Tim Ahli	AKD	7	7	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan	Orang	6	6	100		
				e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi Hubungan Masyarakat DPRD	Kegiatan	4	4	100		
				f Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				5 Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Kerja Dalam Daerah untuk Anggota DPRD	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	Dokumen	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Kali Reses yang difasilitasi pelaksanaannya untuk setiap Anggota DPRD	Kali	2	2	100		
				5 Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	1	100		
				6 Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas	Dokumen	1	0	0	tidak ada dokumen kerjasama daerah yang dibahas oleh DPRD	
				a Sub Kegiatan Fasilitasi. Verifikasi. dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi. Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Bulan	12	12	100		
				7 Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD	Kegiatan	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Koordinasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas DPRD kepada AKD selain Pimpinan DPRD	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bulan	12	12	100		

2) **Permasalahan**

Pada tahun 2024 dokumen Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) berisi 13 Raperda yang diagendakan selesai pada tahun 2024, pada perjalanannya terdapat 3 (tiga) Raperda yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2023 yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan Perempuan.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

3 Raperda yang tidak dibahas pada tahun 2024 dimasukkan kembali pada Propemperda Tahun 2025 dan akan dibahas pada Masa Persidangan I Tahun 2025.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan diatas diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100%. rata-rata capaian kegiatan adalah 92,82%. Hal tersebut disebabkan terdapat satu kegiatan yaitu Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang capaiannya 0% di mana pada tahun 2024 tidak ada dokumen kerjasama daerah yang dibahas oleh DPRD, selain itu anggaran untuk kegiatan ini juga telah dialihkan ke kegiatan lain pada Perubahan APBD 2023.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sehingga pada tahun ini kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen secara umum telah tercapai.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD adalah capaian pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, formulasi penghitungannya adalah:

Capaian fasilitasi pengawasan+Capaian fasilitasi pembahasan dokumen anggaran+fasilitasi pembentukan dan pembahasan peraturan daerah/peraturan DPRD+Fasilitasi penyerapan aspirasi+Fasilitasi peningkatan Kapasitas DPRD dibagi 5.

Sebagaimana disebutkan diatas, meskipun 3 (tiga) Raperda tidak dapat terselesaikan pada tahun 2024, namun Sekretariat DPRD telah secara optimal memfasilitasi proses pembahasan raperda-raperda tersebut melalui fasilitasi rapat-rapat paripurna, rapat-rapat pembahasan, serta konsultasi ke pemerintah pusat/provinsi maupun studi referensi ke daerah-daerah lain.

Adapun capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.101 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
Capaian pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Kebumen. 2024

2. Sekretariat Daerah

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan untuk Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
c) Program Perekonomian dan Pembangunan.

Adapun capaian kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.102 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	a PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Setda	nilai	85	90,40	106,35		
				1 Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	dokumen	4	4	100		
				a Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	dokumen	2	2	100		
				b Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	laporan	1	1	100		
				c Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	dok	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bagian Umum		1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	161	130	80,74	- Terdapat penitipan anggaran gaji PPPK Setda yang gajinya masih masuk di anggaran BKPSDM	Koordinasi dengan OPD terkait
										- adanya pegawai yang pensiun dan mutasi	
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	4	4	100		
		Bagian Umum		2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dok	7	7	100		
		Bagian Umum		3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					administrasi umum perangkat daerah						
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	4	4	100		
				d Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	4	100		
				e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1	1	100		
				f Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	4	4	100		
				g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	120	120	100		
		Bagian Umum		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	64	64	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	unit	2	2	100		
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4	4	100		
				c Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	2	100		
		Bagian Umum		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	12	12	100		
				d Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bagian Umum		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	127	127	100		
				a Penyediaan jasa pemeliharaan. biaya pemeliharan. pajak dan Perizinan aan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	109	109	100		
				b Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	4	4	100		
				c Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	5	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	8	8	100		
		Bagian Umum		7 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	2	2	100		
				c Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	8	8	100		
				d Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional KDH/WKDH	orang/bulan	7	7	100		
		Bagian Umum		8 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	paket	12	12	100		
				b Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	paket	12	12	100		
		Bagian Prokopim		1 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	layanan	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Keprotokolan	layanan	2	2	100		
				b Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	layanan	3	3	100		
				c Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	layanan	3	3	100		
		Bagian Perekonomian dan SDA		1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-undangan	orang	120	200	166,66		
				b PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai EKPPD	Skor	2,95	3,27	110,85		
		Bagian Pemerintahan		1 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi tata Pemerintahan	Kegiatan	5	6	120		
				a Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen	1	1	100		
				b Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	dokumen	2	3	150		
		Bagian Pemerintahan		2 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	dokumen	5	13	260		
				a Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	dokumen	5	13	260		
		Bagian Kesra		1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Kegiat an	15	15	100		
				a Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibumlinmas.	dok	4	4	100		
				b Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil Kebijakan, evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	dokumen	7	7	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	dokumen	5	5	100		
		Bagian Hukum		1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	Kegiatan	3	3	100		
				a Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	dokumen	550	1.008	183,27		
				b Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	kasus	12	13	108,33		
				c Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	dokumen	626	1.010	161,34		
				c PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	%	89	97,09	109,08		
		Bagian Perekonomian dan SDA		1 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen fasilitasi kebijakan sumber daya alam	dokumen	4	4	100		
				a Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian	dokumen	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	dokumen	1	1	100		
				2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	dokumen	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	dokumen	2	2	100		
				b Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bagian Adm. Pembangunan		1 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	dokumen	2	2	100		
				a Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	laporan	12	12	100		
				b Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	laporan	12	12	100		
		Bagian PBJ		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan fasilitasi pengadaan melalui SPSE	dokumen	10	10	100		
				a Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	2	2	100		
				b Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	dokumen	1	1	100		
				c Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	131	131	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan antara lain:

a) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemerintah;
b) Belum tepatnya pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang direncanakan;
c) Masih kurangnya inovasi untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan;
d) Masih kurangnya pemahaman regulasi, inovasi.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

a) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia serta mengusulkan pengadaan.
b) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang belum tepat waktu dan optimalisasi konsolidasi dengan pemerintah provinsi/pusat serta berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah dibuat. khususnya jadwal kegiatan dan rencana anggaran kas.
c) Mendorong untuk selalu mengikuti regulasi terbaru dan memunculkan inovasi sesuai tupoksi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan fungsi penunjang lainnya diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 108,76%. Adapun rata-rata capaian kegiatan adalah 110%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terealisasi di atas 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Selama tahun 2024 kinerja pelayanan publik Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan. Secara umum gambaran pelayanan publik di Kabupaten Kebumen sampai tahun 2024 masuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dari target 85 mendapat capaian skor 90,40. sehingga persentase kinerjanya 106,35%.

Upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dapat ditempuh melalui beberapa hal antara lain dengan peningkatan kompetensi SDM, peningkatan sarana dan prasarana layanan termasuk memperhatikan pelayanan yang ramah anak atau bersifat inklusif serta mempersingkat waktu pelayanan.

Tabel III.103 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	89,57	85	90,40	106,35	86

Sumber: Bagian Organisasi Kab. Kebumen. 2024

3.1.6 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Adapun capaian pelaksanaan program. kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum sebagai berikut:

Tabel III.104 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbang pol	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah per 1000 penduduk	55,93	62,93	112,52		
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	23	23	100		
				a Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	23	23	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Capaian partisipasi masyarakat/penduduk dalam proses pemilihan umum	%	69,38	75,85	109,33		
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	kegiatan	4	4	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.	orang	375	375	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.						
				C PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARA -KATAN	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	100	100		
				1 KegiatanPerumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	150	150	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Orang	36	36	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah per 1000 penduduk	75	90,71	120,95		
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	lokasi	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	orang	200	200	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	orang	175	175	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengahyat Kepercayaan di Daerah.						
				E PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADA AN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	71,43	100	139,99		
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan	orang	130	130	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik	antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah						
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah	Jumlah Orang yang mengikuti koordina si di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	130	130	100		
				c Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penanganan Konflik di Daerah							
				d Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	4	4	100		
				e Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	100		

2) **Permasalahan**

Tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum sering kali menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan demokrasi di suatu wilayah. Di Kabupaten Kebumen, realisasi partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mencapai 75,85%. melampaui target yang ditetapkan sebesar 69,38%. Angka ini mencerminkan antusiasme sebagian masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka sebagai wujud peran aktif dalam menentukan arah kebijakan publik. Namun keberhasilan ini masih menyisakan ruang untuk perbaikan terutama jika dibandingkan dengan rata-rata partisipasi pemilih di Jawa Tengah yang mencapai 82,56%.

Peran perempuan dalam politik juga masih rendah, dimana tingkat partisipasi anggota dewan perempuan pada DPRD Kabupaten Kebumen adalah 24% dari 50 anggota DPRD Kabupaten Kebumen.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam politik dengan melaksanakan pendidikan politik. Pendidikan politik bagi masyarakat tersebut dilaksanakan melalui forum-forum diskusi politik dengan sasaran tokoh-tokoh masyarakat, calon pemilih pemula dan pemilih perempuan.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan pemerintahan umum diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 116,62%. sedangkan rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 100%.

5) **Capaian Kinerja Urusan**

Capaian kinerja urusan unsur pemerintahan umum dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III.105 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	71,43	100	140	78,57

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Kebumen 2024

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen antara lain:

a) Telah terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada tingkat kabupaten dan kecamatan sehingga setiap permasalahan yang berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi dan ditangani;
b) Dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah serta Puskomin (Pusat Komunikasi) yang melibatkan berbagai unsur intelijen guna mengumpulkan data-data dan informasi yang berguna untuk melakukan pencegahan dini dan deteksi dini;
c) Sinergitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikal dan sumber daya ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kebumen.
d) Adanya peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam memfasilitasi solidaritas antar umat beragama, moderasi beragama dan toleransi serta memperkuat kerukunan diantara elemen masyarakat, sehingga hal ini memiliki peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya konflik sosial.
e) Penanganan konflik berbasis kearifan lokal dalam rangka menciptakan solusi yang dapat diterima semua pihak dengan mengedepankan musyawarah dan dialog dengan melibatkan unsur masyarakat.
f) Dilaksanakannya komunikasi sosial antar tokoh masyarakat sehingga meningkatkan hubungan sosial di masyarakat dalam rangka mencegah potensi konflik.
g) Pemberdayaan potensi Ormas karena Ormas memiliki akses langsung ke komunitas dan akar rumput, sehingga dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta membantu dalam mendeteksi potensi konflik lebih awal melalui laporan atau informasi langsung dari lapangan.

3.1.7 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

Pelaksanaan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 11 (sebelas) Kelurahan di Kabupaten Kebumen melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
d) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan urusan kewilayahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Adimulyo

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.106 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kewilayahan	Kecamatan Adimulyo	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	`	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	9	9	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	0	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya AIr dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah	Unit	31	31	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Unit	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	5	100		
				c Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	92	91,01	98,9		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang DIlimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jenis	16	16	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang,	Jenis	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum)						
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jenis	7	7	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	38,08	91,3	239,76		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kegiatan	34	34	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	23	23	100		
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	Dokumen	2	2	100		
				c Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				d Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Kegiatan	4	4	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)						

2) **Permasalahan**

Permasalahan yang ada di Kecamatan Adimulyo antara lain:

a) Sumber Daya Manusia

Masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di pelayanan yaitu hanya 1 (satu) orang sehingga menghambat jalannya pelayanan. Kemudian adanya pegawai dan pejabat struktural yang pensiun sehingga terjadi kekosongan pejabat.

b) Sarana dan Prasarana

Kondisi bangunan gedung Kecamatan Adimulyo yang dalam kondisi rusak perlu pemeliharaan yang membutuhkan biaya besar, sedangkan anggaran pemeliharaan yang ada sangat terbatas. Peralatan kantor seperti komputer dan printer jumlahnya kurang dan peralatan yang ada saat ini kurang memadai. Selain itu jaringan internet yang sering down menghambat pelayanan dan operasional kantor.

c) Sumber Daya Alam

Kondisi geografis Kecamatan Adimulyo yang berupa dataran rendah yang banyak terdiri dari sungai (dilintasi 8 sungai) dan sawah sering mengalami bencana banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang terutama pada saat musim hujan.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Mengusulkan kebutuhan pegawai ke BPKSDM Kabupaten Kebumen
b) Mengoptimalkan personil yang ada dan menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah supaya mengirimkan siswa PKL.
c) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta terus mengusulkan rehab gedung ke Pemerintah Kabupaten Kebumen.
d) Membentuk dan mengoptimalkan peran Tim Tangguh Bencana dan gotong-royong masyarakat saat terjadi bencana supaya bencana dapat langsung dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan teratasi sesegera mungkin.
e) Menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Adimulyo untuk selalu waspada dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 134,66% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

2. Kecamatan Alian

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.107 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kwilayahan	Kecamatan Alian	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dokumen	10	10	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA)	Dokumen	6	6	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang disusun (LKJIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)						
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelola administrasi	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Terlaksananya Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranggan bangunan kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	10	10	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					makanan dan minuman						
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material (Alat tulis kantor)	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan Arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Unit	39	39	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a SubKegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Paket	2	2	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Bulan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	25	25	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Unit	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					operasional atau lapangan						
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	8	8	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	15	15	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	87,5	93,84	107,24		
				1 Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Jenis Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	Jenis	7	7	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				umum sesuai penugasan kepala daerah							
				a Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval. Upacara dan Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri	%	87,5	87,5	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Kegiatan	8	8	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan n aset desa	Jumlah terfasilitasi penyusunan APBDes. keuangan desa dan	Dokumen	16	16	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pendayagunaan aset desa						
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa	Desa	3	3	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	8	8	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	Dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam)	Kegiatan	2	2	100		
				g Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan	Kegiatan	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pemberdayaan masyarakat desa	masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas, pemuda/KT)						
				h Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kegiatan	2	2	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Kecamatan Alian belum tersedia fasilitas tempat ibadah
b) Belum tersedianya sarana dan prasarana ruang khusus untuk penyimpanan arsip;
c) Belum tersedianya sarana CCTV di ruang pengamanan arsip dan untuk keamanan di lingkungan Kecamatan Alian.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Membuat sekat di area parkir untuk bisa difungsikan sebagai tempat ibadah;
b) Memanfaatkan rumah dinas camat untuk penyimpanan arsip;
c) Memaksimalkan petugas penjaga malam dan mengusulkan pengadaan CCTV

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 101,81% dan rata- rata capaian kegiatan 100%.

3. Kecamatan Ambal

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.108 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Kewilayahan	Kecamatan Ambal	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA)	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)	Dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	16	18	118		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelola administrasi	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material (Alat tulis kantor)	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan Arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Unit	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Unit	2	2	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Bulan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	44	44	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	10	10	100		
				d Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	3	1	33,3	Anggaran rehab gedung belum cukup	Penambahan anggaran
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	87	90,18	102		
				1 Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Jenis Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	Jenis	5	5	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara dan Resepsi HUT RI,Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri	%	34,04	65,62	192,77		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes, keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	32	32	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa	Desa	0	0	0		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	5	5	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	Dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam)	Kegiatan	2	2	100		
				g Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas)	Kegiatan	4	4	100		
				h Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kegiatan	2	2	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Ruang pelayanan masyarakat Kecamatan Ambal kurang representatif/terlalu sempit (pelayanan KTP, KK dll).
b) Sarana dan prasarana ruang pelayanan masih kurang maksimal (AC kurang dingin dan mesin printer cetak KTP sering rusak)
c) Blangko KTP sering kehabisan sehingga pelayanan sering terhambat.
d) Sarana penunjang pelayanan tempat bermain anak terlalu sempit

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Memperluas ruang pelayanan dan melengkapi sarana dan prasarananya;
b) Service AC dan Printer cetak KTP
c) Permohonan blangko KTP jauh hari sebelum kehabisan

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 123,69% dan rata- rata capaian kegiatan 100%

4. Kecamatan Ayah

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.109 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Kewilayahan	Kecamatan Ayah	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan publik Kecamatan	%	90	89,9	99,88	1 Sarana dan Prasarana yang sudah lama/rusak sehingga menghambat lamanya waktu pelayanan.	1 Mengajukan Surat Permohonan kepada OPD yang mengampu untuk pemberian alat yang baru (Disdukcapil)
										2 Jaringan yang lemah/sering eror	2 Mengajukan Permohonan Kepada OPD yang mengampu untuk menambah jaringan (Dinas Kominfo)
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	jumlah Urusan Pemerintahan yang	Jenis	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dilimpahkan kepada camat						
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan	Jenis	9	9	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	1	1	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	indeks kondusivitas kecamatan	%	100	100	100		
				1 penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	3	3	100		
				a Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bineka tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	Kegiatan	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	22,22	100	450		
				1 Fasilitasi. Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi. Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kegiatan	7	7	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendaya gunaan aset desa	Desa	18	18	100		
				b Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	5	5	100		
				c fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa	jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dan pembangunan desa	Dokumen	2	2	100		
				d Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				e Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				f Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan	Jumlah Kegiatan pembinaan PKK, Jumlah	Kegiatan	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan Pembinaan sosial Masyarakat, jumlah kegiatan pembinaan UKS, Jumlah kegiatan pembinaan Organisasi Kepemudaan						
				g Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	10	10	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	6	6	100		
				b Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (LKPJ, LKJIP, LPPD, LK SKPD)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Orang	17	17	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan	Bulan	12	12	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel. Lampu. Terminal. Saklar)	Paket	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kamtor	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	Bulan	12	12	100		
				g Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Dartah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				h Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya (Laptop, mikrofon)	Unit	3	3	100		
				4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor	Bulan	12	12	100		
				5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Unit	13	13	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	8	8	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	8	8	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya	Unit	1	1	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Sarana dan prasarana berupa AC, komputer, kamera, alat perekam sidik jari yang sudah lama/rusak sehingga menghambat pelayanan.
b) Jaringan internet yang lemah.
c) Inventarisasi barang BMD berupa sepeda motor sudah tidak layak pakai.
d) Banyaknya lokasi rawan bencana antara lain bencana longsor, banjir, pohon tumbang.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Mengajukan permohonan alat baru kepada OPD pengampu (DISDUKCAPIL)
b) Mengajukan kepada OPD pengampu (DISKOMINFO) untuk menambah bandwitch jaringan.
c) Koordinasi dengan OPD pengampu (BPKPD) mengajukan anggaran untuk perbaikan kendaraan dinas Kecamatan Ayah.
d) Koordinasi dengan OPD pengampu (BPBD, DINSOS P3A, dan PMI) dalam penanggulangan bencana dan antisipasi pencegahan bencana di wilayah Kecamatan Ayah.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 187,47%. kemudian rata-rata capaian kegiatan 100%.

5. Kecamatan Bonorowo

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.110 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kewilayahan	Kecamatan Bonorowo	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, Renstra 2026)	Dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(LkjIP, LKPJ, LPPD, Dalev)						
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang	16	16	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	Dokumen	4	4	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	Bulan	12	12	100	Belanja sesuai dengan kebutuhan	
				e Penyediaan bahan Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12	12	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	Bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	10	10	100		
				a Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Paket	37	37	100		
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	2	100		
				c Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Penyediaan jasa Komunikasi. Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi.sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah	Unit	23	23	100		
				a Penyediaan Jasa. Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah bulan/unit Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	11	11	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan mebel	Unit	12	12	100		
				c Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Unit	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Indeks	89	94	105,61		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan Publik Kecamatan						
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Indeks	89	94	105,61		
				2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	%	100	100	100		
				3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Pelayanan perizinan yang dilaksanakan(KK, KTP, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Izin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum)	Jenis	9	9	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	42,09	100	237,58		
				1 Kegiatan Fasilitasi. Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Kegiatan	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengawasan Pemerintahan						
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (kegiatan lama Fasilitasi APBDes)	Dokumen	11	11	100		
				b Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa (Profil/IPDM)	Dokumen	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Dokumen	4	4	100		
				g Sub Kegiatan koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagai berikut:

a) Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang memadai sesuai dengan perkembangan tuntutan pelayanan.
b) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM.
c) Belum tersedianya sarana CCTV di ruang pengamanan Arsip dan untuk keamanan di lingkungan Kecamatan Bonorowo.
d) Jaringan internet sering tidak stabil dan aplikasi sering error.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Untuk meningkatkan IKM dilakukan dengan cara segera mencukupi kebutuhan sarana prasarana, mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik, website dan media sosial.
b) Mengusulkan penambahan pegawai yang berkualitas.
c) Memaksimalkan petugas penjaga malam dan mengusulkan pengadaan CCTV.
d) Mengajukan kepada OPD pengampu (DISKOMINFO) untuk menambah bandwitch jaringan.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program masuk kategori tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan Program di Kecamatan Bonorowo rata-rata program adalah 135,79% dan rata-rata kegiatan adalah 100% telah dilaksanakan semuanya.

6. Kecamatan Buayan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.111 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Kewilayahan	Kecamatan Buayan	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualtas sumber daya manusia.	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan. Penganggaran.dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renja. RKA, DPA, DPPA, RKAP)	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD,Dalev)						
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan yang mendapatkan Tamsil	Orang	14	14	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	Bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		
				5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					kendaraan dinas operasional						
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan	26	26	100		
				B Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	85	92,73	105,9		
				7 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Laporan	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	Laporan	5	5	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4	100		
				C Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	100	100	100		
				a Sub Kegiataan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	Kegiatan	2	2	100		
				D Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	34,04	65	190,95		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kegiatan	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	20	20	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Dokumen	20	20	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Dokumen	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Dokumen	4	4	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos)	Dokumen	2	2	100		

2) **Permasalahan**

a) Cuaca Ekstrim menyebabkan gangguan pada jaringan listrik, sehingga mengganggu pelayanan.
b) Jaringan Internet sering *down* sehingga menghambat penerbitan dokumen kependudukan.
c) Dengan adanya wajib aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi pemohon yang ingin mencetak e-KTP, membuat antrian menumpuk karena proses registrasi hingga berhasil aktivasi memakan waktu kurang lebih 5 menit.
d) Adanya pengaduan masyarakat yang berhak menerima bantuan belum terfasilitasi bantuan disebabkan pemutakhiran data yang tidak valid dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi.
e) Masih kurangnya kursi rapat.
f) Kecamatan belum memiliki mushola.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Melaporkan ke PLN dan diusulkan penambahan daya listrik.
b) Dilaksanakannya rapat koordinasi PATEN dengan desa terkait sistem, mekanisme dan prosedur terkait PATEN, informasi waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website dan media sosial (facebook dan instagram).
c) Menginformasikan nomor layanan kepada masyarakat Kecamatan Buayan untuk mempermudah informasi terkait mekanisme dan prosedur pengusulan dan penerimaan bantuan.
d) Pinjam kursi ke balai desa terdekat.
e) Memanfaatkan ruangan di rumah dinas Camat untuk tempat ibadah.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Program dan kegiatan urusan kewilayahan rata-rata program adalah 124,21% dan rata-rata kegiatan fisik adalah 100%.

7. Kecamatan Buluspesantren

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.112 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Kewilayahan	Kecamatan Buluspesantren	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Kecamatan	Indeks	84	92,01	108,43		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100	100		
				a Subkegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK Akte Kelahiran, Akte Kematian, Perpindahan, KIA, Pemberian Rekomendasi, Legalisasi Umum	Jenis	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				k Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Persentase Desa yang Mendapatkan Kuota Kecamatan	Desa	100	100	100		
				E PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusifitas Kecamatan	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a Subkegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kebumen, HUT RI dan Karnaval	Kegiatan	3	3	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan indeks desa membangun Kategori Maju dan mandiri	persen	85,71	100	116,67		
				1 Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan	kegiatan	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan						
				a Subkegiatan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	21	21	100		
				b Subkegiatan Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				c Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Dokumen	2	2	100		
				c Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbagdes/kel dan Musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				e Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (PKK,Organisasi Kepemudaan, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Kegiatan	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Subkegiatan Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan TKP2Des/Kel dan Bansos Sembako	Dokumen	2	2	100		
				[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100		
				1 kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	11	11	100		
				a Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026)	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (LKJIP.SKIP.LKIP.LKPJ .LPPD.DALEV.SPIP)	Dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan administrasi keuangan	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan	Dokumen	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil						
				k Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan (TU, GU, UP, LS)	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	100		
				k Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	100		
				c Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Bulan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsultasi ke Luar Daerah.						
				Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip Dinamis	Bulan	12	12	100		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	2	100		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	2	100		
				Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2	100		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah BUlan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	paket	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	10	10	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	10	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Penanganan kebencanaan banjir dan pohon tumbang karena hujan dan angin kencang.
b) Akibat dari hujan adanya jalan rusak.
c) Keterbatasan jumlah personil pelayanan umum (2 orang personil: 1 orang PNS dan 1 orang P2K di mana 1 orang merangkap sebagai operator KTP Elektronik dan KIA).

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

a) Melaksanakan sosialisasi di tiap desa terkait Penanganan banjir, pengerukan sedimen di sungai, penangan pohon tumbang dan penebangan pohon yang membahayakan.
b) Mengajukan permohonan perbaikan atau bantuan ke Pemerintah Pusat.
c) Penambahan personil pelayanan umum di tahun 2025 (1 orang P3K).

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 106,27% dan rata- rata capaian kegiatan 100%.

8. Kecamatan Gombong

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.113 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Kewilayahan	Kecamatan Gombong	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	%	100	100	100		
				1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	28	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	11	11	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		
				3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Unit	14	14	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	11	100		
				b Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	27	27	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	100		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	87	87,67	100,7		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	5	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	2	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kegiatan	1	1	100		
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	80	80	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri	%	100	100	100		
				1 Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan	Desa/kel	14	14	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dan pengawasan pemerintahan desa						
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	14	14	100		
				b Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2	2	100		
				c Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100		
				d Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
				f Fasilitasi Penyusunan Program dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	Dokumen	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						
				g Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	14		100		
				E PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan	%	87	87,67	100,7		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paket	7	7	100		
				a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	14	14	100		
				b Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	6	100		
				c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	32	32	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Gombong antara lain adalah:

a) Sarana dan prasarana kerja (komputer dan printer) sudah kurang layak digunakan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
b) Jaringan internet masih sering *down*.
c) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut:

a) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada
b) Melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana
c) Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana
d) Koordinasi dengan Dinas Kominfo
e) Melakukan pembinaan terhadap aparatur kecamatan dan kelurahan

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 100,28% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

9. Kecamatan Karanganyar

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.114 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Kewilayahan	Kecamatan Karanganyar	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perencanaan Perangkat Daerah	Daerah (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA)						
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	37	37	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	12	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Bahan/Material yang Disediakan	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	9	9	100		
				a SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Unit	1	1	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AIr dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah	Unit	51	51	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Unit	10	10	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	10	10	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi	Unit	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dan banguinan lainnya						
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	90	91,65	101,8		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang DIlimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	Jenis	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kegiatan Infrastruktur, Bantuan Ke Pihak ke 3 dan Peningkatan Kapasitas)	Kegiatan	3	3	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi Kabupaten Kebumen, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	95	100	105,26		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kegiatan	6	6	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan	Desa	7	7	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendayagunaan Aset Desa	keuangan desa dan pendayagunaan aset desa						
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	Dokumen	2	2	100		
				c Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				d Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES, Sosial Masyarakat)	Kegiatan	4	4	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)	Kegiatan	2	2	100		
				E PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan Indeks	%	78	78	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	4	4	100		
				a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	16	16	100		
				b Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	12	12	100		
				c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	23	23	100		
				d Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	4	4	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Kecamatan Karanganyar pada musim penghujan sering dilanda bencana banjir yang disebabkan hujan di wilayah kecamatan karanganyar sendiri dan banjir kiriman dari Kecamatan Karanggayam.
b) Kurangnya ketersediaan kursi.
c) Sarana kerja berupa komputer/laptop dan printer belum memadai.
d) Sumber Daya Manusia masih kurang (pejabat banyak yang kosong) sehingga pelayanan terhambat.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Memerintahkan Desa/Kelurahan untuk mengaktifkan kelompok Destana dan Bekerjasama dengan Desa/Kelurahan untuk bisa mengadakan *Sidebag* untuk upaya peninggian tanggul Kali Karanganyar yang pekerjaannya dilakukan oleh swadaya masyarakat setempat serta koordinasi dengan Stakeholder terkait untuk pembersihan Kali Karanganyar
b) Meminjam kursi dari Desa/Kelurahan/RTRW terdekat.
c) Mengusulkan pengadaan komputer/laptop.
d) Mengusulkan kekurangan SDM ke BKPSDM.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 101,41% dan rata- rata capaian kegiatan 100%.

10. Kecamatan Karanggayam

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.115 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Kewilayahan	Kecamatan Karanggayam	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor paertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	11	11	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, Renstra)	Dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perangkat Daerah yang disusun (LkjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev)						
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan serta Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	14	14	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan (TU, GU, LS, UP)	Dokumen	3	3	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	1	1	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Cetakan dan Penggandaan						
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip Dinamis	Bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	3	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3	3	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	Unit	14	14	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/Operasional	Unit	14	14	100		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja	Unit	12	12	100		
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	87,5	91,25	104,28		
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	100	100	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan yag dilaksanakan (KTP. KK. KIA. Akta Kelahiran. Akta Kematian. Pindah Datang. Pindah Keluar. Rekom SKCK. Izin Keramaian. dan Legalisasi Umum)	Jenis	5	5	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penugasan Kepala Daerah						
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi Kab. Kebumen, Karnaval. Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	38,08	68,42	179,67		
				1 Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan. dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan, dan Pengawasan Pemerintah	Kegiatan	8	8	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	19	19	100		
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Sinkroniasasi	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)						
				c Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				d Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK. UKS. BUMDes, Sosial Masyarakat)	Dokumen	4	4	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2KDes dan Bansos Sembako)	Laporan	2	2	100		

2) **Permasalahan**

Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

a) Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya manusia dalam pengelolaan keuangan terutama dalam proses penyusunan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah.
b) Kurang cermatnya dalam penyusunan perencanaan anggaran kas dan pelaksanaan kegiatan.
c) Masih lemahnya pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran kas, dan belum konsisten dalam melaksanakan register resiko yang telah disusun.
d) Adanya peraturan baru mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu sebagai berikut:

a) Komitmen pimpinan, ASN dan stakeholder/pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
b) Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
c) Optimalisasi peran ASN dalam pengendalian internal.
d) Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Empat Program di Kecamatan Karanggayam yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**,** Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum, dan Program Pembinaan Dan Pengawas Pemerintah Desa. rata-rata program adalah 120,98% dan rata-rata kegiatan adalah 100%.

11. Kecamatan Karangsambung

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.116 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Kewilayahan	Kecamatan Karangsambung	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor paertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA)	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)	Dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	19	19	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelola administrasi	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket penyediaan bahan/material (Alat tulis kantor)	Paket	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Laporan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan Arsip	Dokumen	12	12	100		
				4 Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Unit	16	16	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan pengadaan mebel	Unit	16	16	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang ditetapkan	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan kebersihan	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	37	37	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Unit	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	12	12	100		
				d d. Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1	1	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	90,38	90,46	100,09		
				1 Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan (KTP/KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	Laporan	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Kegiatan rangkaian Hari Jadi Kab. Kebumen dan HUT RI	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila. pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	50	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri	%	71,43	92,85	129,99		
				1 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi	Kegiatan	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan pengawasan pemerintah desa	pembinaan dan pengawasan pemerintahan						
				a Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang penyusunan APBDes. keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	7	7	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	14	14	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam)	Dokumen	2	2	100		
				g Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan	Kegiatan	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	masyarakat desa (BUMDES, PKK. UKS, Sosmas, Karang Taruna)						
				h Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan difasilitasi penanggulangan kemiskinan	Laporan	14	14	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Kecamatan Karangsambung belum tersedia fasilitas Mushola.
b) Sarana dan prasarana kursi rapat masih kurang sehingga pada saat mengundang peserta rapat harus mencari pinjaman sedangkan anggaran sewa tidak tersedia.
c) Sarana penunjang pelayanan tempat bermain anak sangat kurang.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Membuat sekat tempat arsip yang difungsikan sebagai Mushola, dan sedang diupayakan membangun Mushola dengan mencari bantuan anggaran dari Baznas dan infak dari karyawan karyawati serta perangkat Desa.
b) Meminjam kursi ke kantor balai desa terdekat.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 107,52% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

12. Kecamatan Kebumen

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.117 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Kewilayahan	Kecamatan Kebumen	Pemantapan dan pengem bangan kuali tas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Desa	%	100	100	100		
				1 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Dokumen	8	8	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	41	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	10	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		
				3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Unit	3	3	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100		
				4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	22	22	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100		
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	91,7	93,01	101,43		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dilimpahkan kepada Camat	dilimpahkan kepada Camat						
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	2	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Orang	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Desa Membangun	%	25	100	400		
				1 Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Desa/kel	29	29	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	5	5	100		
				b Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	4	4			
				c Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah dengan Pembangunan Desa	dengan Pembangunan Desa						
				d Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1	100		
				f Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	5	5	100		
				g Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		
				E PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan	%	91,7	93,01	101,43		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	16	16	100		
				b Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	46	46	100		
				c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	40	40	100		
				d Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	13	13	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kebumen antara lain adalah:

a) Sarana dan prasarana kerja (komputer, printer) sudah kurang layak digunakan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
b) Internet masih sering *down*;
c) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut:

a) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada
b) Melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana
c) Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana
d) Koordinasi dengan Dinas Kominfo
e) Melakukan pembinaan terhadap aparatur kecamatan dan kelurahan

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 160,57% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

13. Kecamatan Klirong

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.118 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Kewilayahan	Kecamatan Klirong	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dokumen	9	9	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, dan DPPA)	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, DALEV dan SPIP)	Dokumen	4	4	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	15	15	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelola administrasi	Dokumen	3	3	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/Material (Alat Tulis Kantor)	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Unit	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	2	100		
				b Pengadaan Sarana dan Prasarana Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Lainnya	Unit	2	2	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Bulan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	34	34	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan. pajak	Unit	14	14	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan						
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	5	5	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	15	15	100		
				d Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	3	3	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	87	91,32	104,97		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Jenis Pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan (KTP,KK,	Jenis	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				terkait dengan Non Perizinan	Kartu Kelahiran,Surat Kematian, Pindah Datang)						
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Fisik dan Non Fisik Kuota Kecamatan	Paket	8	8	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang	Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara dan Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri	%	37.5	66.67	177.78		
				1 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kegiatan	8	8	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah terfasilitasinya penyusunan APBDes, Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	24	24	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	Desa	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah dengan Pembangunan Desa							
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Desa	4	4	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Kegiatan	3	3	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosialisasi Masyarakat, Karang Taruna)	Kegiatan	2	2	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan	Kegiatan	2	2	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Sarana dan prasarana kursi rapat masih kurang sehingga pada saat mengundang peserta rapat harus mencari pinjaman sedangkan anggaran sewa tidak tersedia.
b) Belum tersedianya fasilitas Mushola di Kecamatan Klirong
c) Belum tersedianya sarana dan prasarana ruang khusus untuk penyimpanan arsip

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

a) Meminjam kursi di Balai Desa terdekat
b) Membuat sekat di ruang PKK yang difungsikan sebagai Mushola
c) Memanfaatkan rumah dinas camat untuk penyimpanan arsip

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 120,69% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

14. Kecamatan Kutowinangun

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.119 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Kewilayahan	Kecamatan Kutowinangun	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dokumen	13	13	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA)	Dokumen	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)	Dokumen	4	4	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	15	15	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelola administrasi	Dokumen	12	12	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang gan bangunan kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Paket	3	3	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Penyediaan bahan bacaan	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peraturan Perundang-undangan	dan peraturan perundang-undangan						
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket penyediaan bahan/material (Alat tulis kantor)	Paket	8	8	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Laporan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan Arsip	Dokumen	12	12	100		
				4 Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Unit	30	30	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan pengadaan mebel	Unit	26	26	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	4	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang ditetapkan	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					daya air dan listrik yang disediakan						
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	33	33	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan	Jumlah Unit penyediaan jasa pemeliharaan. pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	9	9	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	10	10	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	10	10	100		
				d . Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya/Rehab	Jumlah Unit Pemeliharaan/rehabilitasi si gedung kantor dan bangunan lainnya si gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	4	4	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	86.5	87.44	101		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Laporan	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian. Pindah Datang)	Laporan	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain y	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	2	2	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Kegiatan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan HUT RI	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mema	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Orang	75	75	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri	%	68.42	73.68	108		
				1 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah	Jumlah Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Kegiatan	13	13	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang penyusunan APBDes. keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	19	19	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	5	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Dokumen	19	19	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas, Karang Taruna)	Dokumen	4	4	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan difasilitasi penanggulangan kemiskinan	Laporan	2	2	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Kantor Camat Kutowinangun belum tersedia fasilitas mushola;
b) Kursi rapat masih kurang sehingga pada saat mengundang peserta rapat harus mencari pinjaman sedangkan anggaran sewa tidak tersedia.
c) Sarana penunjang pelayanan tempat bermain anak sangat kurang
d) Ruang pelayanan kurang luas

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Membuat sekat tempat arsip yang difungsikan sebagai mushola atau memanfaatkan ruang kosong
b) Meminjam kursi ke kantor balai desa terdekat atau ke UPT Dinas Pendidikan dan mengusulkan pengadaan kursi;
c) Ruang pelayanan akan dirapikan sambil menunggu anggaran pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 102,19% dan rata- rata capaian kegiatan 100%.

15. Kecamatan Kuwarasan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.120 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Kewilayahan	Kecamatan Kuwarasan	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	89	91,97	103,33		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan	Jenis	7	7	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah laporan pelaksanaan	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	kewenangan lain yang dilimpahkan						
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi Kabupaten Kebumen, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	45,45	100	220,02		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Desa	22	22	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pendayagunaan Aset Desa						
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Desa	22	22	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa (Pembinaan PKK, Sosmas, UKS dan BUMDes)	Kegiatan	5	5	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes dan Rakor sembako)	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Dokumen	10	10	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					perangkat daerah yang tersusun						
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	14	14	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Bulan	12	12	100		
				5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	13	13	100		
				b Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	15	15	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	2	2	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagai berikut:

a) Kurangnya sarana prasarana personal komputer, printer dan pendingin ruangan.
b) Kurangnya ketersediaan kursi rapat.
c) Kondisi toilet yang kurang baik sehingga mengurangi kenyamanan.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dan mengusulkan pengadaan printer dan pendingin ruangan. Adapun untuk personal komputer sudah dianggarkan pada anggaran tahun 2025.
b) Meminjam kursi ke balai desa terdekat dan Puskesmas Kuwarasan.
c) Dilakukan pemeliharaan toilet sehingga dapat meningkatkan kenyamanan

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 130,84% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

16. Kecamatan Mirit

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.121 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Kewilayahan	Kecamatan Mirit	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA)	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP						
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	100		
				b Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	100		
				c Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	Bulan	12	12	100		
				e Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	100		
				g Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	Bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan meubelair (kursi tamu/sofa set)	Unit	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Laptop, Printer, Monitor LED, PC, Vegetation Blind/Tirai)	Unit	5	5	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	20	20	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	13	13	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	Unit	5	5	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	87.15	92.07	105.65		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dilimpahkan kepada camat						
				2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum)	Jenis	9	9	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi Kabupaten Kebumen Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Negara Kesatuan Republik Indonesia							
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	91	100	109,89		
				1 Kegiatan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kegiatan	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (kegiatan lama Fasilitasi APBDes)	Desa	22	22	100		
				b Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	22	22	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	Dokumen	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Kegiatan	4	4	100		
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Data Kemiskinan dan Bansos Sembako)	Kegiatan	2	2	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Sarana dan prasarana di Kecamatan Mirit masih kurang seperti komputer, laptop, LCD outdoor dan sarpras PATEN.
b) Untuk ruang arsip kurang luas sehingga tidak mampu menampung jumlah arsip yang ada.
c) Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

a) Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada.
b) Mengoptimalkan daya tampung ruang arsip dan sebagian lagi masih pada masing-masing kepala seksi.
c) Dalam menyelesaikan kegiatan/pekerjaan dibentuk tim kerja.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 103,88% dan rata – rata capaian kegiatan 100%.

17. Kecamatan Padureso

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.122 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Kewilayahan	Kecamatan Padureso	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	87	97,08	111,59		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan	Jenis	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah laporan pelaksanaan	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	kewenangan lain yang dilimpahkan						
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi Kab. Kebumen, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	38,08	100	262,6		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan. pengawasan pemerintahan	Kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Desa	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pendayagunaan Aset Desa						
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa (Pembinaan PKK, Sosmas, Kepemudaan, UKS dan BUMDes)	Kegiatan	5	5	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes dan Rakor sembako)	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Dokumen	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					perangkat daerah yang tersusun						
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	13	13	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3	3	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	4	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Bulan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	8	8	100		
				b Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan mebel						
				c Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	4	4	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	4	4	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan Kecamatan Padureso adalah sebagai berikut:

a) Masih Kurangnya sarana prasarana kantor terutama laptop, printer, LCD proyektor dan *sound system*.
b) Belum tersedianya parkir untuk pengunjung pemohon layanan.
c) Kurangnya SDM untuk pelayanan (petugas pelayanan hanya ada 1 orang).

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dan mengusulkan pengadaan LCD proyektor, sound system, printer dan pendingin ruangan.
b) Disediakan lokasi parkir terbuka untuk pengunjung pemohon layanan di halaman Kecamatan.
c) Koordinasi dengan BKPSDM.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 143,54% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

18. Kecamatan Pejagoan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.123 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Kewilayahan	Kecamatan Pejagoan	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan	%	91	92.47	101.62		
				1 Pelaksanaan Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Urusan Pemerintahaan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis	4	4	100		
				a Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah pelayanan Non Perijinan yang Dilaksanakan	Jenis	4	4	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jenis	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
				1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a Pembinaaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa dengan indeks membangun kategori maju dan mandiri	%	13	13	100		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kegiatan	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	13	13	100		
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	2	2	100		
				c Fasilitasi Penyeleggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1	1	100		
				d Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi musrenbangdes dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK. Kepemudaan, UKS, Bumdes, Sosmas)	Kegiatan	5	5	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(sembako dan TKP2KDes)						
				g Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah bulan terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	100		
				1 Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	17	17	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12	12	100		
				4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	100		
				5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan.Pa jak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	unit	14	14	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	10	100		
				c Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	unit	2	2	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Sarana kendaraan untuk monitoring yang ada di Kecamatan Pejagoan masih belum mencukupi, mengingat wilayah Kecamatan Pejagoan sebagian besar adalah wilayah pegunungan.
b) Sarana Prasarana untuk pelayanan belum memadai karena masih menggunakan sarpras lama.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Melakukan koordinasi dengan Bidang Aset agar bisa disediakan kendaraan untuk mendukung monitoring.
b) Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk memenuhi sarpras pelayanan yang sesuai standar.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 161,11% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

19. Kecamatan Petanahan

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.124 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Kewilayahan	Kecamatan Petanahan	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	10	10	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	17	15	88.23	Ada 2 (dua) orang pejabat yang habis masa bhaktinya dan belum ada penggantinya	Koordinasi dengan BKPSDM
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Administrasi Keuangan (TU,GU, LS dan UP)	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan yang disediakan	Bulan		12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100		
				b Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Bangunan Lainnya yang Disediakan						
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	31	31	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	90,38	91	100,6		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	21	21	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	9	9	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI.	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi Kab. Kebumen, Karnaval, Resepsi HUT RI) memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pelestarian Bineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI.	Orang	2	2	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	81	95,23	117,56		
				1 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	Dokumen	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pendayagunaan Aset Desa						
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam tara	Dokumen	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	4	4	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) **Permasalahan**

Permasalahan yang ada di Kecamatan Petanahan antara lain:

a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di pelayanan, dimana dalam pelayanan Paten hanya 1 (satu) orang.
b) Banyaknya pegawai dan pejabat struktural yang pensiun sehingga terjadi kekosongan pegawai/pejabat.
c) Kondisi bangunan gedung Aula Kecamatan Petanahan kurang nyaman dan sempit
d) Peralatan kantor lainnya juga terbatas.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Mengusulkan kebutuhan pegawai ke BPKSDM Kabupaten Kebumen
b) Mengoptimalkan personil yang ada dan mengoptimalkan kerja sama
c) Mengusulkan Rehabilitasi Gedung Aula Kantor Kecamatan Petanahan.
d) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 104,56% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

20. Kecamatan Poncowarno

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.125 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Kewilayahan	Kecamatan Poncowarno	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	13	13	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi LIstrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	4	4	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	4	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	24	24	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	12	100		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	10	100		
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	87	88.77	102.03		
				AN DAN PELAYANAN PUBLIK							
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	6	6	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					nonperizinan pada urusan pemerintahan						
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	50	100		
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	34,04	81,82	240,36		
				1 Kegiatan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Kegiatan	9	9	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	2	2	100		
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	2	2	100		
				c Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ketentraman dan ketertiban umum						
				d Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	Dokumen	1	1	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Dokumen	4	4	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Laporan	1	1	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut:

a) Masih kurangnya sarana prasarana kantor.
b) Ruang pelayanan yang sempit sehingga arena bermain anak kurang representative.
c) Bangunan depan ruang pelayanan rusak namun tidak tersedia anggaran untuk merehab bangunan tersebut.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dan mengusulkan pengadaan *sound system* dan laptop.
b) Arena bermain anak didesain sedemikian rupa sehingga tidak membutuhkan ruangan yang luas
c) Merencanakan anggaran rehab bangunan depan ruang pelayanan publik yang nantinya akan diusulkan pada Renja Kecamatan.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja Program Kecamatan Poncowarno 135,59% dan rata-rata capaian Kegiatan 100%.

21. Kecamatan Prembun

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.126 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Kewilayahan	Kecamatan Prembun	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dok	10	10	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA)	Dok	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)	Dok	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	17	17	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelola administrasi	Dok	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Terlaksananya Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang gan bangunan kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	10	10	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material (Alat tulis kantor)	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan Arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Unit	39	39	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Paket	2	2	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Bulan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	25	25	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	13	13	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	8	8	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	15	15	100		
				d Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-					
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	90,38	95,94	105,45		
				1 Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang	Jenis	7	7	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dilimpahkan kepada Camat						
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Jenis Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	Jenis	7	7	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara dan Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	keg	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri	%	75,5	100	132,45		
				1 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	kegiatan	8	8	100		
				a a Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan n aset desa	Jumlah terfasilitasi penyusunan APBDes. keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dokumen	13	13	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa	desa					
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	desa	3	3	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Pen yelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam)	keg	2	2	100		
				g Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas.pemuda/KT)	keg	5	5	100		
				h Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi penanggulangan kemiskinan	keg	2	2	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Kecamatan Prembun belum tersedia Fasilitas tempat parkir mobil Trans Kebumen
b) Sarana dan Prasarana Kursi rapat masih kurang sehingga pada saat mengundang Peserta Rapat harus mencari sewa sedangkan Anggaran sewa tidak tersedia.
c) Ruang Pelayanan yang belum memenuhi standar pelayanan
d) Ruang Kerja Sekretariat belum nyaman
e) Ruang Parkir motor pengunjung dan karyawan belum tersedia dengan baik

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Membuat parkiran sementara mobil trans kebumen sementara
b) Meminjam kursi ke pihak ke 3 terdekat;
c) Memaksimalkan Ruang pelayanan
d) Memaksimalkan Ruang kerja Sekretariat
e) Memaksimalkan halaman kantor buat Parkir motor Karyawan dan pengunjung

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 109,47% dan rata- rata capaian kegiatan 100%.

22. Kecamatan Puring

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.127 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Kewilayahan	Kecamatan Puring	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Disusun (LKJIP,SAKIP/LAKIP, LKPJ,LPPD,DALEV,SPIP						
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Administrasi	Dokumen	2	2	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit/jenis Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan bacaan dan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Peraturan Perundang-undangan						
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan bahan/material (ATK)	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Pengelolaan Arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Unit	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	1	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	19	19	100		
				a Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	10	10	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	5	5	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1	1	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	87	88,24	101,42		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Laporan	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperijinan	Jumlah Jenis Pelayanan Non perijinan yang dilaksanakan (KTP,KK,KTA, Surat	Jenis	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kematian, Pindah Datang)						
				C PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	Indeks	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kondusifitas Kecamatan	Indeks	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval,HUT RI,Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	38,08	82,6	216,91		
				1 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen yang Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Kegiatan	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengawasan Pemerintahan						
				a Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang terfasilitasi Penyusunan APBDes Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	3	3	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	8	8	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	8	8	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	Dokumen	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	8	8	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Kegiatan	8	8	100		
				g Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan	Kegiatan	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masyarakat Desa (Bumdes, PKK, UKS.Sosmas)						
				h Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan	Kegiatan	8	8	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Sarana dan prasarana penunjang pelayanan berupa komputer, laptop, printer, kamera dan pendingin ruangan (AC) kondisinya kurang baik.
b) Jaringan internet yang sering *down* dan tidak stabil.
c) Bangunan gedung kantor (aula dan mushola) rusak sedang.
d) Banyaknya lokasi rawan bencana antara lain bencana banjir dan pohon tumbang.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

a) Koordinasi dengan OPD terkait (Bappeda dan BPKPD) untuk menyiapkan anggaran pengadaan dan perbaikan sarana penunjang pelayanan.
b) Mengajukan permohonan kepada OPD terkait untuk menambah melakukan perbaikan jaringan (DISKOMINFO).
c) Koordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan rehab/perbaikan gedung kantor (DPUPR).
d) Koordinasi dengan pihak terkait (BPBD, DINSOS P3A dan PMI) dalam penanggulangan bencana dan antisipasi pencegahan bencana di wilayah Kecamatan.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 129,58% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

23. Kecamatan Rowokele

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.128 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Kewilayahan	Kecamatan Rowokele	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Kecamatan	Indeks	87	93,3	107,2		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	persen	100	100	100		
				a Subkegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang	Jumlah pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan (KTP. KK Kartu Kelahiran. Surat Kematian. Pindah Datang KIA	jenis	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				terkait dengan Nonperizinan							
				b Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Persentase Desa yang Mendapatkan Kuota Kecamatan	Desa	100	100	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas Kecamatan	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kegiatan	2	2	100		
				a Subkegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila Pelaksanaan UUD Negara KRepublik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika	Jumlah Rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara							
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan indeks desa membangun Katagori Maju dan mandiri	indeks	63,63	100	157,2		
				1 Kegiatan Fasilitasi. rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan	kegiatan	6	6	100		
				a Subkegiatan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	3	3	100		
				b Subkegiatan Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				c Subkegiatan Fasilitasi Penyelengaaraan ketentraman dan ketertiban	Jumlah Fasilitasi Penyelengaaraan ketentraman dan ketertiban	Dokumen	1	1	100		
				d Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbagdes/kelurahan dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perencanaan Partisipatif							
				e Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Kegiatan	4	4	100		
				f Subkegiatan Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	jumlah fasiltasi kegiatan penanggulangan kemiskinan TKP2Des/Kel dan Bansos Sembako	Dokumen	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	Persen	100	100	100		
				1 kegiatan perencanaan pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	11	11	100		
				a Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan yang di susun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026)	Dokumen	5	5	100		
				b Subkegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang di susun (LKJIP, SKIP, LKIP, LKPJ,LPPD, DALEV, SPIP)	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan administrasi keuangan	jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100		
				a Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Dokumen	15	15	100		
				b Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Admnistrasi Keuangan (TU, GU, UP, LS)	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Kebencanaan Yang Terdiri dari Tanah Longsor, Kebakaran, Banjir dan Bencana Lainnya.
b) Adanya Jalan Rusak
c) Droping Blanko KTP dari Capil Yang tidak sesuai Kuota yang dibutuhkan.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

a) Mitigasi daerah rawan Bencana.
b) Mengajukan permohonan perbaikan atau bantuan ke Pemerintah Pusat
c) Mengajukan permohonan sesuai kuota yang ada.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program masuk kategori tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Program di Kecamatan Rowokele rata-rata program adalah 116,09% dilaksanakan semua dan rata-rata kegiatan adalah 100% dilaksanakan semuanya.

24. Kecamatan Sadang

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.129 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Kewilayahan	Kecamatan Sadang	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	87	91,64	105,3		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan	Jenis	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	38,08	100	262,6		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	7	7	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa (Pembinaan PKK. Sosmas. UKS dan BUMDes)	Kegiatan	4	4	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes dan Rakor sembako)	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	13	13	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	4	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	Unit	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3	3	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Bulan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	8	8	100		
				b Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan mebel	Unit	4	4	100		
				c Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	9	9	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	5	5	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan Kecamatan Sadang adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya sarana prasarana personal komputer, printer dan pendingin ruangan.
b) Kurangnya SDM di bagian pelayanan.
c) Akses jalan dari jalan raya menuju kantor kecamatan licin dan curam.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dan mengusulkan pengadaan printer dan pendingin ruangan. Adapun untuk personal komputer sudah dianggarkan pada anggaran tahun 2025.
b) Koordinasi dengan BKPSDM.
c) Dilakukan pengurugan dan pemadatan secara swadaya.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 141,98% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

25. Kecamatan Sempor

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.130 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Kewilayahan	Kecamatan Sempor	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev. Sakip. LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Orang	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up, ls)	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
				4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5 Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	28	28	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	9	100		
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	Unit	6	6	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	%	90,7	91	100,9		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	5	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT RI & Hari Jadi Kabupaten Kebumen	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara dan Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kab. Kebumen)	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan UUD 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Orang	139	139	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	59	88	148,3		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	41	41	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	4	4	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	16	16	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Sempor diantaranya:

a) Sarana dan prasarana masih kurang memadai dimana gedung kantor sudah berusia 24 tahun dan perlu rehabilitas.
b) Peralatan komputer dan pendukungnya sudah tidak layak dan perlu peremajaan;
c) Sumber daya manusia atau pegawai yang berkurang karena memasuki usia pensiun dan belum ada penggantinya.

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Memanfaatkan sarana dan prasana yang ada dengan seoptimal mungkin dalam rangka menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat;
b) Dengan sumber daya manusia yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk melayani masyarakat.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program sebesar 112,29% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

26. Kecamatan Sruweng

1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Tabel III.131 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Kewilayahan	Kecamatan Sruweng	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA)	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP,SAKIP/LAKIP,LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)	Dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	19	19	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelola administrasi	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peraturan Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan						
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material (Alat tulis kantor)	Paket	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Laporan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan Arsip	Dokumen	12	12	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Unit	16	16	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Unit	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	16	16	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Laporan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	37	37	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit penyediaan jasa pemeliharaan. pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1	1	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	87,5	90,77	103,7		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Jenis Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	Laporan	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	5	5	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kondusifitas Kecamatan	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara dan Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	orang	50	50	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri	%	34,04	100	293,8		
				1 Kegiatan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	kegiatan	8	8	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes. keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dokumen	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	7	7	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	dokumen	14	14	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam)	dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas)	kegiatan	4	4	100		
				h Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi penanggulangan kemiskinan	laporan	14	14	100		

2) **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewilayahan antara lain:

a) Sarana dan prasarana kursi rapat masih kurang
b) Sarana penunjang pelayanan tempat bermain anak sangat kurang.
c) Sarana penunjang pelayanan di area parkir pengunjung pelayanan belum tersedia.
d) Sarana penunjang pelayanan berupa ruang aduan belum tersedia.
e) Sarana penunjang pelayanan papan informasi belum tersedia.
f) Sarana penunjang pelayanan running text informasi belum tersedia.
g) Sarana penunjang pelayanan pemisahan toilet pria dan wanita pengunjung pelayanan belum tersedia.
h) Dalam melaksanakan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, direncanakan pelaksanaan Pilkades Antar Waktu (PAW) di 2 Desa yaitu Desa Jabres dan Penusupan. Namun ada moratorium Nasional dan Surat Setda Kabupaten Kebumen perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 bahwa Pemilihan Kepala Desa selain Pemilihan Kepala Desa Serentak dilaksanakan setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Dan lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa tanggal 23 April 2024 sehingga terhadap pelaksanaan Pilkades PAW menunggu Juknis atas perubahan UU Nomor 6 Tahun 2024

3) **Upaya Mengatasi Permasalahan**

a) Mengusulkan alokasi tambahan anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
b) Mengirimkan Surat kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen tanggal 12 Desember 2024 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

4) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja**

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 149,37% dan rata- rata capaian kegiatan 100%.

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tabel III.132 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Peraturan Daerah			
1	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021	Mengatur rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kebumen tahun 2024-2044
2	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016	Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3	Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019	Sebagai pedoman dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
4	Pencegahan dan Penanganan Stunting	Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945	Sebagai pedoman dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Kebumen
5	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017	Mengatur Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
6	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021	Sebagai pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
7	Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020	Sebagai pedoman dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha
8	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023
9	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
10	Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021	Sebagai pedoman dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah
11	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025- 2045
12	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019	Sebagai pedoman dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika		Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
13	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015	Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan cadangan pangan daerah
14	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	APBD Tahun Anggaran 2026
Peraturan Bupati			
1	Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Tata Cara Pergeseran APBD
2	Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2045	Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014	Sebagai Pedoman dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kebumen
3	Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023	Mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
4	Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023	Mengatur Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
5	Penyusunan Detail Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023	Mengatur Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD di Kabupaten Kebumen
6	Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019	Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen
7	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464 Tahun 2023	Mengatur Perubahan Penjabaran APBD 2024
8	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Perubahan Standarisasi Biaya Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
9	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019	Mengatur Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
10	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023	Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
11	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur perubahan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Cukai Tembakau Kabupaten Kebumen		Bersumber dari Dana Bagi Cukai Tembakau
12	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023	Mengatur perubahan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
13	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023	Mengatur Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
14	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021	Mengatur Rencana Aksi Daerah dalam rangka Penanggulangan TBC Tahun 2022-2026
15	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023	Sebagai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
16	Penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023	Mengatur Penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan
17	Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Sebagai Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
18	Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Pemungutan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023	Sebagai Pedoman mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Pemungutan Retribusi Daerah
19	Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024	Mengatur Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah
20	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketigabelas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024	Mengatur Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketigabelas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang Bersumber dari APBD Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
21	Kebijakan Akuntansi Properti Investasi	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Mengatur Sistematika dan Uraian Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
22	Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024	Mengatur Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja Disperkimhub
23	Pembentukan. Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017	Mengatur Pembentukan. Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kebumen
24	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Mengatur Perubahan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
25	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024	Mengatur Perubahan Ketiga Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
26	Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017	Mengatur Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD Kabupaten Kebumen
27	Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tidak Mempunyai Nomor Induk kependudukan dan Kelompok Masyarakat yang Tidak Dijamin Kesehatan Nasional	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022	Mengatur pemberian jaminan kesehatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki NIK dan kelompok masyarakat yang tidak dijamin Jaminan Kesehatan Nasional
28	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Batas Desa di Kecamatan Bonorowo
29	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Batas Desa di Kecamatan Alian
30	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Batas Desa di Kecamatan Puring
31	Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024	Mengatur Perubahan Keempat Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
32	Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020	Mengatur Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
33	Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012	Mengatur Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
34	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020	Mengatur Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
35	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengatur Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
36	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Perubahan Ketiga tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
37	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025
38	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024
39	Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Sebagai Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024
40	Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Mengatur Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025
41	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen
42	Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017	Sebagai Pedoman Penggunaan Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen
43	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2024	Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023
44	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
45	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 150 Tahun 2021 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017	Mengatur Perubahan Tata Cara Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
46	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama
47	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024	Mengatur Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024
48	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Mengatur Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
49	Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
50	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012	Memuat Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025
51	Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018	Mengatur Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima
52	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Sebagai Pedoman Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025
53	Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Kebumen
54	Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024	Sebagai Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji di Kabupaten Kebumen
55	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024	Mengatur Perubahan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
56	Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024	Mengatur Penyelenggaraan Program Jamsostek di Kabupaten Kebumen
57	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022	Sebagai Pedoman Pelaksanaan Perda tentang Bangunan Gedung

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
58	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024	Mengatur Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
59	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 dan 353 Tahun 2024	Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
60	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020	Mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen
61	Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022	Sebagai Pedoman Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
62	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2023	Sebagai Pedoman Pelaksanaan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah
63	Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	Sebagai Pedoman Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
64	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018	Mengatur Perubahan Kedua tentang Remunerasi pada RSUD Kabupaten Kebumen
65	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Kedua Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
66	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	Sebagai Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025
67	Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024	Sebagai Pedoman dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
68	Pemberian Fasilitasi Bagi Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Sebagai Pedoman Pemberian Fasilitasi Bagi Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
69	Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	Mengatur Standar Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017	
70	Pembentukan. Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	Mengatur Pembentukan. Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
71	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025
72	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
73	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016	Sebagai Pedoman Pelaporan LHKPN dan LHKAN bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
74	Pedoman Pengelolaan Penugasan Keinvestigasian di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021	Sebagai Pedoman Pengelolaan Penugasan Keinvestigasian di ITDA Kabupaten Kebumen
75	Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017	Mengatur Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
76	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018	Mengatur Perubahan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Kabupaten Kebumen
77	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	Mengatur Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
78	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	Mengatur Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
79	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2024	Mengatur Perubahan mengenai Jenis Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
80	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/M.SM.02/2024	Perubahan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Keputusan Bupati			
1.	Pembentukan Tim Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2.	Pembentukan Tim Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati. Keputusan Bupati dan Perjanjian Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati. Keputusan Bupati dan Perjanjian Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3.	Penunjukan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat dan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat dan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
4.	Penunjukan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Kas Daerah dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Kas Daerah dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
5.	Penunjukan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Penyimpan Uang Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Penyimpan Uang Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
6.	Rekening Satuan Pendidikan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021	Penetapan Rekening Satuan Pendidikan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
7.	Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2023	Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
8.	Perubahan Kesebelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022	Perubahan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
9.	Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
10.	Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Formasi Tahun 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018	Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Formasi Tahun 2023
11.	Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
12.	Pembentukan Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen
13.	Pembentukan Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen
14.	Pembentukan Tim Pembina Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Pembina Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen
15.	Pembentukan Dewan Pengurus Reksa Praja Indonesia Masa Bakti Tahun 2024-2029	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019	Terbentuknya Dewan Pengurus Reksa Praja Indonesia Masa Bakti Tahun 2024-2029
16.	Pemberhentian Nur Subagyo dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016	Penetapan Pemberhentian Nur Subagyo dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia
17.	Pengangkatan Mubasir Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016	Penetapan Pengangkatan Mubasir Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
18.	Program Pembentukan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2024
19.	Penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2024	Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
20.	Penunjukan Pengguna Barang Milik Daerah, Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah. Pengurus Barang Milik Daerah Pengguna dan Pengurus Barang Milik Daerah Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2022	Pengguna Barang Milik Daerah. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Milik Daerah Pengguna dan Pengurus Barang Milik Daerah Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
21.	Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
22.	Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Angagran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial
23.	Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022	Terbentuknya Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024
24.	Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 Tahun 2023	Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
25.	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019	Terbentuknya Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
26.	Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
27.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/529 Tahun 2023 tentang	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024		Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
28.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/529 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
29.	Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019	Terbentuknya Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
30.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
31.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
32.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019- 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
33.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
34.	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Kabupaten Kebumen Tahun 2024
35.	Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2024-2028	Peraturan Menteri Pendidikan. Kebudayaan. Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023	Terbentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2024-2028
36.	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
37.	Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 Tahun 2021	Terbentuknya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
38.	Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007	Terbentuknya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
39.	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
40.	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/529 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
41.	Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Objek Wisata sebagai Area Komersil Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016	Penetapan Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Objek Wisata sebagai Area Komersil Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
42.	Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2023	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
43.	Pembentukan Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	Terbentuknya Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
44.	Pengelola Akun Sepakat Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020	Penetapan Pengelola Akun Sepakat Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Kabupaten Kebumen
45.	Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/529 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
46.	Pemberhentian Daniati. S.Pd.I dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Kepala Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri
47.	Pengangkatan Fidiyanto. S.Sos. Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen
48.	Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Kebumen Tahun 1445 H/2024 M	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022	Terbentuknya Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Kebumen Tahun 1445 H/2024 M
49.	Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kebumen
50.	Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Penyusun Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Kebumen
51.	Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
52.	Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
53.	Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
54.	Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
55.	Penunjukan Pejabat Penjual/Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Pejabat Penjual/Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
56.	Pembentukan Tim Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
57.	Pembentukan Tim Percepatan Legalisasi dan Sertifikasi Tanah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Percepatan Legalisasi dan Sertifikasi Tanah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
58.	Pembentukan Tim Evaluasi Pencairan Bantuan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Evaluasi Pencairan Bantuan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
59.	Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015	Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kebumen
60.	Perubahan Keduabelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022	Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
61.	Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Kepala Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Kepala Desa
62.	Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/529 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
63.	Paket Strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Penetapan Paket Strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
64.	Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah berupa Obyek Wisata sebagai Area Komersil Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016	Penetapan Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah berupa Obyek Wisata sebagai Area Komersil Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
65.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
66.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
67.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Triwarno Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Triwarno Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
68.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Triwarno Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Triwarno Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
69.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
70.	Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
71.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
72.	Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022	Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
73.	Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022	Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
74.	Pembentukan Tim Verifikasi. Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Verifikasi. Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
75.	Pembentukan Desa dan Kelurahan Cinta Statistik di Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019	Terbentuknya Desa dan Kelurahan Cinta Statistik di Kabupaten Kebumen
76.	Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/529 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
77.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/530 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005	Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
78.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
79.	Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017	Terbentuknya Sentra Kekayaan Intelektual Kabupaten Kebumen
80.	Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
81.	Pembentukan Tim Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
82.	Penerima Tambahan Jasa kepada Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2023	Penetapan Penerima Tambahan Jasa kepada Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
83.	Penerima Belanja Stimulan Rehabilitasi dan Relokasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Stimulan Rehabilitasi dan Relokasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
84.	Penerima dan Besarnya Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2021	Penetapan Penerima dan Besarnya Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
85.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Uang Muka kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Uang Muka kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024
86.	Pembentukan Tim Pelaksana Event Idul Fitri 1445H pada Obyek Wisata di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Pelaksana Event Idul Fitri 1445H pada Obyek Wisata di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
87.	Pembentukan Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
88.	Pembentukan Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
89.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 800.1.12/82 Tahun 2024 tentang Penerima Tambahan Jasa kepada Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Perubahan Penerima Tambahan Jasa kepada Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
90.	Pemberhentian Sadi dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Candi Kecamatan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pemberhentian Kepala Desa Candi Kecamatan Karanganyar Kabupaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Karanganyar Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia		Kebumen karena Meninggal Dunia
91.	Pengangkatan Suparno Jabatan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai penjabat Kepala Desa Candi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan penjabat Kepala Desa Candi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen
92.	Pemberhentian Budi Istiyono dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pemberhentian Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia
93.	Pengangkatan Anang Suprayogi. S.E. Jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen
94.	Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Terbentuknya Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen
95.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Triwulan IV Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Triwulan IV Tahun 2023
96.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 445/331 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Masa Jabatan 2020-2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018	Perubahan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Masa Jabatan 2020-2025
97.	Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2016	Terbentuknya Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Kebumen Tahun 2024
98.	Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022	Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Negara Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen		Negara Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen
99.	Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
100.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/530 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
101.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.6.1/99 Tahun 2024 tentang Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Perubahan Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
102.	Penerima Hibah kepada Badan dan Layanan Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Hibah kepada Badan dan Layanan Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
103.	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/530 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Sakit Umum Daerah PRembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024		di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
104.	Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022	Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
105.	Pembentukan Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen
106.	Penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018	Penetapan Penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
107.	Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015	Terbentuknya Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024
108.	Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015	Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024
109.	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015	Terbentuknya Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kebumen
110.	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 823/302 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019	Perubahan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
111.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1267 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Slamet sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ambarwinangun Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
112.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1257 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tasino sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Benerwetan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
113.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	141/1255 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Imanudin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Dukuhrejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen		
114.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1269 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Martono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kenoyojayan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
115.	Perubahan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1261 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suhardi sebagai Kepala Desa Pagedangan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
116.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1265 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Eko Supriyanto. S.H. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidoluhur Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
117.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1263 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan M. Nasirrudin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidomukti Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
118.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1259 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nurhamim sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sumberjati Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
119.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1491 Tahun 2019 tentang Pengesahan pengangkatan Wagino sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
120.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1477 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Rusiyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Benerkulon	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen		
121.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1485 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwat sebagai Kepala Desa terpilih Desa Blengorkulon Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
122.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1487 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Maryoto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Blengorwetan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
123.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1481 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Haryanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Gondanglegi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
124.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1489 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sugino sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kaibon Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
125.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1479 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Setyo Mujiono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kaibon Petangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
126.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1483 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tri Famuji sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Plempukan Kembaran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
127.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/337 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tri Budi Wahono. S.T. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
128.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1691 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Taswarjan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ambalkebrek Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
129.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1695 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wahidin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ambalkliwonan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
130.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1697 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan H. Ngadi Sukoyo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kembangsawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
131.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1699 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Misriyadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pasarsenen Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
132.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1693 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Waluyo Husodo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Prasutan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
133.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1703 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kunardi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidomulyo Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
134.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1705 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sunardi. S.E. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidorejo Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
135.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1689 Tahun 2019 tentang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengesahan Pengangkatan Widodo. S.T. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Singosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen		
136.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1701 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mulyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sinungrejo Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
137.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2096 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mardi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Entak Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
138.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2098 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tri Deny Ruwiyanto. S.P. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kradenan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
139.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2100 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Slamet Sobri sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Lajer Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
140.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2097 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suroto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Peneket Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
141.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2099 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Santoso sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pucangan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
142.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1925 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nurkhabib sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Surobayan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen		
143.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1291 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wawan Rajiko sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
144.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1295 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suparno sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Buayan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
145.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1301 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tulus sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Geblug Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
146.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1299 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ngudiyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangsari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
147.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1297 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sugimin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
148.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1293 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sarijan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
149.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1303 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ali Fathur Rokhim sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Semampir Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
150.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1507 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Solihin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
151.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1505 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kasiran sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Mergosono Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
152.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/436 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Musitah sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Rogodono Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
153.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/437 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Jamaludin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Nogoraji Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
154.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/438 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Sarijo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
155.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1725 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suprapto. S.Pd. sebagai Kepala Desa terpilih Desa Banyumudal Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
156.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1721 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Marno sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jladri Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
157.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1723 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pasiman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen		
158.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1727 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sarijan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tugu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
159.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1729 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Jamingin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wonodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
160.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2104 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Saijo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
161.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2105 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Samtilar sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
162.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1927 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Partin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pakuran Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
163.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1465 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Heru Hudiyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidomukti Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
164.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1235 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Akhmadi sebagai Kepala Desa terpilih Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
165.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1233 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sukhamdi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wajasari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
166.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1465 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tani Parwanti sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
167.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1463 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwatno sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
168.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1469 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Agus Haryanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Meles Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
169.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1467 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ahad Mujaki sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
170.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/466 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Maryono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
171.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/467 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Budiono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
172.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1673 Tahun 2019 tentang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengesahan Pengangkatan Mulyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen		
173.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1683 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan E. Dikan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa arjosari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
174.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1675 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Setiadi Haryono sebagai Kepala Desa terpilih Desa Banyuroto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
175.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1685 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wagiyo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
176.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1679 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Aris Widijono. S.Hut sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
177.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1677 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Margono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
178.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1681 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Rois sebagai Kepala Desa terpilih Desa Sidomulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
179.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1671 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bambang Tulus Wibowo. S.H. sebagai Kepala Desa Terpilih	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen		
180.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2138 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sudiran sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Arjomulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
181.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2140 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Subandi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Joho Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
182.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2137 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sigit Suherman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
183.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2139 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suharyanto. S.E..M.M. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sekarteja Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
184.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1669 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Arif sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tegalsari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
185.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2141 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Arbani sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tepakyang Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
186.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1243 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Iswadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
187.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	141/1241 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Poniran. S.Pd. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangkembang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen		
188.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1245 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Akhmad Mutasil sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
189.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1247 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Agus Parwidi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Krakal Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
190.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1239 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Slamet sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
191.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1249 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mohammad Anas sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Seliling Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
192.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1253 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan H. Edie Surakhman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Surotrunan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
193.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1251 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suwarno sebagai Kepala Desa Tepilih Desa Wonokromo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
194.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1475 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Dasih sebagai Kepala Desa	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Terpilih Desa Kambangsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen		
195.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1471 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Amirudin. S.Pd.I sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kemangguan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
196.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1473 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan H. Supangat. A.Md.Pd. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
197.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1454 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Turyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tlogowulung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
198.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1455 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nurchamid sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
199.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/456 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Nurhabib sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalijaya Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
200.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2103 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suwito sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalirancang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
201.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1275 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Jaisman Agus Wahyudi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
202.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1279 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mustofa sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
203.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1273 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Walim sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jintung Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
204.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1277 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sutono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangduwur Kecamatan Ayah	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
205.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1495 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Zulmiyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jatijajar Kecamatan Ayah	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
206.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1493 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sarmanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Srati Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
207.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1497 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Saridi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tlogosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
208.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/434 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Samijo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
209.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/435 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Paryoto	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen		
210.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1711 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ali Imron sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bulurejo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
211.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1713 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Warisman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
212.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1715 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sarudin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalipoh Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
213.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1709 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Aris Sumiarto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kedungweru Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
214.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1717 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Puryono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
215.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1707 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Samijo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Watukelir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
216.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2102 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Samingan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
217.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2101 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nasikhun sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Mangunweni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
218.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1287 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Rubiman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bonjokkidul Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
219.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1283 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sadar sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bonjoklor Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
220.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1285 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan H. Jawahir sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
221.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1281 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakijo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Patukrejo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
222.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1289 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Teguh Wiyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
223.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1499 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Haryanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
224.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1501 Tahun 2019 tentang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengesahan Pengangkatan Marjono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tlogorejo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen		
225.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/479 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Sadat Purnomo. S.Si. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
226.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1719 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Harto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Balorejo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
227.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2106 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Sudirman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sirnoboyo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
228.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1311 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ryan Sugi Abdi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
229.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1319 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sri Norma Cherani sebagai Kepala Desa Terpilih Dea Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
230.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1317 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mokhamad Supriyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
231.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1313 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tulud Wahyudi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
232.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1315 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mulyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tanjungsari Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
233.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1305 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Heri Setyaji sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Waluyo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
234.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1513 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Budiyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ambalkumolo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
235.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1511 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bambang Gunadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tanjungrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
236.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1509 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sobirin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tanjungrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
237.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/444 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Sunarto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Banjurpasar Kecamatan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Buluspesantren Kabupaten Kebumen		
238.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/445 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Khamid sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Arjowinangun Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
239.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/446 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Saodi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
240.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1731 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Triyono Puji Widodo. S.E. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
241.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1735 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Muhammad Kharisun sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
242.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1737 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Chosin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Indrosari Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
243.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1739 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mokhamad Khamdani sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
244.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1741 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Mochamad Hasyim sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen		
245.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1733 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Muslim Sidik sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
246.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2142 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Beni Setyobowo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Maduretno Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
247.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1307 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nursodik sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
248.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1309 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mulyono sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
249.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1323 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mokhamad Zaenur Rokhman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
250.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1515 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bardiantoro sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
251.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1517 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan L.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Ma'un Al Hasan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Klopogodo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen		
252.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1519 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sudjiono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidayu Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
253.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1521 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Waluyo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wonosigro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
254.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/477 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Joko Setiyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
255.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1747 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Amat Sutoyo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
256.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1749 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kurnia Finalistya sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kemukus Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
257.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1743 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sugiri sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Panjangsari Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
258.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1745 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan H.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Taufik Hidayat. S.T. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Semondo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen		
259.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2143 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sujiman Krisdianto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
260.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1327 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sugito sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
261.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1333 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sukarjo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
262.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1325 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sarman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalirejo Kecamatan karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
263.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1335 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan R. Wiwit Setiyawan Wijayanto. S.Sos. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
264.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1331 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sarlan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
265.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1329 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Suradi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen		
266.	Perubahan atas keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1523 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Murtini sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
267.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1527 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Murtini sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
268.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/478 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Hermansah sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Binangun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
269.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1759 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ahmad Suratman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
270.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1753 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ariyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
271.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1751 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Djasirun sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
272.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1757 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tunjang Mugiyono sebagai	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kepala Desa Terpilih Desa Karangmaja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen		
273.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1761 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nur Soleh Aji Setiawan. A.Md. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pagebangan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
274.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1763 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sukiman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
275.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2114 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Rasman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
276.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2113 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Saijan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
277.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1755 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Saidun sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Karangtengah Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
278.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1339 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sai'un sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Banioro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
279.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1341 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sutarjo sebagai Kepala Desa	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Terpilih Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen		
280.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1337 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sunaryo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
281.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1529 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalisana Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
282.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1531 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Supraptono. A.Md. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
283.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/480 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Muhajirin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Totogan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
284.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/481 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Sangidun sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
285.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/482 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Lukman Hakim sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
286.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1775 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Sentot Kusworo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen		
287.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1773 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Gunawan Sugiyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Langse Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
288.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1769 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Setiyo sebagai Kepala Desa terpilih Desa Pencil Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
289.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1771 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Giriyanto. S.Pd. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
290.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1765 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Darimun sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
291.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1767 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ahmad Sodiq sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
292.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1343 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Slamet Haryadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
293.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1345 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Sa'dan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen		
294.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1347 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nurchamid sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Murtirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
295.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1533 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Dwi Sulistiani sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Gesikan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
296.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1537 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Kuatno sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
297.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1539 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mohamad Fadlan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kutosari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
298.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1535 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nur Aziz sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wonosari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
299.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/457 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Muhamad Khusni Mubarok sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
300.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/458 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Zaenal Muttaqin	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen		
301.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/459 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Setiawan sebagai Kepala Desa terpilih Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
302.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/460 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Sugiyarto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
303.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/461 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Asror Muhlisin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
304.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/462 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Yanti sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
305.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/463 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Suparno sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
306.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1785 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Eful Arifin sebagai Kepala desa Terpilih Desa Candimulyo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
307.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1777 Tahun 2019 tentang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengesahan Pengangkatan Suramin sebagai Kepala Desa terpilih Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen		
308.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1779 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Moh. Khaerodin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
309.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1781 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Endrata sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
310.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1783 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Maksum Subehi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Roworejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
311.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2121 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ahmad Zahrudin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Candiwulan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
312.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2119 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Aristanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
313.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2122 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sugeng Supriyadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
314.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1787 Tahun 2019 tentang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengesahan Pengangkatan Arif Khamidi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen		
315.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2120 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Masno Noor Chasan sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
316.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1359 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Akhmad Muntoyib sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Dorowati Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
317.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1349 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Aji Danu Harjanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jerukagung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
318.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1351 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Muhammad Muhtasimudin. S.Pd.I sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jogosimo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
319.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1355 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mukhamad Khamid sebagai Kepala Desa terpilih Desa Karangglonggong Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
320.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1353 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tanto Kuswoyo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ranterejo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
321.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1357 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kasimin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen		
322.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1541 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sukirno sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
323.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1547 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Dalmo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Gebangsari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
324.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1545 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ismail sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Klegenrejo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
325.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1549 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Puji Santoso sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Klegenwonosari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
326.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1543 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Slamet sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Klirong Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
327.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/442 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Khamid sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Gadungrejo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
328.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/443 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Moh. Baequni. S.Pt. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kedungwinangun	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen		
329.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1789 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Aris Hargiantara. S.E. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bumiharjo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
330.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1797 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Agus Arifin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kaliwungu Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
331.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1795 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Marjuni sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kebadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
332.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1799 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Asrodin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Podoluhur Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
333.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1793 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Harun Alrasid sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sitirejo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
334.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1801 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Adela Sulistiana sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tambakagung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
335.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1791 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Eli Sugiono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
336.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2116 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Parjono. A.Ma.Pd. sebagai Kepala Desa terpilih Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
337.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2115 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sarjono. S.H. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kedungsari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
338.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2117 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sutomo sebagai Kepala Desa terpilih Desa Pandanlor Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
339.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2118 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Muslikhudin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tambakprogaten Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
340.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1361 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Slamet Widiyanto sebagai Kepala Desa terpilih Desa Babadsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
341.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1363 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sukiman sebagai kepala Desa Terpilih Desa Lundong Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
342.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1559 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Purwanto. A.Md. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
343.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1553 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Heri Wibowo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
344.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1555 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suryahadi. S.E. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Mrinen Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
345.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1557 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mualip sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pejagatan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
346.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1561 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kudrat Sudrajat sebagai kepala Desa Terpilih Desa Triwarno Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
347.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1551 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Aris Pambudi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
348.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/452 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Mohammad Fatkhurokhim sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
349.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/453 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Fahmi Huda. S.Sos. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kutowinangun	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen		
350.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1811 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ruri Saharani sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
351.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1807 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Daryanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
352.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1803 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Lasiman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
353.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1805 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ratnawati sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
354.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1809 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kasiman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
355.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2146 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ngadiman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
356.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2145 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wahidin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
357.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2144 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Purwanto. S.Pd. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pesalakan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
358.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1371 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Noro Prihantono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
359.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1369 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Jimun sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kamulyan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
360.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1375 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Teguh Isnentoro sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
361.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1373 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Yatin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
362.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1379 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Parsimin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
363.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1377 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sukiman. S.Pd. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidomukti Kecamatan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kuwarasan Kabupaten Kebumen		
364.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1563 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sugiman sebagai Kepala Desa Pondokgebangsari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
365.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1565 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ramelan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
366.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/470 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Abdul Hakim Kudus sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Mangli Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
367.	Perubahan atas keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/471 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Sodikin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
368.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1825 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Eko Yulianto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Banjarejo Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
369.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1823 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan H. Tujimin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
370.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1817 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Teguh Prahyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Harjodowo Kecamatan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kuwarasan Kabupaten Kebumen		
371.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1819 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Yuli Stianto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
372.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1821 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Slamet Supriyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
373.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1815 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Rasipan. S.Pd. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
374.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1813 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Imam Maskuri sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
375.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2110 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sutikno sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
376.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2109 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Triyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Gumawang Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
377.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2112 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Trisno sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ori Kecamatan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kuwarasan Kabupaten Kebumen		
378.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2111 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Taufik Mundarto Hadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Serut Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
379.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1367 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Misbakhul Munir sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Gandusari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
380.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1385 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tunggal. S.Pd. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Krubungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
381.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1381 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakhid sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Mirit Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
382.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1387 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tarsono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ngabean Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
383.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1389 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Akhmad sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
384.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1391 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Situr sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Singoyudan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
385.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1383 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Agus Widodo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wirogaten Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
386.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1587 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Fahrudin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kertodeso Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
387.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1577 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Taat Teguh Subekti sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Mangunranan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
388.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1581 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Anam Lutfi. S.E. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Patukgawemulyo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
389.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1585 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kijan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
390.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1575 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mudasir Zaenal Ma'sum sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pekutan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
391.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1579 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Jumiarto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Selotumpeng Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
392.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1583 Tahun 2019 tentang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengesahan Pengangkatan Tukino sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wergonayan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen		
393.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/448 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Jatmiko Aji. S.H. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
394.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1839 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Maksum sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karanggede Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
395.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1831 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Cokro Aminoto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
396.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1843 Tahun 2019 tentang Pengesahan pengangkatan Amad Mafangil sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Miritpetikusan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
397.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1837 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Samsino sebagai Kepala Desa terpilih Desa Rowo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
398.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1841 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tashidin. S.Pd.I sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sitibentar Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
399.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1835 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Guntoro sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tlogoprogoto	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen		
400.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1833 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mijo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wiromartan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
401.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1399 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Manang sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
402.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1395 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Eko Wiji Saputra sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kaligubug Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
403.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1397 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Yuli Imam Susanto. A.Md. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
404.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1393 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sulyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidototo Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
405.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1593 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalijering Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
406.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1589 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suprapto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Merden	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen		
407.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1591 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Teguh Sukarman. S.E. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
408.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1595 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Muslimah sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
409.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1845 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Paiman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Rahayu Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
410.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1401 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Muhsinun sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Prigi Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
411.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1403 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wasito sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Watulawang Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
412.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1601 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Muhamad Khasanudin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
413.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1597 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tunjangsari sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jemur	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen		
414.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1603 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Imdad Durokhman. S.E. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Logede Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
415.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/464 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Akhmad Mujamil Mustofa. S.Sos. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
416.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/465 Tahun 2023 tentang Pengesahan Penganglatan Dwi Ari Sunarko sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
417.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1849 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan H. Romelan Mustofa sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
418.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1851 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bayu Sukrisna sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pengaringan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
419.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1847 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Triyono Adi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
420.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1599 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sarikun. S.M. sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Kebagoran Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
421.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2129 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Heru Wiyatna sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
422.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1409 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Umi Maskanah. S.Pd.AUD sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
423.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1405 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Khoeri Anwar sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
424.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1407 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sutowo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
425.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1607 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sabit Banani. S.H. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
426.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1611 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Alif Fatta Al Aula. S.I.P. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
427.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1613 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Subagyo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kewangunan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen		
428.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1609 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Siswati sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Podourip Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
429.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/440 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Sucipto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Grujugan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
430.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/441 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Muhlisin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
431.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1857 Tahun 219 tentang Pengesahan Pengangkatan Siti Rohayah sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Grogolbeningsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
432.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1855 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mutamimah Retno Utami. S.Pd. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
433.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1863 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sakimin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
434.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1859 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Supriyanto sebagai Kepala	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Desa Terpilih Desa Tegalretno Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen		
435.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2126 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Agus sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kritig Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
436.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2123 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nasiati sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Munggu Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
437.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2128 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Rokhmat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
438.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2124 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sucipto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
439.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2125 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Chaerudin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
440.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1861 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Slamet Faozan sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
441.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2127 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Hojali sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Kebonsari	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen		
442.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1411 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sobirin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jatipurus Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
443.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1617 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Muholis sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jembangan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
444.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1619 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tumbar Sudarso. S.Pd. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kedungdowo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
445.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1615 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Fathul Mubin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Soka Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
446.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1865 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Muhyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa LerepKebumen Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
447.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1867 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Dwi Uji Siswanto. S.I.Pust. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
448.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1871 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Najam sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tirtomoyo	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		
449.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2130 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suryo Widodo. A.Md. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Blater Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
450.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2131 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Teguh Budi Prayogo. S.P sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangtengah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
451.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2132 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Indro Haryanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tegalrejo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
452.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1869 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Slamet sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Kebapangan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
453.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1417 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suwarto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kedungweru Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
454.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1415 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Junaedi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pecarikan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
455.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1413 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Slamet Suharno sebagai Kepala Desa Terpilih Desa	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen		
456.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1419 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Subandiyo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sembirkadipaten Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
457.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1625 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Untung Hariyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bagung Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
458.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1623 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Heru Supriyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
459.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1621 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nurodin sebagai Kepala Desa Terpilih Dea Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
460.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/449 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Sunarto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidogede Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
461.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/450 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Puji Bambang Sekdarnako sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
462.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/451 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Sodikul Anwar sebagai Kepala Desa terpilih Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
463.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1875 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Subur Nowo Prasetyo. A.Md. sebagai Kepala Desa Tepilih Desa Kabuaran Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
464.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1873 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Waris sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pesuningan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
465.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1423 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Slamet sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Arjowinangun Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
466.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1435 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ahmad Rifai sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bumirejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
467.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1425 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Agus Parluji sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kaleng Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
468.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1427 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tri Sulastri sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kedaleman Kulon Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
469.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1433 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Muhrojin Ragil Saputra sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
470.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1431 Tahun 2019 tentang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengesahan Pengangkatan Masnan. A.Ma. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pesuruhan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen		
471.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1421 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Solehudin. S.Pd. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
472.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1429 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suparlan. S.E. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
473.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1627 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kasno sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Srusuh Jurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
474.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1635 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ngabdun Najah sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Surorejan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
475.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1629 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Eko Gunarso sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tukinggedong Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
476.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1631 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Dasikin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Weton Kulon Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
477.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1633 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Rohanah sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Weton Wetan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen		
478.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/439 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Hadi Waluyo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
479.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1887 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sambiyo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Banjareja Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
480.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1889 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kadirun sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kedaleman Wetan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
481.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1885 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sarjono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Puliharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
482.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1891 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Riyadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Purwoharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
483.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1883 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sarno sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidobunder Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
484.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1879 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Basuki sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
485.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1881 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tukijan. S.Pd. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Waluyorejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
486.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2133 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ajar Dwiyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
487.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1929 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wasijan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidoharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
488.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1441 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Adi Subarkah. S.T. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
489.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1439 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mualifin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wonosari Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
490.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1645 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Maslam sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pucangan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
491.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1643 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Eko Hadi Saputro sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
492.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1901 Tahun 2019 tentang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengesahan Pengangkatan Suratmin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen		
493.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2149 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sukimin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
494.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1903 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Paimin sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Kedunggong Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
495.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1443 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sugeng Suyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bonosari Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
496.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1445 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Adman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalibeji Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
497.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1447 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suwarjo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
498.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1649 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sunaryo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
499.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1651 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sarikun sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sampang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen		
500.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1653 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Diyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
501.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1647 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Andri sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
502.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/475 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Misrun sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
503.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/476 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Admin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Donorojo Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
504.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1905 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Hamid Isnaeni. S.Pd.I. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kedungjati Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
505.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1911 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Marsimin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
506.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1909 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Mustolih sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kenteng Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
507.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1907 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Samsi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Somagede Kecamatan Sempor	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
508.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2135 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Hasto Nugroho sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
509.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2134 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Paino sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Selokerto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
510.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2136 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Yusiman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
511.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1567 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Hadi Usmanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangkemiri Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
512.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1571 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Suparno sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sidomulyo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
513.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1827 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Parsum sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
514.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1829 Tahun 2019 tentang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengesahan Pengangkatan Sudiyono sebagai Kepala Desa terpilih Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen		
515.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2107 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Eri Listiawan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
516.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2108 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Oyong Trisaputro sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
517.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1437 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Supriyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
518.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1639 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Cip Haryanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
519.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1641 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Supono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
520.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/472 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Singgih Bayu Pamungkas sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
521.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/473 Tahun 2023	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	tentang Pengesahan Pengangkatan Purwanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen		
522.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/474 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Sukirno. S.Sos. Sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
523.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1893 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Rakiman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Giyanti Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
524.	Perubahan atas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1899 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sunardi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
525.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1897 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sumardi. A.Ma.Pd. Sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
526.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1895 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sri Budi Murnianto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
527.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1459 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wanginah sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Condongcampur Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
528.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	141/1461 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sadimin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kejawang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen		
529.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1457 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Handoko sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Klepusanggar Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
530.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1455 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ahmad Komarudin sebagai Kepala Desa Terpilih Dea Sidoagung Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
531.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1449 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kherodin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
532.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1655 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sri Sukaryawati sebagai Kepala Desa terpilih Desa Karangsari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
533.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1661 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Awaludin sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pakuran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
534.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1657 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Surono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pandansari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
535.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/468 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Supyan sebagai	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kepala Desa Terpilih Desa Donosari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen		
536.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/469 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Riyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
537.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1913 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nurbuwono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
538.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1915 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan H. Sutopo sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
539.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1919 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Tri Suhesti Pusparini sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Karangjambu Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
540.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1917 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nur Wahyudi. S.Pd.I. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sruweng Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
541.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1921 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Dodot Yuni Condro Suroso sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tanggeran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
542.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/2147 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Nuryanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pengempon Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
543.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1453 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Supono sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Menganti Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
544.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1659 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Sri Maryati sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
545.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1451 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Miharso sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Sidoharjo Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun
546.	Rekening Swakelola Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/2829/2024	Penetapan Rekening Swakelola Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
547.	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017	Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
548.	Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/529 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
549.	Wilayah Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabuaten Kebumen Tahun Ajaran 2024/2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2022	Penetapan Wilayah Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabuaten Kebumen Tahun Ajaran 2024/2025
550.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.3/26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Analisis dan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Perubahan Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024		
551.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
552.	Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
553.	Pembentukan Tim Penasihat Investasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012	Terbentuknya Tim Penasihat Investasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kebumen
554.	Pembentukan Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Menteri Pendidikan. Kebudayaan. Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
555.	Lokasi Fokus dan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2025 di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004	Penetapan Lokasi Fokus dan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2025 di Kabupaten Kebumen
556.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.7.1/554 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024
557.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.7.1/554 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024
558.	Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah berupa Lahan Parkir Pasar Tumenggungan, Pasar Giwangretno dan Pasar Puring Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016	Penetapan Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah berupa Lahan Parkir Pasar Tumenggungan Pasar

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Giwangretno dan Pasar Puring Kabupaten Kebumen
559.	Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022	Terbentuknya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024
560.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/21 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
561.	Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesperawi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2029	Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005	Terbentuknya Pengurus Lembaga Pengembangan Pesperawi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2029
562.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Serut Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
563.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Serut Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa
564.	Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024	Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen
565.	Pembentukan Tim Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
566.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Candimulyo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
567.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Candimulyo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
568.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa kewangunan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
569.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
570.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jemur Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
571.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jemur Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
572.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sidototo Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
573.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidototo Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
574.	Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018	Penetapan Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2024
575.	Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Bulan Dana Palang merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018	Terbentuknya Panitia Penyelenggaraan Bulan Dana Palang merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2024
576.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.9.1/72 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2024	Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
577.	Pembentukan Panitia Peringatan Hari Koperasi ke-77 Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Terbentuknya Panitia Peringatan Hari Koperasi ke-77 Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
578.	Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014	Terbentuknya Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2024
579.	Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Pengaduan Lapor Cepat Bupati	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019	Terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Pengaduan Lapor Cepat Bupati
580.	Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017	Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
581.	Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat Menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Atas Nama Joko Paripurno. S.Pd.I.. M.Pd.I.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
582.	Pembentukan Tim Teknis Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008	Terbentuknya Tim Teknis Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kebumen
583.	Pembentukan Tim Penilai Anugerah Usaha Terbaik Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Penilai Anugerah Usaha Terbaik Tahun 2024
584.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 300.2/70 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017	Perubahan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
585.	Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/529 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
586.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Kedua	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Kedua
587.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Ketiga		dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Ketiga
588.	Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
589.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
590.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
591.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
592.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
593.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
594.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
595.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
596.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Gombong	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025		
597.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
598.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
599.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
600.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
601.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
602.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
603.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
604.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
605.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
606.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025		Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
607.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
608.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
609.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
610.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
611.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
612.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
613.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
614.	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Perpanjangan Masa Keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun
615.	Pembentukan Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
616.	Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/529 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Penerimaan. Bendahara Pengeluaran. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Penerimaan. Bendahara Pengeluaran. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
617.	Penerima Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahap Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahap Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
618.	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.7.1/554 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024
619.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.2.1/94 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Perubahan susunan keanggotaan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen
620.	Calon Transmigran Asal Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024	Penetapan Calon Transmigran Asal Kabupaten Kebumen Tahun 2024
621.	Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2023	Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
622.	Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022	Terbentuknya Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen
623.	Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024
624.	Pemenang Lomba Menyusun Menu dan Makanan Sehat Sehari Bagi Desa dan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Penetapan Pemenang Lomba Menyusun Menu dan Makanan Sehat Sehari Bagi Desa dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024		Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
625.	Status Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024	Status Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
626.	Usulan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024	Penetapan Usulan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
627.	Pembentukan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019	Terbentuknya Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen
628.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 200.1.1/588 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
629.	Pembentukan Tim Penyuluh Anti Korupsi dan Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi di Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Penyuluh Anti Korupsi dan Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi di Kabupaten Kebumen
630.	Desa Wisata di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2021	Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
631.	Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2024-2027	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2013	Terbentuknya Forum Anak Tingkat Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2024-2027
632.	Pembentukan Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
633.	Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/525 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Penerimaan. Bendahara Pengeluaran. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Penerimaan. Bendahara Pengeluaran. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
634.	Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014	Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
635.	Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan. Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014	Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan. Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
636.	Pembentukan Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan. Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014	Terbentuknya Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan. Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
637.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2019	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
638.	Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022	Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
639.	Pembentukan Tim Penyelenggara Pesta Rakyat Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Penyelenggara Pesta Rakyat Kebumen Tahun 2024
640.	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
641.	Desa Berkinerja Terbaik dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Desa. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.10/284	Penetapan Desa Berkinerja Terbaik dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
642.	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Wajib Pajak atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Kebumen ke-395	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Wajib Pajak atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
643.	Perubahan Kesebelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/529 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Penerimaan. Bendahara Pengeluaran. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Penerimaan. Bendahara Pengeluaran. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
644.	Pembentukan Tim Pelaksana Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Pelaksana Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen Tahun 2024
645.	Penerima Anugerah Usaha Terbaik Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Penetapan Penerima Anugerah Usaha Terbaik Kabupaten Kebumen Tahun 2024
646.	Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kebumen
647.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Guru Ahli Pertama menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Dewi Laeli Utami. S.Pd.I.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan
648.	Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016	Terbentuknya Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pemerintah Kabupaten Kebumen
649.	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya yang Diperbantukan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Pendidikan. Kebudayaan. Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya yang Diperbantukan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
650.	Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-395 Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Terbentuknya Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-395 Kabupaten Kebumen Tahun 2024
651.	Penunjukan Komandan Kompi. Pengawal dan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022	Penetapan Komandan Kompi. Pengawal dan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 Kabupaten Kebumen
652.	Pemberhentian Hadi Usmanto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Karena Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Hadi Usmanto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Karanganyar
653.	Pengangkatan Ahmad Sobirin. S.E. Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen
654.	Pembentukan Panitia Penerimaan Calon Aparatur	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur	Terbentuknya Panitia Penerimaan Calon Aparatur

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024	Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
655.	Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024	Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
656.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
657.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
658.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
659.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
660.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Grogolbeningsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
661.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Grogolbeningsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2091-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
662.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
663.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan		

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027		
664.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Balignasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027		
665.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
666.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
667.	Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
668.	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Manunggal di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Manunggal di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
669.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kalirancang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
670.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalirancang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
671.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Condongcampur Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
672.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Condongcampur Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
673.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
674.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
675.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
676.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
677.	Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/9/2019	Terbentuknya Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kebumen Tahun 2024
678.	Pembentukan Tim Tukar Menukar Tanah Milik Desa di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Tukar Menukar Tanah Milik Desa di Kabupaten Kebumen
679.	Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024
680.	Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
681.	Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan dan Sekolah Dasar Negeri 3 Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan menjadi Sekolah Dasar Negeri 1 Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016	Penetapan Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan dan Sekolah Dasar Negeri 3 Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan
682.	Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Jatisari Kecamatan Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016	Penetapan Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Jatisari Kecamatan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	dan Sekolah Dasar Negeri 3 Jatisari Kecamatan Kebumen menjadi Sekolah Dasar Negeri 1 Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen		Kebumen dan Sekolah Dasar Negeri 3 Jatisari Kecamatan Kebumen
683.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/214 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024	Perubahan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
684.	Pembentukan Tim Penilai Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Penilai Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
685.	Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa di Kabupaten Kebumen
686.	Pembentukan Tim Verifikasi Peserta Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Verifikasi Peserta Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
687.	Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
688.	Penunjukan Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen sebagai Peserta Program Desa Bersih Narkoba Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013	Penetapan Peserta Program Desa Bersih Narkoba Kabupaten Kebumen Tahun 2024
689.	Pemenang Kompetensi Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019	Penetapan Pemenang Kompetensi Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
690.	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Keempat		Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Keempat
691.	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Kelima	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Kelima
692.	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Keenam	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Keenam
693.	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Ketujuh	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Ketujuh
694.	Peserta Perjalanan Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2023	Penetapan Peserta Perjalanan Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
695.	Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.7.1/554 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024
696.	Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/530 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024		Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
697.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
698.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
699.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangduwur Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
700.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangduwur Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
701.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
702.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
703.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Soka Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
704.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Soka Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
705.	Pemberhentian Chabib Nasrudin. S.ST.. M.PSSp. Dari Jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
706.	Pengangkatan Surat Munandar Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen
707.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
708.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
709.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/3 Tahun 2024 tentang Penunjukan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
710.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/535 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023	Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
711.	Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kebumen
712.	Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019	Penetapan Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Kebumen Tahun 2024
713.	Penerima Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahap Kedua di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahap Kedua di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
714.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024
715.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2024		Kepada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2024
716.	Pendelegasian Wewenang untuk Melantik dan Mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017	Penetapan Pendelegasian Wewenang untuk Melantik dan Mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama
717.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.9.1/72 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024	Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
718.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2024	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
719.	Penerima Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
720.	Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2024	Penetapan Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kebumen
721.	Pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Pelaksana Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kebumen
722.	Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 tahun 2024	Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
723.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
724.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027		
725.	Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir
726.	Penerima Bantuan Iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2024	Penetapan Penerima Bantuan Iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
727.	Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Kebumen
728.	Penggabungan dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022	Penggabungan dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama
729.	Penggabungan dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karangsambung Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karangsambung	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022	Penggabungan dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama
730.	Penggabungan dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sempor Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022	Penetapan Penggabungan dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama
731.	Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Alian Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014	Penetapan Perubahan Status
732.	Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ayah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014	Penetapan Perubahan Status
733.	Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Karangsambung Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014	Penetapan Perubahan Status

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
734.	Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Verifikasi Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji di Kabupaten Kebumen
735.	Penerima Insentif Guru Ngaji di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2024	Penetapan Penerima Insentif Guru Ngaji di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
736.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 200.1.4/316 Tahun 223 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016	Perubahan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kebumen
737.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
738.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
739.	Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/530 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Perubahan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
740.	Pembentukan Satuan Tugas Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Terbentuknya Satuan Tugas Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024
741.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/532 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024		
742.	Penerima Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
743.	Desa Prioritas dan Long List Desa Prioritas Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015	Penetapan Desa Prioritas dan Long List Desa Prioritas Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045
744.	Penerima Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2020	Penetapan Penerima Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
745.	Pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017	Penetapan Pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024
746.	Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Roda Empat Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Roda Empat Pemerintah Kabupaten Kebumen
747.	Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.7.1/554 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024
748.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Kedelapan	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Kedelapan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
749.	Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Santri Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Santri Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
750.	Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
751.	Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Sruweng di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013	Penetapan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Sruweng di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
752.	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
753.	Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Kebumen Tahun 2024/2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2022	Penetapan Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Kebumen Tahun 2024/2025
754.	Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2024	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
755.	Status Struktur Makam Tumenggung Kolopaking Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	Penetapan Status Struktur Makam Tumenggung Kolopaking Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya
756.	Status Struktur Punden Berundak Lurah Karsa Desa Giyanti Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	Penetapan Status Struktur Punden Berundak Lurah Karsa Desa Giyanti Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
757.	Status Benda Lingga Yoni Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagai Benda Cagar Budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	Penetapan Status Benda Lingga Yoni Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagai Benda Cagar Budaya
758.	Status Struktur Makam R.A.A. Tirtokoesoemo Desa Karangkemiri Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	Penetapan Status Struktur Makam R.A.A. Tirtokoesoemo Desa Karangkemiri Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya
759.	Status Struktur Makam K.R.A.A. Poerbanegara Desa Benerwetan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	Penetapan Status Struktur Makam K.R.A.A. Poerbanegara Desa Benerwetan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya
760.	Status Struktur Makam Ki Ageng Bodronolo Desa Karangkembang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	Penetapan Status Struktur Makam Ki Ageng Bodronolo Desa Karangkembang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya
761.	Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Kepolisian Resor Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Kepolisian Resor Kebumen
762.	Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Kepada Rumah Sakit Bantuan 04.08.02 Gombong	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Kepada Rumah Sakit Bantuan 04.08.02 Gombong
763.	Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Kepolisian Resor Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Kepolisian Resor Kebumen
764.	Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Kementerian Agama Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Kementerian Agama Kabupaten Kebumen
765.	Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
766.	Penetapan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024	Penetapan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
767.	Pembentukan Panitia Penyelenggara Lomba Lari Kebumen Half Marathon Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Terbentuknya Panitia Penyelenggara Lomba Lari Kebumen Half Marathon Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
768.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 200.2/559 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022	Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024
769.	Penerima Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2023	Penetapan Penerima Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
770.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/22 Tahun 2024 tentang Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
771.	Penerima Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024	Penetapan Penerima Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
772.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
773.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.8/694 Tahun 2024 tentang Peserta Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024	Perubahan Peserta Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
774.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 200.2/559 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022	Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
775.	Data Penduduk Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024	Penetapan Data Penduduk Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
776.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.9.1/42 Tahun 2024 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
777.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jintung Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
778.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jintung Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
779.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tlogosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
780.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tlogosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
781.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
782.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
783.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
784.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Watulawang Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
785.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Watulawang Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
786.	Pembentukan Forum Koordinasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Terbentuknya Forum Koordinasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
787.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Uang Duka Kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Uang Duka Kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024
788.	Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/530 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Perubahan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
789.	Perintah Penyetoran Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2022	Penyetoran Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
790.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.8.1/620 Tahun 2024 tentang Calon Transmigran Asal Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024	Perubahan Calon Transmigran Asal Kabupaten Kebumen Tahun 2024
791.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/6 Tahun 2024 tentang Rekening Satuan Pendidikan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016	Perubahan Rekening Satuan Pendidikan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan di

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024		Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
792.	Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
793.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 560/348 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2022-2025	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021	Perubahan Dewan Pengupahan Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2022-2025
794.	Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.7.1/554 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024
795.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2024
796.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.9.01/552 Tahun 2024 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
797.	Perubahan Keduabelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/529 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
798.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/34 Tahun 2024 tentang Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024	Perubahan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kebumen
799.	Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
800.	Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023	Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Kebumen
801.	Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen
802.	Penerima Insentif Guru Ngaji di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Kedua	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2024	Penetapan Penerima Insentif Guru Ngaji di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Kedua
803.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Kesembilan	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
804.	Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020	Penetapan Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
805.	Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016	Terbentuknya Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen
806.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.7.1/719 Tahun 2024 tentang Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial, Kemasyarakatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial, Kemasyarakatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
807.	Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2024/2025	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016	Terbentuknya Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2024/2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
808.	Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2021	Penetapan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
809.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.6.1/707 Tahun 2024 tentang Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Perubahan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
810.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/22 Tahun 2024 tentang Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Perubahan Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
811.	Pengesahan Pemberhentian Ahmad Ujang Sugiono. S.H. sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Masa Jabatan Tahun 2021-2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2021	Penetapan Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Masa Jabatan Tahun 2021-2025
812.	Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 53 Tahun 2019	Penetapan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
813.	Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020	Penetapan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen
814.	Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2021	Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2025
815.	Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Pemasangan Jaringan Utilitas	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023	Penetapan Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Pemasangan Jaringan Utilitas

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
816.	Pemberhentian Sementara Ngabdun Najah dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Surorejan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Kepala Desa
817.	Pemberhentian Sukirno dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa
818.	Pengangkatan Imam Gunardi. A.Md. Jabatan Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa
819.	Pemberhentian Tashidin. S.Pd.I. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Sitibentar Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Kepala Desa
820.	Pengangkatan Mukhroji Jabatan Pengadministrasi Kepegawaian pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Sitibentar Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa
821.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
822.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
823.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
824.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
825.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Gesikan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
826.	Peresmian Anggota Badan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gesikan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
827.	Peresmian Pemberhentian Anggota badan Permusyawaratan Desa Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
828.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
829.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
830.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
831.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
832.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jladri Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
833.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jladri Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
834.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Banyumudal Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
835.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banyumudal Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
836.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
837.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
838.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada PT. Perhutani Alam Wisata Risorsis Triwulan III Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada PT. Perhutani Alam Wisata Risorsis Triwulan III Tahun Anggaran 2024
839.	Kriteria Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pertimbangan Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Kelengkapan Profesi di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Penetapan Kriteria Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pertimbangan Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Kelengkapan Profesi di Kabupaten Kebumen
840.	Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2021	Penetapan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen
841.	Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Penyelenggara Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen
842.	Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran dan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024	Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran dan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
843.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Kesepuluh		Kebumen Tahun Anggaran 2024 Tahap Kesepuluh
844.	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2024/2025	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2024/2025
845.	Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2021	Penetapan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
846.	Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/529 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
847.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.3.11/637 Tahun 2024 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
848.	Pemberhentian Poniran S.Pd. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Karangkembang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Kepala Desa Karangkembang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen
849.	Pengangkatan Sukmo Edi Saputro. S.E. Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Karangkembang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Karangkembang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen
850.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.7.28.1/775 Tahun 2024 tentang Data Penduduk Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024	Perubahan Data Penduduk Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
851.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/58 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pencairan Bantuan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Tim Evaluasi Pencairan Bantuan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
852.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Bangunan. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kutowinangun menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Noor Adi Wibowo. S.T.. M.Eng.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan
853.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Kukuh Susilonuringsih. S.Pd.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
854.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Betty Setyo Pratiwi. A.Md.Keb.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil
855.	Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021	Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Kebumen Tahun 2025
856.	Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Hari Besar Keagamaan dan Hari Libur Nasional	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022	Penetapan Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Hari Besar Keagamaan dan Hari Libur Nasional
857.	Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Kebumen Tahun 1446 H/2025 M	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016	Terbentuknya Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Kebumen Tahun 1446 H/2025 M
858.	Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Umum Dr. Soedirman di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013	Penetapan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Umum Dr. Soedirman di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
859.	Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
860.	Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
861.	Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018	Penetapan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
862.	Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
863.	Penunjukan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Kas Daerah dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Kas Daerah dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
864.	Penunjukan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Penyimpan Uang Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Penyimpan Uang Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
865.	Rekening Satuan Pendidikan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan di kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan. Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021	Penetapan Rekening Satuan Pendidikan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan di kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
866.	Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
867.	Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Cek, Bilyet, Giro dan Surat Berharga Lainnya Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Cek, Bilyet, Giro dan Surat Berharga Lainnya Tahun Anggaran 2025
868.	Penunjukan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
869.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10.1/754 Tahun 2024 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
870.	Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018	Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025
871.	Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Penetapan Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Daerah Tahun Anggaran 2025
872.	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011	Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen
873.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008	Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
874.	Penggunaan Pakaian Adat Kebesaran Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Bagi Masyarakat Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2024	Penetapan Penggunaan Pakaian Adat Kebesaran Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Bagi Masyarakat Kabupaten Kebumen
875.	Penggunaan Pakaian Adat Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2024	Penetapan Penggunaan Pakaian Adat Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
876.	Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022	Penetapan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2025
877.	Data Penduduk Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024	Penetapan Data Penduduk Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025
878.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangagung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
879.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
880.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jabres Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
881.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jabres Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
882.	Kriteria Wajib Pajak Daerah yang Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 78 Tahun 2022	Penetapan Kriteria Wajib Pajak Daerah yang Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online
883.	Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2023	Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025

3.2.1 Arah Kebijakan Kabupaten Kebumen

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah secara umum dipengaruhi oleh perekonomian Nasional dalam masa saat ini juga masih terdampak kondisi ekonomi dan geopolitik Internasional. Inflasi masih menjadi isu utama yang harus dihadapi berbagai negara

di dunia. Pada level daerah, tingkat inflasi yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian daerah utamanya berdampak pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Selain itu, inflasi juga berdampak pada meningkatnya garis kemiskinan yang pada akhirnya akan menghambat upaya penanggulangan kemiskinan daerah. Bank Indonesia memperkirakan inflasi maksimal tahun 2024 adalah berkisar 3,5%. Proyeksi inflasi ini masih sesuai dengan sasaran inflasi yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 yaitu sebesar 3±1% pada Tahun 2022 dan 2023 serta 2,5±1% pada Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2023 inflasi Kabupaten Kebumen diharapkan bisa terkendali pada level yang sama dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu 3±1%.

Arah kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagai tahapan perwujudan Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Dalam mewujudkan hal tersebut, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah diasumsikan target indikator makro Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Untuk proyeksi pada indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan IPM juga telah sesuai dengan kesepakatan penentuan target makro daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Secara lengkap kondisi makro Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2022 dan target Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel III.133 Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023 dan Target Tahun 2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	5,52	-1,45	3,71	5,79	5,66	5,20- 5,80**
2	Ketimpangan Pendapatan ukuran Bank Dunia (%)	20,39	20,02	19,30	19,86	21,38	21,00- 21,50*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,69	6,07	6,03	5,92	5,11	5,30-5,40*
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	16,82	17,59	17,83	16,41	16,34	14,00-15,00*
5	Indeks Pembangunan Manusia	69,60	69,81	70,05	70,79	71,88	71,20-71,80**

Sumber: BPS tahun 2024

Keterangan:

*) Target pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

**) Target Provinsi Jawa Tengah

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan

pengeluaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari sisi penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Sedangkan dari sisi pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis pembangunan daerah merupakan permasalahan utama daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 serta prioritas kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori. Adapun Isu strategis permasalahan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan Publik
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Kestabilan Ekonomi
4. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim.
5. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu/Pemilukada dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

3.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen

Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan;
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim; dan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana.

Penjabaran lebih lanjut dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 akan dicapai melalui fokus pada upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;

b. peningkatan pengelolaan data pembangunan;
c. peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
d. peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan;
   b. peningkatan upaya pencegahan stunting
   c. peningkatan aksesibilitas dan mutu Pendidikan; dan
   d. peningkatan perlindungan perempuan dan anak
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
   b. peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
   c. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
   d. peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi, pasokan dan ketersediaan barang
   e. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
   f. penguatan ketahanan pangan; dan
   g. peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim, dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung ekonomi;
   b. peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
   c. peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
   d. peningkatan kelayakan hunian;
   e. pengembangan sistem transportasi publik; dan
   f. peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan pengelolaan persampahan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana, dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan kewaspadaan dini;
   b. fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024;
   c. peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
   d. pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata.

3.2.4 Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa inovasi daerah ditujukan untuk meningkatkan

kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah antara lain inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah dan jaringan inovasi daerah. Dalam rangka mendukung iklim riset dan inovasi daerah dibentuk jejaring riset dan inovasi daerah melibatkan lembaga penelitian, bisnis, masyarakat dan media sebagai perwujudan sinergi pentahelix. Beberapa inovasi daerah di Kabupaten Kebumen antara lain:

1) Pengembangan Sistem Perlindungan Pekerja Migran. Keluarga dan Masyarakat melalui “SIPEMIKAT”

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian. Tingginya angka pengangguran Kabupaten Kebumen sebesar 5,11% pada tahun 2023 dengan total pencari kerja yang tercatat sebesar 10.654 orang dengan persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 53,54%. Kondisi ini menjadikan sebagian tenaga kerja di Kabupaten Kebumen memilih bekerja sebagai pekerja migran atau bekerja di luar negeri. Jumlah pekerja migran yang ditempatkan selama tiga tahun terakhir (2019-2023) terus meningkat menjadi sebesar 9.082 orang. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kantong pekerja migran yaitu tertinggi ke 8 di Jawa Tengah dan 25 di tingkat nasional. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan terkait pekerja migran. Setidaknya terdapat 12 kasus pada Tahun 2023 yang ditangani Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dengan aduan mayoritas adalah gagal berangkat/mundur karena tidak ada penempatan.

Upaya peningkatan perlindungan pada PMI Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen membangun sistem kolaborasi yang terintegrasi atau “SIPEMIKAT” SINERGI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN, KELUARGA DAN MASYARAKAT. Inovasi ini bertujuan agar upaya pelindungan PMI lebih komprehensif merupakan sinergi pentahelix berkomitmen untuk memaksimalkan upaya pelindungan serta pemberdayaan PMI. Dalam pelaksanaanya terdapat pilar SIPEMIKAT sebagai pengembangan Desa Migran Produktif/DESMIGRATIF yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan pelindungan bagi Calon PMI, PMI dan PMI purna penempatan beserta anggota keluarganya secara terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Inovasi ini melibatkan stakeholder termasuk perangkat daerah terkait seperti Disdukcapil, Dinas Kesehatan dan melibatkan instansi vertikal seperti imigrasi, kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pengadilan Agama.

SIPEMIKAT, Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Keluarga dan Masyarakat bertujuan agar upaya pelindungan PMI lebih komprehensif, terbit peraturan desa, replikasi Desa Migran Produktif di 26 kecamatan, terbangun database PMI pada semua desa/kelurahan, pelibatan PMI dan keluarganya dalam kegiatan pembangunan dengan anggaran desa, *community parenting* untuk anak PMI yang ditinggalkan, serta kolaborasi kegiatan antar perangkat daerah.

Hingga saat ini telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Camat dan Kades dan telah tersusun regulasi berupa Peraturan Desa tentang Pelindungan dan Pemberdayaan PMI sebanyak 295 Perdes dan 340 database calon PMI, PMI maupun PMI purna penempatan dari jumlah total 460 desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen, terbentuknya 14 Pokja Bina TKI, terbentuknya Tim Psikososial *community parenting*, sosialisasi intensif melalui media cetak dan elektronik serta tersedia hotline layanan pengaduan PMI. Melalui Perbup Nomor 5/2023 teralokasi dana desa untuk kegiatan pelindungan PMI serta kolaborasi kegiatan antar perangkat daerah.

Kebaruan inovasi SIPEMIKAT adalah tersedianya layanan luar gedung dalam bentuk mobil keliling yang diberi nama PATRIOT yang dilaksanakan di minggu ke III setiap bulan bertempat di Alun-Alun Pancasila Kebumen atau di event-event insidental jika diperlukan. Atas inovasi tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan Hassan Wirajuda Award (HWPA) yaitu penghargaan kepada perorangan lembaga, instansi pemerintah baik di perwakilan maupun pemerintah daerah yang memberikan upaya perlindungan kepada WNI dengan sungguh-sungguh.

2) Pengembangan Puskesos SLRT “Rumah Harapan”

Kemiskinan merupakan salah satu isu strategis daerah Kabupaten Kebumen yang akan menjadi mainstreaming dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan. Berbagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan. Pada level penanganan kemiskinan mikro masih terdapat kasus masyarakat miskin yang belum menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif dan banyak yang belum menerima manfaat dari program penanggulangan pemerintah meskipun kondisinya layak menerima. Sebagai langkah tindak lanjut pada September 2015 telah dilaunching Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-P2K) “RUMAH HARAPAN” Kabupaten Kebumen dengan payung hukum Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 tahun 2015. Saat itu UPT P2K memberikan 4 (empat) jenis layanan bagi warga miskin yaitu pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi serta data dan pelaporan.

Sejak Tahun 2017 Rumah Harapan telah berkembang menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) sebagai pusat informasi tentang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Puskesos dibentuk melalui Surat Keputusan Kadinsos P3A Nomor 460/340 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sekretariat dan Penunjukkan Sumber Daya Manusia Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu "Rumah Harapan". Puskesos juga berfungsi untuk membangun wadah aduan masyarakat tentang program bantuan sosial, juga menerima berbagai keluhan mulai dari pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial dan ekonomi, mengetahui kepesertaan dan kebutuhan program melalui penjangkauan oleh fasilitator di lapangan dan menjadi pusat penanganan keluhan dan rujukan, dan menghubungkan masyarakat miskin dengan multi layanan dan lintas sektoral sesuai dengan kebutuhan. Saat ini PUSKESOS memiliki 11 (sebelas) jenis layanan yaitu rekomendasi Kartu Indonesia Sehat PBI dan badan amil zakat nasional, data terpadu: (1) Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), (2) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), (3) Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (4) Rekomendasi bantuan biaya pelayanan kesehatan, (5) Konsultasi bantuan sosial, PKH dan Sembako, (6) Rekomendasi adopsi anak, (7) Rehabilitasi PGOT dan ODGJ, (8) Rekomendasi layanan rujukan bagi ODGJ, disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng, (9) Rekomendasi perpanjangan dan pendirian LKS, (10) Layanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA) dan (11) Dispensasi Kawin.

Puskesos berfungsi sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan yang akan dirujuk ke berbagai pengelola program yang berwenang dan dipastikan dapat ditangani dengan baik dan terpantau proses penanganannya. Salah satu strategi perluasan dan keberlanjutan Puskesos antara lain dengan advokasi dan sosialisasi pada seluruh *stakeholder*, menyusun rencana aksi pengembangan Puskesos SLRT dan membangun pentahelix partisipasi sektor non pemerintah seperti yang sudah dilakukan selama ini yaitu berkolaborasi dengan: Perguruan Tinggi, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, BUMN dan perangkat daerah lainnya. Saat ini Puskesos Rumah Harapan telah dikembangkan di 130 puskesos di tingkat desa.

Pada Tahun 2022 Rumah Harapan ditetapkan sebagai program *Quick Win Smart City* Kabupaten Kebumen. Selain itu Puskesos merupakan salah satu inisiatif dalam penanggulangan kemiskinan. Keberadaan Puskesos diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi, saling terkoneksi dengan seluruh pemangku kepentingan, membantu validasi data penerima bansos dan adanya puskesos pada tingkat desa dapat mendekatkan layanan kesejahteraan sosial

dengan masyarakat. Puskesos Rumah Harapan berusaha terus mendekatkan layanan bagi masyarakat miskin dalam menyampaikan keluhan atau aduan terkait dengan layanan kebutuhan program dan bantuan jaminan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Rumah Harapan (SIRAMAH).

3) MIE KERITING (Makanan Instan Cegah Kerdil dan Stunting)

Inovasi yang diusung oleh Kabupaten Kebumen melalui UPTD Puskesmas Kebumen 2 sebagai salah satu upaya mewujudkan Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Stunting) di Kabupaten Kebumen. Puskesmas Kebumen II berhasil menciptakan sebuah inovasi yaitu "MIE KERITING" (Makanan Instan Cegah Kerdil dan Stunting). Inovasi Mie Keriting merupakan makanan instan yang dibuat dari bahan utama ganyong dan kelor, serta bahan lain yang dibutuhkan sesuai konsep makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan konsep "ISI PIRINGKU". Mie Keriting telah melalui uji laboratorium sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan dan replikasi inovasi agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Inovasi ini telah mengalami pengembangan sejak diinisiasi pada tahun 2020 yang awalnya berupa makanan tambahan yang diberikan langsung kepada balita berupa kue basah, mie basah, bubur dan lainnya kemudian berkembang menjadi camilan instan yang disukai anak-anak dalam bentuk mie instan. Selanjutnya pada Tahun 2022 MIE KERITING berkembang menjadi camilan sehat yang lebih bervariasi dengan bermacam-macam rasa yang disukai anak-anak. Untuk memperluas penerima manfaat, inovasi ini berkembang menjadi industri rumah tangga serta tengah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), izin edar/ P-IRT. Bentuk perlindungan atas kekayaan intelektual yang diberikan antara lain fasilitasi penerbitan sertifikat hak cipta, SK Gubernur Jateng atas Pemenang Inovasi, hak paten, serta MOU dengan BRIDA Jateng dalam pengembangan produk inovasi. Selain itu inovasi ini telah ditetapkan sebagai Top 45 Nasional Inovasi Pelayanan Publik pada Tahun 2023 dan menjadi Top Inovasi Pelayanan Publik kelompok keberlanjutan Tahun 2024.

Makanan instan dari inovasi mie keriting ini dapat di replikasi di seluruh wilayah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan desa bekerjasama dengan promkes dan program gizi kemudian diolah oleh kader menjadi PMT dan diberikan pada balita pada kegiatan posyandu. Sasaran utama pemberian PMT ini adalah balita yang mempunyai berat dan tinggi badan kurang. Selain itu juga melakukan pembinaan pada kelompok PKK desa yang anggotanya termasuk kader desa untuk mengolah mie keriting ini menjadi sediaan instan yang disukai oleh anak-anak seperti *coco crunch* dan *bit mie* kemudian dikemas sedemikian rupa untuk dijual dan menambah pendapatan

desa. Pemasaran mie keriting ini akan dilaksanakan melalui koperasi, Bumdes dan toko-toko makanan yang ada di Kebumen. MIE KERITING sebagai peluang baru untuk pengembangan produk yang bermanfaat untuk pencegahan stunting dan untuk menunjang pertumbuhan balita, atau sebagai altenatif Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai pencegahan stunting. Inovasi ini diharapkan menjadi pioner munculnya inovasi-inovasi baru dalam penanganan stunting di Kabupaten Kebumen.

4) Transformasi Penataan Ruang Terbuka Publik dalam Kerangka Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif

Kabupaten Kebumen menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan penanganan diantaranya angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Kabupaten Kebumen memiliki potensi yang sangat besar dari sektor ekonomi berupa geliat usaha mikro, kecil menengah dan besar yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini terlihat dari perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kebumen yang mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan, meskipun nyatanya belum mampu secara optimal mengentaskan masyarakat dari bawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan antara lain terlihat dari masih rendahnya tingkat pendapatan, belum tersedianya peluang usaha yang memadai, serta masih minimnya ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas dan interaksi masyarakat termasuk aktivitas ekonomi.

Kabupaten Kebumen merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sebesar 1,3 juta jiwa yang membutuhkan ruang publik terbuka dan inklusif pada Kawasan Perkotaan untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk olahraga, hiburan, kesenian, sosial dan kebudayaan, kemasyarakatan dan lain-lain**.** Saat ini Kabupaten Kebumen memiliki beberapa ruang publik yaitu stadion olahraga, taman kota, alun-alun kota, hutan kota dan taman rekreasi dan olaraga. Pemilihan titik awal penataan adalah kawasan perkotaan karena selama ini kawasan perkotaan Kebumen menjadi salah satu ruang publik untuk masyarakat berekreasi, olahraga, dan melakukan aktivitas ekonomi, maupun sosial budaya sehingga kawasan perkotaan Kebumen menjadi lokus favorit para penyelenggara atraksi pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Mendasari hal tersebut, Kabupaten Kebumen melakukan inovasi penataan ruang terbuka publik sebagai bagian dari pengembangan pusat ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Inovasi yang dilakukan adalah melalui revitalisasi dan penataan ulang infrastruktur ruang terbuka publik yang ada sehingga tetap mampu berperan sebagai ruang terbuka publik yang inklusif,

sekaligus memperluas fungsi sebagai sarana berbagai aktivitas seperti olahraga, kesenian, ekonomi serta sosial budaya.

Mendasari letak dan fungsinya yang strategis telah dibangun Koridor Perkotaan Kebumen Moro Soetta di sepanjang ruas Jalan Soekarno-Hatta yang dulunya disebut Jalan Pahlawan hingga Jalan Merdeka di seputaran Alun-alun Kebumen, dilanjutkan sepanjang Jalan Sutoyo hingga terhubung ruas Jalan Kusuma yang berada di pusat perkotaan Kebumen mempunyai nilai fungsi dan aksesibilitas sosial ekonomi yang tinggi sebagai poros pertumbuhan ekonomi. Kondisi sebelum dilakukan revitalisasi infrastruktur, koridor perkotaan Kebumen kurang representatif keberadaannya, ruas jalan tersebut belum mampu mewadahi perkembangan aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Permasalahan yang timbul diantaranya drainase yang kurang lancar sehingga terjadi genangan pada waktu hujan, parkir di kedua bahu jalan, pergerakan transportasi lambat, spesifikasi trotoar yang kurang nyaman sebagai pedestrian, banyaknya PKL dan ruang terbuka hijau (RTH) yang terbatas. Ketersediaan ruang publik diharapkan akan mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang dapat mendukung terwujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Ruang publik diharapkan menjadi wadah interaksi antara Pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis.

Inovasi ini berupaya menawarkan sudut pandang baru kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang publik. Masyarakat yang selama ini memiliki kebutuhan terhadap ruang dan menuntut akan pemenuhannya (pusat aktivitas masyarakat dan gedung kesenian) ditawarkan dengan konsep pemanfaatan ruang publik terbuka untuk memenuhi berbagai kebutuhannya tersebut. Caranya adalah dengan mengubah bentuk, desain, tampilan dan peruntukannya sehingga sesuai dengan kebutuhan akan ruang publik yang ada.

Karena sifatnya yang terbuka, maka ruang publik ini juga akan mampu menopang berbagai aktivitas yang sifatnya lebih masif utamanya dalam mewadahi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, penciptaan peluang usaha dan peningkatan pendapatan. Penciptaan bangunan iconic dan pusat informasi pariwisata/geopark juga diharapkan akan mampu menjadi daya tarik wisata baru, meningkatkan kedatangan wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah yang berujung pada meningkatnya peredaran uang dalam masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu ruang publik diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan luar ruang seperti pelaksanaan event baik lingkup lokal, regional, nasional dan bahkan internasional. Sebagai pusat kegiata olahraga maupun ruang kolaborasi pemuda dan pelaku ekonomi kreatif.

5) Pengembangan Agrobisnis Melalui *Corporate Farming*

Pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Kebumen, meskipun sektor ini belum mampu menjadi sektor andalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bekerja di sektor pertanian. Beberapa masalah dalam sektor pertanian antara lain rendahnya kualitas SDM petani sehingga tingkat adopsi teknologi dan inovasi rendah, terdapat inefisiensi dalam pengelolaan produksi karena kurangnya skala usaha pengelolaan lahan pertanian yang sempit yaitu kurang dari 0,25 Ha produktivitas yang rendah dan permasalahan manajemen usaha dan akses pemasaran.

Konsep *corporate farming* diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. *Corporate farming* adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan manajemen. Keberadaan *Corporate Farming* diharapkan dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi petani yang tergabung dalam manajemen *Corporate*, seperti solusi terkait hambatan permodalan, teknis budidaya, penerapan taknologi, dan pemasaran. Selain itu *Corporate Farming* dapat membuka kesempatan hilirisasi dan kemitraan dari berbagai stakeholder serta masyarakat Kebumen secara umum selaku konsumen dari produk hasil *Corporate Farming* tersebut. Secara khusus, pelaksanaan *Corporate Farming* yang ditumbuhkan dan dikembangkan di Kabupaten Kebumen fokus pada sisi hulu sehingga perlu mengintegrasikan kelembagaan kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Usaha Bersama dalam suatu manajemen korporasi yang mengelola lahan petani yang menyerahkan lahan sawahnya untuk dikelola oleh manajemen korporasi. Selain penguatan kelembagaan kelompok tani dalam manajemen *Corporate Farming*, manajemen mekanisasi untuk mendukung pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan *Corporate Farming* perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, revitalisasi kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Brigade Alsintan menjadi fokus pembinaan dan pendampingan secara terpadu. Tujuan jangka pajang dari *corporate farming* adalah untuk mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi.

Pilot project corporate farming pada MT 1 Tahun 2023 dan MT 2 Tahun 2024 dilaksanakan di 13 desa, 8 kecamatan dengan 13 kelompok tani dengan luasan 83 hektar. Adapun produktivitas pada lokasi percontohan tersebut rata-rata pada MT 1 Tahun 2023 sebesar 59,79 dan rata-rata pada MT 2 Tahun 2024 sebesar 67,72. Pemerintah Kabupaten Kebumen bermitra dengan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya untuk memberikan bantuan pinjaman penyediaan sarana produksi pertanian sebagai *off taker* Gabah Kering Panen (GKP) Kelompok Tani

pelaksana *corporate farming.* PT Aneka Usaha Kebumen Jaya juga bekerjasama dengan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk mendukung akses pemasaran hasil kelompok tani. Hasil serapan GKP kelompok tani digunakan untuk mendukung gerakan pangan murah (GPM) sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen. Setidaknya pada September 2024 penyerapan Gabah sebanyak 43,99 ton (GKP) di lokasi *corporate farming* dan mendukung 60% penyediaan beras untuk pelaksanaan program GPM yang dilaksanakan sebanyak 366 kali selama tahun 2024 di 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Selain pada komoditas padi, *corporate farming* juga diterapkan pada komoditas jagung pada MT 2 Tahun 2024 di 3 desa pada 3 kecamatan di Kabupaten Kebumen dengan masing-masing lokasi seluas 5 Hektar. Untuk akses pemasaran jagung, Pemerintah Kabupaten Kebumen menjalin kemitraan dengan PT Semar Sakti di Brebes dan PT Seger Agro Nusantara di Gresik yang menjadi offtaker jagung di Kabupaten Kebumen setidaknya terserap sebesar 29.176 ton jagung pada Tahun 2024

6) Gerakan Pengendalian Harga Pangan Dukung Stabilitas Inflasi dan Penurunan Kemiskinan

Gerakan pengendalian harga pangan dilatarbelakangi oleh peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Kebumen yang terus meningkat terutama di komoditas beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan gula pasir. Kenaikan bahan pangan ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan secara tidak langsung akan mempengaruhi garis kemiskinan. Sebagai salah satu upaya dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Kebumen dilaksanakan secara terintegrasi dari sisi hulu hingga hilir sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Perangkat Daerah terkait dengan ketahanan pangan dan perdagangan, Bulog, BUMD Aneka Usaha Kebumen Jaya dan stakeholder lainnya. Upaya ini sejalan dengan arahan Pemerintah terkait aksi dan kebijakan terkait pengendalian inflasi pangan salah satunya dengan pelaksanaan gerakan pangan murah, pemberian bantuan pangan, pengawasan keamanan dan mutu pangan, dan edukasi pola konsumsi pangan B2SA.

Terobosan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan meluncurkan program prioritas kolaboratif yang mengintegrasikan dari sisi hulu hilir pertanian dan distribusi barang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengendalian harga, stabilitas inflasi dan pengurangan kemiskinan melalui program Gerak Seruni (Gerakan Pengendalian Harga Pangan Dukung Stabilitas Inflasi dan Penurunan Kemiskinan). Implementasi program Gerak Seruni di sisi hulu yaitu

dengan penerapan teknologi CSA (*Climate Smart Agriculture*) dan sistem tanam jajar legowo di 580 ha yang kemudian berkembang menjadi *corporate farming* di 6 kecamatan dengan produktivitas sebesar 10-12 ton Gabah Kering Giling (GKG) per Ha. Penerapan *off season* dengan tanaman padi biofortifikasi seluas 1000 Ha, pemanfaatan teknologi pompanisasi, penyediaan pupuk dan benih serta peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pekarangan pangan lestari. Pada sisi hilir yang dilaksanakan antara lain menjaga stabilitas harga melalui gerakan pangan murah dan pasar mitra tani secara masif sebanyak 108 kali di tahun 2024, operasi pasar beras dan minyak di pasar tradisional, subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 yaitu untuk komoditas beras, minyak goreng, gula pasir dan bawang putih, membentuk Toko SPHP yaitu toko mitra bulog, mendirikan kios BUMD Aneka Usaha sebagai penyedia beras SPHP dan komoditas pangan dengan harga di bawah harga pasar. Selanjutnya adalah menjaga stabilitas harga di tingkat produsen melalui dana talangan pangan. BUMD sebagai *off taker* gabah petani terutama hasil dari peserta *corporate farming* dengan harga beli sesuai dengan standar harga pemerintah dan melalui lumbung pangan di kecamatan rawan pangan. Selain itu penguatan stok komoditas strategis penyumbang inflasi, pemantauan harga komoditas pangan melalui aplikasi SIMBOK, penguatan pemanfaatan data dan informasi harga dan untuk mengetahui ketersediaan komoditas dan implementasi pencegahan pemborosan pangan.

Program ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pasokan komoditas, stabilitas inflasi dan keterjangkauan harga, menjaga daya beli konsumen dan meningkatkan kesejahteraan petani. Implementasi program ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugrah penghargaan predikat Terbaik 1 Nasional pada Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Awards dari Badan Pangan Nasional dan TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Kawasan Jawa Bali 2024 dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

3.3 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2023

Tabel III.134 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2023 dan Rencana tindak lanjut

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
A. Mekanisme dan Prosedur					
1.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa DPRD memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yang disampaikan oleh Bupati, rekomendasi ini ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan disampaikan melalui rapat paripurna, dalam rangka evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan. Rekomendasi yang diberikan dalam bentuk Keputusan DPRD ini tentunya bukan hanya dokumen yang diserahkan dan tidak diapa-apakan tetapi perlu ditindaklanjuti. Dalam pembahasan yang dilakukan ditemukan banyak	1. Bappeda 2. BPKPD 3. BKPSDM 4. Inspektorat 5. Disdikpora 6. Dinkes PPKB 7. Disperindagkop UMKM 8. Distapang 9. Disparbud 10. Dinsos P3A 11. DPUPR 12. DLHKP 13. Disperkimhub 14. Satpol PP 15. Bagian Kesra 16. Bagian PBJ 17.Bagian Organisasi 18. Bagian Hukum	Telah dilakukan koordinasi dengan OPD terkait dan tim penyusun telah bersurat kepada OPD terkait (yang termasuk dalam daftar rekomendasi tahun sebelumnya) perihal Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2023, dan OPD berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut.	Terhadap Rekomendasi untuk Dinas Kesehatan terkait perlu dimasukkannya laporan kinerja BLUD dalam LKPJ, kami sampaikan bahwa penyusunan dan penilaian laporan kinerja BLUD bidang kesehatan baru disusun oleh Kemendagri bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen sebagai *Pilot Project* pada tahun 2024.	Sehingga laporan kinerja BLUD baru dapat disajikan pada LKPJ 2024.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	rekomendasi ditahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, maka DPRD meminta rekomendasi yang sudah diberikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	19.Bagian Pemerintahan			
2	Dalam dokumen LKPJ yang diserahkan kepada DPRD masih terdapat banyak kesalahan narasi, kesalahan penulisan kebijakan, penghitungan target kinerja, penyajian data dan lain sebagainya. DPRD merekomendasikan kedepan kualitas dokumen harus ditingkatkan sehingga dokumen LKPJ bisa benar-benar menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan didukung dengan data dan informasi yang akuntabel.	Bagian Pemerintahan	Mereview kembali LKPJ tahun 2023 sebagai bahan acuan perbaikan penyusunan LKPJ tahun 2024 dengan mendasari pada Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	1. Dalam penyusunan LKPJ tidak ada pendampingan, tidak ada review dan tidak ada desk dari Provinsi. 2. Sumber data (narasi dan penyajian data) yang disajikan dalam LKPJ merupakan data dari OPD. Secara teknis yang menguasai data secara detail adalah OPD.	1. Dalam penyusunan LKPJ berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Permendagri yang berlaku. 2. Dalam Proses Penyusunan LKPJ dilakukan pendampingan, desk, pencermatan dan koreksi oleh Tim Penyusun.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
B. Kebijakan Pemerintah Daerah					
1	Dalam penjelasan hasil perumusan kebijakan ekonomi ke depan dalam dokumen LKPJ untuk lebih dijelaskan kondisi ekonomi, permasalahan dan potensinya sesuai dengan kondisi riil yang ada ditahun 2023, dalam LKPJ gambaran upaya Penerapan kebijakan ekonomi daerah sama dengan tahun 2022	Bappeda dan Bagian Pemerintahan	Dilakukan review pada sub bab arah kebijakan ekonomi.	Kebijakan Ekonomi yang disajikan merupakan sub atau bagian dari perekonomian Jawa Tengah secara regional dan Indonesia secara Nasional, yang meliputi unsur-unsur: PDRB, Laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sejauh ini data terkait indikator Utama Ekonomi sudah dilakukan penyesuaian dan disesuaikan dengan kondisi riil saat ini.	1. Berkoordinasi dengan penyaji data (BPS) untuk memastikan bahwa data-data indikator ekonomi telah dihitung dan disajikan secara valid. 2. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai kebijakan ekonomi yang lebih baik adalah dengan: a. Menyusun kajian terkait fenomena pembangunan daerah. b. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam perumusan kebijakan pembangunan. c. Melakukan pendekatan kebijakan yang menjadi solusi bagi permasalahan daerah antara lain: GPM (Gerakan Pangan Murah) dalam rangka pengendalian inflasi, Corporate Farming dalam rangka peningkatan daya saing petani, dan Subsidi Bunga dalam rangka

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
					peningkatan akses keuangan masyarakat.
2	Kebijakan strategi pencapaian kebijakan peningkatan pendapatan, tentunya setiap tahun berubah sesuai dengan perkembangan yang ada. Dalam dokumen LKPJ strategi yang dilakukan ditahun 2023 baik pendapatan, belanja dan pembiayaan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kedepan untuk lebih dirumuskan strategi tahunannya dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan yang ada.	BPKPD	1. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengupayakan terkait dengan kebijakan dan strategi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Kebumen tetap mendorong kemandirian daerah dengan melakukan intensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a. Meningkatkan manajemen tata Kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini b. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak	1. Dalam penyajian fokus pada angka antara lain besaran anggaran, pendapatan, belanja, pembiayaan, kenaikan dan penurunan serta persentase capaian. Sehingga narasi hanya menceritakan angka-angka dimaksud. 2. Permasalahan terkait Optimalisasi pendapatan adalah: a. Belum optimalnya pengggalian potensi pajak daerah. b. Belum optimalnya pemberdayaan dan pendayagunaan aset c. Belum optimalnya penerapan *good corporate governance* pada BUMD	Dilakukan inovasi-inovasi kebijakan dalam upaya peningkatan pendapatan. 1. Melakukan penyempurnaan dasar hukum dan regulasi pemungutan; 2. Melakukan koordinasi dengan APIP dan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan pengawasan pajak daerah; 3. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah; 4. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak; 5. Melaksanakan koordinasi dengan OPD Pengelola

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			daerah dan retribusi daerah secara optimal c. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah d. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal e. Membuat kajian terkait potensi pendapatan daerah 2025-2029 2. Diterbitkan regulasi sebagai pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.		Pendapatan dalam rangka sinergitas pemungutan PAD; 6. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Pemungut Pajak, OPD Pengelola Pendapatan maupun para Camat; 7. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak; 8. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; 9. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah; 10. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
					modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan dividen atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;dan 11. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; Selain langkah-langkah tersebut diatas, untuk tahun 2025 mendasari Perda nomor 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai memungut Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3	Indikator Kinerja Utama Daerah atau IKU Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah,	Bagian Organisasi dan Bappeda	Dilakukan review dan evaluasi terhadap indikator kinerja daerah yang belum tercapai.	Pada tahun 2024 terdapat 1 IKU Daerah yang tidak mencapai target yaitu Ketimpangan Pendapatan (Ukuran Bank Dunia).	Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan perlu adanya kebijakan yang mendorong investasi untuk membuka lapangan kerja, serta mendorong

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dalam dokuman LKPJ dijelaskan ada beberapa IKU Daerah yang belum tercapai targetnya, DPRD merekomendasikan untuk IKU daerah yang belum tercapai untuk diperhatikan dan untuk IKU daerah yang sudah tercapai untuk dipertahankan.			Target Ketimpangan Pendapatan yang ditetapkan sebesar 21% terealisasi 20,38%, dengan klasifikasi ketimpangan rendah. Faktor yang dominan di Kabupaten Kebumen disebabkan karena Kesempatan Kerja yang belum mampu menampung seluruh angkatan kerja sehingga terdapat *gap* pendapatan di masyarakat.	kewirausahaan dan memacu UMKM naik kelas, sehingga perlu adanya sinergitas program antar OPD.
C. Rekomendasi Terhadap Kinerja Pemerintah Berdasarkan Urusan					
1	Urusan Pendidikan	DISDIKPORA			
	a. Dalam dokumen LKPJ kebijakan urusan pendidikan tidak sesuai dan terjadi kesalahan. kedepan untuk lebih diperhatikan. dan dirumuskan kebijakan tahunan urusan pendidikan dengan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah.		Kebijakan Disdikpora yang dianggap tidak sesuai dan terjadi kesalahan. kedepan akan lebih diperhatikan. dan dirumuskan kebijakan tahunan disesuaikan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah	Dalam dokumen LKPJ kebijakan urusan pendidikan tidak sesuai dan terjadi kesalahan	Dalam Menyusun Renja dan Renstra akan lebih memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen
	b. Angka Partisipasi Kasar sekolah tidak mencapai		Untuk Meningkatkan APK PAUD dilakukan dengan memfasilitasi	Angka partisipasi dasar sekolah tidak mencapai target dimana APK	Untuk Meningkatkan APK PAUD dilakukan memfasilitasi Bunda

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	target selain itu juga di masyarakat masih ditemukan masyarakat miskin yang mengalami kendala pembiayaan pendidikan. DPRD merekomendasikan kegiatan beasiswa untuk lebih ditambahkan baik dari sisi anggaran dan jumlah sasaran penerimanya		Bunda dan Pokja Bunda PAUD untuk sosialisasi pentingnya mengenalkan pendidikan anak sejak dini melalui PAUD Untuk Meningkatkan APK SMP dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah baik ke sekolah formal maupun non formal dan untuk anak berkebutuhan khusus telah disediakan sekolah yang inklusif.	PAUD dan APK SMP sederajat masih menunjukkan angka dibawah 100. artinya masih kurang kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak ke jenjang PAUD. adanya penurunan pada jumlah murid yang berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan usianya atau anak usia sekolah yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Kebumen. serta faktor ekonomi dan anak berkebutuhan khusus	dan Pokja Bunda PAUD Untuk sosialisasi tentang pentingnya mengenalkan pendidikan anak sejak dini melalui PAUD Untuk Meningkatkan APK SMP dilakukan -sosialisasi kepada masyarakat terkait anak putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah dan untuk anak berkebutuhan khusus telah disediakan sekolah yang inklusif.
			kegiatan beasiswa rencana akan ditambahkan baik dari sisi anggaran dan jumlah sasaran penerimanya	selain itu juga di masyarakat masih ditemukan masyarakat miskin yang mengalami kendala pembiayaan pendidikan	kegiatan beasiswa rencana akan ditambahkan baik dari sisi anggaran dan jumlah sasaran penerimanya
	c. Permasalahan pada urusan pendidikan salah satunya adalah Angka partisipasi sekolah disabilitas masih perlu ditingkatkan karena masih relatif rendah. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kebumen yang		Untuk meningkatkan Angka partisipasi sekolah disabilitas yang masih relatif rendah melalui: - penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah baik ke sekolah formal maupun non	Kondisi anak- anak disabilitas dan putus sekolah sangat beragam dan beberapa anak disabilitas diluar kemampuan sekolah	Dilakukan assesment terhadap anak disabilitas dan untuk ATS dilakukan verval dengan melibatkan berbagai pihak.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	inklusif maka DPRD meminta angka partisipasi sekolah untuk disabilitas lebih ditingkatkan		formal termasuk anak berkebutuhan khusus - Penerimaan PPDB melalui kuota afirmasi		
2	Urusan Kesehatan	DINKES PPKB			
	a. Kasus Gizi Buruk merupakan permasalahan yang belum terselesaikan. ditahun 2023 target penurunan gizi buruk juga tidak mencapai terget. kedepan perlu dilakukan strategi dalam rangka penurunan gizi buruk termasuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi		1. Meningkatkan monitoring data hasil pengukuran antropometri (pengkuran tumbuh kembang) pada balita. 2. Menindaklanjuti temuan gizi buruk, merujuk kasus gizi buruk untuk mendapatkan tatalaksana sesuai standar pada Permenkes nomor 29 tahun 2019 tentang penanggulangan masalah Gizi bagi anak akibat penyakit	1. Adanya penyakit penyerta bayi yang lahir dengan penyakit bawaan; 2. Pola asuh yang kurang baik khususnya dalam hal pemberian makanan pada balita yang tidak tepat; dan 3. Perilaku Hidup bersih dan sehat yg kurang menyebabkan balita terkena penyakit infeksi menyebabkan kasus gizi buruk di kebumen belum dapat teratasi; 4. Asupan makanan yang kurang karena tidak tersedia	1. Koordinasi dengan Rumah sakit rujukan untuk tatalaksana penyakit penyerta dan gizi buruk; 2. Memberikan edukasi/penyuluhan terkait pemberian makan bagi anak dan PHBS kepada orang tua; 3. Mengadakan pelatihan pemberian makan tambahanbayi dan Anak (PMBA); 4. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal
			1. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Melaksanakan audit maternal perinatal (AMP)	1. Masih kurangnya kepatuhan pelaksanaan pemeriksaan ANC terpadu yang sesuai standar dan kepatuhan terhadap standar Kunjungan Neonatal;	1. Bimtek Ante Natal care (ANC) terpadu sesuai standar kepada pemberi pelayanan; 2. Dinas Kesehatan PPKB menerbitkan Surat Edaran

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			3. Meningkatkan kualitas pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir sesuai standar. 4. Melaksanakan AMP pada kasus kematian bayi	2. Belum semua faskes jejaring Puskesmas (klinik, dokter praktek mandiri, Bidan Praktek Mandiri) yang belum berkolaborasi dengan Puskesmas dalam pelaksanaan ANC Terpadu; 3. Masih banyak ibu hamil yang resiko tinggi. Kejadian ibu hamil resiko tinggi meningkat menjadi 50%; 4. Masih banyak ibu hamil dengan penyakit penyerta; 5. Masih adanya kasus kehamilan remaja; 6. Masih adanya kehamilan tidak diinginkan (pada usia tua);	terkait kewajiban DPM dan BPM merujuk ibu hamil ke Puskesmas untuk melakukan ANC Terpadu; 3. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan kehamilan; 4. Penerapan Skrining Layak hamil. 5. Sosialisasi kesehatan reproduksi ke sekolah-sekolah; 6. Peningkatan KB Aktif pada PUS; 7. Pelaksanaan skrining layak hamil; 8. Bimtek kepatuhan pelayanan Kunjungan Neonatal sesuai standar 9. Untuk tahun 2025 diterbitkan SE tentang Minum Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri dan WUS, dan disusun SK Bupati tentang Gugus Tugas Penanganan kematian Ibu dan Kematian Bayi di Kabupaten Kebumen.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	b. Kinerja BLUD baik rumah sakit dan puskesmas tidak dijelaskan di dokumen LKPJ. sesuai dengan rekomendasi DPRD tahun sebelumnya untuk mencantumkan kinerja BLUD. kami meminta kedepan target dan capaian kinerja BLUD untuk bisa dilaporkan dalam dokumen LKPJ.	Dinkes PPKB	Melaksanakan penilaian Kinerja BLUD.	Pada tahun 2023 belum adanya modul penyusunan dan penilaian laporan Kinerja BLUD bidang Kesehatan.	Kinerja BLUD sudah kami lampirkan pada dokumen LKPJ 2024.
3	Urusan Pekerjaan Umum	DPUPR			
	Arah kebijkan pembangunan tahun 2023 adalah “Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam Rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme aparatur dan kualitas sumber daya manusia”. Dengan kebijakan pembangunan tersebut seharusnya infrastruktur di Kabupaten Kebumen sudah mantap atau baik, tetapi apabila melihat		1. Dari tahun sebelumnya penetapan target sudah dinaikkan seperti ; a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tahun 2023 80% target 2024 82.5%; b. Program Pengelolaan dan Pengambangan Sistem Drainase tahun 2023 target 17.04%. pada 2024 target 18.01%; c. Program Penyelenggaraan Jalan tahun 2023 target	Beberapa target yang ditetapkan di awal tidak dapat dicapai karena tidak diikuti dengan penganggaran yang sesuai.	1. Mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan. 2. Mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharan jaringan irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan. 3. Mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase disesuaikan dengan

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	capaian target infrastruktur banyak yang tidak tercapai target seperti Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam kondisi Baik ditargetkan sebanyak 80% hanya terealisasi sebesar 76,31%. Persentase Drainase dalam kondisi baik tidak mencapai target, dari target 17,04% hanya terlaksana 16,19%. Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik tidak mencapai target, dari target 81,14% hanya tercapai 80,81%, kondisi jalan dikabupaten kebumen tahun 2023 juga semakin menurun, hal ini terlihat dari Persentase Jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap ditargetkan sebanyak 76,23% hanya terealisasi sebanyak 73,69%. DPRD merekomendasikan kedepan capaian target infrastruktur untuk lebih		76.23%. tahun 2024 79,48%; d. Program Penataan Bangunan Gedung Target 2023 81,14%. pada 2024 83,16% ; 2. Adapun besaran anggaran dari tahun sebelumnya; a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tahun 2023 Rp. 15.424.0550 dan anggaran tahun 2024 Rp. 7.586.3050; b. program Pengelolaan dan Pengambangan Sistem Drainase tahun 2023 Rp. 5.461.6780, pada 2024 Rp. 1.663.6420; c. Program Penyelenggaraan Jalan tahun 2023 Rp. 109.214.422.288, tahun 2024 Rp. 83.141.9720; d. Program Penataan Bangunan Gedung Rp. 4.300.700, pada 2024 Rp. 13.856.3400;		kemampuan keuangan daerah.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	ditingkatkan selain itu juga disertai dengan anggaran yang mencukupi dan kwalitas hasil pekerjaan yang baik, arah kebijakan pembangunan juga harus diperhatikan dan diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan sub kegiatan dan anggaran, bukan hanya sebatas arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.		Dari 4 program tersebut hanya program gedung yang mengalami peningkatan anggaran; 3. bentuk program dan kegiatan masih menggunakan renstra 2021-2026, untuk renstra selanjutnya masih dalam proses penyusunan; 4. hasil pekerjaan sudah sesuai dengan HPS dan perencanaan, serta masih dalam proses pemeliharaan atau masih dalam FHO		
4	Urusan Sosial				
	Data kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum bisa diselesaikan, dalam LKPJ di jelaskan beberapa permasalahan data kemiskinan, seperti: Masih didapati PPKS yang belum masuk ke DTKS, Penanganan PPKS harus ditetapkan BNBA satu tahun sebelum tahun anggaran.	DINSOS P3A	1. Melakukan pendataan dan pemutakhiran berkala DTKS (bulanan) 2. Penggantian PPKS selalu di realisasikan pada anggaran perubahan 3. Melakukan pendataan menyeluruh terhadap PGOT dan ODGJ di wilayah kab. Kebumen melalui kerja sama dengan	1. Usulan PPKS untuk masuk ke DTKS belum optimal 2. PPKS adalah kelompok rentan baik secara kondisi sosial maupun kesehatan 3. Kurangnya data yang akurat dan terkini mengenai jumlah, identitas, kondisi, dan kebutuhan PGOT serta ODGJ	1. Sosialisasi DTKS dan bansos kepada desa/kelurahan 2. Selalu melaksanakan validasi PPKS dengan Kecamatan dan pendamping desa 3. Melakukan pendataan menyeluruh terhadap PGOT dan ODGJ dan berkoordinasi dengan perangkat desa,

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Banyaknya Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dan ODGJ Terlantar sementara di Kebumen belum ada lembaga yang secara khusus menangani pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Tidak adanya perangkingan/status kesejahteraan/desil di dalam DTKS, DTKS kurang fleksibel untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas BNBA. Pembaharuan menu aplikasi Kabupaten; Kendala dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pusdatin dikarenakan tidak adanya kontak person yang dapat memberikan solusi setiap muncul permasalahan atau komplain. Kabupaten hanya bisa melakukan usulan data tetapi untuk berhasil atau tidaknya sepenuhnya keputusan Pusdatin Kesos Kemensos RI.		perangkat desa, kelurahan, dan kecamatan dan dinas terkait 4. Perangkingan status kesejahteraan sosial untuk intervensi di Kabupaten Kebumen mendasarkan Data Sasaran Prioritas Penanggulangan Kemiskinan yang sedang disusun oleh TKPKD 5. Update data dan koordinasi 6. Aktif dalam memantau pembaharuan menu aplikasi DTKS 7. Pengelola DTKS Kabupaten selalu memantau grup whatshapp untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemutakhiran DTKS/Bansos 8. Update data secara berkala sesuai jadwal dari Pusdatin Kesos RI 9. Penyusunan data sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan	membuat penanganan sulit dilakukan secara tepat sasaran. 4. DTKS hanya berbasis NIK 5. DTKS merupakan basis data yang digunakan untuk intervensi bantuan sosial dari Kemensos RI 6. Pembaharuan menu otomatis di aplikasi DTKS 7. Permasalahan dan komplain terkait pengelolaan DTKS hanya melalui *call center* 8. Usulan data DTKS/bansos sepenuhnya keputusan Pusdatin 9. Data yang diampu oleh Kemensos adalah DTKS yang merupakan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. 10. Data kemiskinan kabupaten masih disusun oleh TKPKD dan dikoordinir oleh Bappeda selaku sekretariat TKPKD (proses verval)	kelurahan, dan kecamatan dan dinas terkait 4. Menunggu penetapan Data Sasaran Prioritas Penanggulangan Kemiskinan yang telah dipadankan dengan DTKS 5. Update DTKS secara berkala dan berkoordinasi dengan Kemensos RI 6. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pusdatin Kesos 7. Update berkala DTKS (bulanan) dan koordinasi dengan Kemensos RI 8. Menunggu penetapan Data Sasaran Prioritas Penanggulangan Kemiskinan yang sedang disusun oleh TKPKD dengan koordinator Bappeda selaku sekretariat TKPKD

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Permasalahan data kemiskinan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten yang memiliki kemiskinan tinggi, DPRD merekomendasikan terkait data kemiskinan untuk segera di cari jalan keluar dan berkomunikasi dengan Kemensos.		Kemiskinan Kabupaten Daerah) sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK RI dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Kinerja atas efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan tahun 2022-2024 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen 10. OPD dalam pelaksanaan kegiatan dan program Penanggulangan Kemiskinan mendasarkan pada data tersebut.		
5	Urusan Pertanian dan Pangan	DISTAPANG			
	a. Tumpuan ekonomi masyarakat kebumen terbesar ada pada sektor pertanian. sementara ini kebijakan dan anggaran pada sektor pertanian masih sangat terbatas dan secara kinerja juga banyak yang tidak mencapai target, DPRD Merekomendasikan untuk sektor pertanian untuk lebih		Untuk upaya mencapai target yang ditetapkan perlu didukung anggaran. Untuk itu dilakukan pengusulan anggaran APBN dan DAK.	Adanya penurunan pagu anggaran dari Tahun 2023 dan 2024 yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja. dimana: 1. Pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp.53.180.962.053.- 2. Pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 49.572.5730.-	Dukungan anggaran terhadap sektor pertanian agar dapat lebih di prioritaskan. Sejauh ini perangkat daerah telah berupaya untuk melakukan kegiatan dengan pembiayaan minimal melalui berbagai inovasi, misalnya: Corporate Farming yang pelaksanaanya menggunakan anggaran yang tersedia.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	diprioritaskan sesuai dengan tema dan kebijakan pembangunan yang sudah disepakati dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan.				
	b. Kabupaten Kebumen dari dulu terkenal sebagai lumbung pangan jawa Tengah, tetapi pada tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu belum mantapnya pengelolaan Cadangan pangan daerah, Persentase cadangan pangan yang dikelola, juga tidak mencapai target dari target 10% hanya tercapai 9,08%. Adanya gejolak harga pangan khususnya beras yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi di beberapa waktu yang lalu juga sangat dirasakan oleh masyarakat, DPRD meminta untuk melakukan evaluasi kebijakan pertanian, sehingga pembangunan sektor		Melaksanakan penyusunan regulasi cadangan pangan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur tentang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan baik di cadangan pangan pemerintah daerah, cadangan pangan pemerintah desa dan cadangan pangan masyarakat.	Anggaran yang tersedia untuk pengadaan cadangan pangan untuk 20 ton gabah/setara dengan 12,4 ton beras, perhitungan ideal cadangan pangan pemerintah kabupaten kebumen 134,17 ton beras, stok CPPD Tahun 2023 sebanyak 28,64 ton beras, sehingga terdapat kekurangan beras 105,53 ton beras	Adanya penambahan jumlah pengadaan cadangan pangan.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	pertanian dan ketahanan pangan tetap terjaga.				
6	Urusan Lingkungan Hidup	DLHKP			
	Permasalahan sampah tentunya harus ditangani sehingga tidak mengancam ekosistem lingkungan hidup. dari pembahasan dokumen LKPJ ditemukan masih dibutuhkan beberapa kebutuhan container pada beberapa instansi seperti RSUD Prembun, RSDS dan lain sebagainya. DPRD memberikan rekomendasi untuk lebih meningkatkan koordinasi antar instansi selain itu juga membuat rencana bersama dalam pengelolaan sampah termasuk melakukan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah.		1. Melakukan koordinasi antar instansi baik daerah, swasta maupun BUMN melalui program satu OPD satu UPS melalui SE Nomor 660.1/10910 Tahun 2024 Tentang Satu Organisasi Pemerintah Daerah Satu Unit Pengelola Sampah. 2. Mendorong peningkatan pemberian Tanggung Jawab Sosial Lingkungan bagi instansi swasta dan BUMN diantaranya masing-masing rumah sakit telah menyediakan kontainer sampah secara mandiri dan PT. Sucofindo, PT BKI dan PT SI telah memberikan TJSL nya untuk pengelolaan sampah di TPA menjadi biogas yang dimanfaatkan oleh Masyarakat sekitar TPA.	1. Terkait dengan kondisi sarpras pengelolaan persampahan yang semakin hari semakin rusak dan membutuhkan perawatan dan bahkan peremajaan, diantaranya adalah container sampah, yang disebabkan karena minimnya anggaran maka kami sudah mengupayakan pemenuhan sarpras tersebut dengan meningkatkan TJSL dari perusahan dan BUMD maupun BUMN. 2. Mengusulkan penganggaran baik ke provinsi maupun ke pusat. 3. Kesadaran Masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya perlu ditingkatkan melalui aksi nyata dengan adanya Bank Sampah ataupun	Menyusun inventarisasi kondisi sarpras yang ada serta membuat daftar kebutuhan sarpras untuk selanjutnya diusulkan penganggaranya baik melalui APBD, TJSL, APBD Provinsi maupun ke APBN.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			3. Melakukan upaya peningkatan partisipasi Masyarakat dalam penanganan sampah dari hulu dengan Desa Mandiri Sampah melalui Instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2024 tentang Program Desa dan Kelurahan Mandiri Sampah serta Pengurangan Sampah Organik di Kabupaten Kebumen. 4. Pembiasaan hidup bersih dan peduli lingkungan hidup melalui sekolah adiwiyata.	TPS3R di masing-masing desa atau kelurahan. 4. Belum semua desa atau kelurahan memiliki Bank Sampah maupun TPS3R. 5. Sekolah adiwiyata masih terus perlu ditingkatkan jumlahnya hingga minimal mencapai 20%.	
			Pemilihan bahan baku/sarana prasarana pembuatan Tunnel garam yang lebih tahan cuaca (angin, hujan, panas matahari). Untuk diversifikasi produk garam. DLHKP juga bekerjasama dengan UGM untuk pelatihan pengolahan produk garam menjadi garam non konsumsi (misalnya untuk kosmetik, sabun, garam SPA dll.).	Produksi garam yang menurun drastis karena kerusakan Tunnel (faktor cuaca: hujan deras. angin kencang/puting beliung. banjir) dan terkendala biaya rehab/perbaikan Tunnel yang sangat besar, sehingga Kugar masih kesulitan dalam pembiayaan untuk rehab tunnel.	Mendorong optimalisasi pelaksanaan desa mandiri sampah dengan melakukan monev dan sosialisasi secara masif langsung ke tingkat desa serta melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi sekolah adiwiyata serta hal yang paling penting adalah Menyusun peta jalan pengurangan sampah dimana didalamnya melibatkan peran serta seluruh stakeholder.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
					bagaimana cara yang akan dilakukan berapa lama target tersebut akan dicapai serta berapa besar target yang harus dicapai dan bagaimana pembagian peran masing-masing pihak. 1. Kugar (Kelompok Usaha Garam) akan mengusahakan biaya perbaikan tunnel melalui swadaya/mandiri. 2. Pengajuan proposal bantuan hibah ke APBD Kabupaten/APBD Provinsi. 3. Pada Tahun 2024 sudah ada alokasi dana untuk bantuan sarpras Kugar.
			Mengembangkan potensi perikanan yang ada. baik dari bidang penangkapan maupun budidaya melalui peningkatan sarana dan prasarana baik penangkapan di laut. perairan umum daratan maupun pada pembudidaya ikan.	1. Dilihat dari jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 12.898.02 ton dan produksi perikanan budidaya sebanyak 3.453.93 ton. Seharusnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan telah mencapai 16.351.95 ton	Penghitungan Ketersediaan ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. ke depannya mencakup beberapa sumber. yaitu dari hasil produksi penangkapan ikan. dari hasil budidaya. serta ikan yang masuk dari luar Kabupaten Kebumen.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
				2. Dari jumlah produksi tahun 2022 sebesar 12.493.43 ton. sudah ada peningkatan 3.858.52 ton. Adapun angka 21.58 ton hanya penghitungan untuk 1 sub kegiatan saja.	
7	Urusan Kelautan dan Perikanan	DLHKP			
	a. Kampung garam pernah menjadi unggulan daerah dan banyak alokasi anggaran yang dialokasikan kesana, tetapi pada beberapa tahun terakhir kondisi kampung garam banyak mengalami kerusakan seperti tunnel dan lain sebagainya serta kelompok usaha garam juga banyak yang tidak aktif. Kondisi terkini juga terkesan terbengkalai kurang produktif. DPRD merekomendasikan untuk melakukan evaluasi dan		1. Pemilihan bahan baku, sarana prasarana pembuatan tunnel garam yang lebih tahan cuaca (angin, hujan, panas matahari). 2. Untuk diversifikasi produk garam, DLHKP juga bekerjasama dengan UGM untuk pelatihan pengolahan produk garam menjadi garam non konsumsi (misalnya untuk kosmetik, sabun, garam SPA dll.).	Produksi garam yang menurun drastis karena kerusakan tunnel (faktor cuaca: hujan deras, angin kencang/puting beliung, banjir) dan terkendala biaya rehab/perbaikan tunnel yang sangat besar, sehingga Kugar masih kesulitan dalam pembiayaan untuk rehab tunnel.	1. Kugar (Kelompok Usaha Garam) akan mengusahakan biaya perbaikan tunnel melalui swadaya/mandiri. 2. Pengajuan proposal bantuan hibah ke APBD Kabupaten/APBD Provinsi. 3. Pada Tahun 2024 sudah ada alokasi dana untuk bantuan sarpras Kugar.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	membuat kebijakan terkait dengan peningkatan dan pemberdayaan kampung garam.				
	b. Peningkatan Ketersediaan ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Target sebanyak 97.33 Ton realisasinya hanya 21.58 ton. Hal ini menandakan ketersediaan ikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat masih sangat terbatas dan banyak disuplai dari luar daerah. padahal potensi perikanan di Kabupaten Kebumen sangat banyak, baik perikanan tangkap di laut, perikanan budidaya di waduk, kolam dan sebagainya. DPR merekomendasikan untuk lebih mengembangkan		Mengembangkan potensi perikanan yang ada baik dari bidang penangkapan maupun budidaya melalui peningkatan sarana dan prasarana baik penangkapan di laut, perairan umum daratan maupun pada pembudidaya ikan.	1. Dilihat dari jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 12.898,02 ton dan produksi perikanan budidaya sebanyak 3.453,93 ton. Seharusnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan telah mencapai 16.351,95 ton 2. Dari jumlah produksi tahun 2022 sebesar 12.493,43 ton. sudah ada peningkatan 3.858,52 ton. Adapun angka 21.58 ton hanya penghitungan untuk 1 sub kegiatan saja.	Penghitungan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ke depannya mencakup beberapa sumber yaitu dari hasil produksi penangkapan ikan. dari hasil budidaya serta ikan yang masuk dari luar Kabupaten Kebumen.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	potensi yang ada di Kabupaten Kebumen dan meningkatkan produksi perikanan. Program perikanan tangkap dan budidaya juga perlu dilakukan evaluasi.				
8	Urusan Pariwisata	DISPARBUD			
	Capaian indicator kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD sebesar 1,31%. dibawah target yang ditetapkan sebesar 1,91%. DPRD merekomendasikan untuk lebih meningkatkan pendapatan sektor pariwisata. Berbagai upaya sudah dilakukan mulai dari promosi adanya event-event seperti KIE, pembangunan Pandankuning, Krakal dan lain sebagainya dengan anggaran yang tidak sedikit. DPRD juga memandang perlu adanya *road map* pengembangan pariwisata yang		Pada tahun 2025 dilakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan yang meliputi: 1. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata 2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja SDM 3. Memperbaiki dan melengapi peralatan *E-tiketing* 4. Melakukan pemihakketigaan obyek wisata	1. Banyaknya persaingan industri pariwisata di Kabupaten Kebumen yang mulai menggeliat. Dan juga sarana dan prasarana yang belum memadai 2. SDM yang kurang memadai 3. Kurang optimalnya peralatan e-tiketing	1. Penguatan identitas dan branding wisata 2. Peningkatan sarana dan prasarana 3. Pemberdayaan masyarakat dan sdm 4. Digitalisasi dan pemasaran online 5. Diversifikasi wisata dan inovasi 6. Pemihakketigakan obwis

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	disertai dengan target yang terukur				
9	Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	BAPPEDA			
	Presentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dari target 75% yang dimanfaatkan, pemanfaatannya atau realisasinya hanya 66,67%. Hal ini menandakan banyak penelitian yang tidak berguna atau tidak dimanfaatkan, padahal hasil riset dan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kebijakan. Berubahnya Bappeda menjadi Bapperida seharusnya lebih meningkatkan pemanfaatan penelitian.		Pada dokumen LKPJ tahun 2023 halaman 505, realisasi kinerja tertulis 66,67%. Angka tersebut merupakan realisasi pada Triwulan III. Realisasi tahun 2023 adalah 75% sebagaimana sudah tertulis pada Tabel 3.88 halaman 509. Dengan demikian capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan mencapai 100% sesuai yang tertulis pada Tabel halaman 505.	Hasil penelitian dan pengembangan tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti pada tahun berikutnya karena beberapa faktor, antara lain kesesuaian dengan arah pembangunan baik Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.	Perlu melakukan sinkronisasi antara penelitian yang dilakukan dengan arah pembangunan baik Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Urusan pemerintahan yang ditugaskan melalui pembantuan adalah sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah atas penugasan dari pemerintah. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Penugasan ini dapat terjadi antara pemerintah dan daerah, antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, atau antara pemerintah kabupaten atau kota dan desa. Dalam tugas pembantuan, yang ditugaskan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat maupun provinsi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah tingkat atasnya

Dalam penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Kebumen berlandasakan pada dasar hukum yang tertuang pada DIPA-090.02.039600/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan melalui Program Perdagangan Dalam Negeri. Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan. Rincian Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) untuk pembangunan Pasar Rakyat Pagi Kebumen di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah 100% dengan realisasi keuangan dari target Rp. 3.000.000.000.- terealisasi Rp. 2.821.343.000.- atau sebesar 94,04%.

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya

Tabel IV.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya

NO	PROGRAM. KEGIATAN. DAN RINCIAN KEGIATAN	DESA	SKPD PEMBERI TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepala Pemerintahan Desa	449 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	12.984.387.000	12.930.080.000	99,58	100	100	DINAS PMD
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	449 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	3.017.804.000	3.004.239.925	99,55	100	100	DINAS PMD
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD)	449 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	184.213.559.000	184.175.394.037	99,98	100	100	DINAS PMD
4	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Kepada Desa (Dana Desa)	449 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	463.030.927.000	461.258.494.000	99,62	100	100	DINAS PMD
5	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa	163 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	43.087.900.000	40.480.900.000	93,95	93.95	93,95	DINAS PMD

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kebumen. 2024

Tabel IV.2 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2024

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGITAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Kementerian Perdagangan RI	SP DIPA-090.02.039600/2024	Program Perdagangan Dalam Negeri/Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan/Output Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen	3.000.000.000	2.821.343.000	94,04%	1	100%	

Sumber: Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.2 Hambatan Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memperhatikan tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan capaian kinerjanya 100% dan realisasi anggaran 94.04% dimana tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

BAB V
PENUTUP

Dalam bagian penutup ini memuat ringkasan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. LKPJ Bupati Kebumen Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Pada kondisi sosial demografi pada tahun 2024 Kabupaten Kebumen memiliki jumlah penduduk 1.446.833 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.129,35 jiwa/km^2. *sex ratio* sebesar 102,98 (laki-laki 734.040 jiwa dan perempuan 712.793 jiwa), dan pertumbuhan penduduk tumbuh positif 0,89%. Bonus demografi masih dinikmati oleh Kabupaten Kebumen dengan jumlah penduduk usia produktif sebesar 68,08%.
3. Presentase Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 sebesar 102,23%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 102.31%. Pendapatan transfer terealisasi sebesar 101.51%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 18.563,01%. Sedangkan belanja daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar 96,22%. Belanja operasi terealisasi 95,26%, belanja modal terealisasi 96,51%. dan belanja tidak terduga terealisasi sebesar 16,15%;
4. Kontribusi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar 15,26%. Angka presentase ini masih diketegorikan tinggi dan mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah terhadap dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat semakin rendah;
5. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
    a. Pelayanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:
        1) Urusan Pendidikan, rata-rata program 98,58%, rata-rata kegiatan 99,56%.
        2) Urusan Kesehatan rata-rata program 105,37%, rata-rata kegiatan 100%.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang rata-rata program 97,29%, rata-rata kegiatan 100%.
4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman rata-rata program 182,13%, rata-rata kegiatan mencapai 269,08%.
5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat rata-rata program 100%, rata-rata kegiatan 100%.
6) Urusan Sosial rata-rata program 105,01%, rata-rata kegiatan 87,84%.

b. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:
1) Urusan Tenaga Kerja rata-rata program 105,91%, kegiatan 111,10%.
2) Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, rata-rata program 100%, rata-rata kegiatan sebanyak 100%.
3) Urusan Pangan rata-rata program 98,43%, rata-rata kegiatan 113,05%.
4) Urusan Pertanahan rata-rata program 100%, rata-rata kegiatan 100%.
5) Urusan Lingkungan Hidup rata-rata program 106,82%, rata-rata kegiatan 110,59%.
6) Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil rata-rata program 100%, rata-rata capaian kegiatan 100%.
7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa rata-rata program 122,7%, rata-rata kegiatan 112,7%.
8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana rata-rata program 135,72%, rata-rata kegiatan 100%.
9) Urusan Perhubungan rata-rata program 95,79% dan rata-rata kegiatan 101,04%.
10) Urusan Komunikasi Dan Informatika rata-rata program 114,12% dan rata-rata kegiatan 100%.
11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah rata-rata capaian program 279,73%, rata-rata kegiatan 244,79%.
12) Urusan Penanaman Modal rata-rata program 103,91% dan rata-rata kegiatan 100%.
13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga, rata-rata program 353,88%, rata-rata kegiatan 141,97%.
14) Urusan Statistik rata-rata program 100% dan rata-rata kegiatan 100%.
15) Urusan Persandian rata-rata program 113,02% dan rata-rata kegiatan 113,02%.
16) Urusan Kebudayaan rata-rata program 189,40% dan rata-rata kegiatan 154,63%.
17) Urusan Perpustakaan rata-rata program 115,39% dan rata-rata kegiatan 127,26%.
18) Urusan Kearsipan rata-rata program 110,54% dan rata-rata kegiatan 104,16%.

c. Urusan Pilihan:
1) Urusan Kelautan dan Perikanan rata-rata program 266,31% dan rata-rata kegiatan 115,76%.

2) Urusan Pariwisata rata-rata program 120,91% dan rata-rata kegiatan 110,96%.
3) Urusan Pertanian rata-rata program 174,95% dan rata-rata kegiatan 301,83%.
4) Urusan Energi Sumber daya Mineral rata-rata program 100% dan rata-rata kegiatan 100%.
5) Urusan Perdagangan rata-rata program 520,93% dan rata-rata kegiatan 116,25%.
6) Urusan Perindustrian rata-rata capaian program 117,53%, rata-rata kegiatan 100%.
7) Urusan Transmigrasi rata-rata capaian Program dan Kegiatan 50%.

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang:
1) Urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan rata-rata program 104,66%, rata-rata kegiatan 100%.
2) Urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan rata-rata program 100,77%, rata-rata kegiatan 100%.
3) Urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian rata-rata program 99,99%, rata-rata kegiatan 100%.
4) Urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan rata-rata program sebesar 104,5% rata-rata kegiatan 137,79%.
5) Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik rata-rata program dan kegiatan 100%.

e. Unsur Pendukung urusan Pemerintahan:
1) Unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD rata-rata program 100%, rata-rata kegiatan 92,82%.
2) Unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah rata-rata program 108,76%, rata-rata kegiatan 110%.

f. Unsur Pemerintahan Umum:
1) Unsur pendukung urusan unsur pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik rata-rata program 116,62%, rata-rata kegiatan 100%.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2021-2026, dari 7 indikator kinerja keseluruhan mencapai target antara lain Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia), Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Indeks Kesalehan Sosial dan Indeks Kondusifitas wilayah.
7. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 untuk pembangunan Pasar Rakyat Pagi Kebumen di Kecamatan Kebumen. Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah 100% dengan realisasi keuangan dari target Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) terealisasi Rp. 2.821.343.000.00 (dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 94.04%.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridha-Nya kepada kita semua dalam memajukan Kabupaten Kebumen.